lippo cikarang

2020

Laporan Tahunan
Annual Report

3 Ringkasan Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

20 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

51 Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

BUILDING THE FOUNDATION FOR FUTURE *Growth*

LIPPO CIKARANG

DAFTAR ISI
Contents

Ikhtisar Kinerja
Performance Highlights

1 Building the Foundation for Future Growth
Building the Foundation for Future Growth
2 Pernyataan CEO
CEO Statement
3 Ringkasan Kinerja 2020
2020 Performance Highlights
4 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
6 Informasi Saham
Stocks Highlights
6 Pergerakan Harga Saham
Share Price Movements

8

Laporan Manajemen
Management Report

9 Laporan Dewan Komisaris
Report from The Board of Commissioners
14 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
20 Laporan Direksi
Report from The Board of Directors
28 Profil Direksi
Board of Director's Profile

32

Profil Perusahaan
Company Profile

33 Identitas Perusahaan
Corporate Identity
34 Sekilas Lippo Cikarang
About Lippo Cikarang
36 Perjalanan Kami
Our Journey
38 Kegiatan Usaha
Line of Business
42 Struktur Organisasi
Organization Structure
43 Visi dan Misi
Vision and Mission
44 Nilai Perusahaan
Corporate Values
44 Budaya Perusahaan
Corporate Culture
45 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition
46 Struktur Pemegang Saham dan Struktur Grup Perusahaan
Shareholders and Company Group Structure
46 Struktur Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Main and Controlling Shareholders Structure
47 Kronologi Pencatatan Saham
Shares Listing Chronology
47 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology
47 Informasi Entitas Anak
Subsidiary Information
48 Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Capital Market Support Institutions
49 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification
50 Informasi Kantor Cabang/ Perwakilan
Branch/Representative Office Information
50 Situs *Web* Perusahaan
Company Website

51

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

52 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review per Business Segment
52 Residensial
Residential
52 Industrial
Industrial
53 Komersial
Commercial
53 Pengelolaan Kota
Town Management Services
54 Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Review

62

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

62 Sumber Daya Manusia
Human Resources

65

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

66 Komitmen Perseroan
The Company's Commitment
66 Prinsip GCG
GCG Principles
66 Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure
66 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
74 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
80 Komisaris Independen
Independent Commissioner
81 Direksi
Board of Directors
85 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors
86 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors
87 Kebijakan dan Frekuensi Rapat
Policies and Frequency of Meetings
90 Hubungan Afiliasi
Affiliate Relations
90 Komite Audit
Audit Committee
95 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
101 Unit Audit Internal
Internal Audit Unit
104 Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Internal Control System (SPI)
106 Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System
111 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
113 Akuntan Publik
Public Accountant
114 Kasus dan Perkara Penting
Important Litigation and Cases
114 Informasi mengenai Sanksi Administratif dan Finansial
Information on Administrative and Financial Sanctions
114 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Corporate Data and Information
115 Kode Etik
Code of Conduct
116 Anti Suap, *Anti Fraud* dan Korupsi, Anti Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Pencucian Uang, Anti Teroris & Pencegahan Pendanaan terhadap Kegiatan yang Terkait Terorisme, Anti Hoaks, Anti Monopoli/ Oligopoli, *Trust*/Kartel
Anti-Bribery, Anti-Fraud and Corruption, Anti-Gratification, Anti-Nepotism, Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism & Prevention of Funding for Activities Related to Terrorism, Anti-Hoax, Anti-Monopoly/ Oligopoly, Trust/Cartel
116 Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
118 Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Governance Guidelines of Public Companies

123

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

123 Komitmen Kami
Our Commitment
123 Tanggung Jawab terhadap Lingkungan
Responsibility towards the Environment
123 Tanggung Jawab terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
Responsibility towards Employment, Occupational Health and Safety
124 Tanggung Jawab terhadap Sosial dan Kemasyarakatan
Responsibility towards Social and Community Development
124 Tanggung Jawab terhadap Konsumen
Responsibility towards the Consumer

126 Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Lippo Cikarang Tbk
Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners on the Responsibility for the 2020 Annual Report of PT Lippo Cikarang Tbk

128

Laporan Keuangan
Financial Statements

BUILDING THE FOUNDATION FOR FUTURE *Growth*

Tema Laporan Tahunan 2020 PT Lippo Cikarang Tbk (Perseroan) mencerminkan arah perkembangan yang terjadi pada tahun 2020. Di tahun tersebut, Perseroan melanjutkan langkah-langkah transformasi yang telah dirintis sejak beberapa tahun sebelumnya, termasuk dengan terus memperkuat jajaran manajemen puncak serta meningkatkan kualitas praktik tata kelola perusahaan. Melalui langkah-langkah tersebut, Perseroan mampu terus menciptakan nilai lebih bagi pemangku kepentingan, dan membukukan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi, baik ekspektasi pemegang saham terkait dengan hasil-hasil keuangan Perseroan, ekspektasi konsumen yang senantiasa menuntut produk-produk hunian yang berkualitas dan tepat-jadwal, maupun ekspektasi karyawan dan masyarakat di dalam maupun sekitar wilayah kerja Perseroan, terkait berbagai kebijakan internal dan program bantuan sosial untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan mereka dalam masa pandemi COVID-19.

The theme of the 2020 Annual Report of PT Lippo Cikarang Tbk (the Company) reflects the direction of developments occurring in 2020. In that year, The Company continued the transformation steps that had been initiated in the previous couple of years, including by continuing to strengthen top management and improving the quality of corporate governance practices. Through these steps, the Company is able to continue to create added value for stakeholders, and deliver a level of performance that met expectations, be it shareholder expectations related to the Company's financial results, consumer expectations for quality and on-schedule residential products, as well as expectations of employees and the community in and around the the Company work area, related to various internal policies and social assistance programs to maintain their health and welfare during the COVID-19 pandemic.

PERNYATAAN CEO
CEO Statement

Rudy Halim
CEO

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Sepanjang 2020, seluruh pelaku usaha dari berbagai latar belakang industri dan lapisan masyarakat merasakan dampak yang signifikan dari timbulnya pandemi COVID-19. Situasi ini juga menuntut Perseroan untuk beradaptasi dengan cepat dan melakukan kebijakan yang eksepsional guna memastikan kelangsungan usaha Perseroan. Kebijakan yang kami lakukan mencakup penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin untuk melindungi seluruh karyawan dan pemangku kepentingan kami.

Di tengah situasi perekonomian yang fluktuatif, kami terus berupaya mempertahankan kinerja Perseroan dengan optimal dengan memprioritaskan penyediaan produk dan jasa berkualitas yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan kami. Kinerja Perseroan pada 2020 utamanya didukung oleh penjualan residensial kami yaitu Waterfront Estates serta kawasan industri yang terus mencatatkan peningkatan permintaan dari waktu ke waktu, khususnya kawasan pergudangan.

Bersama dengan Dewan Komisaris, rekan-rekan Direksi dan seluruh karyawan, Perseroan akan terus melangkah maju dengan penuh keyakinan dan optimisme serta melakukan pengembangan usaha kami secara bertahap. Kami senantiasa memastikan bahwa Perseroan menjalankan bisnisnya dengan profesional dan penuh integritas, agar mampu mempertahankan reputasi Perseroan sebagai salah satu perusahaan properti terdepan di Indonesia.

Our Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Throughout 2020, all companies from various industries as well as people from all walks of life were significantly affected by the onset of the COVID-19 pandemic. This situation has also required the Company to adapt quickly and adopt exceptional policies to ensure the continuity of the Company's business. Our policies include implementing strict and disciplined health protocols to protect all our employees and stakeholders.

In the midst of a fluctuating economic situation, we continue to strive to maintain the Company's performance optimally by prioritizing the provision of quality products and services oriented to the needs of our customers. The Company's performance in 2020 is mainly supported by our residential sales, namely Waterfront Estates and industrial estates which continue to record an increase in demand, from time to time, especially warehousing areas.

Together with the Board of Commissioners, fellow Directors and all employees, the Company will continue to move forward with full confidence and optimism and carry out our business development gradually. We always ensure that the Company runs its business in a professional manner with full integrity, in order to be able to maintain the Company's reputation as one of the leading property companies in Indonesia.

RINGKASAN KINERJA 2020

2020 Performance Highlights

Pada 2020, Perseroan meluncurkan Waterfront Estates Residensial Klaster Riverside dan Silvercreek.

In 2020, the Company launched Riverside and Silvercreek Cluster Waterfront Estates Residential.

Pendapatan
Revenues
Rp Triliun | Rp Trillion
1,8

Jumlah Aset
Total Assets
Rp Triliun | Rp Trillion
9,7

Laba (Rugi) Bersih Komprehensif
Comprehensive Income (Loss)
Rp Triliun | Rp Trillion
(3,7)

Pendapatan Divisi Residensial
Revenues of Residential Division
Rp Miliar | Rp Billion
1.265,4
▲ 53,4%

Pendapatan Divisi Pengelolaan Kota, Sewa dan Lainnya
Revenues of Town Management Division, Rental and Others
Rp Miliar | Rp Billion
383,2
▲ 4,0%

Pendapatan Divisi Industrial
Revenues of Industrial Division
Rp Miliar | Rp Billion
129,8
▼ -64,6%

Pendapatan Divisi Komersial
Revenues of Commercial Division
Rp Miliar | Rp Billion
65,9
▼ -51,5%

IKHTISAR KEUANGAN
Financial Highlights

PT LIPPO CIKARANG Tbk dan Entitas Anak

PT LIPPO CIKARANG Tbk and Subsidiaries

Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik menggunakan notasi Indonesia.

Numerical notations in all tables and graphs are in Indonesia.

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain)	2020	2019	2018	2017	2016	(In million of Rupiah, unless stated otherwise)
Laba Rugi						**Profit and Loss**
Pendapatan Usaha	1.844.373	1.694.809	2.209.581	1.501.178	1.544.898	Revenues
Laba Kotor	664.218	644.685	1.254.449	633.699	711.262	Gross Profit
Laba (Rugi) Usaha	(1.806.642)	341.832	1.591.350	353.424	529.736	Operating Income (Loss)
Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan	(3.604.406)	422.293	2.054.699	380.734	549.872	Income (Loss) Before Tax
Laba (Rugi) Bersih	(3.646.386)	341.832	2.027.361	368.440	539.796	Net Income (Loss)
Jumlah Saham Beredar (juta lembar)	2.679,60	2.679,60	696,00	696,00	696,00	Number of Shares Issued (million shares)
Laba (Rugi) Usaha per Saham (Rp)	(674)	128	2.286	508	761	Operating Income (Loss) per Share (Rp)
Laba (Rugi) Bersih per Saham (Rp)	(1.364)	221	2.818	527	776	Net Income (Loss) per Share (Rp)
Neraca						**Balance Sheet**
Jumlah Aset	9.719.570	12.219.228	9.225.622	12.455.503	5.653.153	Total Assets
Jumlah Investasi	2.174.709	5.104.035	1.914.432	302.261	295.429	Total Investments
Jumlah Pinjaman	977.398	200.000	-	200.000	-	Total Debts
Jumlah Liabilitas	3.140.408	1.336.706	1.695.594	4.734.087	1.410.461	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	6.579.162	10.882.522	7.530.028	7.721.416	4.242.691	Total Equity
Rasio Keuangan						**Financial Ratios**
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset	(37,52%)	3,14%	21,98%	2,96%	9,55%	Return on Assets
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas	(55,42%)	3,53%	26,92%	4,77%	12,72%	Return on Equity
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	47,73%	12,28%	22,52%	61,31%	33,24%	Liabilities to Equity Ratio
Rasio Kewajiban terhadap Aset	32,31%	10,94%	18,38%	38,01%	24,95%	Liabilities to Assets Ratio
Rasio Laba Kotor terhadap Pendapatan	36,01%	38,04%	56,77%	42,21%	46,04%	Gross Profit to Revenue
Rasio Laba Usaha terhadap Pendapatan	(97,94%)	20,17%	72,02%	23,54%	34,29%	Operating Income to Revenue
Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan	(197,72%)	22,66%	91,75%	24,54%	34,94%	Net Income to Revenue

Pendapatan Usaha
Revenues

(miliar Rupiah | billion Rupiah)

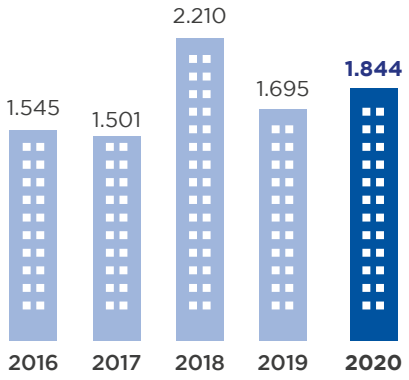

Jumlah Aset
Total Assets

(miliar Rupiah | billion Rupiah)

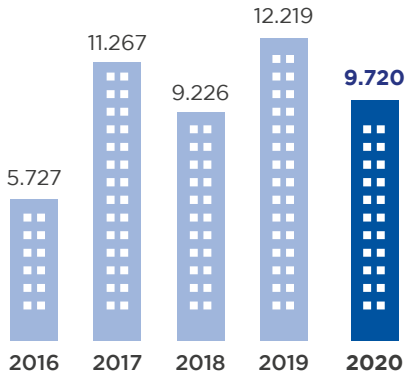

Laba (Rugi) Bersih
Net Income (Loss)

(miliar Rupiah | billion Rupiah)

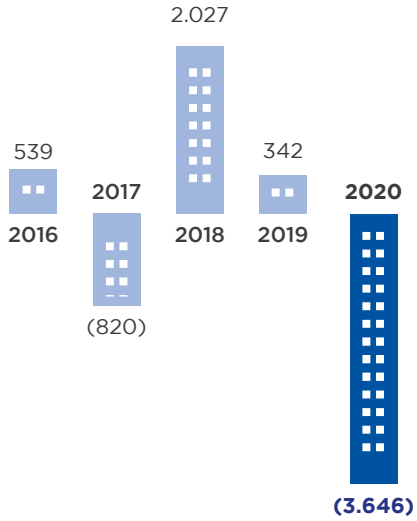

Jumlah Ekuitas
Total Equity

(miliar Rupiah | billion Rupiah)

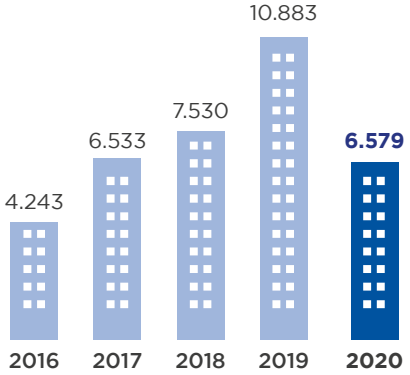

INFORMASI SAHAM
Stocks Highlights

Kinerja Harga Saham 2020 & 2019
Share Price Performance 2020 & 2019

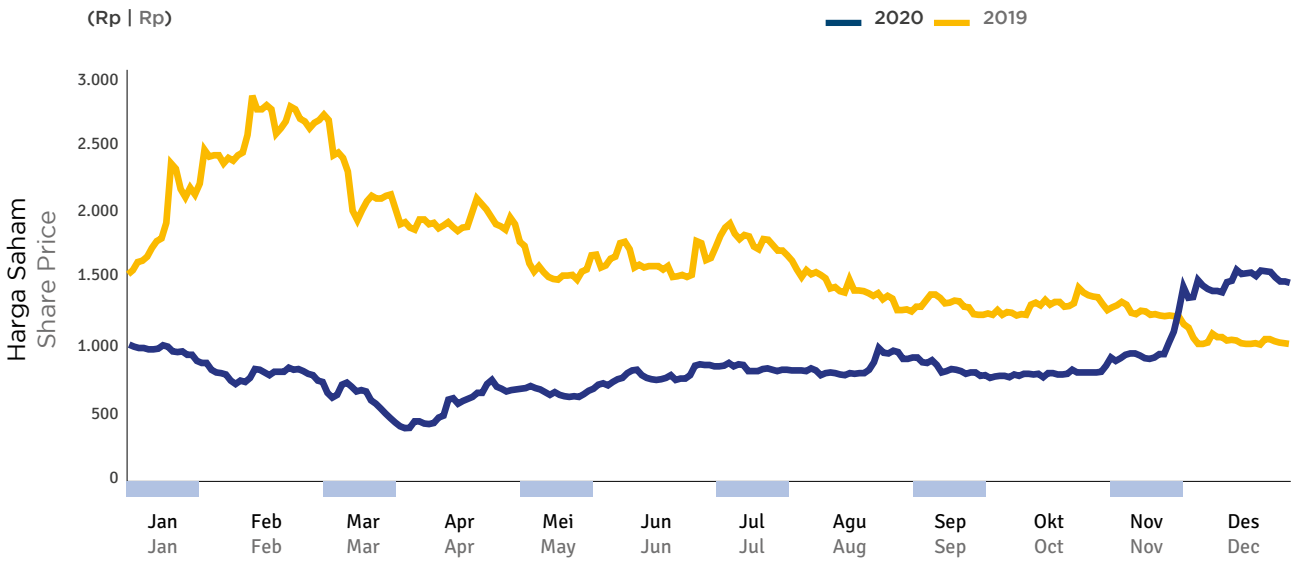

PERGERAKAN HARGA SAHAM
Share Price Movements

Harga, Volume Transaksi, Jumlah Saham Beredar, dan Kapitalisasi Pasar Per Triwulan Tahun 2020.

Price, Transaction Volume, Number of Shares Circulated, and Market Capitalization Per Quarter of 2020.

Triwulan Quarter	**Tertinggi** Highest (Rupiah)	**Terendah** Lowest (Rupiah)	**Penutupan** Closing (Rupiah)	**Volume Transaksi** Volume of Transaction	**Jumlah Saham Beredar** Number of Outstanding Shares	**Kapitalisasi Pasar** Market Capitalization (Rupiah)
2020						
I	1.025	382	420	86.194.051	2.679.600.000	1.125.432.000.000
II	930	418	855	149.839.439	2.679.600.000	2.291.058.000.000
III	1.030	745	765	87.929.068	2.679.600.000	2.049.894.000.000
IV	1.700	765	1.420	238.676.005	2.679.600.000	3.805.032.000.000
2019						
I	2.910	1.470	1.850	132.453.800	696.000.000	1.287.600.000.000
II	2.130	1.450	1.505	74.146.300	696.000.000	1.047.480.000.000
III	1.960	1.205	1.220	336.738.507	2.679.600.000	3.269.112.000.000
IV	1.430	1.000	1.015	81.967.210	2.679.600.000	2.719.794.000.000

Aksi Korporasi

Corporate Action

Sepanjang 2020, Perseroan tidak melakukan aksi korporasi, baik berupa pemecahan saham, dividen saham, saham bonus, serta penggabungan saham. Oleh sebab itu, Perseroan tidak terdapat informasi terkait hal ini.

Throughout 2020, the Company did not take corporate Action, whether in the form of stock splits, stock dividends, bonus shares, as well as stock merger. Therefore, The company has no information related to this matter.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham/ Penghapusan Pencatatan Saham

Suspension of Stock Trading/Delisting

Selama 2020, tidak terdapat penghentian sementara atas perdagangan saham Perseroan atau penghapusan pencatatan saham Perseroan.

During 2020, there were no suspension of stock trading or delisting of the Company's shares.

Informasi Obligasi

Bond Information

Pada 2020, Perseroan tidak melakukan obligasi sehingga tidak terdapat informasi terkait hal ini.

In 2020, the Company did not issue any bond and hence there is no information related to this matter.

LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

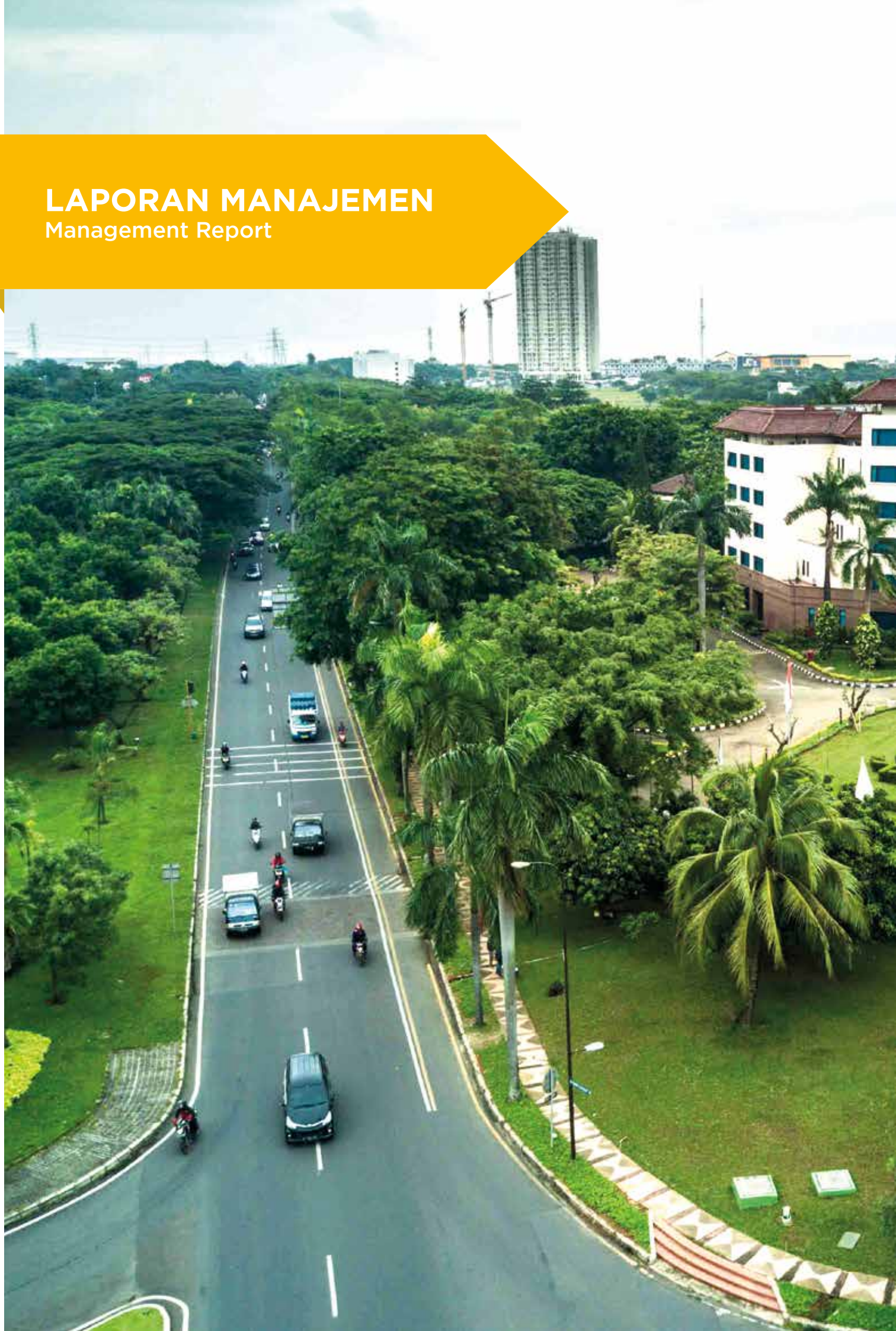

LAPORAN DEWAN *KOMISARIS*

REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pemegang Saham yang Terhormat,

Sepanjang 2020, Perseroan terus beradaptasi dengan perubahan pola hidup dan model bisnis yang terjadi sehubungan dengan timbulnya pandemi COVID-19. Kami memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan bimbingan-Nya, Perseroan tetap mampu menghasilkan kinerja yang baik di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian.

Dear Shareholders,

During 2020, the Company continues to adapt to changes in lifestyles and business models in connection with the outbreak of the COVID-19 pandemic. We would like to express our gratitude to God Almighty for the guidance, allowing the Company to still be able to achieve encouraging performance amidst a condition that is full of uncertainties.

Kepemimpinan Direksi yang sangat baik memampukan Perseroan untuk beradaptasi dengan cepat dan mengelola tantangan menjadi kesempatan. Kami juga mengapresiasi Direksi yang senantiasa mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku terkait penanganan pandemi COVID-19.

The excellent leadership of the Board of Directors enabled the Company to swiftly adapt and manage these challenges into opportunities. We also appreciate the Board of Directors who always comply with the applicable government regulations and policies in relation to the handling of the COVID-19 pandemic.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report from The Board of Commissioners

Tinjauan Perekonomian

Secara umum, perekonomian global mengalami tantangan yang berat pada 2020. Meluasnya pandemi COVID-19 secara masif sepanjang tahun menyebabkan sejumlah negara harus melakukan kebijakan yang cukup ekstrim, seperti *lockdown*, pembatasan kegiatan ekspor dan jam operasional tempat-tempat publik. Kondisi ini menyebabkan sejumlah negara maju dan berkembang mengalami resesi yang cukup dalam pada triwulan kedua 2020, seperti Amerika Serikat dengan tingkat pertumbuhan yang terkontraksi hingga 32,9%, Italia sebesar 17,3%, dan Singapura sebesar 12,6%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat perekonomian Indonesia juga mengalami kontraksi hingga 3,49% pada kuartal ketiga 2020. Di akhir 2020, tingkat inflasi tercatat berada pada level 1,7% dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) cenderung menguat dengan kisaran Rp14.000 per 1 Dolar AS.

Dari segi industri properti, permintaan mengalami penurunan pada triwulan pertama dan kedua tahun 2020 dikarenakan Indonesia memasuki masa-masa awal pandemi, sehingga masyarakat menahan tingkat konsumsi dan investasi. Namun, menjelang triwulan ketiga dan keempat, kegiatan usaha perlahan mulai menunjukkan gejala pemulihan kendati masih dalam fase kontraksi.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Kami menilai bahwa Direksi telah mengelola Perseroan dengan strategis dan sinergis, terutama dalam masa pandemi. Kepemimpinan Direksi yang sangat baik memampukan Perseroan untuk beradaptasi dengan cepat dan mengelola tantangan menjadi kesempatan. Kami juga mengapresiasi Direksi yang senantiasa mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku terkait penanganan pandemi COVID-19.

Kami mendukung upaya Direksi untuk terus melakukan identifikasi *market* dan meluncurkan produk-produk yang dapat diserap dengan optimal oleh pasar. Keandalan dan kapabilitas Direksi dalam menavigasi Perseroan tampak melalui kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kinerja secara optimal di tengah situasi yang kurang menggembirakan. Selain itu, Perseroan juga mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 8,82% dengan perolehan laba kotor sebesar Rp664,22 miliar, meningkat sebesar 3,03% dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp644,69 miliar. Pencapaian ini menandakan bahwa Direksi telah melakukan kebijakan dan langkah yang tepat dalam memanfaatkan peluang usaha secara optimal serta menghadapi tantangan usaha dengan solusi yang tepat.

Economic Overview

In general, the global economy faced heavy challenges in 2020. The massive outbreak of the COVID-19 pandemic throughout the year has resulted in a number of countries requiring to perform relatively extreme policies, such as lockdown, restriction on export activities, and operating hours of public places. This condition forced several developed and developing countries to experience recession in the second quarter of 2020, such as the United States with a contracted growth rate of 32.9%, Italy by 17.3%, and Singapore by 12.6%.

Based on the data of the Central Bureau of Statistics (BPS), the level of the Indonesian economy also contracted by 3.49% in the third quarter of 2020. At the end of 2020, inflation rate was posted at the 1.7% and the Rupiah exchange rate against the United States Dollar (USD) tend to strengthen in the range of Rp14,000 per 1 US Dollar.

In terms of the property industry, demand experienced a decline in the first and second quarter of 2020 because Indonesia was entering the early period of the pandemic, resulting in people to hold their level of consumption and investment. However, towards the third and fourth quarter, business activities are slowly indicating signs of recovery even though still in the contraction phase.

Assessment on the Performance of the Board of Directors

We believe that the Board of Directors has managed the Company in a strategic and synergic manner, particularly during the pandemic. The excellent leadership of the Board of Directors enabled the Company to swiftly adapt and manage these challenges into opportunities. We also appreciate the Board of Directors who always comply with the applicable government regulations and policies in relation to the handling of the COVID-19 pandemic.

We support the efforts of the Board of Directors to continue to conduct market identification and launch products that can be absorbed optimally by the market. The reliability and capability of the Board of Directors in navigating the Company is evidenced in the Company's ability to maintain optimal performance amidst the less than favorable situation. In addition, the Company was also able to post revenue growth of 8.82% with gross profit of Rp664.22 billion, an increase of 3.03% from 2019 which was amounting to Rp644.69 billion. This achievement indicates that the Board of Directors has carried out the appropriate policies and measures in optimally exploiting business opportunities as well as addressing the business challenges with the proper solutions.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

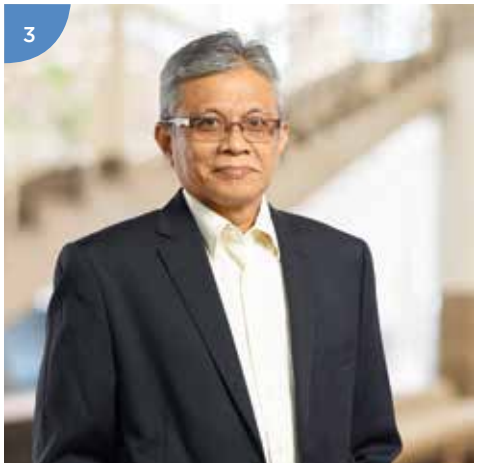

1. **THEO L. SAMBUAGA**
   Presiden Komisaris | President Commissioner
2. **HADI CAHYADI**
   Komisaris Independen | Independent Commissioner
3. **DIDIK JUNAIDI RACHBINI**
   Komisaris Independen | Independent Commissioner
4. **ALI SAID**
   Komisaris Independen | Independent Commissioner
5. **SUGIONO DJAUHARI**
   Komisaris | Commissioner
6. **ANAND KUMAR**
   Komisaris | Commissioner

Pengawasan atas Implementasi Strategi Perseroan

Kami terus mendukung Direksi dan Perseroan dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan dan strategi secara berkesinambungan, serta mengukung langkah Direksi untuk membenahi sejumlah aspek operasional dalam rangka memperkuat landasan dan identitas bisnis Perseroan. Salah satu kegiatan pengawasan kami adalah terhadap pembangunan Waterfront Estates di wilayah Koridor Timur Jakarta, yaitu rumah berkonsep modern minimalis "*autograph homes*" dan ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau.

Pada Februari 2020, Perseroan melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan Savills Indonesia terkait pemasaran proyek Orange County Mall, Lippo Cikarang. Kami menilai positif kerja sama ini dan optimis bahwa kerja sama ini akan mendorong pertumbuhan Perseroan dengan lebih optimal di masa mendatang.

Penilaian terhadap Prospek Usaha

Dalam pandangan kami, kondisi perekonomian global dan nasional akan menunjukkan gejala pemulihan secara bertahap di masa mendatang, terlebih dengan kehadiran vaksin. Kami juga sepakat dengan proyeksi Direksi bahwa industri properti akan mampu meraih kinerja yang lebih baik dari 2020, di mana aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak lebih lancar. Secara garis besar, industri properti diproyeksikan mampu tumbuh sekitar 20-30% pada 2021. Proyeksi ini berdasarkan sejumlah aspek, di antaranya penerapan Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diharapkan mampu memangkas birokrasi perizinan dan kepastian pengadaan lahan.

Pandangan atas Penerapan Praktik GCG

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap penerapan praktik GCG Perseroan secara menyeluruh. Kegiatan pengawasan Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Melalui pengamatan kami, Perseroan telah menjalankan praktik tata kelola dengan sangat baik, yang ditandai dengan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kemampuan Perseroan untuk dalam menjaga integritas dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk memperkokoh fondasi Perseroan dari waktu ke waktu.

Supervision on the Implementation of Corporate Strategy

We continue to support the Board of Directors and the Company in conducting supervision on the implementation of policies and strategies on an ongoing basis, as well as supporting the Board of Directors' approach to revise a number of operational aspects in order to strengthen the Company's business foundation and identity. One of our monitoring activities is the construction of the Waterfront Estates in the East Corridor of Jakarta, namely a modern minimalist "autograph homes" and environmentally friendly concept housing at an affordable price.

In February 2020, the Company signed a cooperation agreement with Savills Indonesia in relation to the marketing of the Orange County Mall project at Lippo Cikarang. We consider this as a positive collaboration and optimistic that this collaboration will boost the Company's growth optimally in the future.

Assessment on Business Outlook

In our perspective, the global and national economic conditions will show signs of gradual recovery in the near future, especially with the presence of vaccines. We are also in conformation with the Board of Directors' outlook that the property industry will be able to accomplish better performance compared to 2020, in which economic activities has started to move smoothly. Broadly speaking, the property industry is projected to grow by approximately 20-30% in 2021. This outlook is based on several aspects, including the Job Creation Law (Ciptaker Law), which is expected to be able to cut licensing bureaucracy and certainty of land acquisition.

Perspective on the Implementation of GCG Practices

The Board of Commissioners continues to supervise the implementation of the Company's GCG practices in a comprehensive manner. The supervisory activity of the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. According to our observation, the Company has implemented governance practices well, evidenced by the Company's compliance with all applicable laws and regulations, as well as the Company's ability to maintain integrity and perform improvements to strengthen the Company's foundation from time to time.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2020 yang diselenggarakan pada 6 Juli 2020, Perseroan mengangkat Bapak Anand Kumar sebagai Komisaris Perseroan. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Based on the resolution of the 2020 Annual GMS that was held on July 6, 2020, the Company appointed Mr. Anand Kumar as a Commissioner of the Company. Therefore, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020 is as follows:

Presiden Komisaris	**Theo L. Sambuaga**	President Commissioner
Komisaris	**Sugiono Djauhari**	Commissioner
Komisaris	**Anand Kumar**	Commissioner
Komisaris Independen	**Didik Junaidi Rachbini**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Hadi Cahyadi**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Ali Said**	Independent Commissioner

Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Anand Kumar dalam jajaran Dewan Komisaris. Dengan komposisi yang semakin kuat, kami optimis mampu mendukung Perseroan dalam mencapai pertumbuhan yang lebih baik di masa mendatang.

We would like to welcome Mr. Anand Kumar on the Board of Commissioners. With a stronger composition, we are optimistic that we will be able to support the Company to achieve better growth in the future.

Apresiasi

Perseroan mampu menutup tahun 2020 dengan baik, berkat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Secara khusus, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi atas kepemimpinan yang strategis sehingga Perseroan mampu beradaptasi dengan baik di masa-masa yang penuh tantangan. Kami juga mengapresiasi seluruh karyawan yang telah bekerja secara optimal di tengah keterbatasan dan perubahan pola kerja. Akhir kata, kami akan terus bersinergi dengan Direksi dalam mengelola Perseroan secara optimal serta meraih kinerja yang berkelanjutan.

Appreciation

The Company was able to pass through 2020 well, due to the support of all stakeholders. In particular, we would like to express our highest appreciation to the Board of Directors for its strategic leadership, which enabled the Company to adapt well in challenging times. We would also like to extend our appreciation to all employees who have worked optimally amidst the limitations and changing work patterns. Finally, we will continue to have synergy with the Board of Directors to manage the Company optimally as well as achieving sustainable performance.

Theo L. Sambuaga
Presiden Komisaris
President Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Profile

THEO L. SAMBUAGA
Presiden Komisaris | President Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 71 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023.

Rangkap Jabatan
Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, President Direktur Koran Media Investor Indonesia, dan Ketua Dewan Redaksi BeritaSatu Media Holdings.

Pengalaman Kerja
Selama beberapa periode sebagai Anggota DPR RI (1982-1998 & 2004-2009) dan Anggota MPR RI (1982-2009) antara lain menjabat: Wakil Ketua Komisi I (Luar Negeri, Keamanan, Pertahanan, Informasi dan Komunikasi) DPR RI (1990-1994); Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) DPR RI (1994-1997); Ketua Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) DPR RI (1997-1998); Sekretaris (1998–1999) dan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI (1999-2004); Ketua PAH-Panitia AdHoc-I (GBHN); Badan Pekerja–BP-MPR RI (1998-1999); Anggota/Wakil Ketua PAH I–BP MPRI RI (Perubahan Konstitusi, 1999–2004); Ketua Komisi I DPR RI (2004–2009); Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI (2015–2019).

Aktif di Partai Golkar, Theo L. Sambuaga berturut-turut dipilih sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar (1993–1998); Ketua (1998–2009); Wakil Ketua Umum (2009–2016), dan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina (2016–sekarang).

Di pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, Kabinet Pembangunan VII (1998); Menteri Perumahan dan Permukiman, Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999).

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Master International Public Policy (MIPP) pada tahun 1989 dari School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins University, Washington DC, Amerika Serikat, S1 (Drs) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1977 dan mengikuti KSA (Kursus Singkat Angkatan) IV LEMHANNAS (Lembaga Ketahanan Nasional) tahun 1994.

Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi
Selama tahun 2020, tidak ada pendidikan dan/atau pelatihan yang beliau ikuti.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Indonesian citizen, 71 years old, domiciled in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Serves as the President Commissioner based on the resolution of Annual General Meeting Shareholders dated July 6, 2020 up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023.

Concurrent Positions
He also serves as Commissioner of PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk and Chairman of the Editorial Board of BeritaSatu Media Holdings.

Work Experience
For several periods he served as a Member of the Indonesian Parliament (1982-1998 & 2004-2009) and Member of the Indonesian People's Consultative Assembly (1982-2009); Deputy Chairman of Commission I (Foreign Affairs, Security, Defense, Information and Communication) DPR RI (1990-1994); Chairman of the Indonesian Parliamentary Cooperation Agency (BKSAP) (1994-1997); Chairman of Partai Karya Pembangunan (Golkar) Faction (1997-1998); Secretary (1998-1999) and Vice Chairman of Golkar Faction of the MPR RI (1999-2004); Chairperson of PAH–AdHoc–I (GBHN); Working Committee of MPR RI (1999); Member/Vice Chairman of PAH I–BP MPRI RI (Constitutional Amendment, 2000-2004); Chairman of the House of Representatives Commission I (2004-2009); Member of the Indonesian MPR Study Institute (2015-2019).

Active in Golkar Party, Theo L. Sambuaga was successively elected as Deputy Secretary General (1993-1998); Chairperson (1998-2009); Deputy Chairperson of the Golkar Party DPP (2009-2016), and as Deputy Chairperson of the Board of Trustees (2016-present).

Cabinet VII (1998); Minister of Housing and Settlements, Development Reform Cabinet (1998-1999).

Educational Background
He holds a Master's degree in International Public Policy (MIPP) from the School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins University, Washington DC, USA and Bachelors Degree from the Faculty of Social and Political Sciences from Universitas Indonesia in October 1977.

Education and/or Training for Competency
During 2020, he did not attend education and/or training.

Affiliate Relationship
He has no affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major and Controlling Shareholders.

SUGIONO DJAUHARI
Komisaris | Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 78 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023.

Rangkap Jabatan
Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Kharisma Propertindo sejak tahun 2014, Direktur PT Menara Group sejak tahun 2008, dan Presiden Komisaris PT Praga Intiwira sejak tahun 1994.

Pengalaman Kerja
Sebelumnya, beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Trisakti, dan juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Lippo Cikarang Tbk (1989-2002).

Riwayat Pendidikan
Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Trisakti pada 1969.

Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi
Selama tahun 2020, tidak ada pendidikan dan/atau pelatihan yang beliau ikuti.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Indonesian citizen, 78 years old, domiciled in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Serves as a Commissioner based on the resolution of the Annual General Meeting Shareholders dated July 6, 2020 up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023.

Concurrent Positions
Currently, he also serves as Commissioner of PT Kharisma Propertindo (2014-present), Director of PT Menara Group (2008-present), and President Commissioner of PT Praga Intiwira (1994-present).

Work Experience
He served as a lecturer at Universitas Trisakti, and also served as Director of PT Lippo Cikarang Tbk (1989-2002).

Educational Background
He holds a Bachelor's degree in Engineering from Universitas Trisakti in 1969.

Education and/or Training for Competency
During 2020, he did not attend education and/or training.

Affiliate Relationship
He has no affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major and Controlling Shareholders.

ANAND KUMAR
Komisaris | Commissioner

Warga negara Singapura, berusia 53 tahun, berdomisili di Singapura.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023.

Rangkap Jabatan
Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk, Direktur Non-Eksekutif di Healthway Medical Corporation (Singapura) dan TVS Supply Chain Solutions (India).

Pengalaman Kerja
Beliau memiliki 30 tahun pengalaman di bidang M&A, Equity Capital Market dan Leveraged Finance di Asia Tenggara, dengan jaringan kerja yang luas di kawasan tersebut. Beliau adalah perwakilan dan Partner di Gateway Partners, perusahaan investasi yang fokus pada *growth capital* dan *special situation* di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika.

Sebelum di Gateway, beliau menjabat posisi kepemimpinan di beberapa bank investasi terkemuka, termasuk Standard Chartered Bank dan Morgan Stanley.

Riwayat Pendidikan
Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari Vanderbilt University, AS.

Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi
Selama tahun 2020, tidak ada pendidikan dan/atau pelatihan yang beliau ikuti.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Singapore citizen, 53 years old, domiciled in Singapore.

Legal Basis of Appointment
Serves as Commissioner based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated July 6, 2020 up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023.

Concurrent Positions
He also serves as a Commissioners of PT Lippo Karawaci Tbk, an non-executive director of Healthway Medical Corporation (Singapore) and TVS Supply Chain Solutions (India).

Work Experience
He has over 30 years of experience in M&A, Equity Capital Markets and Leveraged Finance in Southeast Asia with a strong network of relationships in the region. He is a representative and a Partner of Gateway Partners, an investment firm focused on growth capital and special situations across markets in Southeast Asia, South Asia, the Middle East and Africa.

Prior to Gateway, he held leadership positions in several leading investment banks including Standard Chartered Bank and Morgan Stanley.

Educational Background
He holds a Master of Business Administration from Vanderbilt University, U.S.A.

Education and/or Training for Competency
During 2020, he did not attend education and/or training.

Affiliate Relationship
He has no affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, but has an affiliation with the Major and Controlling Shareholders.

Didik Junaidi Rachbini
Komisaris Independen | Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Depok.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023..

Rangkap Jabatan
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 2018 dan Ketua Komite Audit serta Komisaris Independen PT Gowa Makassar Tourism Development sejak tahun 2017, anggota Komite Investasi PT Bowsprit Asset Management sejak tahun 2017. Beliau dikenal sebagai salah satu ekonom di Indonesia dan mendirikan lembaga riset ekonomi INDEF (Institue for Development of Economics and Finance) pada tahun 1995. Selain sebagai ekonom, beliau juga merupakan Dosen, Dekan, Guru Besar dan Pembantu Rektor I pada Universitas Mercu Buana, Jakarta serta sebagai Dosen Luar Biasa pada program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Pengalaman Kerja
Beliau pernah aktif dalam beberapa organisasi profesi dan pemerintahan, di antaranya sebagai Anggota MPR (1998-1999), Komisioner KPPU (2000-2004), Ketua Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan BUMN (2004-2008), Wakil Ketua Komisi X DPR RI membidangi Pariwisata, Kepemudaan dan Kebudayaan sebagai (2008-2009), Anggota Komite Ekonomi Nasional (2012-2014), Staf Ahli Menko Perekonomian RI (2013-2014), Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI (2014-2019), Anggota Lembaga Kajian Ketatanegaraan MPR RI (2019-sekarang), Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Senior Advisor pada International Tax and Investment Center, Federation of ASEAN Economist Association, dan Ketua LP3E Kadin Indonesia.

Riwayat Pendidikan
Beliau meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD), dari Central Luzon State University, Filipina pada tahun 1991, Master of Science dari Central Luzon State University, Filipina pada tahun 1988, dan Sarjana Manajemen Agribisnis dan Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia pada tahun 1983. Beberapa pendidikan non-gelar yang pernah dijalani beliau, antara lain dari University of the Phillipines at Los Banos (ekonomi) pada tahun 1986 dan Boston University (Economic Culture) pada tahun 1992.

Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi
Selama tahun 2020, tidak ada pendidikan dan/atau pelatihan yang beliau ikuti.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Indonesian citizen, 60 years old, domiciled in Depok.

Legal Basis of Appointment
Serves as an Independent Commissioner based on the resolution of Annual General Meeting Shareholders dated July 6, 2020 up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023.

Concurrent Positions
He also serves as President Commissioner since 2018 and Chairman of the Audit Committee as well as Independent Commissioner of PT Gowa Makassar Tourism Development since 2017, member of Investment Committee of PT Bowsprit Asset Management since 2017. He is known as one of the economists in Indonesia and founder of economic research institute, INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) (1995-present). He is also a Lecturer, Dean, Professor and Assistant to the Chancellor I at Universitas Mercu Buana, Jakarta and as an Extraordinary Lecturer at Universitas Indonesia Post-graduate program.

Work Experience
He has been active in several professional and government organizations, among others as a member of the MPR (1998-1999), a Commissioner of KPPU (2000-2004), Chairman of Commission X of the House of Representatives in charge of Trade, Industry, Investment, and SOEs (2004-2007), Vice Chairman of Commission X of the House of Representatives in charge of Tourism, Youth, Education, and Culture (2007-2009), Member of the National Economic Committee (2012-2014), Expert Staff to the Coordinating Minister for Economic Affairs (2013-2014), Central Board of Association of Indonesian Muslim Intellectuals, Senior Advisor at International Tax and Investment Center, Federation of ASEAN Economist Association, and Chairman of LP3E Kadin Indonesia.

Educational Background
State University, Philippines in 1991, Master of Science from Central Luzon State University, Philippines in 1988, and Bachelor degree in Agribusiness and Agricultural Economics Management from Institut Pertanian Bogor, Indonesia in 1983. He had several non-degree education, including from University of the Philippines at Los Banos (Economics) in 1986 and Boston University (Economic Culture) in 1992.

Education and/or Training for Competency
During 2020, he did not attend education and/or training.

Affiliate Relationship
He has no affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major and Controlling Shareholders.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Profile

HADI CAHYADI
Komisaris Independen | Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023.

Rangkap Jabatan
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Multipolar Tbk, sejak tahun 2018. Presiden Komisaris & Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Indonesian Paradise Property Tbk, sejak tahun 2015. Serta Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sekar Bumi Tbk, sejak tahun 2019. Selain itu beliau adalah Managing Partner-Founder Helios Capital, sebuah perusahaan penyedia jasa penasihat keuangan dengan spesialisasi di bidang Corporate Finance sejak tahun 2009, Wakil Ketua Komite Tetap Modal Ventura & Pendanaan Alternatif Bidang Finansial & Pasal Modal KADIN Indonesia sejak tahun 2015 dan merupakan Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara untuk bidang Manajemen Stratejik sejak tahun 1999.

Pengalaman Kerja
Memulai karirnya sebagai Auditor di kantor Arthur Andersen, Jakarta (1989-1991), beliau kemudian melanjutkan karirnya di bidang penasihat keuangan di berbagai perusahaan termasuk KPMG Jakarta (1994-1997), KPMG Melbourne (1999), Ernst and Young Jakarta (2000) dan Deloitte Touche Jakarta (2000-2001) dan terakhir PB Capital Jakarta (2001-2009). Kemudian Beliau mendirikan Helios Capital pada tahun 2009.

Riwayat Pendidikan
Beliau memiliki gelar Master degree of Corporate Law (MCL) dari Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) pada tahun 1999, gelar Business Administration (MBA) dari University of Houston-Clear Lake, Texas pada tahun 1993 dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1990.

Indonesian citizen, 54 years old, domiciled in Jakarta

Legal Basis of Appointment
Serves as an Independent Commissioner based on the resolution of Annual General Meeting Shareholders dated July 6, 2020 up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023.

Concurrent Positions
Currently, he serves as an Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Multipolar Tbk, since 2018. President Commissioner & Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Indonesian Paradise Property Tbk, since 2015. He also serves as an Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Sekar Bumi Tbk, since 2019. In addition, he is also Managing Partner–Founder of Helios Capital, a financial advisory services specializing in Corporate Finance since 2009, Deputy Chairman of the Committee of Capital Venture & Alternative Funding in the Financial & Capital sector of KADIN Indonesia since 2015 and is a Lecturer at the Faculty of Economics, in Strategic Management of Universitas Tarumanagara since 1999.

Work Experience
Starting his career as an Auditor at Arthur Andersen, Jakarta (1989-1991), he then continued his career as financial advisors in various companies including KPMG Jakarta (1994-1995), KPMG Melbourne (1998-1999), Ernst and Young Jakarta (2000) and Deloitte Touche Jakarta (2000-2001) and finally PB Capital Jakarta (2001-2009). He then founded Helios Capital in 2009.

Educational Background
He holds a Master's degree in Corporate Law (MCL) from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) in 1999, an MBA degree from the University of Houston-Clear Lake in 1993 and a Bachelor degree in Accounting from Universitas Tarumanagara in 1990.

Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi

Education and/or Training for Competency

- "Customer Centricity in the Digital Age: When and Why Big Data can Yield Big Insights"– Amphi Roskothen, INSEAD Asia Campus
- "Business Law Forum 2020" [Omnibus Law: Government's Breakthrough for Economic Growth]– Assegaf Hamzah & Partners
- "COVID-19 Force Majeure?" Indonesian Legal Perspective & Potential Disputes Confirmation– Assegaf Hamzah & Partners
- Webinar: "Remote Online Learning in the Face of Disruption"–McGraw-Hill Asia
- Webinar: "Asia Pacific COVID-19, Resilience Webcast series: Redefining Business Continuity to Thrive"–Deloitte
- "Steadying your business and navigating your way forward in Indonesia amidst COVID-19"– Ginting & Reksodiputro
- Webinar: "A Spotlight on the Restructuring Options & Rescue Mechanisms Available to Businesses in Southeast Asia"– Assegaf Hamzah & Partners with Rajah Tann Singapore
- Webinar: "Kolaborasi dan Kartel: Hukum Persaingan Usaha Dalam Masa Pandemi dan Normal Baru"– AHP
- "Asia M&A Virtual Forum 2020"–FIABCI Chapter Indonesia and President University–IFLR
- Webinar: "Quo Vadis Tech Scene in Indonesia: Do We Need an Indonesian "Silicon Valley?"– FIABCI Chapter Indonesia and President University
- Webinar The Jakarta Post Up Close #10 "Reimagining the Future of Indonesia's Economy, Live Talk Show dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani – The Jakarta Post
- "Post COVID-19 Pandemic: How Entrepreneurs and Manager Adapt and Reshape Business Strategies"– 9th ICEBM (The Ninth International Conference on Entrepreneurship and Business Management) 2020
- CEO Webinar: "The Way Forward"– FORBES Asia

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliate Relationship
He has no affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major and Controlling Shareholders.

Ali Said
Komisaris Independen | Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023.

Rangkap Jabatan
Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk dan merupakan Ketua Komite Tetap Organisasi dan Pemberdayaan Daerah serta Staf Khusus Ketua Umum Kadin Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan antara lain PT Karya Abadi Selaras, PT Citra Bangun Selaras dan PT Crystal Cakawala Indah dan juga merupakan Komisaris Utama di PT Bumi Wiralodra Selaras, PT Bangun Wiralodra Mandiri, Komisaris di PT Energi Madani Cemerlang.

Pengalaman Kerja
Beliau sebelumnya aktif di HIPMI pada tahun 2000-2002 sebagai Kompetement Agribisnis selama 2 priode tahun 2002-2005 dan tahun 2005-2008 sebagai Ketua II Bidang pembiayaan dan Pembinanan UKM.

Riwayat Pendidikan
Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Bandung tahun 1992.

Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi
Selama tahun 2020, tidak ada pendidikan dan/atau pelatihan yang beliau ikuti.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Indonesian citizen, 54 years old, domiciled in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Serves as an Independent Commissioner based on the resolution of the Annual General Meeting Shareholders dated July 6, 2020 up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023.

Concurrent Positions
Currently he serve as the Chairman of the Standing Committee of Regional Organizations and Empowerment and Special Staff of the General Chairman of Kadin Indonesia. They also cases where as Director of PT Gowa Makassar Development Tbk, Director of the few companies in the PT Karya Abadi Selaras, PT Citra Bangun Selaras and PT Crystal Cakawala Indah as well as Commissioner in PT Bumi Wiralodra Selaras, PT Bangun Wiralodra Mandiri, Commissioner PT Energi Madani Cemerlang.

Work Experience
Previously, he was active at HIPMI in 2000-2002 as Compartment of Agribusiness for two periods of 2002-2005 and in 2005–2008 as Chairman II of Financing and Development of SMEs.

Educational Background
He holds a Bachelors Degree in Economics from Universitas Islam Bandung in 1992.

Education and/or Training for Competency
During 2020, he did not attend education and/or training.

Affiliate Relationship
He has no affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major and Controlling Shareholders.

LAPORAN *DIREKSI*

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Pemegang Saham yang Terhormat,

Melalui laporan ini, perkenankan kami untuk menyampaikan perkembangan kinerja dan berbagai langkah strategis yang telah kami lakukan sepanjang 2020. Selama beberapa dekade, Perseroan terus membuktikan eksistensinya sebagai salah satu perusahaan pengembang properti terdepan di Indonesia. Perseroan terus menghadirkan inovasi dan solusi bagi masyarakat untuk memiliki hidup yang lebih sejahtera dari waktu ke waktu.

Dear Shareholders,

Through this report, we would like to convey our performance and the various strategic measures that we have taken throughout 2020. Over the decades, the Company has proven to be one of the leading property development companies in Indonesia. The Company continues to come up with innovations and solutions to promote community welfare.

Perseroan berkomitmen untuk hadir sebagai perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, di mana Perseroan mampu menghadirkan solusi atas permasalahan yang terjadi serta memenuhi kebutuhan pelanggan secara maksimal.

The Company is committed to be a customer-oriented company, in which the Company is able to provide to problems that occurred as well as meeting the needs of the customers to the fullest.

Pendapatan
Revenue

Rp1,8

Triliun | Trillion

Total Aset
Total Assets

Rp9,7

Triliun | Trillion

Tinjauan Perekonomian

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap bisnis properti di tanah air. Hal tersebut terlihat pada penurunan penjualan dan penyewaan properti baik rumah, mal, kantor dan apartemen. Namun, terlepas dari berbagai tantangan ekonomi yang terjadi sepanjang 2020, sektor properti masih memberikan kontribusi positif terhadap PDB Indonesia sebesar 2,30% pada triwulan kedua 2020. Kontribusi ini didukung oleh sejumlah faktor yakni peningkatan alokasi KPR Subsidi, perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih banyak berada di rumah, dan adanya bantuan likuiditas pemerintah untuk penyaluran kredit melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Gejala pemulihan industri properti mulai tampak sejak awal triwulan ketiga 2020, yang dikontribusikan oleh sejumlah kebijakan pemerintah seperti pengesahan UU Cipta Kerja dan rencana vaksinasi COVID-19.

Economic Review

The COVID-19 pandemic has had a massive impact on the country's property business. This is evidenced by the decline in sales and rentals of properties, such as houses, malls, offices, and apartments. However, despite the various economic challenges that occurred throughout 2020, the property sector was still able to contribute positively to the Indonesian economy by 2.30% in the second quarter of 2020. This contribution was supported by a number of factors, namely an increase in the allocation of subsidized mortgage loans, lifestyle changes that meant spending more time at home, as well as government liquidity assistance through the National Economic Recovery Program (PEN). Signs of recovery in the property industry began to be visible in the beginning of the third quarter of 2020, supported by a number of government policies, such as the ratification of the Job Creation Law and the COVID-19 vaccination plan.

Beradaptasi dengan Pandemi COVID-19

Bagi Perseroan, keselamatan dan keamanan karyawan merupakan prioritas utama. Untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama masa pandemi, Perseroan membatasi dan mengurangi pertemuan tatap muka dengan memanfaatkan teknologi pertemuan secara daring. Dengan demikian, walaupun mobilitas karyawan menjadi terbatas, namun efektivitas dan produktivitas kerja tetap dapat mencapai hasil yang optimal. Di samping itu, Perseroan juga melakukan pembatasan kapasitas karyawan yang bekerja di kantor sebesar 50% serta melakukan tes cepat/tes serologi secara berkala kepada karyawan dan semua pekerja di lokasi proyek.

Prioritas ini juga berlaku kepada seluruh pelanggan dan penghuni kawasan Lippo Cikarang. Oleh sebab itu, Perseroan senantiasa mengikuti arahan dan instruksi pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan sejumlah protokol kesehatan, seperti pemakaian masker, penyediaan tempat cuci tangan dan peringatan jaga jarak di tempat-tempat publik.

Adapting to the COVID-19 Pandemic

The Company prioritizes employee health and safety. To adapt to the changes that occurred during the pandemic, the Company limited face-to face meetings by utilizing online technology. Therefore, although employee mobility become limited, work effectiveness and productivity remained at their optimum. In addition, the Company has also limited its office capacity to 50% and has been conducting periodic quick tests/serology tests of all employees and workers at the project site.

This priority also applies to all customers and residents in the Lippo Cikarang area. The Company complies with government directives and instructions concerning the prevention of COVID-19 by enforcing a number of health protocols, such as wearing masks, and providing hand washing facilities and warnings to keep a certain distance in public places.

LAPORAN DIREKSI
Report from The Board of Directors

Kebijakan Strategis

Perseroan berkomitmen untuk hadir sebagai perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, di mana Perseroan mampu menghadirkan solusi atas permasalahan yang terjadi serta memenuhi kebutuhan pelanggan secara maksimal. Untuk itu, sepanjang 2020 kami terus menggali dan mencari tahu keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan melakukan riset secara intensif guna merancang strategi pemasaran yang tepat dan efektif.

Untuk mencapai pertumbuhan bisnis secara jangka panjang, kami terus melakukan mitigasi risiko bisnis, menjaga kondisi keuangan dan melakukan pengembangan produk. Kami juga terus membenahi sejumlah aspek operasional dalam rangka memperkuat landasan dan identitas bisnis Perseroan. Upaya ini merupakan langkah penting bagi kami dalam menentukan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan memproyeksikan prospek usaha Perseroan di masa mendatang.

Direksi memiliki peranan penuh dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis lainnya. Dengan latar belakang kompetensi dan keahlian yang beragam dari masing-masing anggota Direksi, kami dapat merumuskan dan menyusun strategi secara menyeluruh dan objektif, sehingga kami mampu menghasilkan rencana dan keputusan yang terbaik. Proses perumusan strategi dilakukan melalui rapat internal Direksi termasuk dan tidak terbatas pada pertemuan-pertemuan lainnya. Setelah itu, Direksi menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah lebih lanjut hingga memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Sebelum mengimplementasikan kebijakan strategis, Direksi mengadopsi rekomendasi dan masukan yang diberikan Dewan Komisaris.

Kinerja Perseroan

Secara umum, Perseroan berhasil meraih peningkatan kinerja yang baik pada 2020. Kendati kondisi perekonomian berada dalam suasana yang kurang menggembirakan, namun Perseroan tetap dapat mempertahankan kinerjanya. Permintaan kawasan komersial mengalami sedikit perlambatan dikarenakan daya beli yang melemah selama masa pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, kawasan industri menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sekitar 100%, khususnya pada permintaan properti di bidang pergudangan dan logistik. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia.

Strategic Policy

The Company is committed to providing the best possible services for its customers. As a customer-oriented business entity, the Company is committed to providing the best solutions in the optimum fulfilment of the customers' needs. To this end, we continued to explore and observe the needs of our customers throughout 2020 by conducting research in order to design an appropriate and effective marketing strategy.

To achieve long-term business growth, we continue to mitigate business risks, maintain financial conditions, and engage in product development. We also continue to improve our operational activities in order to strengthen the Company's business foundation and identity. This effort is a crucial step to determining the appropriate strategy to increase market confidence and improve the Company's future business outlook.

The Board of Directors formulates the Company's strategies and policies. With a diverse background and expertise of each member of the Board of Directors, we have been able to formulate a comprehensive and objective strategy. The strategy formulation process is conducted through internal meetings of the Board of Directors and other meetings. The Board of Directors submits its policies to the Board of Commissioners for review and approval. Prior to implementing the strategic policies, the Board of Directors takes into account the recommendations of the Board of Commissioners.

Company Performance

The Company managed to achieve a good performance in 2020. Despite the unfavorable economic conditions, the Company was still able to maintain its performance. The demand for commercial areas experienced a slight slowdown due to the weakening purchasing power during the COVID-19 pandemic. On the other hand, the demand for industrial areas showed a significant growth of around 100%, particularly in the demand for properties in the warehouse and logistics sectors. This increase was influenced by the growth of e-commerce in Indonesia.

DIREKSI

Board of Directors

1. **SIE SUBIYANTO**
   Presiden Direktur | President Director
2. **RUDY HALIM**
   Direktur | Director
3. **TEVILYAN YUDHISTIRA RUSLI**
   Direktur | Director
4. **JU KIAN SALIM**
   Direktur | Director

LAPORAN DIREKSI
Report from The Board of Directors

Di tengah masa pandemi, Perseroan terus berfokus untuk memanfaatkan momentum dan peluang yang tercipta melalui kehadiran Waterfront Estates, perumahan kelas premium dengan lokasi yang strategis di kawasan Lippo Cikarang. Waterfront Estates adalah salah satu bentuk upaya strategis Perseroan dalam meluncurkan produk yang mudah diserap oleh segmen kelas menengah.

Pada 2020, Perseroan telah meluncurkan klaster ketiga Waterfront Estates yaitu Travertine, dengan total penjualan 72% dari total 446 unit per September 2020. Selain itu, pada triwulan ketiga 2020, Meikarta telah melakukan proses penyerahan seribu unit apartemen, yang terdiri dari 14 *tower* di 7 (tujuh) blok dan merampungkan *topping-off* 28 menara. Selain itu, Perseroan terus melakukan serah terima unit secara bertahap di Orange County sepanjang 2020. Pencapaian ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus meningkatkan kepercayaan para pelanggan serta melakukan serah terima unit secara tepat waktu.

Dari segi finansial, Perseroan mampu menorehkan kinerja yang positif pada 2020, yang ditandai dengan pencapaian pendapatan usaha sebesar Rp1,84 triliun, meningkat sebesar 8,82% dari tahun 2019 yaitu Rp1,70 triliun. Kenaikan pendapatan ini terutama didukung oleh penjualan rumah hunian dan serah terima apartemen Orange County. Selain itu, kami juga terus melakukan efisiensi biaya disertai dengan pengendalian keuangan secara disiplin di semua lini usaha.

Perbandingan Target dan Pencapaian

Kendati Perseroan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan di awal tahun, namun Perseroan tetap melaksanakan rencana-rencana strategis yang telah disusun bersama dan mengupayakan pertumbuhan Perseroan, baik dalam operasional dan finansial. Sepanjang 2020, kami terus berfokus untuk memperkuat konsolidasi seluruh unit usaha agar mampu mencatatkan kinerja yang optimal.

Amid the pandemic, the Company has remained focused on utilizing the available opportunities through the Waterfront Estates, a premium class housing with a strategic location in the Lippo Cikarang area. The Waterfront Estates in one of the Company's strategic efforts to launch products that are easily absorbed by the middle-class segment.

In 2020, the Company launched the third Waterfront Estates cluster, namely the Travertine, with total sales of 72% of the 446 units as at September 2020. In addition, in the third quarter of 2020, Meikarta handed over one thousand apartment units, consisting of 14 towers in 7 (seven) blocks and completed the topping off of 28 towers. In addition, the Company continued to hand over units in the Orange County throughout 2020. This achievement is a manifestation of our commitment to continue to increase customer confidence thought timely unit handovers.

From the financial perspective, the Company was able to post a positive performance in 2020. This was marked with a revenue achievement of Rp1.84 trillion a 8.82% increase from Rp1.70 trillion in 2019. This increase was supported by the sale of residential houses and the handing over of apartments in Orange County. In addition, we also continued to focus on cost efficiency, along with disciplined financial control, in all lines of businesses.

Comparison of Targets and Achievements

Even though the Company has yet to accomplish the targets set at the beginning of the year, it continues to implement the formulated plans and strives to achieve growth, both in operational and financial terms. During 2020, we continued to focus on strengthening the consolidation of all business units in order to post optimum performance.

Tantangan Usaha

Untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu perusahaan properti terdepan di Indonesia, salah satu tantangan usaha yang dihadapi Perseroan adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis mampu terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, guna mencegah terjadinya inefisiensi kinerja, kesalahan ekspansi serta penimbunan stok. Oleh sebab itu, kami terus memperkuat fondasi usaha Perseroan dengan meningkatkan kepatuhan dan *operational excellence* serta menghadirkan produk properti yang *sustainable*. Di sisi lain, Perseroan juga menaruh perhatian besar pada kestabilan kondisi keuangan. Untuk menghadapi tantangan usaha ini, kami terus melakukan pengendalian dan pengawasan secara ketat terhadap arus kas setiap saat.

Business Challenges

One of the business challenges faced by the Company is to ensure that its strategic policies are appropriately implemented. This is done to maintain the Company's position as one of the leading property companies in Indonesia, and prevent performance inefficiency, expansion errors, as well as stockpiling. To this end, we continue to strengthen the Company's business foundations by increasing compliance and operational excellence, as well as focusing on sustainable property products. On the other hand, the Company also pays great attention to the stability of its financial condition. To address this business challenge, we continue to exercise strict control and supervision of cash flow.

Prospek Usaha

Industri properti diprediksi dapat tumbuh berkisar 20-30% pada 2021. Sejumlah faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri properti di antaranya adalah penerapan Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diharapkan mampu memangkas birokrasi perizinan dan kepastian pengadaan lahan. Pemulihan sektor properti juga menjadi salah satu perhatian dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selaras dengan optimisme pada pertumbuhan industri properti, Perseroan akan terus memanfaatkan peluang usaha yang di masa mendatang. Kami akan terus menyelesaikan proyek-proyek eksisting dan melanjutkan pembangunan Waterfront Estates melalui peluncuran klaster-klaster baru. Perseroan menargetkan prapenjualan sebesar Rp4,1 triliun di 2021, yang diupayakan berasal dari proyek hunian dengan harga terjangkau. Perseroan juga akan mengembangkan segmentasi industri khususnya pergudangan. Selain itu, kami juga akan terus memperkuat strategi pemasaran dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan peningkatan *operational excellence*, sehingga produk properti Perseroan dapat terserap dengan optimal dan menjadi preferensi utama para pelanggan.

Business Outlook

The property industry is predicted to grow by approximately 20-30% in 2021, among others, thanks to the implementation of the Job Creation Law (UU Ciptaker), which is expected to cut licensing bureaucracy and ensure certainty in land acquisition. The recovery in the property sector is also one of the concerns of the National Economic Recovery (PEN) program.

In line with the optimism about the growth in the property industry, the Company will continue to take advantage of business opportunities. We will continue to complete all existing projects and continue the expansion of the Waterfront Estates through the launch of new clusters. The Company is targeting pre-sales of Rp4.1 trillion in 2021, derived from reasonably-priced residential projects. The Company will also develop industrial segmentation, particularly warehousing. In addition, we will also continue to strengthen our marketing strategy by meeting the needs of the customers, as well as focusing on operational excellence improvements. This will ensure the absorption of the Company's property products.

LAPORAN DIREKSI
Report from The Board of Directors

Penerapan Praktik Tata Kelola yang Baik

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib mengutamakan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga berlaku pada pembangunan seluruh properti kami, di mana seluruh proses perizinan kami lakukan sesuai prosedur dengan mengikuti ketentuan pemerintah. Kepatuhan ini merupakan wujud komitmen dan pertanggungjawaban kami dalam menghadirkan produk properti yang terpercaya dan aman sebagai bagian dari investasi jangka panjang pelanggan.

Kemampuan Perseroan dalam meraih pertumbuhan kinerja dari tahun ke tahun didukung oleh penerapan praktik tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara konsisten. Kami terus berupaya memperkokoh fondasi kami menjadi perusahaan properti yang berintegritas serta menjalankan bisnis yang beretika. Upaya kami dalam mengembangkan praktik GCG meliputi penerapan inisiatif anti korupsi dan gratifikasi serta pengendalian sistem pelaporan pelanggaran. Melalui berbagai inisiatif ini, kami memastikan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan usaha Perseroan dilakukan secara transparan, akuntabel, independen dan bertanggung jawab.

Implementation of Good Corporate Governance

As a public company, the Company has to comply with all applicable laws and regulations. This also applies to the construction of our properties, where our licensing processes adhere with all government regulations. This compliance is a manifestation of our commitment to reliable and safe property products, and a part of our long-term commitment to our customers.

The Company's ability to achieve performance growth is supported by the consistent implementation of Good Corporate Governance (GCG). We continue to strive to strengthen our foundations as a property company with integrity that conducts ethical business. Our GCG practices include the implementation of anti-corruption and anti-gratification initiatives, as well as controlling the violation reporting system. Through these initiatives, we ensure that the Company's business activities are conducted in a transparent, accountable, independent, and responsible manner.

Perubahan Komposisi Direksi

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Direksi serta untuk memperkuat struktur keanggotaan Direksi, maka berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 6 Juli 2020, Perseroan menyetujui perubahan komposisi Direksi menjadi:

Changes in the Composition of the Board of Directors

In line with the end of the term of office of the Board of Directors, and to strengthen the membership structure of the Board of Directors, based on the resolution of the Annual GMS on July 6, 2020, the Company approved the following changes in the composition of the Board of Directors to:

Presiden Direktur	**Sie Subiyanto**	President Director
Direktur	**Rudy Halim**	Director
Direktur	**Tevilyan Yudhistira Rusli**	Director
Direktur	**Ju Kian Salim**	Director

Perseroan mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Bapak Rudy Halim dan Tevilyan Yudhistira Rusli di Perseroan. Dengan struktur yang semakin kuat, kami optimis bahwa kami akan mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih baik bagi Perseroan di tahun-tahun mendatang.

The Company welcomes Mr. Rudy Halim and Mr. Tevilyan Yudhistira Rusli to the Company. With a stronger structure, we are optimistic that we will be able to ensure the Company's growth in the years to come.

Apresiasi

Keberhasilan Perseroan menutup tahun 2020 dengan positif merupakan hasil dari konsolidasi dan kerja sama seluruh manajemen, karyawan dan para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam mengelola Perseroan, kepada para anggota manajemen yang telah membantu kami dalam mengelola Perseroan, serta kepada seluruh karyawan yang telah bahu membahu mendorong pertumbuhan Perseroan di tengah keterbatasan perubahan pola bekerja. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, mitra usaha serta para pelanggan yang terus menaruh harapan dan kepercayaan pada kinerja Perseroan. Dengan dukungan dari seluruh pihak, kami optimis bahwa Perseroan akan terus mampu mencatatkan kinerja yang optimal di masa mendatang.

Appreciation

The success of the Company in closing 2020 with a positive performance is the result of the cooperation of all of the management, employees, and stakeholders. On this account, please allow us to express our gratitude to the Board of Commissioners for supporting the implementation of the managerial duties of the Board of Directors, to all management staff who assisted us to manage the Company, and to all employees who have worked hand in hand to boost the growth of the Company amid various limitations and changes in working patterns. We would also like to extend our gratitude to the Company's shareholders, business partners, as well as customers who have continued to maintain confidence in the Company's performance. With the support of all parties, we are optimistic that the Company will be able to continue to post optimal performance in the future.

Sie Subiyanto
Presiden Direktur
President Director

PROFIL DIREKSI
Board of Director's Profile

SIE SUBIYANTO
Presiden Direktur | President Director

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, berdomisili di Tangerang.

Dasar Hukum Penunjukan
Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023.

Rangkap Jabatan
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain selama 2020.

Pengalaman Kerja
Beliau memulai karirnya di PT Sika Nusa Pratama sebagai Sales Manager pada tahun 1988-1989, sebagai Business Development Manager di PT Ongko Group pada tahun 1993, kemudian dari tahun 1994-1996 menjadi Construction Manager di PT Summarecon Group. Pada tahun 1997, di PT Ciputra Group menduduki posisi sebagai Project Manager dan mengakhiri karirnya sebagai Deputy General Manager pada tahun 2001. Kembali bergabung dengan PT Summarecon Group sebagai General Manager dari tahun 2002-2003. Kemudian pada tahun 2003 mengemban tugas sebagai General Manager di PT Lippo Karawaci Tbk dan dipromosikan sebagai Direktur dari tahun 2013-2018.

Riwayat Pendidikan
Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 1987 dan Master of Management dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen Jakarta pada 1990.

Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi

Indonesian citizen, 57 years old, domiciled in Tangerang.

Legal Basis of Appointment
Serves as the President Director based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated July 6, 2020 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023.

Concurrent Positions
He does not hold concurrent positions in other public companies during 2020.

Work Experience
He began his career at PT Sika Nusa Pratama as Sales Manager (1988-1989), Business Development Manager at PT Ongko Group in 1993. Then joined PT Summarecon Group as Construction Manager (1994-1996). In 1997, he served as Project Manager of PT Ciputra Group and lastly served as Deputy General Manager in 2001. Re-joined PT Summarecon Group as General Manager (2002-2003). Then he served as General Manager of PT Lippo Karawaci Tbk and served as Director (2013-2018).

Educational Background
He holds a degree in Civil Engineering from Universitas Atma Jaya Yogyakarta in 1987 and a Master of Management from Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen Jakarta in 1990.

Education and/or Training for Competency

- Resilience In Turbulence: Bertahan di Tengah Badai–Universitas Tarumanagara
- CEO Networking 2020: "Building Resilience to Economic Recovery"– Pasar Modal Indonesia

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliate Relationship
He has no affiliations with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the Major and Controlling Shareholders.

RUDY HALIM
Direktur | Director

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahunan tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023.

Rangkap Jabatan
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Lippo Karawaci Tbk sejak Juli 2020.

Pengalaman Kerja
Dengan pengalaman lebih dari dua dasawarsa di berbagai sektor industri, Rudy Halim pernah menjabat di jajaran Direksi sejumlah perusahaan publik di Indonesia, termasuk sebagai Presiden Direktur dan CEO PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("MPM") (2016), sebuah grup perusahaan otomotif *end-to-end* dan afiliasi dari PT Saratoga Investama Tbk; sebagai Wakil Presiden Direktur PT Dian Swastika Sentosa Tbk, perusahaan energy dan infrastruktur dalam Sinarmas Grup, sekaligus sebagai CEO dari perusahaan-perusahaan bisnis energi di Sinarmas Grup di Indonesia (2012). Beliau berpengalaman menangani transformasi dan *turnaround* korporasi, penggalangan dana dan pembiayaan proyek skala besar, merger dan akuisisi lintas-batas, serta pengembangan dan pembangunan proyek-proyek besar. Beliau memimpin MPM menjadi salah satu dari 50 perusahaan terbaik Indonesia versi majalah Forbes, dan menerima berbagai penghargaan bergengsi termasuk dari Finance Asia.

Riwayat Pendidikan
Beliau meraih gelar sarjana ganda di bidang Hukum dan Commerce (Akuntansi dan Keuangan) dari University of Sydney, Australia. Beliau juga memperoleh gelar Master of Business Administration dari Booth School of Business, University of Chicago. Beliau juga seorang professional dalam manajemen proyek yang bersertifikasi dari Project Management Institute di Pennsylvania, AS, dan menyelesaikan program eksekutif "Strategi Pemasaran Digital: Data, Otomasi, AI & Analytics" di Universitas Northwestern–Kellogg School of Management.

Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi
Selama tahun 2020, tidak ada pendidikan dan/atau pelatihan yang beliau ikuti.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Indonesian citizen, 48 years old, domiciled in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Serves as a Director based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated July 6, 2020 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders 2023.

Concurrent Positions
He concurrently serves as Director PT Lippo Karawaci Tbk since July 2020.

Work Experience
With more than two decades of experience in various industry sectors, Rudy has served on the Board of Directors of various public-listed companies in Indonesia, including as the President Director and CEO of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("MPM") in Indonesia (2016) –an end-to-end automotive group of companies and affiliate of PT Saratoga Investama Tbk., and as the Deputy President Director of PT Dian Swastika Sentosa Tbk, the energy and infrastructure arm of the Sinarmas Group, and as CEO of the energy businesses of the Sinarmas Group in Indonesia (2012). He has experiences in leading company transformation and turnaround, large-scale fund raising and project financing, cross-border mergers and acquisitions and major project development and construction. He has led MPM to become one of the 50 best companies in Indonesia by Forbes, and to receive many other accolades including by Finance Asia.

Educational Background
He holds double degrees in Bachelor of Laws and Bachelor of Commerce (majoring in Accounting and Finance) from the University of Sydney, Australia. He also graduated with a Master of Business Administration degree from the University of Chicago, Booth School of Business. He is also a qualified project management professional certified by the Project Management Institute in Pennsylvania, and completed an executive education on "Digital Marketing Strategies: Data, Automation, AI & Analytics" at the Northwestern University–Kellogg School of Management.

Education and/or Training for Competency
During 2020, he did not attend education and/or training.

Affiliate Relationship
He has no affiliations with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the Major and Controlling Shareholders.

PROFIL DIREKSI
Board of Director's Profile

TEVILYAN YUDHISTIRA RUSLI
Direktur | Director

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan
Beliau menjabat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023.

Rangkap Jabatan
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Lippo Karawaci Tbk sejak Juli 2020.

Pengalaman Kerja
Sebelumnya, beliau berkarir selama 20 tahun di Unilever, salah satu perusahaan dalam daftar Fortune 500, dan pernah menjabat sebagai Chief Auditor di Unilever (2018-2020) dan CFO Unilever Indonesia (2013-2018). Karir profesionalnya dimulai sebagai Akuntan di Apex Engkish Group, Taiwan (1996) dan sebagai Manager, Manufacturing and Sales Finance, di PT GE Lighting Indonesia (1999).

Riwayat Pendidikan
Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis (Akuntansi) dari Chung Yuan Christian University, Taiwan.

Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi

Indonesia citizen, 48 years old, domiciled in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Serves as the Director based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated July 6, 2020 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023.

Concurrent Positions
He concurrently serves as Director PT Lippo Karawaci Tbk since July 2020.

Work Experience
He had spent the last 20 years at Unilever, a Fortune 500 Company, most recently as Chief Auditor at Unilever (2018–2020) and CFO of Unilever Indonesia (2013–2018). He began his career as Accountant at Apex English Group, in Taiwan (1996) and as Manager Manufacturing and Sales Finance at PT GE Lighting Indonesia, in Indonesia (1999).

Educational Background
He holds a Bachelor's degree in Business Administration (Accounting) from Chung Yuan Christian University, Taiwan.

Education and/or Training for Competency

- Panelist of CIMA Session – Agile Finance
- CEO Networking 2020 "Building Resilience to Economic Recovery"– Pasar Modal Indonesia
- "Speaker of CIMA Webinar" Thinking Out of The Box–Reinvent and Digitalize – CIMA Sri Lanka
- Speaker of Coffee Talk with CFO Club dan Panelist dalam CIMA APAC CFO Summit Invitation – Microsoft

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliate Relationship
He has no affiliations with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the Major and Controlling Shareholders.

JU KIAN SALIM
Direktur | Director

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun, berdomisili di Bekasi.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023.

Rangkap Jabatan
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain selama 2020.

Pengalaman Kerja
Beliau memulai karirnya di Perusahaan Arsitektur Prof. Dipl.-Ing. Lothar Gotz & Partners Heidelberg-Stuttgart, di Jerman (2000-2002). Kemudian beliau mendirikan sebuah perusahaan konsultan desain, Salim & Partners, di Jerman pada tahun 2002. Sebelum kembali ke Indonesia, beliau sempat bergabung dengan Federal Investindo Group sebagai Operation and Design Project (2007-2010). Hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur di sejumlah entitas anak Perseroan.

Riwayat Pendidikan
Beliau meraih gelar Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.) dengan jurusan Arsitektur dan Perencanaan Kota dari University of Applied Science Kaiserslautern, Jerman pada 2001. Beliau juga meliliki gelar Masters of Management (MM) dengan jurusan Manajemen Strategis dari Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) pada 2014 dan berhasil memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) dari Universitas Pelita Harapan (UPH) bekerja sama dengan Peking University (PKU), China pada 2015.

Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi

Indonesia citizen, 47 years old, domiciled in Bekasi.

Legal Basis of Appointment
Serves as the Director based on the resolution of the Annual General Meeting Sharaholders dated July 6, 2020 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023.

Concurrent Positions
He does not hold concurrent positions in other public companies during 2020.

Work Experience
He began his career at Architecture Company Prof. Dipl.-Ing.Lothar Gotz & Partners Heidelberg-Stuttgart, in Germany (2000-2002). Then he founded a design consulting firm, Salim & Partners, in Germany in 2002. Prior to returning to Indonesia, he joined Federal Investindo Group as Operation and Design Project (2007-2010). He is also serves as President Director in a number of subsidiaries of the Company.

Educational Background
He holds a Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.) Degree majoring in Architecture and Urban Planning from the University of Applied Science Kaiserslautern, Germany in 2001. He also holds a Masters of Management (MM) degree majoring in Strategic Management from Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) in 2014 and successfully obtained Master of Business Administration (MBA) degree from Universitas Pelita Harapan (UPH) in cooperation with Peking University (PKU), China in 2015.

Education and/or Training for Competency

- Resilience In Turbulence: Bertahan di Tengah Badai – Universitas Tarumanagara

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliate Relationship
He has no affiliations with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the Major and Controlling Shareholders.

PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

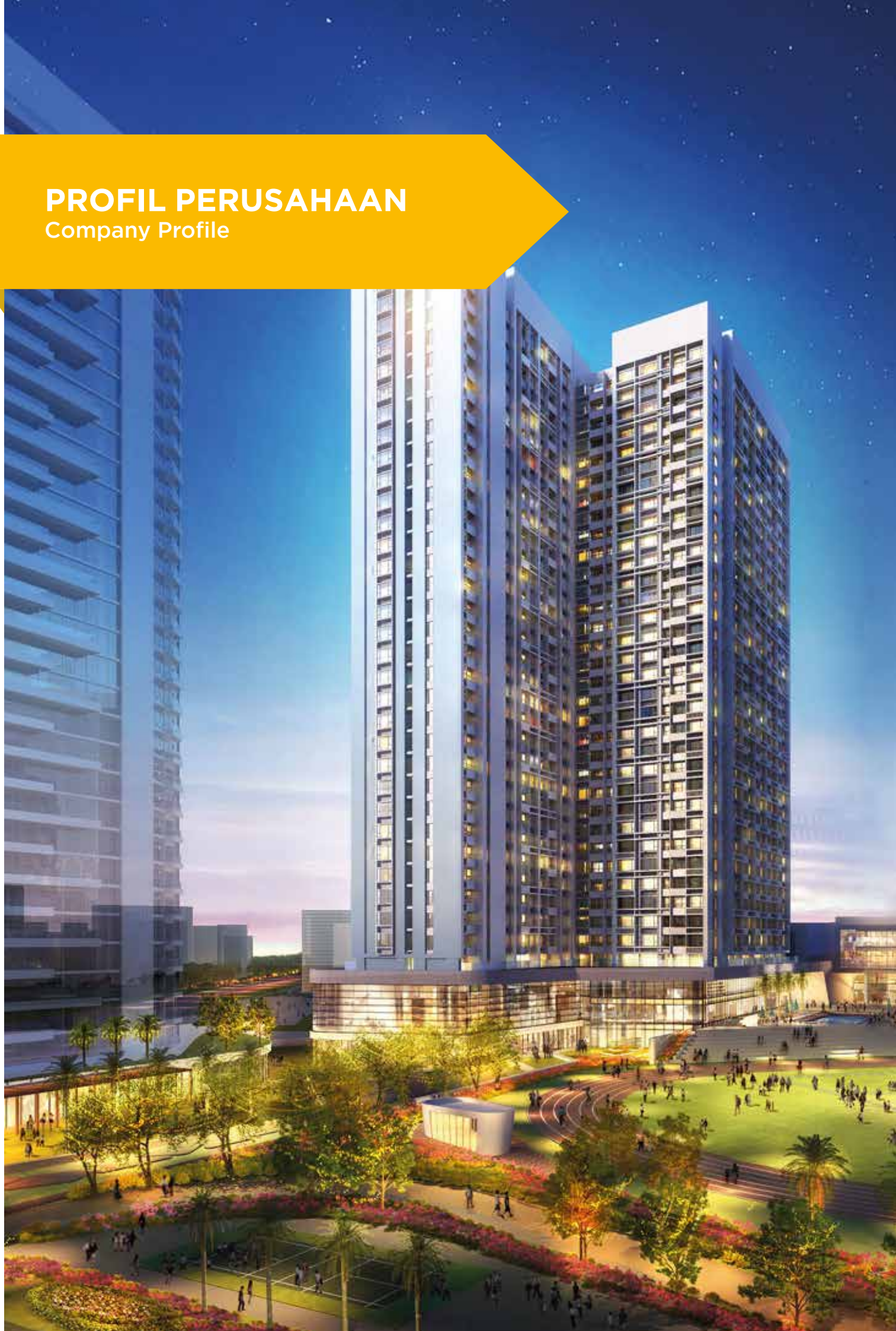

IDENTITAS PERUSAHAAN

Corporate Identity

Nama Perusahaan
Company Name
PT Lippo Cikarang Tbk

Jenis Perusahaan
Company Type
Swasta Terbuka | Public Listed

Tanggal Pendirian
Date of Establishment
30 Mei 1988 | May 30, 1988

Kegiatan Usaha
Type of Business
Pengembangan kota yang meliputi pengembangan kawasan perumahan dan industri, pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum, dan penyediaan jasa-jasa pendukung.
Urban development which includes development of real estate and industrial estate, development of infrastructure and public facilities, and providing supporting services.

Modal Dasar
Authorized Capital
Rp1.350.000.000.000 terdiri dari 2.700.000.000 saham |
Rp1,350,000,000,000 comprised of 2,700,000,000 shares

Modal Disetor
Paid-up Capital
Rp1.339.800.000.000 terdiri dari 2.679.600.000 saham |
Rp1,339,800,000,000 comprised of 2,679,600,000 shares

Nilai Nominal
Par Value
Rp500 per lembar | Rp500 per share

Kode Saham
Ticker Code
LPCK (Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Listed on the Indonesia Stock Exchange)

Kepemilikan Saham
Share Ownership

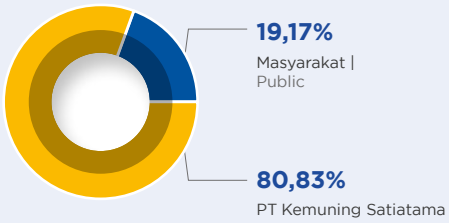

Alamat Kantor Pusat
Headquarter Address
Easton Commercial Centre
Jl. Gn. Panderman Kav. 05,
Lippo Cikarang
Kab. Bekasi 17550

Situs Perusahaan
Company Website
www.lippo-cikarang.com

Kontak
Contact
Corporate Secretary
Tel. 62-21 897-2484, 897-2488
Fax 62-21 897-2093, 897-2493
E-mail: corsec@lippo-cikarang.com

SEKILAS LIPPO CIKARANG

About Lippo Cikarang

Pada 2020, Perseroan mengadakan *Grand Opening* Waterfront Estates Residensial Klaster Travertine.

In 2020, the Company exhibited the Grand Opening Waterfront Estates Residential Travertine Cluster.

PT Lippo Cikarang Tbk ("Perseroan/LPCK") didirikan dengan nama PT Desa Dekalb, berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 20 Juli 1987 yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi SH, Notaris di Jakarta. Pada 1988, PT Desa Dekalb mengalami perubahan nama menjadi PT Gunung Cermai Inti berdasarkan Akta No. 63 tanggal 22 April 1988.

Pada 1992, PT Gunung Cermai Inti melakukan perubahan nama menjadi PT Lippo City Development berdasarkan Akta No. 157 tanggal 20 Maret 1992 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Pada 1995, Perseroan kembali melakukan perubahan nama menjadi PT Lippo Cikarang berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 September 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo S.H., Notaris di Jakarta. Status PT Lippo Cikarang resmi menjadi PT Lippo Cikarang Tbk setelah menjadi perusahaan publik, berdasarkan Akta No. 95 tanggal 21 April 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih SH, Notaris di Jakarta.

Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir tercatat dalam Akta No. 10 tanggal 23 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Sri Herawati Anwar Efendi S.H., Notaris di Bekasi, mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

PT Lippo Cikarang Tbk (the "Company") was established under the name of PT Desa Dekalb, based on Deed of Establishment No. 43 dated July 20, 1987 made before Hendra Karyadi SH, Notary in Jakarta. In 1988, PT Desa Dekalb changed its name to PT Gunung Cermai Inti based on Deed No. 63 dated April 22, 1988.

In 1992, PT Gunung Cermai Inti changed its name to PT Lippo City Development based on Deed No. 157 dated March 20, 1992, made before Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. In 1995, the Company once again changed its name to PT Lippo Cikarang based on Deed No. 2 dated September 1, 1995 made before Mrs. Liliana Arif Gondoutomo S.H., Notary in Jakarta. The status of PT Lippo Cikarang officially became PT Lippo Cikarang Tbk after becoming a public company, based on Deed No. 95 dated April 21, 1997 which was made before Mrs. Poerbaningsih SH, Notary in Jakarta.

Since its establishment, the Company's Articles of Association has been amended several times, with the last amendment recorded in Deed No. 10 dated March 23, 2017, made before Sri Herawati Anwar Efendi S.H., Notary in Bekasi, regarding the approval of amendments to the Company's Articles of Association.

Lippo Cikarang saat ini berada di kawasan segitiga emas Kawasan Industri Cikarang di Koridor Timur Jakarta, yang berkontribusi sekitar 60% dari seluruh produksi manufaktur di Indonesia. Lokasi ini merupakan salah satu lokasi paling strategis karena terletak persis di sisi jalan tol pesisir utara Pulau Jawa yang menghubungkan kota Jakarta dengan kota-kota besar lain di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kawasan Lippo Cikarang telah memiliki akses langsung melalui pintu tol Cibatu KM 34,7 ruas tol Jakarta–Cikampek dan merupakan salah satu kawasan industri dan hunian yang dekat dengan kawasan sentral bisnis di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam lebih dari dua dekade perjalanan bisnisnya, Perseroan telah mengembangkan lebih dari 3.000 hektar lahan yang dimilikinya menjadi Kota Mandiri dengan kawasan industri sebagai basis ekonomi yang kuat. Sekitar 582.307 orang bekerja di kurang lebih 1.399 industri manufaktur di Kawasan Industri Lippo Cikarang yang bebas polusi. Perseroan telah berhasil membangun lebih dari 17.192 rumah dan 12 menara apartemen yang ramah lingkungan, dilengkapi dengan fasilitas 2 mal, 21 sekolah termasuk sekolah internasional, 3 rumah sakit berkelas dan 5 hotel berbintang 5 dan 3.

Lippo Cikarang is located in the golden triangle area of the Cikarang Industrial Estate in the East of Jakarta Corridor, which accounts for around 60 percent of all manufacturing production in Indonesia. This location is one of the most strategic locations because it is situated right on the side of the north coast toll road of the island of Java that connects the city of Jakarta with other major cities in West Java and Central Java. The Lippo Cikarang area has direct access through the Cibatu toll gate KM 34.7 of Jakarta–Cikampek toll road and is one of the industrial and residential areas close to the central business district in Jakarta and the Port of Tanjung Priok.

In more than two decades of its business journey, the Company has developed more than 3,000 hectares of its landbank into a Township with an industrial area as a strong economy base. Around 582,307 people work at some 1,399 manufacturing industries in the pollution-free Lippo Cikarang Industrial Estate. The Company has succeeded in developing more than 17,192 houses and 12 apartment towers that are environmentally friendly, and are equipped with facilities such as 2 malls, 21 schools including international schools, 3 premium hospitals and five 5-and 3-star hotels.

PERJALANAN KAMI
Our Journey

1987
Cikal-bakal Lippo Cikarang, PT Desa Dekalb didirikan di Jakarta. Bidang usaha: perdagangan, industri, percetakan, pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pengangkutan, pergudangan, perhutanan, dan pemasokan aneka barang.
The forerunner of Lippo Cikarang, PT Desa Dekalb was established in Jakarta, with line of business such as trading, industry, printing, mining, transportation, warehousing, forestry, and supplier of various commodities.

1997
- Status Lippo Cikarang diubah dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Bidang usaha: *real estate*, *industrial estate* dan pengembang perkotaan.
- Juni: Penawaran Umum Perdana 108.588.000 saham dengan harga Rp925 per saham. Dengan nilai nominal Rp500 per saham.
- 24 Juli 1997, 696 juta saham Lippo Cikarang dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kedua bursa telah dimerger menjadi Bursa Efek Indonesia).
- Lippo Cikarang changed its status from private company to public company, with line of business: real estate, industrial estate and township developers.
- June: Initial Public Offering of 108,588,000 common shares at a price of Rp925 per share with nominal value of Rp500 per share.
- July 24, 1997, Lippo Cikarang listed 696 million shares and began trading on the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange (both were merged into the Indonesia Stock Exchange).

2009
- Pengembangan Pembangunan Lippo Cikarang Citywalk.
- Pembangunan pusat olahraga, Sport Village di kawasan Elysium Residence.
- Pengembangan kawasan industri Delta Silicon 5.
- The construction of Lippo Cikarang Citywalk.
- The construction of Sport Village at the Elysium Residence.
- The construction of Delta Silicon 5 industrial estate.

2010
- Pencatatan tertinggi harga saham Lippo Cikarang mencapai Rp3.800 dengan nilai nominal Rp500 per saham.
- Grand Preview Trivium Terrace Apartments.
- Perseroan menerima penghargaan dari majalah Investor dan majalah Forbes Indonesia.
- Peluncuran residensial klaster Vassa Terrace, Le Vesta, Emerald Mansion.
- Highest recorded share price of Lippo Cikarang reached Rp3,800 with share at par valued Rp500 per share.
- Grand preview of Trivium Terrace Apartments.
- The Company received Award from Investor and Forbes Indonesian Magazine.
- Launching of Vassa Terrace, Le Vesta, Emerald Mansion residential cluster.

2011
- Mulai pembangunan akses jalan tol dan pintu keluar di KM 34,7.
- Pencatatan tertinggi dalam Tingkat hunian tempat tinggal.
- Peningkatan penjualan dan penyewaan unit-unit komersial sebesar 80%.
- Kenaikan harga tanah di kawasan industri.
- Start construction of KM 34.7 toll exit and access road.
- Highest recorded residential occupancy rate.
- 80% increase in sales/rental for commercial unit.
- Hiked land value for industrial estate.

2012
- Peluncuran klaster Le Jardin di kawasan Elysium Residence, Acacia Garden dan Easton Commercial Centre.
- Lippo Cikarang membangun gedung kantor baru di Easton Commercial Centre.
- Launched Le Jardin cluster at the Elysium Residence, Acacia Garden, and Easton Commercial Centre.
- Lippo Cikarang built its new office building at Easton Commercial Centre.

2015

- Peletakan batu pertama Globally Connected City "Orange County".
- Hari pertama sekolah Hikari Japanese School.
- Lippo-Mitsubishi menandatangani Perjanjian Joint Venture pengembangan menara Residensial di Orange County Lippo Cikarang.
- Perseroan memperoleh penghargaan " Best of The Best Company 2015" dari majalah Forbes Indonesia.
- Groundbreaking Globally Connected City "Orange County".
- First day school of Hikari Japanese School.
- Lippo-Mitsubishi signed a Joint Venture Agreement Residential tower development in Orange County Lippo Cikarang.
- The Company was awarded " Best of the Best Company 2015" by Forbes Indonesia magazine.

2018

- Menerima penghargaan Properti Indonesia Award 2018 kategori The Prospective Housing Concept in Cikarang.
- Meresmikan Masjid Pertama yang dikelola sendiri sebagai bagian dari CSR.
- Serah terima dua *tower* Orange County yaitu Tower Irvine dan Tower Westwood.
- Received the 2018 Property Indonesia Award for the category of The Prospective Housing Concept in Cikarang.
- Inaugurated the First Self-managed Mosque as part of CSR.
- Hand over of two Orange County towers, namely Irvine Tower and Westwood Tower.

2019

- *Topping-off* Tower Glendale dan Newport Park Orange County.
- Penawaran Umum Terbatas I dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 1.983.600.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu)saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham ("Saham Baru").
- Serah terima unit Glendale Park Orange County.
- Topping-off the Glendale and Newport Park, Orange County Tower
- Limited Public Offering I by issuing Pre-emptive Rights ("HMETD") of 1,983,600,000 (one billion nine hundred eighty three million six hundred thousand) ordinary shares on behalf of a nominal value of Rp500,-(five hundred Rupiah) per share ("New Shares")
- Handover of the Glendale Park Orange County Tower unit.

- **Peluncuran Waterfront Estates Residensial Klaster Riverside dan Silvercreek.**
  Launch of the Riverside and Silvercreek Cluster Waterfront Estates Residential.
- **Grand Opening Waterfront Estates Residensial Klaster Travertine.**
  Grand Opening Waterfront Estates Residential Travertine Cluster.

KEGIATAN USAHA
Line of Business

PRODUK DAN JASA
Product and Services

RESIDENSIAL
RESIDENTIAL

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

KOMERSIAL
COMMERCIAL

PENGELOLAAN KOTA
TOWN MANAGEMENT SERVICES

Kegiatan Usaha Perseroan Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 38 tetanggal 18 April 2019 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang Real Estat; Kawasan Industri; Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; Konstruksi; Pengangkutan; Perdagangan; Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi; Aktivitas Ketenagakerjaan dan Penunjang Usaha Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. menjalankan usaha-usaha di bidang Real Estat, termasuk namun tidak terbatas pada:
      i. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, yaitu meliputi usaha Pembangunan, Pembelian, Penjualan, Persewaan dan Pengoperasian Real Estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan, pribadi, mall, pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, perhotelan, pusat sarana olah raga, dan saran penunjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub, restoran, tempat hiburan, laboratorium medik, apotek, beserta fasilitasnya, gedung perkantoran, penyelenggaraan perparkiran, sarana penunjang dan

The Company's Business Activities under Article 3 Deed No. 38 dated April 18, 2019, made before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Engineer, Bachelor of Law, Notary in Jakarta include:

1. The Company's goals and objectives are to engage in the field of Real Estate; Industrial Estates; Professional, Scientific and Technical Activities; Construction; Transportation; Trading; Water Management, Waste Water Management; Waste Management and Recycling; Remediation Activities; Employment Activities and Other Business Activities.
2. To achieve the above mentioned goals and objectives, the Company performed the following business activities:
   a. Conducting business activities in the field of Real Estate, including but not limited to:
      i. Self-Owned or Leased Real Estate, which covers the construction, purchase, sale, lease and operation of real estate, such as apartment buildings, residential buildings and non-residential buildings (including exhibition spaces, storage facilities, private buildings, malls, shopping centers, hospitals, conference halls, houses of worship, hotels, sports centers, golf courses, clubs, restaurants, entertainment venues, medical laboratories, pharmacies, office buildings and parking lots) and the provision of houses and flats or apartments with or without furniture for monthly or annual

lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, perdagangan real estat (meliputi penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung rumah sakit, gedung pusat perbelanjaan, gedung hotel, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dalam perusahaan lain sehubungan dengan kegiatan real estat, pengembangan perkotaan, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kavling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

ii. Kawasan Industri, yaitu perusahaan yang menguasai lahan sekurang–kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan/atau menguasai lahan. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 hektar dalam satu hamparan.

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, termasuk namun tidak terbatas pada Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yaitu meliputi ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

use. This area also includes land sales, real estate trading (including the sale and purchase of residential buildings, office buildings, hospital buildings, shopping centers, hotel buildings, apartment units, condominiums, office spaces and shopping centers), both directly or indirectly through the inclusion (investment) or release (divestment) of capital in other companies in connection with real estate activities, urban development, development of buildings for self-operation (for leasing spaces in the building), the division of real estate into plots of land without land development and operation of residential areas for movable housing.

ii. Industrial Estate, which is activities related to the control of a minimum 50 (fifty) hectares of land in an area used for industrial activities that is equipped with supporting facilities and infrastructure developed, and/or controls the land. This includes the exploitation of Industrial Estate land for Micro, Small and Medium-Sized Enterprises, a minimum of 5 hectares in one location.

b. Conducting business activities in the fields of Professional, Scientific and Technical Activities, including but not limited to Management Consultancy Activities, which include provision of advice, business guidance and operational assistance, as well as other organizational and management activities, such as strategic and organizational planning; financial decision making; marketing activities and policies; human resource planning, policies; production scheduling and control planning. The provision of these business services can include advisory assistance, guidance and operational management, management consultancy by agronomist and agricultural economist, development of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, provision of advice and assistance for business and community services in planning, organizing and supervision, as well as information management.

3. To achieve the above goals and objectives, and to support its main business activities, the Company carries out the following activities:

a. menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi, termasuk namun tidak terbatas pada:
   i. Konstruksi Gedung Lainnya, yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
   ii. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.
   iii. Konstruksi Gedung Perkantoran, yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
   iv. Konstruksi Gedung Perbelanjaan, yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.
b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada Angkutan Bus Bertrayek Lainnya, yaitu meliputi usaha pengangkutan penumpang yang menggunakan bus bertrayek lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pengoperasian *shuttle bus*.
c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi, termasuk namun tidak terbatas pada:
   i. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, yaitu meliputi usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangka (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.

a. Conducting activities in the field of Construction, including but not limited to:
   i. Building Construction, which covers the construction of buildings used as places of worship, terminals/stations, monumental buildings, airport buildings, warehouses and others. This areas also includes other building modification and renovation activities.
   ii. Residential Building Construction, which covers the construction of buildings used as dwellings, such as residential houses, apartments and condominiums. This area includes the construction of buildings for dwellings carried out by real estate companies and activities to modify and renovate residential buildings.
   iii. Office Building Construction, which covers the business of constructing buildings used as offices, such as office houses (offices). This area includes the construction of buildings by real estate companies and activities to modify and renovate office buildings.
   iv. Shopping Building Construction, which covers construction of building such as malls, department stores, shop houses and stalls. This area includes the construction of shop houses carried out by real estate companies and activities to modify and renovate shopping buildings.
b. Carrying out business in the field of Transportation, including but not limited to Other Scheduled Bus Route, which includes transportation of passengers using transport buses that are not classified elsewhere, such as operating shuttle buses.
c. Conducting business in the areas of Water Management, Waste Water Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities, including but not limited to:
   i. Collection, Purification and Distribution of Drinking Water, which includes the business of taking water directly from springs and ground water, purifying it and distributing it as drinking water from water terminals through pipelines and water tankers (with the water tankers still under the administrative management of the water company) to be sold to consumers, such as households, government agencies/institutions, social agencies, state-owned enterprises, and private companies/businesses including hotels, processing plants and shops.

ii. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.

iii. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).

iv Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, container sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.

d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Ketenagakerjaan dan Penunjang Usaha Lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Aktivitas Keamanan Swasta, yaitu meliputi usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan.

ii. Management and Disposal of Non-Hazardous Wastewater, which includes the operation of sewage systems or non-hazardous wastewater treatment facilities; treatment of non-hazardous wastewater (including industrial and household wastewater, water from swimming pools, etc.) through physical, chemical and biological processes such as dilution, filtering and sedimentation. This area also includes the management and cleaning of non-hazardous sewerage.

iii. Collection of Non-Hazardous Wastewater, which includes collection and transportation of industrial wastewater, or non-hazardous household wastewater, through the sewerage network and waste water collection, as well as other transportation facilities (sewage transport vehicles). This area also includes the desludging and cleaning of septic tanks (pit latrines), tanks and sewerage pits; and waste water collection from chemical toilets (eg portable toilets, airplane toilets and train toilets).

iv. Collection of non-hazardous waste, which includes the collection of non-hazardous solid waste. For example, the collection of household and business waste including a mixture of recyclable materials, used cooking oil and grease using bins, wheeled bins and garbage containers, as well as the collection of rubbish from bins in public places. This area also includes the collection and cleaning of debris after demolition of buildings, the collection of rubbish from textile factories and the operation of garbage removal posts for non-hazardous waste.

d. Conducting business activities in the field of Manpower and Business Support, including but not limited to Private Security Activities such as business services for investigation, supervision and guarding to ensure personal safety and protect property. This area includes patrolling activities, such as provision of guards for individuals carrying valuables; road patrols; guarding buildings, offices, factories and hotels; and investigations of fingerprints, signatures and handwriting.

STRUKTUR ORGANISASI
Organization Structure

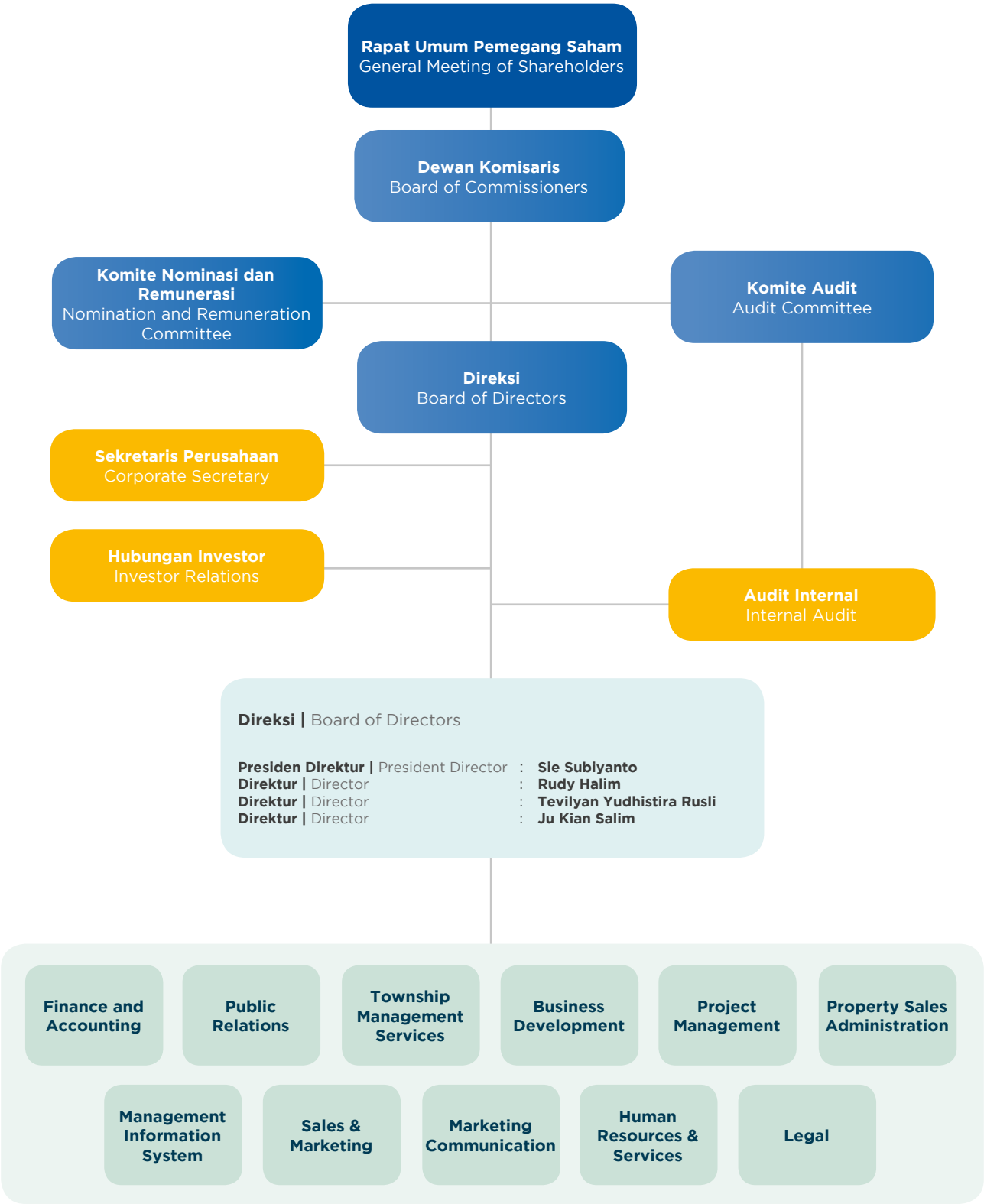

VISI DAN MISI
Vision and Mission

VISION

Membangun kawasan perkotaan yang lengkap dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tinggal, bekerja dan gaya hidup.

To build comprehensive urban area and create conducive environment for living, working and lifestyle.

MISSION

Menjadi pengembang kawasan perkotaan berbasis industri, komersial dan residensial terkemuka di Indonesia, melalui investasi di bidang infrastruktur, fasilitas publik dan perangkat manajemen perkotaan, untuk mempertahankan pangsa pasar, nilai tambah, marjin tinggi dan daya saing yang kuat dalam bisnis.

To become an industry-leading residential, commercial and urban residential developer in Indonesia, through infrastructure, public facilities and urban management apparatus investments, to maintain market share, added value, high margins and strong business competitiveness.

NILAI PERUSAHAAN
Corporate Values

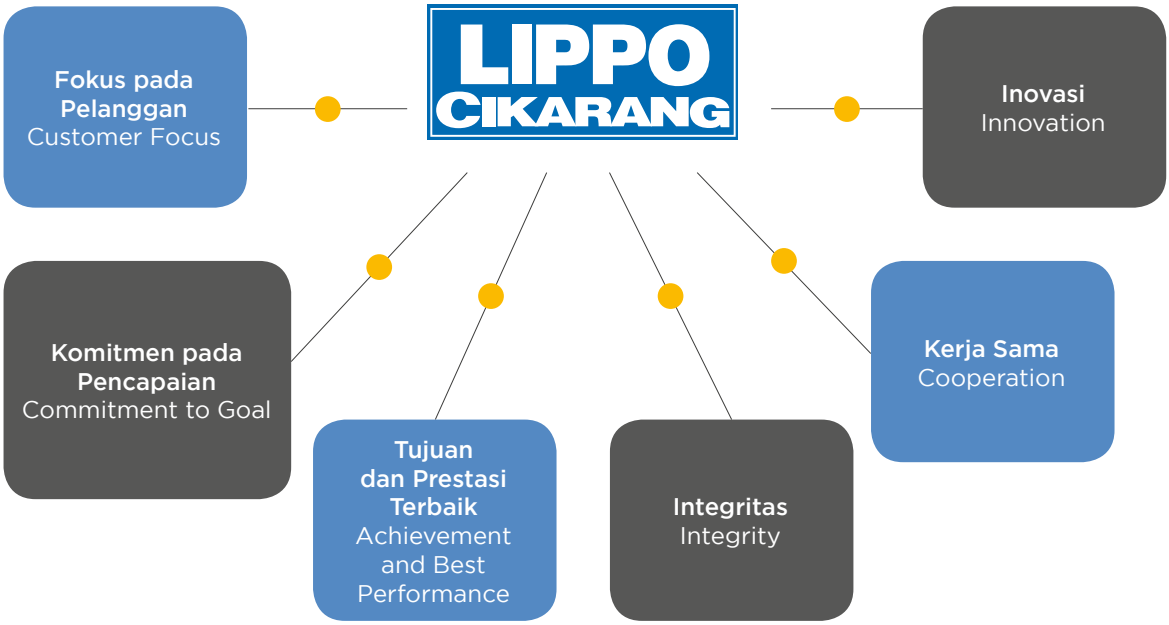

BUDAYA PERUSAHAAN
Corporate Culture

Dengan tatanan nilai yang senantiasa ditanamkan ke seluruh aktivitas sehari-hari, Perseroan berupaya untuk menanamkan nilai-nilai Perseroan agar membudaya dalam sikap, karakter dan etika dalam bekerja. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang sama, Perseroan dapat mempertahankan reputasinya sebagai salah satu perusahaan ternama yang bergerak dalam bisnis pengembangan properti perumahan, komersial dan industri.

The Company has taken efforts to develop and socialize a corporate culture appropriate to its businesses. As a Company involved in the development of residential, commercial and industrial properties, as well as a service provider to those same customers the need to have all employees consistently follow the Company's corporate values is important.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholders Composition

Komposisi Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih
Composition of Shareholders with 5% or More

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
1.	PT Kemuning Satiatama	2.165.811.178	80,83%
2.	Masyarakat | Public	513.788.822	19,17%
	TOTAL | Total		**100,00%**

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat yang Memiliki Lebih Kecil dari 5%
Composition of Public Shareholders with Less than 5%

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
1.	Individu Lokal | Domestic Individual	244.925.625	9,14%
2.	Individu Asing | Foreign Individual	5.890.100	0,22%
3.	Institusi Lokal | Domestic Institution	2.283.805.809	85,25%
4.	Institusi Asing | Foreign Institution	144.978.466	5,41%
	TOTAL | Total	**2.679.600.000**	**100,00%**

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Pemilik
Shareholders Composition Based on Ownership

No.	Status Pemilik Ownership Status	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
Pemodal Nasional | Domestic Investor			
1.	Perorangan | Individual	262.941.625	9,81%
2.	Yayasan | Foundation	12.500	0,00%
3.	Dana Pensiun | Pension Fund	699.700	0,03%
4	Asuransi | Insurance	1.717.900	0,06%
5	Perseroan | Corporation	2.312.744.917	86,31%
6	Lain-lain | Others	1.360.300	0,05%
	Sub Total	2.579.476.942	96,26%
Pemodal Asing | Foreign Investor			
1.	Perorangan | Individual	6.898.000	0,26%
2.	Badan Usaha | Business Entity	93.225.058	3,48%
3.	Lain-lain | Others	0	0,00%
	Sub Total	100.123.058	3,74%
	TOTAL	**2.679.600.000**	**100,00%**

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2020

Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2020

Tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham atas Perseroan.

There are no members of the Board of Commissioners and Board of Directors who own shares in the Company.

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM DAN STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Shareholders and Company Group Structure

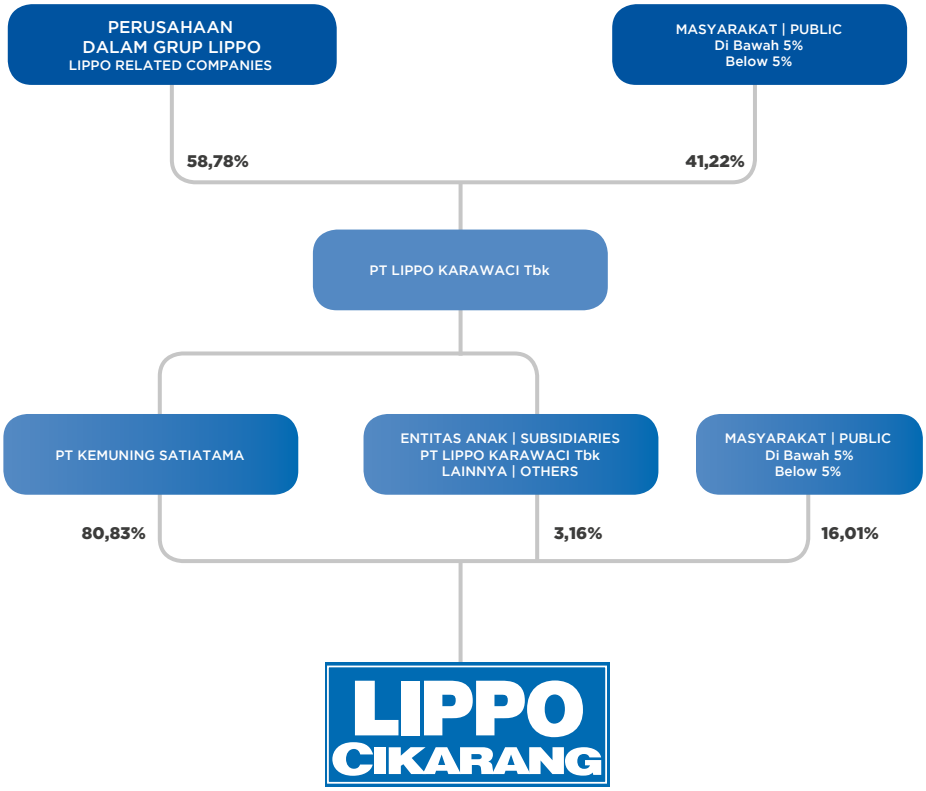

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Main and Controlling Shareholders Structure

Per 31 Desember 2020, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan adalah PT Kemuning Satiatama (80,83%) dan penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham adalah James T. Riady.

As of December 31, 2020, the main and controlling shareholder of the Company is PT Kemuning Setiatama (80,83%) and the Ultimate Beneficial Ownership is Mr. James T. Riady.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM
Shares Listing Chronology

Saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

The Company's shares are listed on the Indonesia Stock Exchange.

Tanggal Date	Keterangan Description	Nominal Saham (Rp) Nominal Shares (Rp)	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Saham Beredar Number of Shares Circulated	Bursa Stock Exchange
27 Juni 2019 June 27, 2019	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	500	1.983.600.000	2.679.600.000	Bursa Efek Indonesia (BEI) Indonesia Stock Exchange
24 Juli 1997 July 24, 1997	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	500	108.588.000	696.000.000	Bursa Efek Indonesia (BEI) Indonesia Stock Exchange
24 Juli 1997 July 24, 1997	Pencatatan Seluruh Saham Listing of All Shares	100	587.412.000	587.412.000	Bursa Efek Indonesia (BEI) Indonesia Stock Exchange

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA
Other Securities Listing Chronology

Perseroan tidak melakukan pencatatan efek lainnya per 31 Desember 2020.

The Company did not record other securities as of December 31, 2020.

INFORMASI ENTITAS ANAK
Subsidiary Information

No.	Entitas Anak Subsidiary	Domisili Domicile	Kegiatan Usaha Utama Main Business	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage		Tahun Awal Beroperasi Year of Starting Operations	Jumlah Aset (Rp juta) Total Assets (Rp million)
				Langsung Direct	Tidak Langsung Indirect		
1.	PT Great Jakarta Inti Development dan/and Entitas Anak/Subsidiaries	Bekasi	Pengelolaan Kota dan Real Estat/ Estate Management and Real Estate	99,99%	0,01%	1992	593.408
2.	PT Tirta Sari Nirmala dan/and Entitas Anak/Subsidiaries	Bekasi	Pengelolaan Air Bersih dan Limbah/ Clean and Waste Water Management	99,99%	0,01%	2011	252.392
	PT Tunas Pundibumi	Bekasi	Pengelolaan Kota/Estate Management	25,00%	75,00%	2010	194.174
3.	PT Sinar Surya Timur	Bekasi	Perdagangan, Pembangunan dan Jasa/ Trading, Development and Services	99,99%	0,01%	2007	77.825
4.	PT Waska Sentana	Bekasi	Real Estat/Real Estate	75,00%	25,00%	2014	628.938
5.	PT Swadaya Teknopolis dan/and Entitas Anak/Subsidiaries	Bekasi	Real Estat/Real Estate	99,99%	0,01%	2015	321.836
	Premium Venture International Ltd dan/and Entitas Anak/Subsidiary	British Virgin Island	Investasi/Investment	-	100,00%	2015	321.761
	Intellitop Finance Ltd	British Virgin Island	Investasi/Investment	-	51,72%	2015	320.790
6.	PT Cahaya Ina Permai dan/and Entitas Anak/Subsidiaries	Bekasi	Real Estat/Real Estate	75,00%	25,00%	-	580.155
	PT Astana Artha Mas	Bekasi	Real Estat/Real Estate	-	100,00%	-	67.432
	PT Megakreasi Cikarang Damai	Bekasi	Real Estat/Real Estate	-	100,00%	2015	258.623
	PT Megakreasi Cikarang Asri dan/and Entitas Anak/Subsidiary	Bekasi	Real Estat/Real Estate	-	75,00%	-	83.524
	PT Megakreasi Propertindo Utama	Bekasi	Real Estat/Real Estate	-	75,00%	-	83.434
7.	PT Megakreasi Cikarang Permai dan/and Entitas Anak/Subsidiary	Bekasi	Real Estat/Real Estate	99,92%	0,08	2015	810.961
	PT Lippo Diamond Development	Bekasi	Real Estat/Real Estate	-	51,00%	2015	806.506

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

Capital Market Support Institutions

Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. : (62 21) 1515 0515
Fax. : (62 21) 515 0330
E-mail : callcenter@idx.co.id
Website : www.idx.co.id

Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
AAJ Associates
Plaza ABDA Lt. 10 & 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. : (62 21) 5140 1340
Website : www.rsm.aajassociates.com
Jasa yang diberikan: jasa audit laporan keuangan
Periode Penugasan: 2020

Biro Administrasi Efek
PT Sharestar Indonesia
Berita Satu Plaza Lt. 7
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950, Indonesia
Tel. : (62 21) 527 7966
Fax. : (62 21) 527 7967
Jasa yang diberikan: biro administrasi efek
Periode Penugasan: 2020

Notaris
Lucy Octavia Siregar, SH., Sp.N
Jababeka Central Business District
Ruko Pavillion Jl. Industri Utara IV Blok SS No. 12
Cikarang Baru, Kota Jababeka-Cikarang 17550
Tel. : 021-8984 0652
Fax. : 021-7076 1181

Indonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. : (62 21) 1515 0515
Fax. : (62 21) 515 0330
E-mail : callcenter@idx.co.id
Website : www.idx.co.id

Public Accounting Firm
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
AAJ Associates
Plaza ABDA 10th & 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. : (62 21) 5140 1340
Website : www.rsm.aajassociates.com
Services provided: financial statement audit services
Assignment Period: 2020

Share Administration Bureau
PT Sharestar Indonesia
Berita Satu Plaza 7th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950, Indonesia
Tel. : (62 21) 527 7966
Fax. : (62 21) 527 7967
Services provided: securities administration bureau
Assignment Period: 2020

Notary
Lucy Octavia Siregar, SH., Sp.N
Jababeka Central Business District
Ruko Pavillion Jl. Industri Utara IV Blok SS No. 12
Cikarang Baru, Kota Jababeka-Cikarang 17550
Tel. : 021-8984 0652
Fax. : 021-7076 1181

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certification

1. **Online Zoom, 19 Agustus |** August 19
   The Most Valuable Company Award 2020–Kategori Best 5-Months Stock Performance, diberikan oleh Warta Ekonomi.

   The Most Valuable Company Award 2020–Best 5-Months Stock Performance Category, awarded by Warta Ekonomi.

2. **Online Zoom, 2 September |** September 2
   Anugerah Inovasi Indonesia 2020–Kategori Inovasi Orange County, diberikan oleh IDX Channel.

   Anugerah Inovasi Indonesia 2020–Orange County Innovation Category, awarded by IDX Channel.

3. **Hotel Indonesia Kempinski, 21 Oktober |** October 21
   Nusantara CSR Awards 2020-Kategori Bantuan Kesehatan dan Ekonomi untuk Penanganan Darurat COVID-19 Program Lippo Cikarang Semangat Berbagi di Tengah Pandemi, diberikan oleh The La Tofi School of CSR.

   Nusantara CSR Awards 2020-Health and Economic Assistance for Emergency Management of COVID-19 Lippo Cikarang Program Spirit of Sharing in the middle of a Pandemic, awarded by The La Tofi School of CSR.

4. **Online Streaming, 5 November |** November 5
   Indonesia Property Awards 2020-WINNER of the Best Housing Interior Design for Waterfront Estates by PT Lippo Cikarang Tbk, diberikan oleh PropertyGuru.

   Indonesia Property Awards 2020-WINNER of the Best Housing Interior Design for Waterfront Estates by PT Lippo Cikarang Tbk, awarded by PropertyGuru.

5. **Online Streaming, 5 November |** November 5
   Indonesia Property Awards 2020-WINNER of the Best Condo Development (Greater Jakarta) for Orange County by Lippo Group, diberikan oleh PropertyGuru.

   Indonesia Property Awards 2020-WINNER of the Best Condo Development (Greater Jakarta) for Orange County by Lippo Group, awarded by PropertyGuru.

6. **Online Streaming, 5 November |** November 5
   Indonesia Property Awards 2020-HIGHLY COMMENDED of the Best Housing Architectural Design for Waterfront Estates by PT Lippo Cikarang Tbk, diberikan oleh PropertyGuru.

   Indonesia Property Awards 2020-HIGHLY COMMENDED of the Best Housing Architectural Design for Waterfront Estates by PT Lippo Cikarang Tbk, awarded by PropertyGuru.

7. **Online Streaming, 5 November |** November 5
   Indonesia Property Awards 2020-HIGHLY COMMENDED of the Best Housing Landscape Architectural Design for Waterfront Estates by PT Lippo Cikarang Tbk, diberikan oleh PropertyGuru.

   Indonesia Property Awards 2020-HIGHLY COMMENDED of the Best Housing Landscape Architectural Design for Waterfront Estates by PT Lippo Cikarang Tbk, awarded by PropertyGuru.

8. **Online Streaming, 5 November |** November 5
   Indonesia Property Awards 2020-HIGHLY COMMENDED of the Best Mixed Use Architectural Design for Orange County by Lippo Group, diberikan oleh PropertyGuru.

   Indonesia Property Awards 2020-HIGHLY COMMENDED of the Best Mixed Use Architectural Design for Orange County by Lippo Group, awarded by PropertyGuru.

9. **Online Streaming, 5 November |** November 5
   Indonesia Property Awards 2020-WINNER of the Best Condo Development (Indonesia) for Orange County by Lippo Group, diberikan oleh PropertyGuru.

   Indonesia Property Awards 2020-WINNER of the Best Condo Development (Indonesia) for Orange County by Lippo Group, awarded by PropertyGuru.

10. **Holiday Inn, 17 Desember |** December 17
    Penghargaan Pemerintah Kabupaten Bekasi atas Partisipasi Aktif Dalam Kegiatan CSR di Kabupaten Bekasi 2020, diberikan Oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    Bekasi Regency Government Award for Active Participation in CSR Activities in Bekasi Regency 2020, awarded by Bekasi Regency Government.

INFORMASI KANTOR CABANG/PERWAKILAN

Branch/Representative Office Information

Perseroan tidak memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan per 31 Desember 2020.

The Company does not have a branch office or representative office as of December 31, 2020.

SITUS *WEB* PERUSAHAAN

Company Website

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku termasuk POJK No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015, Perseroan secara rutin mempublikasikan informasi terkini melalui situs resminya yaitu www.lippo-cikarang.com. Situs resmi Perseroan sekurang-kurangnya telah memuat informasi-informasi di bawah ini:

1. Informasi Umum Perusahaan Publik
2. Informasi bagi Pemodal
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan

Situs *web* Perseroan tersedia dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris demi kenyamanan pengguna. Pengumuman Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material yang disampaikan Perseroan ke Publik dapat diakses melalui http://www.lippocikarang.com/corporate/#corporate-governance.

To comply with the regulations including POJK No. 8/POJK.04/2015 dated June 25, 2015, the Company regularly publishes the latest information through its official website, namely www.lippo-cikarang.com. The Company's official website contains at least the following information:

1. General Information of the Company
2. Information for Investors
3. Information on Corporate Governance
4. Information on Corporate Social Responsibility.

The Company's website is available in two languages, namely Indonesian and English for the convenience of users. Announcement of Disclosure of Material Information or Facts submitted by the Company to the public can be accessed through http://www.lippocikarang.com/corporate/#corporate-governance.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operational Review per Business Segment

Residensial
Residential

Divisi Residensial merupakan pemimpin pasar perumahan dan apartemen kelas menengah atas di Koridor Timur Jakarta dengan pangsa pasar lebih dari 50%. Dengan konsep ramah lingkungan dan berbagai fitur cerdas yang didukung teknologi modern, menjadikan hunian di Kawasan Lippo Cikarang sebagai preferensi utama untuk bertempat tinggal, bekerja, dan membangun *lifestyle* di Koridor Timur Jakarta.

Pada 2020, Perseroan meluncurkan 3 (tiga) klaster di Waterfront Estates (900 unit), yaitu Riverside dan Silvercreek pada Maret 2020, serta Travertine (*pre-selection unit*) pada Juli 2020 dengan harga unit mulai dari Rp488 juta hingga Rp998 juta.

Orange County

Perseroan terus melanjutkan pembangunan fasilitas di Orange County, dan menghadirkan sejumlah *tenant* untuk menambah kenyamanan dan memenuhi gaya hidup penghuni di Orange County dan Lippo Cikarang secara keseluruhan, di antaranya Maxx Coffee, Alfamart, Akazora Interior Design, fasilitas *laundry*, dan mesin ATM, serta melengkapi fitur *smart home* di Tower Glendale dengan retina *access*.

The Residential Division is the leader in the upper-middle class housing and apartment market in the East Jakarta Corridor with a market share of over 50%. With an environmentally friendly concept and various smart technologies, housing in the Lippo Cikarang area has become the primary reference point for living, working, and building a comfortable lifestyle in the Eastern Jakarta Corridor.

In 2020, the Company launched 3 (three) new clusters at the Waterfront Estates (900 units), namely the Riverside and Silvercreek in March 2020 and the Travertine (pre-selection units) in July 2020, with unit process ranging from Rp488 million to Rp998 million.

Orange County

The Company continues to build facilities in Orange County, and presents a number of tenants to increase comfort and meet the lifestyle of residents in Orange County and Lippo Cikarang as a whole, including Maxx Coffee, Alfamart, Akazora Interior Design, laundry facilities, and ATM machines, as well as complementing features smart home at Glendale Tower that uses retina access.

Industrial
Industrial

Perseroan membangun beragam infrastruktur yang prima di kawasan industrinya. Sistem air bersih, pengelolaan limbah dan sistem telekomunikasi telah tersedia untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri ringan. Sepanjang 2020, Perseroan terus meningkatkan tingkat keamanan kawasan industrial adalah dengan menambah titik pemasangan CCTV di lokasi-lokasi tertentu yang dianggap cukup rawan. Selain itu, Perseroan juga memiliki *Call Center* yang beroperasi selama 24 jam setiap hari. Perseroan juga melakukan pengembangan Era Baru Industrial Park dengan luas lahan sekitar 68,8 hektar.

Lippo Cikarang has built a number of different types of infrastructure in its industrial areas. The Company has constructed roads to reduce traffic. It has also provided clean water systems, waste management systems, and telecommunication systems to support the growth of the light industrial area. Throughout 2020, the Company has improved the security of its industrial estates by installing additional CCTVs in certain locations considered vulnerable, in addition to the Company's call center that operates 24/7. The Company also developed the New Era Industrial Park in an area of approximately 68.8 hectares.

Komersial
Commercial

Divisi Komersial membangun kawasan perkotaan yang lengkap dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tinggal, bekerja dan membangun *lifestyle* dengan menyediakan pusat perbelanjaan, *showroom*, dan ruang ritel. Untuk mendukung penjualan perumahan tapak yang terjangkau di Waterfront Estates, Perseroan meningkatkan penjualan produk komersial. Selain itu, Perseroan juga meluncurkan produk komersial baru untuk menciptakan basis ekonomi baru agar dapat menumbuhkan jumlah penduduk.

The Commercial Division focuses on building shopping centers, showrooms, and retail spaces in urban areas to create a comfortable environment for living, working and building a lifestyle through the provision of shopping centers, showrooms and retail spaces. To support the sales of affordable landed housing at the Waterfront Estates, the Company promoted the sale of commercial products. The launch of new commercial products by the Company is also intended to create new economic bases in order to attract new residents.

Pengelolaan Kota
Town Management Services

Segmen usaha pengelolaan kota meliputi pengelolaan infrastruktur, perawatan lingkungan, layanan keamanan, kebersihan lingkungan, utilitas, penerangan umum, kebutuhan air bersih dan pengelolaan air limbah industri. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan rutin untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penghuni dan pengunjung.

Pada 2020, Perseroan terus melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan setiap bulan terhadap kualitas air limbah tenant industri. Pelaksanaan pengujian air limbah bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan tersertifikasi EJIP Laboratory (E-lab). Selain itu, Perseroan telah mematuhi PP No. 24 Tahun 2018 terkait persetujuan dokumen lingkungan tenant industri dan area komersial oleh Pengelola Kawasan serta melakukan pemasangan sparing sebagai alat *monitoring* kualitas air limbah yang disalurkan kembali ke badan air sesuai Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup.

The Town Management Services (TMS) Division is responsible for providing infrastructure management, environment maintenance, security services, neighborhood sanitation, utilities, public lighting, clean water for residents, and industrial waste water treatment. These routine activities are intended to provide greater safety and comfort for residents and visitors.

In 2020, the Company continues to carry out monthly environmental quality monitoring of wastewater quality from industrial tenants. The wastewater testing is undertaken in collaboration with an EJIP Laboratory (E-lab) certified Environmental Laboratory. In addition, the Company has also complied with PP. 24/2018 regarding the approval of industrial and commercial area tenant environmental documents by the Estate Management as well as the installation of sparing as a means of monitoring the quality of waste water that is channeled back to the water body in accordance with the Ministry of Environment Regulation.

Pendapatan Usaha dan Profitabilitas / **Operating Revenues and Profitability**

Struktur Bisnis/Tahun	2020 Rp miliar | Rp billion	2019 Rp miliar | Rp billion	Persentase Percentage (%)	Business Segment/Year
Residensial				**Residential**
Pendapatan Usaha	1.265,4	825,1	53,4%	Operating Revenues
Laba Kotor	421,7	322,7	30,7%	Gross Profit
Industri				**Industrial**
Pendapatan Usaha	129,8	366,9	(64,6%)	Operating Revenues
Laba Kotor	71,7	155,0	(53,7%)	Gross Profit
Komersial				**Commercial**
Pendapatan Usaha	65,9	134,5	(51,5%)	Operating Revenues
Laba Kotor	54,7	50,1	9,2%	Gross Profit
Pengelolaan Kota				**Town Management Service**
Pendapatan Usaha	324,9	338,6	(4,0%)	Operating Revenues
Laba Kotor	124,7	132,1	(5,6%)	Gross Profit

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

Analisis kinerja keuangan Perseroan di bawah ini mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material.

The following analysis of the Company's financial performance refers to the Company's Consolidated Financial Statements for the 2020 fiscal year, which was prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) and was audited by KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto. The Company's Consolidated Financial Statements for 2020 were presented fairly in all material respects.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

Pada akhir 2020, Perseroan membukukan total aset sebesar Rp9,7 triliun, menurun sebesar 20,46% dari tahun 2019 yakni sebesar Rp12,2 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan investasi pada entitas asosiasi dan investasi dana infrastruktur.

Aset Lancar

Aset lancar Perseroan tercatat sebesar Rp6,8 triliun pada 2020, meningkat sebesar 7,27% dari tahun 2019 yakni sebesar Rp6,3 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai persediaan.

Aset Tidak Lancar

Pada 2020, aset tidak lancar Perseroan tercatat sebesar Rp3,0 triliun, menurun sebesar 49,95% dari Rp5,9 triliun pada 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan investasi pada entitas asosiasi dan investasi pada dana investasi infrastruktur.

Liabilitas

Perseroan membukukan total liabilitas sebesar Rp3,1 triliun pada 31 Desember 2020, meningkat sebesar 134,94% dari Rp1,3 triliun pada 2019. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan utang bank dan uang muka pelanggan.

Liabilitas Jangka Pendek

Perseroan mencatatkan terjadinya kenaikan atas liabilitas jangka pendek, yaitu dari Rp950,8 miliar pada 2019 menjadi Rp2.158,1 miliar pada 2020, yang disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek dan uang muka pelanggan (liabilitas kontrak).

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 2020, liabilitas jangka panjang Perseroan tercatat sebesar Rp982,3 miliar, meningkat sebesar 154,54% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu Rp385,9 miliar yang disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang dan uang muka pelanggan (liabilitas kontrak).

Consolidated Statements of Financial Position

Assets

As at the end of 2020, the Company posted Rp9.7 trillion of total assets, a decline of 20.46% from Rp12.2 trillion in 2019. The decline mainly reflects the decline in investment in associates and in investment in infrastructure investment funds.

Current Assets

The Company's current assets amounted to Rp6.8 trillion in 2020, an increase of 7.27% from Rp6.3 trillion recorded in 2019. The increase was mainly attributable to the increase in inventories.

Non-Current Assets

In 2020, the Company's non-current assets amounted to Rp3.0 trillion, down 49.95% from Rp5.9 trillion in 2019. The decline mainly reflects the decline in investment in associates and in investment in infrastructure investment funds.

Liabilities

The Company recorded total liabilities of Rp3.1 trillion as at December 31, 2020, an increase of 134.94% from total liabilities of Rp1.3 trillion in 2019. The increase reflects increases in bank loans and in deposits from customers.

Current Liabilities

The Company recorded an increase in short-term liabilities from Rp950.8 billion in 2019 to Rp2,158.1 billion in 2020, mainly due to increases in short-term bank loans and in deposits from customers (contractual liability).

Non-Current Liabilities

In 2020, the Company recorded non-current liabilities of Rp982.3 billion, an increase of 154.54% over the amount in 2019 of Rp385.9 billion, mainly due to long-term bank loans and customer advances (contractual liability).

Ekuitas

Per 31 Desember 2020, Perseroan membukukan penurunan total ekuitas sebesar 39,54%, yaitu dari Rp10,9 triliun pada 2019 menjadi Rp6,6 triliun pada 2020. Penurunan ini terutama bersumber dari kerugian Perseroan tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan Usaha

Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,8 triliun pada 2020, meningkat sebesar 8,82% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu Rp1,7 triliun. Kenaikan ini bersumber dari peningkatan penjualan rumah hunian dan serah terima apartemen Orange County.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat pada 2020, yaitu dari Rp1,0 triliun pada 2019 menjadi Rp1,1 triliun. Peningkatan ini terjadi karena peningkatan biaya penjualan rumah hunian dan apartemen.

Laba Bruto

Perseroan meraih laba bruto sebesar Rp664,2 miliar pada 2020, meningkat sebesar 3,03% dari 2019 yaitu Rp644,7 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan tercatat sebesar Rp300,6 miliar pada 2020, meningkat sebesar 42,56% dari tahun 2019 yaitu Rp210,9 miliar. Peningkatan ini umumnya disebabkan oleh peningkatan biaya penjualan dan biaya umum administrasi.

Laba (Rugi) Usaha

Pada 2020, Perseroan mencatat penurunan laba usaha sebesar 628,52%, dari Rp341,8 miliar pada 2019 menjadi kerugian Rp1,8 triliun pada 2020, yang disebabkan oleh peningkatan beban lainnya dan penurunan investasi pada dana investasi infrastruktur.

Arus Kas

Arus Kas yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Pada 2020, Perseroan mencatatkan peningkatan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 179,17% dari Rp248,1 miliar pada 2019 menjadi Rp692,6 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan dan peningkatan pembayaran beban operasional.

Equity

As at December 31, 2020, the Company recorded a 39.54% decline in total equity to Rp6.6 trillion, compared with Rp10.9 trillion in 2019. The decline mainly reflects the loss for the year recorded by the Company in 2020.

Consolidated Statements of Profit or Loss and other Comprehensive Income

Revenues

The Company posted Rp1.8 trillion of revenues in 2020, representing an increase of 8.82% from revenues of Rp1.7 trillion in 2019. The increase in revenues was mostly driven by higher sales of residential houses and the handing over of apartments in Orange County.

Cost of Revenues

The Company recorded an increase in cost of revenues from Rp1.0 trillion in 2019 to Rp1.1 trillion in 2020. The increase was attributable to the increase in cost of sales of residential houses and apartments.

Gross Profit

The Company recorded gross profit of Rp664.2 billion in 2020, up by 3.03% compared to Rp644.7 billion in 2019, on the back of increased revenues.

Operating Expenses

The Company's operating expenses in 2020 amounted to Rp300.6 billion, an increase of 42.56% from the amount in 2019 at Rp210.9 billion. The increase was mostly attributable to increases in selling expenses and in general and administrative expenses.

Operating Income (Loss)

In 2020, the Company recorded a decrease in operating income of 628.52%, from Rp341.8 billion in 2019 to a loss of Rp1.8 trillion in 2020, which due to an increase in other expenses and decrease in investment in infrastructure investment funds.

Cash Flows

Net Cash Flows Obtained from Operating Activities

In 2020, the Company recorded an increase in cash flow used for operating activities of 179.17% from Rp248.1 billion in 2019 to Rp692.6 billion. This increase was due to a decrease in receipts from customers and an increase in payment for operating expenses.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Pada 2020, arus kas Perseroan yang digunakan untuk investasi meningkat sebesar 100,83% dari Rp3,3 triliun pada 2019 menjadi Rp27,6 miliar, yang terutama disebabkan oleh penurunan penyertaan dana pada investasi infrastruktur.

Net Cash Flows Used in Investment Activities

In 2020, net cash flows used in investment activities declined by 100,83% to Rp27.6 billion, compared with Rp3.3 trillion in 2019, due mainly to the reduction in investment in infrastructure investment funds.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Pada 2020, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp777,8 miliar, menurun sebesar 77,5% dari Rp3,5 triliun pada 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Penurunan Penawaran Umum Terbatas 1 Saham Perseroan.

Net Cash Flows from Financing Activities

In 2020, net cash flows obtained from financing activities amounted to Rp777.8 billion, a decline of 77.5% from Rp3.5 trillion in 2019, due mostly to the decline in proceeds from the Company's Rights Issue I.

Profitabilitas

Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan keuntungan dan nilai bagi pemegang saham dengan sumber daya yang tersedia.

Profitability

Profitability ratios reflect the Company's ability to generate profits and value for shareholders using its available resources.

Rasio Profitabilitas	2020	2019	▲ (%)	Profitability Ratio
Laba Kotor terhadap Penjualan Bersih (%)	36,85	38,87	(5,20)	Gross Profit to Net Sales (%)
Laba Usaha terhadap Penjualan Bersih (%)	(100,23)	20,61	(586,32)	Operating Income to Net Sales (%)
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih (%)	(202,29)	23,16	(973,45)	Net Income to Net Sales (%)
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (%)	(37,52)	3,14	(1.294,27)	Return on Asset (%)
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas (%)	(55,42)	3,53	(1.669,97)	Return on Equity (%)

Kemampuan Membayar Utang

Tingkat likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang. Rasio keuangan pokok yang digunakan mencakup antara lain rasio utang terhadap ekuitas, jumlah liabilitas terhadap aset, aset lancar terhadap liabilitas lancar dan kolektibilitas rasio.

Solvency

The level of liquidity illustrates the Company's ability to pay short-term and long-term debt. The key financial ratios used include the debt to equity ratio, debt to assets ratio, current assets to current liabilities ratio, and collectability ratio.

Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Utang	2020	2019	Liquidity, Solvency, and Debt Ratios
Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar (x)	3,12	6,62	Total Current Asset to Total Current Liabilities (x)
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (x)	0,32	0,11	Total Liabilities to Total Asset (x)
Jumlah Aset terhadap Jumlah Liabilitas (x)	3,10	9,14	Total Asset Total Coverage (x)
Jumlah Pinjaman terhadap Jumlah Ekuitas (x)	0,15	0,02	Total Debt to Total Equity (x)

Pada 2020, rasio likuiditas atau rasio lancar yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar 3,12x, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,62x. Di sisi lain, rasio liabilitas yang menunjukkan proporsi liabilitas dalam membiayai aset tercatat sebesar 0,32x. Rasio solvabilitas yaitu kemampuan Perseroan dalam membayar utang sebesar 3,10x. Ketiga rasio tersebut menunjukkan Perseroan tetap memiliki kemampuan yang solid untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

In 2020, the liquidity ratio or current ratio, which indicates the ability of the Company in servicing its short-term liabilities, was recorded at 3.12x, down from the corresponding level in 2019 at 6.62x. On the other hand, the liability ratio that shows the proportion of liabilities in financing the assets was recorded at 0.32x. The solvency ration, indicating the Company's ability to pay its debts, was recorded at 3.10x. Altogether, the three ratios indicate that the Company still has a solid ability to fulfill all of its obligations.

Tingkat Kolektabilitas Piutang

Pada 2020, jumlah piutang yang belum jatuh tempo menurun dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar Rp7,3 miliar. Terhadap hal ini, Perseroan terus memperhatikan saldo piutang untuk meningkatkan pengelolaan likuiditas, serta melakukan cadangan penurunan nilai piutang yang dinilai cukup untuk mengantisipasi jika terjadi kegagalan pembayaran piutang yang telah melebihi masa jatuh tempo.

Receivable Turnover

As at year-end 2020, the Company's outstanding receivables amounted to Rp7.3 billion, or less than the corresponding amount in 2019. The Company continues to pay attention to accounts receivable balances to improve liquidity management, as well as to allow for impairment of receivables which are considered sufficient to anticipate if there is a failure to pay receivables that have exceeded their maturity dates.

dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah

Uraian	2020	2019	Description
Belum jatuh tempo	7.341	201.096	Not yet due
Jatuh tempo:			**Maturity:**
1-90 hari	4.957	40.534	1-90 days
>91-180 hari	3.651	6.488	>91-180 days
>181 hari	5.240	18.812	>181 days
Mengalami penurunan nilai individual	173.951	133.335	Individually impaired
Jumlah piutang usaha	195.140	400.265	Total accounts receivables
Penyisihan penurunan nilai piutang	(173.951)	(133.335)	Allowance for impairment in value
Jumlah neto	**21.189**	**266.930**	**Total net**

Struktur Modal

Struktur modal Perseroan pada 2020 adalah utang/liabilitas dengan porsi 32,31% dan modal/ekuitas dengan porsi 67,69%. Dalam mengelola permodalan, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjaga kelangsungan usaha sehingga dapat memberikan hasil yang optimal kepada pemegang saham dan manfaat positif kepada pemegang kepentingan lainnya, dan memelihara struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Selain itu, Perseroan terus melakukan penelaahan dan pengelolaan permodalan secara intensif untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa mendatang, efisiensi biaya modal, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal, dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Capital Structure

The Company's capital structure in 2020 comprised of debt/liabilities of 32.31% and capital/equity of 67.69%. In managing capital, the Company is committed to always maintaining business continuity so as to provide optimal results to shareholders and positive benefits to other stakeholders, and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In addition, the Company continues to conduct intensive capital reviews and management to ensure optimal capital structure and returns for shareholders, taking into account future capital requirements, capital cost efficiency, present and future profitability, operating cash flow projections, projections, capital expenditures, and projected strategic investment opportunities.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pengeluaran investasi sesuai dengan periode masing-masing:

Material Commitments for Investments in Capital Goods

The following table presents the amount of investments in each respective period:

dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah

Uraian	2020	2019	2018	Description
Perolehan Aset Tetap	9.276	11.577	69.786	Acquisition of Property and Equipment

Sumber dana belanja modal Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Pembelanjaan umum digunakan untuk pembelian perabot dan perlengkapan kantor, mesin dan peralatan serta pembangunan properti investasi.

The source of funds for the Company's capital expenditures comes from cash receipts from customers. General expenditure is used for the purchase of office furniture and supplies, machinery and equipment as well as the construction of investment properties.

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2020, Perseroan melaporkan belanja barang modal sebesar Rp14 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk pembelian mesin, peralatan, perabot dan perlengkapan kantor.

Investments in Capital Goods in the Last Fiscal Year

In 2020, the Company reported Rp14 billion of capital expenditures, most of which were used for the purchase of office equipment and furniture.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

Pada 2020, tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition or Debt/Capital Restructuring

In 2020, there are no material information and facts subsequent to the date of the accountant's report.

Prospek Usaha

Menurut Real Estate Indonesia, industri properti diperkirakan dapat tumbuh sekitar 20-30% di 2021 seiring dengan optimisme pemerintah yang memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4-5% di tahun mendatang. Proyeksi ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain pengesahan UU Ciptaker yang diharapkan dapat memangkas jalur birokrasi perizinan dan memberikan kepastian pada pengadaan lahan. Ke depannya, sektor properti dinilai masih memiliki prospek usaha yang prospektif, terutama segmen hunian menengah yakni rumah di bawah Rp1 miliar. Segmen ini dinilai menawarkan daya tarik yang tinggi, khususnya bagi masyarakat yang sudah berkeluarga atau yang ingin membeli rumah pertama.

Business Prospects

According to Real Estate Indonesia, the property industry is expected to grow by around 20-30% in 2021 in line with the government's optimism that predicts national economic growth to reach 4-5% in the next year. This projection is supported by several factors, including the ratification of the Job Creation Law, which is expected to cut the bureaucratic channels for licensing and provide certainty in land acquisition. In the future, the property sector is considered to still have prospective business prospects, especially the middle residential segment, namely houses under Rp1 billion. This segment is considered to offer high attractiveness, especially for people with families or those who want to buy their first house.

Target, Pencapaian dan, Proyeksi

Targets, Realization and, Projections

Uraian	Target Target 2020	Realisasi Realization 2020	Proyeksi Projection 2021	Description
Pendapatan Usaha	2.553.000	1.844.373	2.431.938	Revenues
Laba Usaha	646.000	(1.806.641)	552.962	Operating Income

Aspek Pemasaran

Perseroan memiliki 4 (empat) segmen bisnis, yaitu residensial, industrial, komersial, dan pengelolaan kota yang terintegrasi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi pemasaran Perseroan ditujukan untuk terus meningkatkan ekuitas merek Perseroan guna meningkatkan pangsa pasar di sektor properti, terutama di koridor timur Jakarta. Berbagai strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan mencakup penyiaran iklan di media cetak dan media siar, bekerja sama dengan sales channel untuk memperluas jangkauan pemasaran, serta memanfaatkan jejaring sosial sebagai media informasi digital yang efektif.

Marketing Aspect

The Company operates 4 (four) business segments, namely residential, industrial, commercial and city management, which are well integrated to meet customer needs. The Company's marketing strategy is aimed at continuously increasing the Company's brand equity in order to increase market share in the property sector, especially in the eastern corridor of Jakarta. Various marketing strategies implemented by the Company include broadcasting advertisements in print and broadcast media, collaborating with sales channels to expand marketing reach, and utilizing social networks as an effective digital information medium.

Kebijakan Dividen

Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Dividend Policy

The Company has the following dividend policy:

Laba Bersih	Persentase Dividen Kas terhadap Laba Bersih Cash Dividends to Net Income	Net Income
Sampai dengan Rp800 miliar	Sampai dengan 10% | Up to 10%	Up to Rp800 billion
Di atas Rp800 miliar	10-30% | 10-30%	Above Rp800 billion

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 02 tanggal 6 Juli 2020, No. 37 tanggal 18 April 2019 dan No. 12 tanggal 5 Juni 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2020, 2019, dan 2018 untuk memperkuat struktur modal, sehingga untuk tahun-tahun buku tersebut, Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham dan penyisihan tambahan dana cadangan masing masing Rp200.000.000 (dua ratus juta) dari saldo laba masing masing tahun.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen

Hingga 2020, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan harga *exercise*.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil bersih PUT I sebagaimana ternyata dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana PUT I untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 sebagaimana dimuat dalam Surat Perseroan No. 206/LC-COS/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019. Perseroan telah melaporkan penggunaan dana ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/ POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

Investasi

Penjelasan lebih rinci mengenai investasi pada entitas asosiasi dapat dilihat di catatan Laporan Keuangan Audit 2020 No. 11.

Ekspansi

Pada 2020, Perseroan tidak melakukan kegiatan ekspansi.

Penggabungan/Peleburan Usaha

Pada 2020, Perseroan tidak melakukan kegiatan penggabungan/peleburan usaha.

Akusisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

Struktur Permodalan Perseroan mengalami perubahan akibat adanya Penawaran Umum Terbatas I, sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan mengalami perubahan. Tahun 2019 kepemilikan saham PT Kemuning Satiatama 77,84% dan Publik 22,16%.

Based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 02 dated July 6, 2020, No. 37 dated April 18, 2019, and No. 12 dated June 5, 2018, which were all drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta, shareholders approved the use of the 2020, 2019 and 2018 net income to strengthen the capital structure, so that for those financial years, the Company did not distribute dividends to shareholders and additional allowance reserve funds each Rp200,000,000 (two hundred million) of the retained earnings for each year.

Employee and/or Management Share Ownership Program

Up to the year 2020, the Company does not have a share ownership program for employees and/or management. Therefore, there is no information regarding the number of ESOP/MSOP shares and their realization, time period, requirements for eligible employees and/or management, and exercise price.

Utilization of Proceeds from Public Offerings

The Company has used all the fund from the net proceeds of Rights Issue (PUT) I as evidenced in the Report on Realization of Use of Funds from PUT I for the period ended November 30, 2019, as contained in Company Letter No. 206/LC-COS/XII/2019 dated December 2, 2019. The Company has reported the use of these funds in accordance with OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on Realization of Use of Proceeds from Public Offering dated December 16, 2015.

Information on Material Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition or Debt/Capital Restructuring

Investment

A more detailed explanation regarding investment in associates is presented in Note No. 11 to the 2020 Audited Financial Statements.

Expansion

In 2020, the Company did not carry out any expansion activities.

Business Merger/Consolidation

In 2020, the Company did not carry out merger/ consolidation activities.

Debt/Capital Restructuring

The Company's capital structure has changed due to the Limited Public Offering I, resulting in the change of the composition of the Company's share ownership. In 2019, the share ownership of PT Kemuning Satiatama was 77.84% and the public shareownership was 22.16%.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi dan/atau Mengandung Benturan Kepentingan

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yang telah dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi serta manfaat ekonomis yang secara substansial sebanding dengan transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Transactions with Related Parties and/or Transactions with Conflict of Interest

The Company entered into transactions with related parties, which were carried out in accordance with terms and conditions as well as economic benefits that were substantially comparable to transactions with unrelated parties.

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationships	Transaksi Transaction
PT Bumi Lemahabang Permai	Entitas Sepengendali Entity Under Common Control	Piutang usaha dan piutang non usaha yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jatuh tempo Trade accounts receivable and non bearing non-trade receivable without maturity date
PT Mahkota Sentosa Utama	Entitas Asosiasi Associate	Investasi penyertaan saham, piutang non usaha yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jatuh tempo dan penjualan lahan siap bangun Investment in shares, non bearing non-trade receivable without maturity date, customer deposit and sales of land lot
PT Nusa Medika Perkasa	Entitas Asosiasi Associate	Investasi penyertaan saham Investment in shares
PT Hyundai Inti Development	Entitas Asosiasi Associate	Investasi penyertaan saham Investment in shares
PT Bank Nationalnobu Tbk	Entitas Sepengendali Entity Under Common Control	Penempatan pada rekening giro dan dana yang dibatasi penggunaannya/ Placement in current account and restricted funds
Dana Investasi Infrastruktur Bowsprit Township Development USD Infrastructure Invesment Fund Bowsprit of Township Development USD	Afiliasi Affiliate	Investasi pada dana investasi infrastruktur Investment in infrastructure investment funds
Dana Investasi Infrastruktur Bowsprit Township Development IDR Infrastructure Invesment Fund Bowsprit of Township Development IDR	Afiliasi Affiliate	Investasi pada dana investasi infrastruktur Investment in infrastructure investment funds
PT Primakreasi Propertindo	Entitas Sepengendali Entity Under Common Control	Utang atas akuisisi entitas anak Liability upon the acquisition of a subsidiary
Direksi, Dewan Komisaris dan Manajemen Kunci Lainnya Directors, Commisioners and Other Key Management	Manajemen Kunci Key Management	Imbalan kerja dan pinjaman yang tidak dikenakan bunga Employee benefits and non-interest bearing loan without maturity date

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun Buku

Sepanjang 2020, tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.

Changes in Laws and Regulations during the Fiscal Year

During 2020, there were no changes in laws and regulations with significant impact to the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perseroan pada Tahun Buku

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

1. PSAK 1 (Amandemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan: tentang Judul Laporan Keuangan";
2. PSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
3. PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi Pada Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
4. PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";

Changes in Accounting Policies Implemented in the Fiscal Year

New accounting standard and amendment to accounting standards, which are effective for the period beginning on or after 1 January 2020, with early adoption being permitted, are as follow:

1. PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";
2. PPSAK 13: "Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting";
3. PSAK 15 (Amendment 2017): "Investment In Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures;"
4. PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors";

5. Amandemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga;
6. PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
7. PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
8. PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
9. PSAK 73: "Sewa";
10. PSAK 73 (Amandemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19;
11. PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
12. PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
13. ISAK 35: "Penyesuaian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
14. ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
15. ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
16. ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
17. Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55, Amandemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Informasi lebih rinci mengenai hal ini dapat mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2020 halaman 9-10.

5. Amendment to PSAK 60 "Financial Instrument: Disclosure" about interest rate benchmark reform;
6. PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation";
7. PSAK 71: "Financial Instrument";
8. PSAK 72: "Revenue from Contract with Customer";
9. PSAK 73: "Lease";
10. PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Covid-19 related Rent Concessions;
11. PSAK 102 (Revisi 2019): "Accounting for Murabahah";
12. PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract";
13. ISAK 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements";
14. ISAK 101: "Recognition of Unearned Revenue of Murabahah Without Significant Risk Related to Inventory Ownership";
15. ISAK 102: "Allowance for Murabahah Receivables";
16. ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases;
17. Amendment to PSAK 71, Amendment to PSAK 55, Amendment to PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform.

More detailed information in this matter is presented to the 2020 Consolidated Financial Statements page 9-10.

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

Pengelolaan SDM

Sistem pengelolaan SDM Perseroan dilakukan secara digital, yang ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Departemen HR bekerja sama dengan MIS untuk memperkuat program digitalisasi agar dapat mengurangi penggunaan *paperwork* dalam kegiatan operasional. Perseroan juga telah mengaplikasikan program Cynergy. Program Cynergy tidak hanya mengurangi penggunaan *paperwork*, tetapi juga mempermudah dan mempercepat proses persetujuan yang diperlukan dan membuat proses pengarsipan dokumen menjadi lebih rapi dan aman.

Kebijakan Selama Masa Pandemi COVID-19

Selama masa pandemi, Perseroan menerapkan kebijakan khusus dan protokol kesehatan yang ketat kepada karyawan guna mengoptimalkan perlindungan terhadap keselamatan karyawan. Berbagai kebijakan yang diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*);
- Menerapkan *physical distancing* di tempat kerja;
- Melakukan pemeriksaan *serology test* setiap bulan bekerja sama dengan RS Siloam;
- Melakukan pembagian vitamin kepada karyawan secara Rutin setiap 1 minggu sekali;
- Melakukan penyinaran UV dan pembersihan seluruh ruangan kerja setiap hari;
- Menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan dan koridor dan area umum di kantor;
- Menyediakan ruang darurat satgas COVID-19;
- Pengecekan suhu tubuh karyawan secara rutin sebelum memasukin area perkantoran.

Rekrutmen

Pada 2020, Perseroan telah melaksanakan *Recruitment Management Trainee Batch* 6 sebanyak 15 orang dari berbagai program studi. Oleh karena itu, Perseroan memfasilitasi para karyawan dengan *training in class* dan *taskforce* untuk sejumlah proyek yang sedang berjalan di kawasan Lippo Cikarang.

Penilaian Kinerja

Secara berkala, Perseroan melakukan penilaian secara komprehensif atas kinerja karyawan. Dengan menggunakan metode *Key Performance Indicators*, penilaian dilakukan atas 2 (dua) aspek yaitu kompetensi dan hasil kerja/target yang terukur.

HR Management

At the Company, the Human Resources management is carried out on digital platform, by tapping into advances in information technology. Therefore, the HR Department works together with MIS in strengthening the digitization program, in order to reduce paper usage for operation. The Company has also implemented the Cynergy program, a program aimed at not only reducing paper usage, but also streamlining and speeding up approval process, as well as revamping the archiving process into a better and safer one.

Policies During the COVID-19 Pandemic

During the pandemic, in order to optimize the protection for the sake of employee safety, the Company implemented special policies and strict health protocols as follows:

- Enforcing work from home policy;
- Adopting physical distancing at workplace;
- Conducting serology test on monthly basis, in collaboration with Siloam Hospital;
- Distributing vitamins to employees on weekly basis;
- Performing ultraviolet germicidal irradiation and sterilization on all workspace on daily basis;
- Providing hand sanitizers in every room and corridor and in common areas in the office;
- Providing emergency room for the COVID-19 task force
- Checking employees' body temperature regularly before entering the office area

Recruitment

In 2020, the Company has implemented Recruitment Management Trainee Batch 6 with 15 participant from various study programs. The Company also facilitates employees with in-class training and taskforce for a number of ongoing projects in the Lippo Cikarang area.

Performance Assessment

Periodically, the Company conducts a comprehensive assessment of employee performance. Using Key Performance Indicators, the assessment is carried out on 2 (two) aspects, namely competence and work results/ measurable targets.

Profil Karyawan

Jumlah karyawan Perseroan pada 2020 adalah 1.062 orang yang terdiri dari 456 karyawan internal dan 606 karyawan *outsource* (OS). Berikut adalah profil karyawan yang dipetakan menurut level organisasi, tingkat pendidikan, usia, status kepegawaian, gender dan masa kerja.

Employee Profile

The number of the Company's employees in 2020 is 1,062 persons consisting of 456 internal employees and 606 outsourced (OS) employees. Below are employee profiles mapped according to organizational level, education level, age, employment status, gender and years of service.

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI / EMPLOYEE PROFILE BY ORGANIZATIONAL LEVEL

Level | Level	2020				2019			
	Internal	%	OS	%	Internal	%	OS	%
Non Staf | Non-Staff	113	24,78%	530	87,46%	139	32,55%	568	89,03%
Staf | Staff	78	17,11%	65	10,73%	95	22,25%	59	9,25%
Asisten Manajer | Assistant Manager	135	29,61%	6	0,99%	101	23,65%	9	1,41%
Manajer | Manager	47	10,31%	2	0,33%	37	8,67%	2	0,31%
Senior Manajer | Senior Manager	50	10,96%	3	0,50%	45	10,54%	0	0,00%
Senior Eksekutif | Senior Executive	29	6,36%	0	0,00%	5	1,17%	0	0,00%
Direktur | Director	4	0,88%	0	0,00%	5	1,17%	0	0,00%
Total | Total	**456**	**100,00%**	**606**	**100,00%**	**427**	**100%**	**638**	**100%**

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN / EMPLOYEE PROFILE BY EDUCATION LEVEL

Pendidikan | Education	2020				2019			
	Internal	%	OS	%	Internal	%	OS	%
SD | Elementary School	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SMP | Junior High School	8	1,97%	37	6,11%	11	2,58%	52	8,15%
SMA | Senior High School	123	26,97%	500	82,51%	147	34,43%	523	81,97%
Sarjana Muda | Academy	33	7,24%	17	2,81%	29	6,79%	17	2,66%
Sarjana | Undergraduate	251	55,04%	51	8,42%	214	50,12%	45	7,05%
Pasca Sarjana | Graduate	39	8,55%	1	0,17%	24	5,62%	1	0,16%
Doktor | Doctorate	2	0,44%	0	0,00%	2	0,47%	0	0,00%
Total | Total	**456**	**100,22%**	**606**	**100,00%**	**427**	**100,00%**	**638**	**100,00%**

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN USIA / EMPLOYEE PROFILE BY AGE

Usia | Age	2020				2019			
	Internal	%	OS	%	Internal	%	OS	%
<25 tahun | years old	35	7,68%	102	16,83%	47	11,01%	99	15,52%
>25-30 tahun | years old	93	20,39%	126	20,79%	72	16,86%	142	22,26%
>30-35 tahun | years old	49	10,75%	122	20,13%	35	8,20%	136	21,32%
>35-40 tahun | years old	28	6,14%	94	15,51%	30	7,03%	103	16,14%
>40 tahun | years old	251	55,04%	162	26,73%	243	56,91%	158	24,76%
Total | Total	**456**	**100%**	**606**	**100%**	**427**	**100%**	**638**	**100%**

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN / EMPLOYEE PROFILE BY EMPLOYMENT STATUS

Status | Status	2020				2019			
	Internal	%	OS	%	Internal	%	OS	%
Permanen | Permanent	300	65,79%	0	0,00%	281	65,81%	0	0,00%
Kontrak | Contract	156	34,21%	606	100,00%	146	34,19%	638	100,00%
Total | Total	**456**	**100%**	**606**	**100%**	**427**	**100%**	**638**	**100%**

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA / EMPLOYEE PROFILE BY YEARS OF SERVICE

Masa Kerja | Years of Service	2020				2019			
	Internal	%	OS	%	Internal	%	OS	%
<3 tahun | years	151	33,11%	546	90,10%	147	34,43%	589	92,32%
3-5 tahun | years	45	9,87%	14	2,31%	40	9,37%	7	1,10%
5-10 tahun | years	62	13,60%	44	7,26%	41	9,60%	38	5,96%
>10 tahun | years	198	43,42%	2	0,33%	199	46,60%	4	0,63%
Total | Total	**456**	**100%**	**606**	**100%**	**427**	**100%**	**638**	**100%**

PROFIL KARYAWAN BERDASARKAN GENDER

EMPLOYEE PROFILE BY GENDER

Gender | Gender	2020				2019			
	Internal	**%**	**OS**	**%**	**Internal**	**%**	**OS**	**%**
Laki-laki | Male	131	28,73%	47	7,76%	110	25,76%	46	7,21%
Perempuan | Female	325	71,27%	559	92,24%	317	74,24%	592	92,79%
Total | Total	**456**	**100%**	**606**	**100%**	**427**	**100%**	**638**	**100%**

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Training and Competency Development

Tanggal Pelatihan Date of Training	**Judul Pelatihan** Topics of Training	**Penyelenggara** Organizer	**Jumlah Partisipan** Number of Participants
19-22 Oktober 2020 October 19-22, 2020	Training Operator Genset Training Operator Genset	PT Sarana Katiga Nusantara	7
12-13 Agustus 2020 August 12-13, 2020	Pengolahan air bersih dan air industri Clean water and industrial water treatment	Benefita	13
04 Februari 2020 February 04, 2020	Pendalaman POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik serta Sharing Session dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Socialization of POJK No. 51 / POJK.03 / 2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies as well as a Sharing Session from PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	OJK dan BEI	2
09 Juni 2020 June 09, 2020	RESILIENCE IN TURBULENCE: Bertahan di Tengah Badai RESILIENCE IN TURBULENCE: Survive in a Storm	IKA FEB UNTAR	3
03 Maret 2020 March 03, 2020	Penilaian Tata Kelola Perusahaan dan *Sharing* terkait Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Corporate Governance Assessment and Sharing related to the Implementation of Good Corporate Governance (GCG)	ICSA	1
20 Februari 2020 June 02, 2020	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Lalu Lintas First Aid in Traffic Accidents	Trivium Terrace Apt. Bekerja sama dengan Siloam Hospitals Lippo Cikarang	
18 November - 11 Desember 2020 November 18-December 11, 2020	Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal untuk Kelas Dasar 2 Capital Market Legal Consultant Education for Elementary Class 2	FHP Law School bekerja sama dengan PERADI	1
23 Maret 2020 March 23, 2020	*Code of Conduct* Code of Conduct	LK Corporate	All Employee
19 April 2020 April 19, 2020	*Whistleblowing System* Whistleblowing System	LK Corporate	All Employee
06 Mei 2020 May 06, 2020	*Anti Bribery & Money Laundering* Anti Bribery & Money Laundering	LK Corporate	All Employee
26 Mei 2020 May 26, 2020	*Non Disclosure Agreement* Non Disclosure Agreement	LK Corporate	All Employee
24 Juli 2020 July 24, 2020	*Company Regulations* Company Regulations	LK Corporate	All Employee
08 & 17 Juni 2020 June 8 & 17, 2020	Communication Communication	LK Corporate	All Employee
05 Agustus 2020 August 05, 2020	Collaboration Collaboration	LK Corporate	All Employee
12 Oktober 2020 October 12, 2020	Creativity Creativity	LK Corporate	All Employee
13 November 2020 November 13, 2020	Critical Thinking Critical Thinking	LK Corporate	All Employee
29 Juni 2020 June 29, 2020	New Employee Orientation New Employee Orientation	LK Corporate	6
27 Agustus 2020 August 27, 2020	Pembahasan & 7 Solusi atas: Permen PUPR No. 11/ PRT/M/2019 tentang PPJB Discussion & 7 solutions for: PUPR Regulation No. 11 / PRT/M/2019 concerning PPJB	KD & Co Law Office, International Patent Firm, PT Kasuri Djuli Corpora	1

Pada 2020, Perseroan menginvestasikan dana sebesar Rp57.500.000 untuk program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan.

In 2020, the Company invested Rp57,500,000 for employee training and competency development programs.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Good Corporate Governance

KOMITMEN PERSEROAN

Penerapan praktik GCG Perseroan dilaksanakan berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/SEOJK. 04/2015 tentangPedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik;
5. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Perusahaan.
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

THE COMPANY'S COMMITMENT

The implementation of GCG in the Company always complies with the regulations below:

11. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market;
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law");
3. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 concerning Application of Governance Guidelines in Public Companies and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance;
4. POJK No. 8/POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Website;
5. POJK No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies and Circular of Financial Services Authority (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of Issuers or Public Companies' Annual Reports;
6. Company Regulations;
7. Other relevant laws and regulations.

PRINSIP GCG

Praktik GCG Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip umum yang dikenal dengan nama TARIF, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas atau Tanggung Jawab, Independensi atau Kemandirian, dan Kewajaran/Kesetaraan.

GCG PRINCIPLES

The Company's GCG practices refers to 5 (five) general principles known as TARIF, namely Transparency, Accountability, Responsibility or Responsibility, Independence or Independence, and Fairness/Equality.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

GCG GUIDELINES AND POLICIES

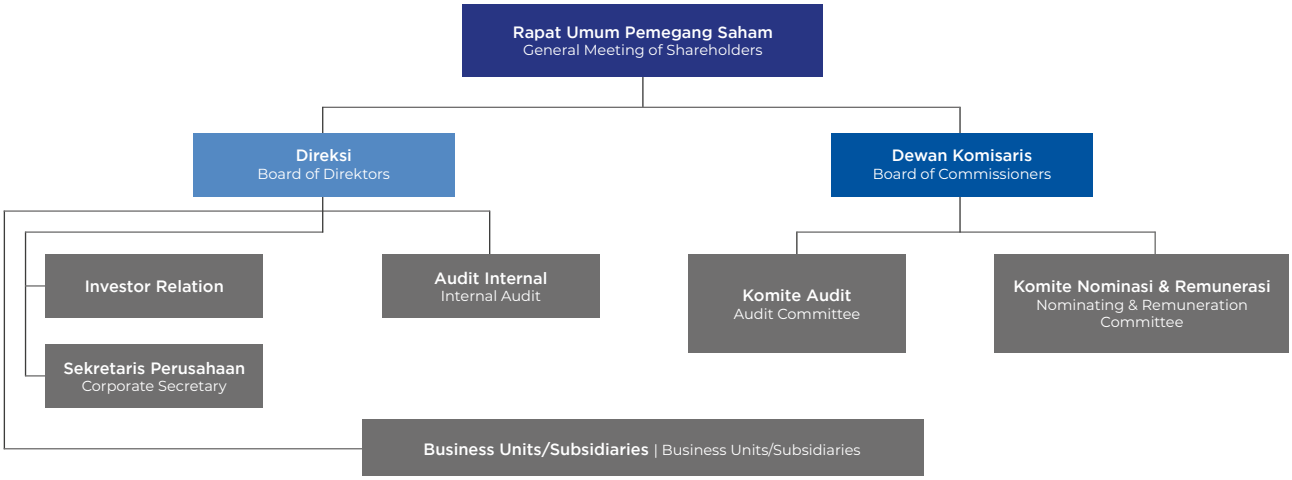

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Penyelenggaraan RUPS Perseroan mengacu pada POJK No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32/2014") tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, serta Undang–Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan (UUPT).

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The Company's GMS policy refers to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Companies, Law No. 40 of 2017 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020

Implementation of the 2020 Annual GMS

Tanggal Date	Perihal Subject	Pengumuman kepada Publik Public Notification
15 Mei 2020 May 15, 2020	Pemberitahuan rencana RUPS Tahunan Announcement of the Annual GMS plan	Pemberitahuan RUPS Tahunan disampaikan melalui surat ke OJK Nomor 064/LC-COS/V/2020 melalui SPE OJK, situs *web* BEI(www.idx.co.id) dan situs *web* Perseroan yaitu www.lippo-cikarang.com. Announcement of the Annual GMS is submitted by letter to OJK Number 026/LC-COS/II/2019 through SPE OJK, IDX website (www.idx.co.id) and the Company's website, www.lippo-cikarang.com.
28 Mei 2020 May 28, 2020	Pengumuman RUPS Tahunan di 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional Notification of Changes to Annual GMS Schedule	Pengumuman disampaikan melalui surat ke OJK Nomor 072/LC-COS/V/2020 melalui SPE OJK, situs *web* BEI(www.idx.co.id) dan situs *web* Perseroan yaitu www.lippo-cikarang.com dan iklan di surat kabar harian Investor Daily. Announcements are submit by letter to OJK Number 072/LC-COS/V/2020 through SPE OJK, IDX website (www.idx.co.id) and the Company's website, www.lippo-cikarang.com and advertisements in daily newspapers Investor Daily.
11 Juni 2020 June 11, 2020	*Recording Date* Daftar Pemegang Saham (DPS) Recording Date of List of Shareholders	
12 Juni 2020 June 12, 2020	Pemanggilan RUPS Tahunan di 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional Summons in 1 (one) nationally circulated newspaper	Pemanggilan disampaikan melalui surat ke OJK Nomor 084/LC-COS/VI/2020 melalui SPE OJK, situs *web* BEI(www.idx.co.id) dan situs *web* Perseroan yaitu www.lippo-cikarang.com dan iklan di surat kabar harian Investor Daily. The summons is submitted by letter to OJK Number 084/LC-COS/VI/2020 through SPE OJK, IDX website (www.idx.co.id) and the Company's website, www.lippo-cikarang.com and advertisements in the daily newspaper Investor Daily.
8 Juli 2020 July 8, 2020	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan di 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional Summary of Minutes of the AGMS and 1 (one) nationally circulated newspaper	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan disampaikan melalui surat ke OJK Nomor 102/LC-COS/VII/2020 dan 103/LC-COS/VII/2020 melalui SPE OJK, situs *web* BEI(www.idx.co.id) dan situs *web* Perseroan yaitu www.lippo-cikarang.com dan iklan di surat kabar harian Investor Daily. Summary of Minutes of the Annual GMS submitted by letter to OJK Number 102/LC-COS/VII/2020 and 103/LC-COS/VII/2020 through SPE OJK, IDX website (www.idx.co.id) and the Company's website, www.lippo-cikarang.com and advertisements in newspapers Investor Daily.
30 Juli 2020 July 30, 2020	Risalah RUPS Tahunan Summary of Minutes of the AGMS	Penyampaian Risalah RUPS Tahunan melalui surat OJK Nomor 118/LC-COS/VII/2020 melalui SPE OJK. Submission of Annual GMS Minutes through OJK letter Number 118/LC-COS/VII/2020 through SPE OJK

Berdasarkan SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, Perseroan menyampaikan hasil RUPS Tahunan 2020 sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan dan tercantum dalam panggilan RUPS Tahunan. RUPS Tahunan 2020 diselenggarakan pada 6 Juli 2020 di California Room, Maxxbox Orange County, Jl. Orange County Boulevard, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17530. Rapat dibuka pada pukul 10.14 WIB dan ditutup pada pukul 11.49 WIB.

Pursuant to SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the form and content of the annual report of issuers or public companies, the Company submits the results of the 2020 Annual GMS in accordance with the set agenda and stated in the AGM's summons. The 2020 Annual GMS was held on July 6, 2020 at California Room, Maxxbox Orange County, Jl. Orange County Boulevard, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, West Java 17530. The meeting commenced at 10.14 Western Indonesia Time (WIB) and was ended at 11.49 WIB.

Kehadiran Peserta RUPS Tahunan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
Komisaris : Sugiono Djauhari*)
Komisaris Independen : Didik Junaidi Rachbini*)
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi*)
Komisaris Independen : Ali Said

Direksi

Presiden Direktur : Sie Subiyanto
Direktur : Ju Kian Salim*)
Direktur : Alexander Yasa
Direktur : Lora Oktaviani
Direktur Independen : Sony

Attendance of Participants in the Annual GMS

Board of Commissioners

President Commissioner : Theo L. Sambuaga
Commissioner : Sugiono Djauhari*)
Independent Commissioner : Didik Junaidi Rachbini*)
Independent Commissioner : Hadi Cahyadi*)
Independent Commissioner : Ali Said

Board of Directors

President Director : Sie Subiyanto
Director : Ju Kian Salim*)
Director : Alexander Yasa
Director : Lora Oktaviani
Independent Director : Sony

Komite Audit

Ketua Komite Audit : Hadi Cahyadi*)
Anggota Komita Audit : Laurensia Adi*)
Anggota Komite Audit : Yugi Prayanto*)

Unit Audit Internal

Ketua Unit Audit Internal : Yoseph Tannos

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Tjun Tjun

Notaris

Lucy Octavia Siregar, SH, Sp.N

Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia

Ruswandi

*Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi

Audit Committee

Chairman of the Audit Committee : Hadi Cahyadi*)
Member of the Audit Committee : Laurensia Adi*)
Member of the Audit Committee : Yugi Prayanto*)

Internal Audit Unit

Chairman of the Internal Audit Unit : Yoseph Tannos

Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners

Tjun Tjun

Notary

Lucy Octavia Siregar, SH, Sp.N

Share Registrar

Ruswandi

*Attending the Meeting by teleconference

Berikut adalah mata acara, keputusan dan realisasi rapat RUPS Tahunan 2020:

The following are the agenda, resolutions and realization of the 2020 Annual GMS:

Mata Acara Pertama | First Meeting Agenda

Agenda

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2019 and granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions carried out in the fiscal year ending on December 31, 2019

Keputusan

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, firma anggota dari jaringan global RSM, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00596/2.1030/AU.1/03/1115-1/1/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*), kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan, tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Resolutions

1. Approve and ratify the Company's Annual Report regarding the condition and running of the Company's business activities, which include the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the fiscal year ending December 31, 2019, which includes reports on business activities, which are derived from the main business activities the Company as well as the Monitoring Report of the Board of Commissioners;
2. Approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries consisting the Consolidated Financial Position Report as per December 31, 2019 as well as the Comprehensive Income Statement, Statement of Changes in Equity, and Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended on that date, which had been audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, member of RSM network, with fair opinion in all material respects as stated in its report No. 00596/2.1030/AU.1/03/1115-1/1/V/2020 dated May 20, 2020.
3. Granted full release and discharge to all members of the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors for the management actions taken and supervision made for the fiscal year ended December 31, 2019 (acquit et de charge), as long as their actions are relevant to and include derivatives of the Company's core business activities as reflected in the Company's Consolidated Financial Statements as well as Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2019.

Jumlah Penanya 1

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	2.326.048.917 saham	99,827%
Tidak Setuju	1 saham	0%
Abstain	4.034.800 saham	0,173%

Realisasi

Telah direalisasikan.
Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada 12 Juni 2020.

Number of Inquirers 1

Voting Results

Agree	2,326,048,917 shares	99.827%
Disagree	1 shares	0%
Abstain	4,034,800 shares	0.173%

Realization

Has been realized.
The Annual Report has been submitted to OJK and IDX on June 12, 2020.

Mata Acara Kedua | Second Meeting Agenda

Agenda

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	Determination of the use of the Company's profit for the fiscal year ended on December 31, 2019.
Keputusan 1. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019. 2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan, yaitu sebesar Rp383.832.000.000,-(tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta Rupiah), akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.	**Resolutions** 1. Agreed not to distribute dividend for the fiscal year ended on December 31, 2019. 2. Approved to set aside a fund in the amount of Rp200,000,000,-(two hundred million Rupiah) as Reserved Funds as referred in Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and Article 23 of the Company's Articles of Association. 3. Agreed that the remaining net income after a deduction of the reserved fund in the amount of Rp383.832.000.000,-(three hundred eighty three billion eight hundred thirty two million Rupiah) will be recorded as the Company's retained earnings.
Jumlah Penanya Tidak ada penanya	**Number of Inquirers** None

Hasil Pemungutan Suara			**Voting Results**		
Setuju	651.691 saham	100%	Agree	651,691 shares	100
Tidak Setuju	1 saham	0%	Disagree	1 shares	0%
Abstain	0 saham	0%	Abstain	0 shares	0%

Realisasi Telah direalisasikan.	**Realization** Has been realized.

Mata Acara Ketiga | Third Meeting Agenda

Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	Appointment of a Public Accountant Firm that will conduct an audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2020.
Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen dan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.	**Resolutions** Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2020 provided that the Independent Public Accounting Firm appointed has been registered in the Financial Services Authority and has good reputation as well as granting full authority to Company's Board of Directors to determine the honorarium as well as other requirements relating to the appointment of the public accountant.
Jumlah Penanya Tidak ada penanya	**Number of Inquirers** None

Hasil Pemungutan Suara			**Voting Results**		
Setuju	2.329.432.027 saham	99,972%	Agree	2,329,432,027 shares	99.972%
Tidak Setuju	651.691 saham	0,028%	Disagree	651,691 shares	0.028%
Abstain	0 saham	0%	Abstain	0 shares	0%

Realisasi Telah direalisasikan. Berdasarkan wewenang yang dilimpahkan dalam RUPS Tahunan, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 22 Juli 2020.	**Realization** Has been realized. Based on the authorities granted in the AGM, the Board of Commissioners has appointed the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners as the Public Accountant that will audit the Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the fiscal year ending December 31, 2020 in accordance with the decision letter of the Board of Commissioners dated July 22, 2020.

Mata Acara Keempat | Fourth Meeting Agenda

Agenda

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.	Appointment of the composition of members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company including Independent Commissioners of the Company as well as the determination of honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners as well as salaries and other benefits for members of the Board of Directors of the Company.

Mata Acara Keempat | Fourth Meeting Agenda

Agenda

Keputusan

1. Menerima dan mengesahkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, efektif sejak Rapat ini ditutup dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan dan pengurusan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
2. Mengangkat dan menetapkan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

   Dewan Komisaris:
   Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
   Komisaris : Sugiono Djauhari
   Komisaris : Anand Kumar
   Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
   Komisaris Independen : Didik Junaidi Rachbini
   Komisaris Independen : Ali Said

   Direksi:
   Presiden Direktur : Sie Subiyanto
   Direktur : Rudy Halim
   Direktur : Tevilyan Yudhistira Rusli
   Direktur : Ju Kian Salim

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi Perseroan.

Resolutions

1. Accept and ratify the termination of the term of office of all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, effective as of the closing of this Meeting by providing full payment and release of responsibility for supervisory and management actions (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors, as long as their actions are reflected in the Company's books.
2. Appoint and determine the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the term of office from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023 as follows:

   Board of Commissioners:
   President Commissioner : Theo L. Sambuaga
   Commissioner : Sugiono Djauhari
   Commissioner : Anand Kumar
   Independent Commissioner : Hadi Cahyadi
   Independent Commissioner : Didik Junaidi Rachbini
   Independent Commissioner : Ali Said

   Board of Directors:
   President Director : Sie Subiyanto
   Director : Rudy Halim
   Director : Tevilyan Yudhistira Rusli
   Director : Ju Kian Salim

3. Granted full authority and power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors both individually or collectively to take any actions required related to decisions taken and/or decided in this Meeting, submit notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company above-mentioned in the Company List in accordance with the prevailing laws and regulations.
4. Agreed to grant the authority to the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine the amount of honorarium and other benefits as well as salaries and other benefits to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Jumlah Penanya	Tidak ada penanya		**Number of Inquirers**	None	
Hasil Pemungutan Suara			**Voting Results**		
Setuju	2.327.985.219 saham	99,910%	Agree	2,327,985,219 shares	99.910%
Tidak Setuju	2.098.499 saham	0,090%	Disagree	2,098,499 shares	0.090%
Abstain	0 saham	0%	Abstain	0 shares	0%

Realisasi
Telah direalisasikan.
Telah direalisasikan. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam salinan Akta Risalah RUPS Tahunan No.3 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Lucy Octavia Siregar, S, S.p.N.

Realization
Has been Realized.
Changes in the composition of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been stated in copy of the Deed of Annual GMS Resolutions No. 3 dated July 6, 2020 made by Notary Lucy Octavia Siregar, S, S.p.N.

Mata Acara Kelima | Fifth Meeting Agenda

Agenda

Persetujuan Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.

Approval of Report on the use of proceeds from the Limited Public Offering I.

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Perseroan No. 206/LC-COS/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Resolutions

1. Approved the Report on the Realization of Use of Proceeds from the Limited Public Offering I for the period ended on November 30, 2019 which was submitted by the Board of Directors of the Company to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange as stated in the Company's letter No. 206/LC-COS/XII/2019 dated December 2, 2019.
2. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions in relation to the resolution of this Meeting Agenda, including submitting to the competent authorities for approval, doing everything deemed necessary and useful for these purposes without none of which is excluded.

Jumlah Penanya	Tidak ada penanya		**Number of Inquirers**	None	
Hasil Pemungutan Suara			**Voting Results**		
Setuju	2.330.083.717 saham	100%	Agree	2,330,083,717 shares	100%
Tidak Setuju	1 saham	0%	Disagree	1 shares	0%
Abstain	0 saham	0%	Abstain	0 shares	0%

Realisasi
Telah direalisasikan.

Realization
Has been realized.

Pelaksanaan RUPS Tahun Buku Sebelumnya

Implementation of Prior Fiscal Year GMS

RUPS Tahunan 2019 | 2019 Annual GMS

Mata Acara	Meeting Agenda
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasantanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.	Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2018 and granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions carried out in the fiscal year ending on December 31, 2018.
Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM network,dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00096/2.1030/AU.1/03/0502-3/1/III/2019 tertanggal 1 Maret 2019. 3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge), kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan, tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	**Resolutions** 1. Approve and ratify the Company's Annual Report regarding the condition and running of the Company's business activities, which include the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the fiscal year ending December 31, 2018, which includes reports on business activities, which are derived from the main business activities the Company as well as the Monitoring Report of the Board of Commissioners; 2. Approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries consisting the Consolidated Financial Position Report as per December 31, 2018 as well as the Comprehensive Income Statement, Statement of Changes in Equity, and Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended on that date, which had been audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, member of RSM network, with fair opinion in all material respects as stated in its report No. 00096/2.1030/AU.1/03/0502-3/1/III/2019 dated March 1, 2019. 3. Granted full release and discharge to all members of the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors for the management actions taken and supervision made for the fiscal year ended December 31, 2018 (acquit et de charge), as long as their actions are relevant to and include derivatives of the Company's core business activities as reflected in the Company's Consolidated Financial Statements as well as Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2018.
Realisasi Telah selesai direalisasikan. Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada 27 Maret 2019.	**Realization** Has been realized. The Annual Report has been submitted to OJK and IDX on March 27, 2019.

Mata Acara	Meeting Agenda
Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Determination of the use of the Company's profit for the fiscal year ended on December 31, 2018.
Keputusan 1. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. 2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp200.000.000,-(duaratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan,yaitu sebesar Rp2.220.522.000.000,-(dua triliun dua ratus dua puluh miliar lima ratus dua puluh dua juta Rupiah),akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.	**Resolutions** 1. Agreed not to distribute dividend for the fiscal year ended on December 31, 2018. 2. Approved to set aside a fund in the amount of Rp200,000,000,-(two hundred million Rupiah) as Reserved Funds as referred in Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and Article 23 of the Company's Articles of Association. 3. Agreed that the remaining net income after a deduction of the reserved fund in the amount of Rp2,220,522,000,000,-(two trillion two hundred twenty billion five hundred twenty two million Rupiah) will be recorded as the Company's retained earnings.
Realisasi Telah selesai direalisasikan	**Realization** Has been realized.

Mata Acara	Meeting Agenda
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;	Appointment of a Public Accountant Firm that will conduct an audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2019.
Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.	**Resolutions** Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2019 provided that the Independent Public Accounting Firm appointed has been registered in the Financial Services Authority and has good reputation as well as granting full authority to Company's Board of Directors to determine the honorarium as well as other requirements relating to the appointment of the public accountant.
Realisasi Telah selesai direalisasikan.	**Realization** Has been realized.

Mata Acara	Meeting Agenda
Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan;	Appointment of the composition of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company including Independent Commissioners of the Company as well as the determination of honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners as well as salaries and other benefits for members of the Board of Directors of the Company.

Mata Acara	Meeting Agenda
Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Ibu Juvantia dari jabatannya selaku Direktur Independen efektif pada 31 Oktober 2018 serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 2. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020 sebagai berikut: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga Komisaris : Sugiono Djauhari Komisaris Independen : Didik Junaidi Rachbini Komisaris Independen : Hadi Cahyadi Komisaris Independen : Ali Said Direksi: Presiden Direktur : Sie Subiyanto Direktur : Hong Kah Jin Direktur : Ju Kian Salim Direktur : Alexander Yasa Direktur : Lora Oktaviani Direktur Independen : Sony 3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	**Resolutions** 1. Accept the resignation of Mrs. Juvantia from her position as Independent Director effective on October 31, 2018 as well as granting discharge of duties and responsibilities from her position as of the closing of this Meeting. 2. To determine the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the remaining term of 1 (one) year from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2020 as follows: Board of Commissioners: President Commissioner : Theo L. Sambuaga Commissioner : Sugiono Djauhari Independent Commissioner : Didik Junaidi Rachbini Independent Commissioner : Hadi Cahyadi Independent Commissioner : Ali Said Board of Directors: President Director : Sie Subiyanto Director : Hong Kah Jin Director : Ju Kian Salim Director : Alexander Yasa Director : Lora Oktaviani Independent Director : Sony 3. Granted full authority and power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors both individually or collectively to take any actions required related to decisions taken and/or decided in this Meeting, submit notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company above-mentioned in the Company List in accordance with the prevailing laws and regulations. 4 Agreed to grant the authority to the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine the amount of honorarium and other benefits as well as salaries and other benefits to members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
Realisasi Telah selesai direalisasikan. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam salinan Akta Risalah RUPS Tahunan No.37 tanggal 18 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Ir.Nanaette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.	**Realization** Has been realized. Changes in the composition of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been stated in copy of the Deed of Annual GMS Resolutions No. 37 dated April 18, 2019 made by Notary Ir. Nanette Cahyanie Adi Warsito, SH.

Mata Acara	Meeting Agenda
Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;	Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in the context of adjusting to the Regulation of Head of BPS-Statistics Indonesia Number 19 of 2017 concerning Amendments to the Head of BPS-Statistics Indonesia Regulation Number 95 of 2015 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields;
Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan yang disebutkan sebelumnya. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.	**Resolutions** 1. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in the context of adjusting to the Regulation of Head of BPS-Statistic Indonesia Number 19 of 2017 concerning Amendments to the Head of BPS-Statistics Indonesia Regulation Number 95 of 2015 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields. 2. Agree to rearrange all provisions in the Articles of Association in connection with the changes as referred to in point 1 (one) of the decision mentioned earlier. 3. To grant power and authority to the Directors of the Company with the substitution right to take all necessary actions related to the decision of the agenda of this Meeting, including preparing and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed and submitting it to the authorized agency for approval and/or receipt of notification of amendments to the Articles of Association, to do everything deemed necessary and useful for this purpose with none being excluded, including to make additions and/or changes in amendments to the Articles of Association required by the competent authority.
Realisasi Telah selesai direalisasikan. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan.	**Realization** Has been realized. The Company's Articles of Association have been adjusted.

Mata Acara	Meeting Agenda
Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.	Appointment of the composition of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company including Independent Commissioners of the Company as well as the determination of honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners as well as salaries and other benefits for members of the Board of Directors of the Company.

Mata Acara

Keputusan

1. Menyetujui rencana penambahan modal Perseroan dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 2.000.000.000(dua miliar) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500,-(limaratus Rupiah) setiap saham ("Saham Baru") yang ditawarkan dengan memperhatikanPeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Terbatas I, dengan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Terbatas I setelah selesainya pelaksanaan HMETD oleh para pemegang saham Perseroan;
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, seperti penunjukan Penjamin Emisi/Pembeli Siaga, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro Administrasi Efek dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015 yang meliputi:
   i. menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
   ii. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran UmumTerbatas I;
   iii. menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
   iv. menentukan Jadwal Penawaran Umum Terbatas I;
   v. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya;dan
   vi. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, efektifnya dan/atau sahnya hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yangnberwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Realisasi

Dana telah habis direalisasikan.

Meeting Agenda

Resolutions

1. Approve the Company's plan with additional capital by granting Rights Issues I to the Shareholders by issuing Preemptive Rights ("HMETD") with the maximum amount of 2,000,000,000 (two billion) ordinary shares with a value of Rp500.-(five hundred Rupiah) per offered share by observing the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Additional Capital of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights (POJK No. 32/2015"), which is the implementation of Law No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 concerning the Capital Market.
2. Approved the amendment to the Company's Articles of Association, including but not limited to the amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association on the increase of the Issued Capital and the Paid-Up Capital of the Company in accordance with the proceeds of the Limited Public Offering I, by granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the number of new issued shares and to increase the Company's Issued Capital and Paid-Up Capital in accordance to the proceeds of the Limited Public Offering I after the completion of the Pre-emptive Rights execution by the shareholders of the Company;
3. Approved to grant the power and authority to the Board of Directors of the Company with the rights of substitution to conduct any and all actions related to matters relating to the Limited Public Offering I, such as the appointment of Underwriters, Public Accounting Firms, Legal Consultants, Securities Administration Agencies, and other related institutions, as well as granting the power and authority to the Board of Directors of the Company to perform all necessary actions related to the Limited Public Offering I by considering the prevailing laws and regulations that are applicable in the Capital Market, particularly POJK 32/2015 that covers the following:
   i. Determining ratios of the shareholders entitled for the Pre-emptive Rights;
   ii. Determining the implementation price in the framework of the Limited Public Offering I;
   iii. Determining the date of the List of Shareholders entitled to the Pre-emptive Rights;
   iv. Determining the schedule of Limited Public Offering I;
   v. Signing the required documents for the Limited Public Offering I, including the notarial deeds and their amendments and/or additions; and
   vi. Performing all necessary action related to the Limited Public Offering I, without any action being exempted, by taking into account the prevailing laws and regulations and the applicable regulations in the Capital Market.
4. Approved the listing of all New Shares in the Indonesia Stock Exchange in accordance with the prevailing laws and regulations.
5. Ratified and approved acts which have been and will be executed by the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company in terms of the Limited Public Offering I to the Shareholders, including but not limited to making and/or submitting information, including the initial prospectus, prospectus, and brief prospectus.
6. Granting the power and authority with the with the rights of substitution to the Board of Directors of the Company to act individually or collectively to take any required actions in the implementation, effectiveness and/or validity of matters submitted and/or decided in the meeting, including but not limited to re-state parts or all decisions in the Meeting agenda on a notarial deed, create or request all necessary deeds, letters, or documents required, present before authorized officials, request application to authorized officials to acquire approval, including from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, or report the matters to authorized officials, and to make any form of adjustments to obtain approval or endorsement of the reporting to apply for and execute all applications and other documents, to choose a position and to execute other actions that may be required, as well as to register or announce as referred to in the prevailing laws and regulations without any exceptions.

Realization

Funds have been realized.

RUPS Luar Biasa 2019-29 November 2019 | 2019 Extraordinary GMS-29 November 2019

Mata Acara	Meeting Agenda
Persetujuan pengunduran diri Direktur dan Penegasan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Approval the resignation of Director and determined the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Hong Kah Jin dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak Rapat ini ditutup dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan (*acquit et de charge*) kepada Bapak Hong Kah Jin yang mengundurkan diri tersebut di atas, sepanjang tindakan-tindakan beliau tersebut tercermin dalam buku Perseroan. 2. Menetapkan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020 sebagai berikut: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga Komisaris : Sugiono Djauhari Komisaris Independen : Didik Junaidi Rachbini Komisaris Independen : Hadi Cahyadi Komisaris Independen : Ali Said Direksi: Presiden Direktur : Sie Subiyanto Direktur : Ju Kian Salim Direktur : Alexander Yasa Direktur : Lora Oktaviani Direktur Independen : Sony 3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	**Resolutions** 1. Accepted the resignation of Mr. Hong Kah Jin as Director of the Company, effective since the closing of this Meeting by granting full release and discharge for the supervision and management actions (*acquit et de charge*) to Mr. Hong Kah Jin who resigned, provided that the actions are reflected in the Company's book. 2. Determined the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the term of office up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders that will be implemented in 2020 as follows: President Commissioner : Theo L. Sambuaga Commissioner : Sugiono Djauhari Independent Commissioner : Didik Junaidi Rachbini Independent Commissioner : Hadi Cahyadi Independent Commissioner : Ali Said Board of Directors: President : Sie Subiyanto Director : Ju Kian Salim Director : Alexander Yasa Director : Lora Oktaviani Independent Director : Sony 3. Granted full authority and power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors both individually or collectively to take any actions required related to decisions taken and/or decided in this Meeting, submit notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company above-mentioned in the Company List in accordance with the prevailing laws and regulations.
Realisasi Telah selesai direalisasikan. Telah Terealisasi. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam salinan Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.3 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H.,M.Kn,	**Realization** Has been realized. Changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors have been stated in the copy of the Deed of Extraordinary GMS No. 3 dated December 3, 2019 made by Notary Kristanti Suryani, S.H., M.Kn.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ tata kelola yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk menilai dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

Landasan Hukum

Pembentukan Dewan Komisaris Perseroan didasarkan pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33/2014);
3. Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan.

Kriteria Pengangkatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a governance organ that has the authority, duties, and responsibilities to assess and supervise the implementation of the Company's management carried out by the Board of Directors.

Legal Basis

The establishment of the Company's Board of Commissioners is based on several provisions, among others:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company;
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (POJK 33/2014);
3. Regulation of IDX No. I-A concerning Registration of Shares and Equity Securities in addition to Shares Issued by the Listed Companies; and
4. The Company's Articles of Association.

Appointment Criteria of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. Recommendation on the appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Directors to the GMS shall observe the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Kriteria Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
b. Cakap melakukan perbuatan hukum
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
   c. Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i. Pernah tidak mengadakan RUPS Tahunan
      ii. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
      iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
   e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
   f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman Dewan Komisaris, yakni lebih dari 2 (dua) orang anggota dan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Susunan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Criteria of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are those who meet the requirements at the time of appointment and during the term of office:

a. Have good character, moral, and integrity
b. Capable of taking legal actions
c. During 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
   a Has not been declared bankrupt
   b. Has not been a member of a Board of Directors and/or a member of a Board of Commissioners who has been found guilty of causing a company to be declared bankrupt
   c. Has not been convicted committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector
   d. Has not been a member of a Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners who during the term of office:
      i. Has not held an Annual GMS
      ii. Have been rejected by the GMS regarding his/her accountability as a member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners or has failed to give an accountability report to the GMS as a member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners
      iii. Has caused a company that obtains a license, approval or registration from the Financial Services Authority fail to meet the requirements to submit annual report and/or financial report to OJK
   e. Committed to comply with the laws and regulations
   f. Have knowledge and/or expertise in the field that is needed by the Company.

Board of Commissioners Composition

The composition of the Company's Board of Commissioners is in accordance with the Company's Articles of Association and the Board of Commissioners' Guidelines, which are more than 2 (two) members and at least 30% of the total members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. The composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2020 is as follows:

Nama | Name	**Jabatan** | Position	**Periode Jabatan** | Terms of Office
Theo L. Sambuaga	Presiden Komisaris | President Commissioner	2020-2023
Sugiono Djauhari	Komisaris | Commisioner	2020-2023
Anand Kumar	Komisaris | Commisioner	2020-2023
Didik Junaidi Rachbini	Komisaris Independen | Independent Commissioner	2020-2023
Hadi Cahyadi	Komisaris Independen | Independent Commissioner	2020-2023
Ali Said	Komisaris Independen | Independent Commissioner	2020-2023

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen sesuai Pasal 25 POJK 33/2014. Apabila Komisaris Independen menjabat sebagai Kepala Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Audit berikutnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib:
   a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
   b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; dan
   c. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
5. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam setiap

Term of Office of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are appointed for a certain term of office in accordance with the Article of Association. Members of the Board of Commissioners are appointed for a term of office of 1 (one), period which started from the closing of the appointing GMS up to the closing of third GMS after the date of the appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Commissioners at any time.

Members of the Board of Commissioners are appointed for a certain term of office in accordance with the Article of Association and the prevailing regulations. The term of office of Independent Commissioner is at most 2 (two) consecutive terms. An Independent Commissioner that has served for 2 (two) term of office periods can be reappointed in the next period provided that the Independent Commissioner declares to remain Independent in accordance to Article 25 POJK 33/2014. In the event an Independent Commissioner serves as the Head of Audit Committee, the Independent Commissioner can only be reappointed as Audit Committee for (1) one more Audit period position.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Pursuant to the Board of Commissioners Charter, the following are the duties and responsibilities of the Board of Commissioners:

1. The Board of Commissioners shall:
   a. Conduct supervision on the Company's management by Board of Directors in general, covering the Company in general or the Company's business as well as provides advice to the Board of Directors.
   b. Perform duties that are specifically mandated in accordance with the Article of Association, applicable laws and regulations, and/or based on the resolutions of the GMS; and
   c. Perform duties, responsibilities, and authority in accordance with the Article of Association of the Company and the resolutions of the GMS.
2. In implementing the supervision referred to paragraph (1), the Board of Commissioners shall direct, monitor, and evaluate the implementation of the strategic policies of the Company.
3. Members of the Board of Commissioners shall perform their duties and responsibilities as mentioned in paragraph (1) in good faith, full of responsibilities, and prudence.
4. Members of the Board of Commissioners shall perform their duties and responsibilities independently.
5. Members of the Board of Commissioners shall apply and ensure the implementation of Risk management and the principles of Good Corporate Governance

kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

6. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perseroan.
7. Dewan Komisaris wajib membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan.
8. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kepada kinerja komite yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku.
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
12. Tugas Presiden Komisaris sebagai *primus inter pares* adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.
13. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh perserta RUPS.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi tidak lebih dari 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain, dan anggota Dewan Komisaris tidak lebih dari 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.

Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan dan perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi

(GCG) in every business activities of the Company at every level in the organization.

6. The Board of Commissioners shall evaluate and approve the work plan of the Company.
7. The Board of Commissioners shall facilitate and encourage the business development efforts of the Company.
8. To support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish an Audit Committee and other committees in accordance with the applicable regulation.
9. The Board of Commissioners shall ensure the established committees have performed their duties effectively.
10. The Board of Commissioners shall evaluate the performance of each committee that assists the Board of Commissioners in performing their duties and responsibilities at every end of the fiscal year.
11. In certain circumstances, the Board of Commissioners shall implement the Annual GMS and other GMS in accordance with its authority as regulated in the regulations and the Article of Association.
12. The duty of the President Commissioner as primus inter pares is mainly to coordinate the activities of the Board of Commissioners and ensure that each member of the Board of Commissioners will be able to deliver their opinion based on adequate information.
13. The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. In the event all members of the Board of Commissioners are absent or unavailable, it is not necessary to be proven to a third party, then the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors. In the event all members of the Board of Commissioners and Directors are absent or unavailable, the GMS shall be chaired a shareholder present at the GMS, who is appointed from and by the GMS participants.

Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners may have concurrent positions as a member of the Board of Directors of no more than 2 (two) other companies or public companies, and as a member of the Board of Commissioners for no more than 2 (two) other companies or public companies.

If the member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions as a member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners can have concurrent positions at maximum 4 (four) other companies or public companies. Members of the Board of Commissioners can be a member of Committee at maximum for 5 (five) other companies or public companies, where he/she also has the responsibility as a

atau anggota Dewan Komisaris. Rangkap jabatan ini hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka yang lebih ketat berlaku.

member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners. The concurrent positions can only be done provided that it does not contradict other prevailing laws and regulations. In the event the regulation is different with the OJK regulation, the more strict regulation prevails.

Berikut adalah daftar Dewan Komisaris Perseroan beserta dengan keterangan rangkap jabatan masing-masing selama tahun 2020:

The following is the list of members of the Company's Board of Commissioners concurrent positions:

Nama Name	**Jabatan di Perseroan** Position in the Company	**Jabatan di Perusahaan** Position in the Company	**Jabatan di Anak Perusahaan/ Perusahaan Asosiasi** Position in Subsidiary
Theo L. Sambuaga	Presiden Komisaris President Commissioner	Komisaris PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk Commissioner of PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	Komisaris Commissioner
Sugiono Djauhari	Komisaris Commissioner	Beliau tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain. He does not have concurrent positions at other public companies.	Tidak ada None
Didik Junaidi Rachbini	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk • Ketua Komite Audit PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk • Anggota Komite Investasi PT Bowsprit Asset Management • President Commissioner and Independent Commissioner of PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk • Chairman of the Audit Committee of PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk • Member of the Investment Committee of PT Bowsprit Asset Management	Tidak ada None
Hadi Cahyadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Multipolar Tbk • Presiden Komisaris & Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Indonesian Paradise Property Tbk • Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sekar Bumi Tbk • Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Multipolar Tbk • President Commissioner & Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Indonesian Paradise Property Tbk • Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Sekar Bumi Tbk.	Tidak ada None
Ali Said	Komisaris Independen Independent Commissioner	Direktur PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk Director of PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	Tidak ada None
Anand Kumar	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk • Direktur Non-Eksekutif di Healthway Medical Corporation (Singapura) dan TVS Supply Chain Solutions (India) • Commissioner of PT Lippo Karawaci Tbk • Non-Executive Director at Healthway Medical Corporation (Singapore) and TVS Supply Chain Solutions (India)	Tidak ada None

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Perseroan memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk membantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Committees under the Board of Commissioners

The Company has committees under the Board of Commissioners to assist in performing its duties and responsibilities, namely: Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Selama 2020, penilaian kinerja atas seluruh komite pendukung Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan lingkup kerjanya.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

During 2020, the performance assessment of Committees was conducted by the Board of Commissioners in accordance with the GCG principles and the objectives of the Company. The Board of Commissioners considers that all committees have conducted their duties and responsibilities properly in accordance with their scope of work.

Piagam Dewan Komisaris

Perseroan memiliki Piagam Dewan Komisaris yang telah diimplementasikan secara efektif sejak Februari 2016. Piagam Dewan Komisaris berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan dan sesuai dengan perundangan yang berlaku sehingga dapat mengawasi kinerja Direksi lebih baik dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan terbaik Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Piagam Dewan Komisaris telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Dewan Komisaris, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2020

Selama 2020, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan Dewan Komisaris mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menganalisis, memberikan masukan dan bersama-sama Direksi menyetujui Rencana Bisnis yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Melakukan kajian atas kinerja keuangan Perseroan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan atau rapat Komite Audit.
3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan Audit Eksternal maupun regulator.
4. Menelaah dan menilai Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 yang diantaranya memuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2019.
5. Menyetujui Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020, 30 Juni 2020 dan 30 September 2020.
6. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
7. Mengevaluasi dan memberikan keputusan atas proposal investasi yang diajukan Direksi.
8. Memberikan persetujuan atas kajian dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam usulan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS.

Board of Commissioners Charter

The Company has the Board of Commissioners Charter, which has been effectively implemented since February 2016. The Board of Commissioners Charter functions to assist the Board of Commissioners in performing their duties and responsibilities optimally, transparently, and in accordance with the applicable legislation, enabling it to monitor the performance of Directors better in implementing management in the best interest of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company.

The Board of Commissioners Charter has been signed by all members of the Board of Commissioners and must be adhered to, obeyed, and implemented by all members of the Board of Commissioners. In the event of a violation of the Board of Commissioners Charter, the provisions as stipulated in the Company's Articles of Association and the Capital market Regulations shall apply.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2020

During 2020, the duties and responsibilities implemented by the Board of Commissioners include the following activities:

1. Analyze, provide input, and collectively with the Board of Directors approve the Business Plan that includes the Company's annual budget for the 2021 fiscal year.
2. Reviewing the Company's financial performance in every Board of Commissioners meetings and/or Audit Committee meetings.
3. Ensuring that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit, including improvements to the examination findings of External Audit and regulators.
4. Review and assess the Company's 2020 Annual Report, which includes the financial statements consisting of balance sheets and the profit and loss calculation of the 2019 fiscal year.
5. Approving the Consolidated Interim Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the periods ended march 31, 2020, June 30, 2020, and September 30, 2020.
6. Appoint the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2020.
7. To evaluate and make decisions on investment proposals submitted by the Board of Directors.
8. Provide approval on the review and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee in the proposed remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners to the GMS.

KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan tersebut;
c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang usaha utama Perusahaan; dan
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Masa Jabatan

Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen sesuai Pasal 25 POJK 33/2014. Apabila Komisaris Independen menjabat sebagai Kepala Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Audit berikutnya.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Criteria of Independent Commissioners

The appointment of the Company's Independent Commissioners shall meet the following requirements:

a. Do not work or have authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise over the activities of the Company within the last 6 (six) months, unless for a reappointment as an Independent Commissioner of the Company for the next period;
b. Do not have direct or indirect shares of the Company;
c. Do not have any affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or majority shareholders of the Company; and
d. Do not have any direct or indirect business relationship with the Company's activities.

Term of Office

The term of office of Independent Commissioner is at most 2 (two) consecutive terms. An Independent Commissioner that has served for 2 (two) terms of office can be reappointed in the next period provided that Independent Commissioner declares to the GMS that he/she will remain Independent, in accordance with Article 25 POJK 33/2014. In the event the Independent Commissioner serves as Chairman of the Audit Committee, he/she only can be reappointed in the Audit Committee for one more period.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen / Statement of Independency of Independent Commissioners

Aspek Independensi	Didik Junaidi Rachbini	Hadi Cahyadi	Ali Said	Independency Aspects
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali diangkat kembali menjadi Komisaris Independen untuk periode berikutnya;	√	√	√	Do not work or have authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise over activities of the Company within the last 6 (six) months, unless reappointed as an Independent Commissioner of the Company for the next period;
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;	√	√	√	Do not have direct or indirect shares of the Company;
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan.	√	√	√	Do not have any affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders of the Company.
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.	√	√	√	Do not have any direct or indirect business relationship with business activities of the Company.

DIREKSI

Landasan Hukum

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi juga mewakili Perseroan secara kolegial baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pembentukan Direksi Perseroan didasakan pada beberapa ketentuan antara lain:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33/2014).
3. Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
4. Anggaran Dasar Perseroan.

Kriteria Pengangkatan Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Seluruh anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Direksi, yaitu:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i. Pernah tidak mengadakan RUPS Tahunan;
      ii. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung

BOARD OF DIRECTORS

Legal Basis

The Board of Directors is the organ of the Company that has the authority and full responsibility for the Company's management for the Company's interests, in accordance with the Company's goals and objectives. The Board of Directors also represents the Company collegially both inside and outside the court in accordance with the Company's Articles of Association.

Legal basis for the formation of the Company's Board of Directors includes:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (POJK 33/2014);
3. IDX Regulation No. I-A concerning Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies;
4. Company's Articles of Association.

Criteria for Appointment of the Board of Directors

Members of the Board of Directors are appointed and/or dismissed by the GMS. Proposals for the appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Directors presented to the GMS must heed the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.

All members of the Board of Directors of the Company must meet the general requirements as stipulated in Article 15 of the Company's Articles of Association and the Board of Directors' Charter, namely:

1. Having good character, morals and integrity;
2. Capable of conducting any legal action;
3. Within the last 5 (five) years prior to the appointment and during his/her term of office:
   a. Never been declared bankrupt;
   b. Never been part of a Board of Directors and/or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt;
   c. Never been convicted of a criminal act that caused losses to state finances and/or was related to the financial sector; and
   d. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who during his tenure:
      i. Ever refrain from conducting annual GMS;
      ii. The responsibility report as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners was rejected by the GMS or ever refrain from submitting a responsibility

jawaban sebagaianggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

iii. Pernah menyebabkan perusahaanyang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

e. Mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

report as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and

iii. Ever caused a company that obtain permit, approval, or effective statement from the OJK failed to submit annual reports and/or financial statements to OJK.

e. Having a commitment to comply with laws and regulations;

f. Having sufficient knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.

Masa Jabatan

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 1 (satu) periode dari terhitung ditutupnya RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Term of Office

Members of the Board of Directors are appointed at the Bank's GMS for a term of 1 (one) period from the closing of the GMS which appoints the members of the Board of Directors to the closing of the third annual GMS after the date of their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors at any time. Members of the Board of Directors whose term of service has ended may be reappointed by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Struktur Direksi

Berdasarkan Piagam Direksi, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur, seorang Wakil Presiden Direktur (jika diangkat) dan seorang Direktur.

Board of Directors Structure

Pursuant to the Board of Directors Charter, the Company is managed and led by the Board of Directors consisting of at least 3 (three) Board of Directors members: a President Director, a Vice President Director (if appointed); and a Director.

Susunan Direksi Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors of the Company as of December 31, 2020 is as follows:

Nama | Name	**Jabatan** | Position
Sie Subiyanto	Presiden Direktur | President Director
Rudy Halim	Direktur | Director
Tevilyan Yudhistira Rusli	Direktur | Director
Ju Kian Salim	Direktur | Director

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Piagam Direksi, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang sudah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mengurus kekayaan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Pursuant to the Board of Directors Charter, the following are the duties and responsibilities of the Board of Directors:

1. The Board of Directors is in charge of running and responsible for the management of the Company for the interest of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company that have been established in the Articles of Association.
2. The Board of Directors shall manage the Company in accordance with its authority and responsibility as regulated in the Article of Association and the applicable regulations.
3. The Board of Directors manages the assets of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.

4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan.
6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
8. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite.
9. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 8, Direksi wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
10. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

4. The Board of Directors shall implement risk management and Good Corporate Governance principles in each activity of the Company and at all levels of the organization.
5. The Board of Directors designates the organization structure and working system of the Company.
6. The Board of Directors shall hold an Annual GMS and other GMS in accordance with the laws and Article of Association.
7. Each member of Board of Directors shall perform the duties and responsibilities as mentioned in paragraph (1) with good faith, full of responsibility, and prudence.
8. To support the effectiveness of the implementation of tasks and responsibilities, Board of Directors may establish committees.
9. In the establishment of committees stated in paragraph 8, the Board of Directors shall evaluate the committees' performance at every end of fiscal year.
10. The Board of Directors shall be held responsible for their duties implementation to the shareholders through the GMS.

Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Direktur

Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mewakili Perseroan dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawabnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Berikut adalah lingkup dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi Perseroan:

Duties & Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Members of the Board of Directors perform their duties and responsibilities as a representative of the Company as well as take a decision in accordance with each allocation of duty and responsibility. However, the implementation of the duty of each Director remains the collective responsibility of the Board of Directors;

Nama | Name	**Jabatan** | Position	**Ruang Lingkup Tugas**	Scope of Duty
Sie Subiyanto	Presiden Direktur | President Director	Fungsi dari Presiden Direktur adalah memimpin jalannya Perusahaan dengan memberi arahan dan koordinasi untuk pencapaian Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan melalui implementasi inisiatif inisiatif strategis Perusahaan, termasuk memimpin hubungan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan.	The function of the President Director is to lead the way of the Company by guiding and coordinating the realization of Vision, Mission, and Strategy of the Company through the implementation of Company strategic initiatives, including lead the Group's relationships with its stakeholders.
Rudy Halim	Direktur | Director	Bertanggung jawab memimpin pengembangan dan eksekusi strategi-strategi Perusahaan, mengawasi jalannya operasional dan prosedur organisasi serta mengembangkan kinerja dan strategi pertumbuhan, termasuk rencana Perseroan terkait pengembangan properti, marketing dan penjualan.	Responsible for leading the development and execution of company strategies, to oversee the organization's ongoing operations and procedures and develop performance and growth strategy, including Company's plan related to property development, marketing and sales.
Tevilyan Yudhistira Rusli	Direktur | Director	Bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan bisnis Perseroan. Posisi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan laba Perseroan serta melindungi aset Perseroan melalui pembentukan dan implementasi strategi bisnis, operational excellence, tata kelola, dan manajemen risiko termasuk pengendalian internal ke seluruh unit bisnis Perseroan.	Responsible to optimize the business and financial performance of the company. The goal of this position is to optimize the company revenue and profit and also to protect the Assets of the company via effective establishment and implementation of business strategy, operational excellence, governance and risk management including internal control for all business units the Company.
Ju Kian Salim	Direktur | Director	Bertanggungjawab dalam pengurusan pengelolaan kota dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas unit bisnis Perseroan.	Responsible for managing the township management and supervising all activities of the Company's business units.

Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain
b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain;
c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Concurrent Positions of the Board of Directors

Members of the Board of Directors may have concurrent positions as:

a. A member of the Board of Directors for maximum 1 (one) other company or public company;
b. A member of the Board of Commissioners for no more than 3 (three) other issuers or public companies;
c. A member of the Committee for no more than 5 (five) Committees in other Companies or public companies where he/she is also a member of the Board of Directors or Board of Commissioners.

Nama Name	**Jabatan di Perseroan** Position in the Company	**Jabatan di Perusahaan Lain** Position at Other Companies	**Jabatan di Anak Perusahaan/ Perusahaan Asosiasi** Position in Subsidiary
Sie Subiyanto	Presiden Direktur | President Director	-	Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur | President Director, Vice President Director
Rudy Halim	Direktur | Director	Direktur PT Lippo Karawaci Tbk	Tidak Ada | None
Tevilyan Yudhistira Rusli	Direktur | Director	Direktur PT Lippo Karawaci Tbk	Tidak Ada | None
Ju Kian Salim	Direktur | Director	-	Direktur | Director

Piagam Direksi

Perseroan telah memiliki Piagam Direksi yang telah efektif sejak Februari 2016 dan mengacu pada:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; dan
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

Piagam Direksi disusun sebagai pedoman kerja bagi Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan.

Piagam Direksi telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Direksi, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

Board of Directors Charter

The Company has the Board of Directors Charter effective since February 2016 and refers to:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. Regulation of the IDX No. I-A concerning Registration of Shares and Equity Securities in addition to Shares Issued by the Listed Company; and
4. Company's Articles of Association.

The Board of Directors Charter is regulated as a working guideline for the Board of Directors to perform their duties and responsibilities in a transparent, accountable, responsible, independent, and fair manner in the effort to achieve the objectives of the Company as well as provide the expected value of the interested parties. T

The Board of Directors Charter has been signed by all members of the Board of Directors and shall be obeyed, adhered to, and implemented by all members of the Board of Directors. In the event of a breach of the Board of Directors Charter, the provision applied follows the regulations in the Company's Articles of Association and the Capital market.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Kebijakan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pada POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi, di mana Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan melakukan evaluasi atas KPI dari Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sekali setiap tahunnya.

Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Dewan Komisaris menjalankan tugas, tanggung jawabdan wewenang sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan dan kegiatan usaha Perseroan.
3. Dewan Komisaris menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku
4. Dewan Komisaris memantau dan memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan.
5. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang bekerja secara efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kriteria penilaian kinerja Direksi mencakup:

1. Aspek Finansial
2. Aspek Pelanggan
3. Aspek Proses Internal
4. Aspek SDM

Pihak yang Memberikan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan sendiri oleh Dewan Komisaris, dan merupakan salah satu agenda rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang menentukan keputusan remunerasi yang diberikan. Selanjutnya, kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh pemegang saham melalui RUPS Tahunan. Evaluasi kinerja didasarkan pada keselarasan kinerja dengan visi dan misi Perseroan serta implementasi GCG.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Procedure for Performance Assessment

The policy on the performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners is based on POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination Committee, where the Nomination and Remuneration Committee of the Company evaluates KPIs from the Board of Directors and Board of Commissioners. The appraisal of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out once a year.

Kriteria Penilaian Kinerja

The criteria for the performance assessment of the Board of Commissioners include:

1. The Board of Commissioners performs its duties, responsibilities, and authorities in accordance with the Board of Commissioners Charter, the Company's Articles of Association, the prevailing laws and regulations, and/or the resolution of the General Meeting of Shareholders.
2. The Board of Commissioners supervises the management and business activities of the Company.
3. The Board of Commissioners organizes and attends the Board of Commissioners Meetings in accordance with the prevailing laws.
4. The Board of Commissioners continuously monitors and ensures the implementation of GCG.
5. The Board of Commissioners has committees that work effectively and comply with the prevailing rules.

The criteria for the performance assessment of the Board of Directors include:

1. Financial Aspect
2. Customer Aspect
3. Internal Process Aspect
4. HR Aspect

Party Giving the Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out by the Board of Commissioners, and is one of the meeting agenda of the Nomination and Remuneration Committee that determines the remuneration decision. Furthermore, the performance of the Board of Commissioners is evaluated by shareholders through the AGM. The performance assessment is based on the alignment of performance with the Company's vision and mission as well as GCG implementation.

Penilaian bagi KPI Direksi

Penilaian kinerja Direksi merupakan salah satu agenda rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang menentukan keputusan remunerasi yang diberikan. Kinerja Direksi dievaluasi baik secara individual maupun kolektif oleh RUPS. Penilaian atas kinerja anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan risalah rapat, presentasi di RUPS, kinerja Perseroan seperti yang disajikan dalam Laporan Tahunan dan kriteria lainnya.

Board of Directors KPI Assessment

The performance assessment of the Board of Directors is one of the main meeting agenda of the Nomination and Remuneration Committee that determines the remuneration decision. The performance of the Board of Directors is assessed both individually and collectively by the General Meeting of Shareholders. The performance assessment of members of the Board of Directors is performed by observing the minutes of meetings, presentations at the GMS, the Company's performance as presented in the Annual Report, and other criteria.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Perseroan mendasarkan prosedur remunerasi Dewan Komisaris Perseroan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 11 ayat 13 Akta No. 28 Tahun 2015,yang menyatakan bahwa gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) untuk para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam menjalankan fungsinya di bawah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan melalui RUPS, yang akan memberikan persetujuan dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, komponen remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri dari:

a. Gaji;
b. Honorarium;
c. Insentif dan/atau;
d. Tunjangan tetap dan/atau variabel.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

RUPS yang diselenggarakan pada 6 Juli 2020 telah memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya. Jumlah remunerasi, tunjangan dan bonus kinerja yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris pada 2020 adalah sebesar Rp2.983.600.000.

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Proposal Procedures up to the Remuneration Determination of the Board of Commissioners

The Company's procedure of remuneration for the Board of Commissioners is based on the Limited Liability Company Law Article 11 Paragraph 13 Deed of Articles of Association of the Company No. 28 of 2015, stipulating that members of the Board of Commissioners shall receive honorarium and/or other allowances in the amount and kind as determined by the GMS, and such authority by the GMS can be delegated to the Board of Commissioners, which then carry out this duty through the Nomination and Remuneration Committee.

The remuneration of the Board of Commissioners is determined through the GMS, which will provide approval and subsequently authorizes the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners, taking into account recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Remuneration Structure of the Board of Commissioners

Based on the Company's Articles of Association and the Nomination and Remuneration Committee Charter, the remuneration components of members of the Board of Commissioners consists of:

a. Salary;
b. Honorarium;
c. Incentives and/or;
d. Fixed and/or variable benefits.

Total Remuneration of the Board of Commissioners

The GMS held on July 6, 2020 has granted the authorization to the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners receives remuneration in the form of salaries and other benefits. The amount of remuneration and benefits for members of the Board of Commissioners in 2020 amounted to Rp2,983,600,000.

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi Direksi

Remunerasi bagi anggota Direksi ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan remunerasi Direksi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan ditetapkan serta disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Struktur Remunerasi Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, komponen remunerasi anggota Direksi terdiri dari:

a. Gaji;
b. Insentif dan/atau;
c. Tunjangan tetap dan/atau variabel.

Jumlah Remunerasi Direksi

Direksi menerima remunerasi dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya. Jumlah remunerasi, tunjangan dan bonus kinerja yang diberikan kepada anggota Direksi pada 2020 adalah sebesar Rp4.100.475.000.

Penerimaan Bonus Kinerja/Bonus Non Kinerja/Opsi Saham

Pada 2020, anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima bonus non kinerja dan opsi saham.

Hubungan antara Remunerasi dan Kinerja Perseroan

Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi disusun berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dikaitkan dengan:

a. Pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang;
b. Perbandingan remunerasi tahun sebelumnya;
c. Perbandingan remunerasi dengan perusahaan sejenis dan sama skala dalam industrinya; dan
d. Pencapaian KPI Dewan Komisaris dan Direksi.

KEBIJAKAN DAN FREKUENSI RAPAT

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau sedikitnya oleh 2 (dua) orang Komisaris atau oleh Rapat Direksi. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan anggota Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Proposal Procedures up to the Remuneration Determination of the Board of Directors

Remuneration of members of the Board of Directors is determined by referring to the provisions of the Company's Articles of Association. Determination of the remuneration of the Board of Directors is carried out by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, and is determined and ratified at the Company's Annual GMS.

Remuneration Structure of the Board of Directors

Based on the Company's Articles of Association and the Nomination and Remuneration Committee Charter, the remuneration components of members of the Board of Directors consists of:

a. Salary;
b. Incentives and/or;
c. Fixed and/or variable benefits.

Total Remuneration of the Board of Directors

The Board of Directors receives remuneration in the form of salaries and other benefits. The amount of remuneration and benefits for members of the Board of Directors in 2020 amounted to Rp4,100,475,000.

Acceptance of Performance Bonus, Non-performance Bonus, and Stock Options

In 2020, the Board of Commissioners and Board of Directors received no performance bonus, nor stock options.

Relations between Remuneration and the Company's Performance

The remuneration amount of members of the Board of Directors is formulated based on the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors members, which are related to:

a. Achievement of the Company's goals and performance;
b. Comparison to the remuneration in the previous year;
c. Remuneration comparison with similar companies; and
d. The Board of Directors' KPI Achievement.

POLICIES AND FREQUENCY OF MEETINGS

Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners shall convene at least 1 (one) meeting every 2 (two) months, except if deemed necessary by the President Commissioner or at least by 2 (two) Commissioners or by a Board of Directors Meeting. The Board of Commissioners shall hold meetings with members of the Board of Directors at least 1 (one) time every 4 (four) months.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Selama 2020, telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali rapat Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

The Board of Commissioners meeting is chaired by the President Commissioner, In the event the President Commissioner is absent or unavailable, which does not need to be proven to a third party, the meeting will be chaired by an individual appointed by and from members of the Board of Commissioner present. The Board of Commissioners meeting is valid and has the right to take a binding decision if more than ½ (one half) of the total members of the Board of Commissioners are present or with proxy in the meeting. During 2020, the Board of Commissioners convened 6 (six) meetings, with the following details:

No.	Tanggal | Date	Kehadiran Rapat | Meeting Attendance					
		TLS	SD	DJR	HC	AS	AK*
1	17 April | April 17, 2020	√	√	√	√	√	-
2	15 Juni | June 15, 2020	√	-	√	√	√	-
3	22 Juli | July 22, 2020	√	√	√	√	√	√
4	22 Oktober | October 22, 2020	√	√	√	√	√	√
5	25 November | November 25, 2020	√	√	√	√	√	√
6	8 Desember | Desember 8, 2020	√	-	√	√	√	√
Jumlah Rapat | Number of Meeting		6	6	6	6	6	4
Jumlah Kehadiran | Attendance		6	4	6	6	6	4
Tingkat Kehadiran | Attendance Level		100%	66,67%	100%	100%	100%	100%

Keterangan | Notes:
TLS = Theo L. Sambuaga, SD = Sugiono Djauhari, DJR = Didik Junaidi Rachbini, HC = Hadi Cahyadi, AS = Ali Said, AK= Anand Kumar
*) Efektif menjabat mulai 6 Juli 2020 | Effective from 6 July 2020.

Rapat Direksi

Direksi Perseroan mengadakan rapat Direksi secara berkala yaitu 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat dapat dilakukan setiap waktu, apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi.

Rapat Direksi telah dilaksanakan secara rutin 1 (satu) kali dalam setiap minggu. Selama 2020, rapat Direksi telah dilaksanakan sebanyak 30 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Board of Directors Meeting

The Board of Directors convenes Board of Directors meeting periodically, namely 1 (one) time every month. Meetings can be held at any time, if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors, upon the written request of one or more members of the Board of Commissioners, or of 1 (one) person or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights. The Board of Directors must hold a meeting with the Board of Commissioners on a regular basis at least 1 (one) time every 4 (four) months. Every policy and strategic decision must be decided at a meeting of the Board of Directors.

The Board of Directors' meeting has been held regularly 1 (one) time every week. During 2020, the Board of Directors' meetings were held 30 times, with the following details:

No.	Tanggal | Date	Kehadiran Rapat | Meeting Attendance						
		SS	JKS	AY*	LO*	SN*	RH*	TYR*
1	7 Januari | January 7, 2020	√	√	√	-	√	-	-
2	28 Januari | January 28, 2020	√	√	√	√	√	-	-
3	12 Februari | February 12, 2020	√	√	√	√	-	-	-
4	18 Februari | February 18, 2020	√	√	√	√	-	-	-
5	4 Maret | March 4, 2020	√	√	√	√	√	-	-
6	11 Maret | March 11, 2020	√	√	√	√	√	-	-
7	16 Maret | March 16, 2020	√	√	√	√	√	-	-
8	30 Maret | March 30, 2020	√	√	√	√	-	-	-
9	6 April | April 6, 2020	√	√	√	√	-	-	-
10	14 April | April 14, 2020	√	√	√	√	-	-	-

No.	Tanggal | Date	Kehadiran Rapat | Meeting Attendance						
		SS	JKS	AY*	LO*	SN*	RH*	TYR*
11	21 April | April 21, 2020	√	√	√	√	-	-	-
12	27 April | April 27, 2020	√	√	√	√	-	-	-
13	4 Mei | May 4, 2020	√	√	√	√	-	-	-
14	11 Mei | May 11, 2020	√	√	√	√	-	-	-
15	18 Mei | May 18, 2020	√	√	√	√	-	-	-
16	2 Juni | June 2, 2020	√	√	√	√	-	-	-
17	8 Juni | June 8, 2020	√	√	√	√	-	-	-
18	15 Juni | June 15, 2020	√	√	√	√	-	-	-
19	22 Juni | June 22, 2020	√	√	√	√	-	-	-
20	13 Juli | July 13, 2020	√	√	-	-	-	√	√
21	20 Juli | July 20, 2020	√	-	-	-	-	√	√
22	27 Juli | July 27, 2020	√	-	-	-	-	√	√
23	4 Agustus | August 4, 2020	√	√	-	-	-	√	√
24	11 Agustus | August 11, 2020	√	√	-	-	-	√	√
25	24 Agustus | August 24, 2020	√	√	-	-	-	√	√
26	1 September | September 1, 2020	√	√	-	-	-	√	√
27	7 September | September 7, 2020	√	√	-	-	-	√	√
28	21 September | September 21, 2020	√	√	-	-	-	√	√
29	20 Oktober | October 20, 2020	√	√	-	-	-	√	√
30	17 November | November 17, 2020	√	√	-	-	-	√	√
Jumlah Rapat | Number of Meeting		30	30	19	19	19	11	11
Jumlah Kehadiran | Attendance		28	28	19	18	05	11	11
Tingkat Kehadiran | Attendance Level		93,33%	93,33%	100%	94,73%	26,31%	100%	100%

Keterangan | Notes:
SS = Sie Subiyanto, JKS = Ju Kian Salim, LO = Lora Oktaviani, AY = Alexander Yasa, SN = Sony, RH = Rudy Halim, TYR = Tevilyan Yudhistira Rusli
*) Efektif menjabat hingga/mulai 06 Juli 2020 | Effective until/starting July 06, 2020.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama 2020, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors

During 2020, joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been held 5 (five) times, with the following details:

No.	Tanggal | Date	Kehadiran Rapat | Attendance												
		TLS	SD	DJR	HC	AS	AK*	SS	JKS	AY*	LO*	SN*	RH*	TYR*
1	17 April 2020	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-	-
2	15 Juni 2020	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-
3	22 Juli 2020	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√
4	22 Oktober 2020	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√
5	25 November 2020	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√
Jumlah Rapat | Number of Meeting		5	5	5	5	5	3	5	5	2	2	1	3	3
Jumlah Kehadiran | Attendance		5	4	5	5	5	3	5	5	2	2	2	3	3
Tingkat Kehadiran | Attendance Level		100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%

Keterangan | Notes:
TLS = Theo L. Sambuaga, SD = Sugiono Djauhari, DJR = Didik Junaidi Rachbini, HC = Hadi Cahyadi, AS = Ali Said, AK = Anand Kumar, SS = Sie Subiyanto, JKS = Ju Kian Salim, LO = Lora Oktavian, AY = Alexander Yasa, SO = Sony, RH = Rudy Halim, TYR = Tevilyan Yudhistira Rusli
*) Efektif menjabat hingga/mulai 06 Juli 2020 | Effective until/starting July 06, 2020.

HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lainnya, serta Pemegang Saham

Selain Bapak Anand Kumar, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Bapak Anand Kumar merupakan salah satu anggota Komite Investasi Gateway Partners Limited (GP), yaitu general partner yang memiliki pengendalian penuh atas usaha dan hal-hal terkait Gateway Fund I, LP (Fund). Fund mempunyai 100% kepemilikan saham atas GWI, di mana GWI memiliki 2,8% saham atas Perseroan. Pengungkapan ini telah dilaporkan Bapak Anand Kumar kepada OJK dalam Surat No. 111/LC-COS/VII/2020.

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lainnya, serta Pemegang Saham

Tidak ada anggota Direksi yang memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Utama/Pengendali.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Affiliation Relations between Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, Other Members of the Board of Commissioners, and Shareholders

Apart from Mr. Anand Kumar, no member of the Board of Commissioners has affiliation in the form of family relationships and financial relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major/Controlling Shareholders.

Mr. Anand Kumar is a member of the Gateway Partners Limited (GP) Investment Committee, which is a general partner who has full control over the business and matters related to Gateway Fund I, LP (Fund). The Fund has 100% share ownership in GWI, in which GWI owns 2.8% of the shares of the Company. This disclosure has been reported by Mr. Anand Kumar to OJK in Letter No. 111/LC-COS/VII/2020.

Affiliation Relations between Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, Other Members of the Board of Directors, and Shareholders

None of the members of the Board of Directors are affiliated in the form of family relationships and financial relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Major/Controlling Shareholders.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya Perseroan khususnya terkait dengan kualitas dari pelaporan keuangan Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit harus senantiasa bersikap secara independen, adil serta profesional.

Kebijakan dan Dasar Hukum

Komite Audit Perseroan dibentuk oleh Dewan Komisaris melalui sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 054/LPCK/BOC/V/2015 tanggal 19 Mei 2015. Selain itu, Komite Audit terbentuk sesuai dengan dasar-dasar hukum:

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Keputusan Direksi PT BEI No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Tentang Peraturan No. I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is established by and responsible to the Board of Commissioners to assist the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners in overseeing the running of the Company, particularly related to the quality of the Company's financial reporting. The Audit Committee shall always be independent, fair, and professional.

Policy and Legal Basis

The Company's Audit Committee is established by the Board of Commissioners through the Decree of the Board of Commissioners No. 054/LPCK/BOC/V/2015 dated May 19, 2015. In addition, the establishment of the Audit Committee is in accordance with the following legal basis:

1. POJK No.55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee.
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Board of Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies.
3. Decree of the Board of Directors of PT BEI No. KEP-00001/BEI/01-2014 dated January 20, 2014 Regarding the Amendment to the Regulation No. I-A regarding Listing of Shares and Equity Securities other than Shares Issued by the Listed.

Profil Ketua dan Anggota Komite Audit

Komite Audit harus dijabat oleh paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan. Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit.

Profiles of Chairman and Members of the Audit Committee

The Audit Committee shall at least consist of 3 (three) members who are from Independent Commissioner and external party of the Company. A member of Audit Committee who is an Independent Commissioners will act as the Audit Committee Chairman.

Hadi Cahyadi
Ketua Komite Audit | Chairman of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. SK LC-019/VII/2020/COS tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 atau sampai diberhentikan dan/atau dibubarkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

Indonesian citizen, 54 years old, domiciled in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Serves as a Chairman of the Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK LC-019/VII/2020 COS dated July 6, 2020 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023 or until dismissed and/or dissolved based on the Decree of the Board of Commissioners.

Yani Bardan
Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

Warga negara Indonesia, berusia 43 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. SK LC-019/VII/2020/COS tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 atau sampai diberhentikan dan/atau dibubarkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

Rangkap Jabatan
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Bukit Barisan Indah Prima, PT Kaswari Unggul, PT Batanghari Sawit Sejahtera, PT Ekajaya Multi Perkasa, PT Arta Prigel, PT Adi Tarwan, PT Flora Wahana Tirta dan PT Perkebunan Inti Sawit Subur.

Pengalaman Kerja
Beliau memiliki pengalaman profesional hampir 20 tahun di kantor Akuntan Publik dan industri kelapa sawit, dimana hampir 10 tahun bekerja di PricewaterhouseCoopers Indonesia ("PwC"), Departemen Audit. Beliau bergabung dengan PwC pada awal tahun 2003 sebagai associate auditor dan posisi terakhir sebagai Manajer Senior. Pada April 2012, beliau bergabung sebagai kepala audit internal pada grup perkebunan kelapa sawit. Pada bulan Februari 2015, beliau ditunjuk sebagai CFO di BBIP Palm Group.

Riwayat Pendidikan
Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1998. Beliau juga memperoleh sertifikasi Akuntan Indonesia dan Akuntan Publik Indonesia.

Indonesian citizen, 43 years old, domiciled in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Serves as a member of the Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK LC-019/VII/2020/COS dated July 6, 2020 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023 or until dismissed and or dissolved based on the Decree of the Board of Commissioners.

Concurrent Positions
He also serves as Director of PT Bukit Barisan Indah Prima, PT Kaswari Unggul, PT Batanghari Sawit Sejahtera, PT Ekajaya Multi Perkasa, PT Arta Prigel, PT Adi Tarwan, PT Flora Wahana Tirta and PT Perkebunan Inti Sawit Subur.

Work Experience
He has almost 20 years of professional experience in Public Accountant Firm and the palm oil industry, with 10 years working experience in Audit Department of PricewaterhouseCoopers Indonesia ("PwC"). He joined PwC in early 2003 as an associate auditor and his last position was Senior Manager. In April 2012, he joined as head of internal audit for the oil palm plantation group. In February 2015, he was appointed as CFO at BBIP Palm Group.

Educational Background
He holds his Bachelor's degree in Accounting from Universitas Tarumanagara in 1998. He also obtained certification of Indonesian Accountant and Indonesian Public Accountant.

Chambers Peter Jhon
Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

Warga negara Australia, berusia 65 tahun, berdomisili di Australia.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. SK LC-019/VII/2020/COS tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 atau sampai diberhentikan dan/atau dibubarkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

Rangkap Jabatan
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Lippo Karawaci Tbk, Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Siloam International Hospitals Tbk dan Komisaris PT Kredit Pintar.

Pengalaman Kerja
Latar belakang beliau mencakup lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang keuangan, telekomunikasi dan pengawasan investasi. Beliau memiliki sejumlah posisi penting di berbagai perusahaan termasuk di Coopers dan Lybrand, PT Excelcomindo Pratama, Rajawali Corporation, Axiata and Farallon Capital (sebagai penasihat). Sebagai bagian dari perannya, ia juga memimpin Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko. Beliau juga mendirikan yayasan swasta di Indonesia guna membantu penciptaan ekonomi untuk masyarakat berbasis kelautan.

Riwayat Pendidikan
Beliau memperoleh gelar studi bisnis (Keuangan dan Akuntansi) RMIT dan memperoleh sertifikasi Akuntan Publik, profesional audit (Australia).

Australian citizen, 65 years old, domiciled in Australia.

Legal Basis of Appointment
Serves as member of the Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK LC-019/VII/2020/COS dated July 6, 2020 up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023 or until dismissed based on the Decree of the Board of Commissioners.

Concurrent Positions
Currently, he serves as a member of the Audit Committee of PT Lippo Karawaci Tbk, Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Siloam International Hospitals Tbk and Commissioner of PT Kredit Pintar.

Work Experience
His background experience more than 25 years in finance, telecommunications and investment supervision. He has a number of important positions in various companies including at Coopers and Lybrand, PT Excelcomindo Pratama, Rajawali Corporation, Axiata and Farallon Capital (as advisor). As part of his role, he also chairman of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Monitoring Committee. He founded a private foundation in Indonesia to help create an economy for a marine-based society.

Educational Background
He holds a business studies degree (Finance and Accounting) RMIT and is certified as a Certified Public Accountant, Auditing Professional (Australia).

Keanggotaan dan Masa Jabatan

Komite Audit dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan wajib dimuat dalam situs Bursa Efek dan/atau situs Perusahaan.

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Membership and Term of Office

The Audit Committee was established and ratified through the decision of the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of the Audit Committee shall be disclosed to the Financial Services Authority no later than 2 (two) working days after the appointment or dismissal and also has to be published in the Stock Exchange website and/or the Company's website.

The term of office of members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected only for the next 1 (one) period. The Independent Commissioner serving as the Chairman of the Audit Committee can only be reappointed as an Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee.

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit Perseroan yang ditunjuk Perusahaan telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) dari Anggota Komite Audit yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang menunjang fungsinya sebagai anggota Komite Audit;
5. Wajib memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa ata kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang terkait lainnya;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans atau non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
7. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencakan, memimpin, atau mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali bagi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit;
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib mengalihkan kepada pihak lain;
9. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain:

Independence of the Audit Committee

All members of the Company's Audit Committee who are appointed by the Company have fulfilled the following independence criteria:

1. Has high integrity, ability, adequate knowledge and experience in accordance with his educational background, as well as able to communicate well;
2. One of the members must have education background in Accounting and Finance;
3. Shall comply with the code of conduct of the Audit Committee determined by the Company;
4. Willing to continuously improve the competency through education, training, and seminar that support its function as members of the Audit Committee;
5. Shall have adequate knowledge to analyze and interpret financial statements, businesses of the Company, especially on services or business activities of the Company, audit process, risk management, and regulations in capital market and laws;
6. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Service Office, or other party that provides insurance or non insurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners;
7. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners, except for Independent Commissioners who are members of the Audit Committee;
8. Has no direct or indirect shares of the Company. In the event that a member of the Audit Committee obtains shares due to a legal event, within a maximum period of 6 (six) months after the acquisition of the shares, it must transfer the shares to other party;
9. Has no Affiliated relations with the Commissioners, Directors, or Major Shareholders of the Company;
10. Has no business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.

Duties and Responsibilities

Based on the Audit Committee Charter, the Audit Committee acts independently in performing its duties and responsibilities. In carrying out its functions, the Audit Committee provides opinions to the Board of Commissioners on financial statements or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifies matters that require the attention of the Board of Commissioners, and performs other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, among others:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
d. Melakukan penelaahan independensi, objektivitas, ruang lingkup penugasan, dan *fee* akuntan publik dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan atau pemberhentian auditor eksternal.
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi sepanjang belum dibentuknya komite yang berfungsi sebagai pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
g. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan sekaligus tidak menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perseroan.

a. Reviewing the financial information that will be released by the Company, such as financial statements, projections, and other financial information.
b. Reviewing the Company's compliance with other laws and regulations relating to the Company's activities.
c. Provide independent opinion in the event of differences of opinion between the management and public accountants for the services they provide.
d. Reviewing the independence, objectivity, scope of assignments, and fees of public accountants as well as providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment or dismissal of external auditors.
e. Reviewing the audit implementation by internal auditors and overseeing the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on findings of the internal auditors.
f. Reviewing the risk management implementation activities by the Board of Directors provided that no committee has been established as a risk monitor under the Board of Commissioners.
g. Review and report to the Board of Commissioners for complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Company.
h. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential of conflicts of interest of the Company.
j. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information while not using the information for personal interest or in any way that is against the law or detrimental to the Company.

Pelatihan Komite Audit

Sepanjang 2020, anggota Komite Audit telah mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya ialah sebagai berikut:

Audit Committee Training

Throughout 2020, members of the Audit Committee have participated in various trainings, including the following:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Hadi Cahyadi	Ketua Chairman	• "Customer Centricity in the Digital Age: When and Why Big Data can Yield Big Insights"	• 21 Januari | January 21	• Amphi Roskothen, INSEAD Asia Campus
		• "Business Law Forum 2020" [Omnibus Law: Government's Breakthrough for Economic Growth]	• 5 Maret | March 5	• Assegaf Hamzah & Partners
		• "COVID-19 Force Majeure?" Indonesian Legal Perspective & Potential Disputes Confirmation	• 20 April | April 20	• Assegaf Hamzah & Partners
		• Webinar: "Remote Online Learning in the Face of Disruption"	• 24 April | April 24	• McGraw-Hill Asia
		• Webinar: "Asia Pacific COVID-19, Resilience Webcast series: Redefining Business Continuity to Thrive"	• 30 April | April 30	• Deloitte
		• "Steadying your business and navigating your way forward in Indonesia amidst COVID-19"	• 12 Mei | May 12	• Ginting & Reksodiputro
		• Webinar: "A Spotlight on the Restructuring Options & Rescue Mechanisms Available to Businesses in Southeast Asia"	• 20 Mei | May 20	• Assegaf Hamzah & Partners with Rajah Tann Singapore
		• Webinar: "Kolaborasi dan Kartel: Hukum Persaingan Usaha Dalam Masa Pandemi dan Normal Baru"	• 27 Mei | May 27	• AHP
		• "Asia M&A Virtual Forum 2020"	• 15-19 Juni | June 15-19	• IFLR
		• Webinar: "Quo Vadis Tech Scene in Indonesia: Do We Need an Indonesian "Silicon Valley?"	• 12 Agustus | August 12	• FIABCI Chapter Indonesia and President University
		• Webinar The Jakarta Post Up Close #10 "Reimagining the Future of Indonesia's Economy, Live Talk Show dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani	• 19 Agustus | August 19	• The Jakarta Post
		• "Post COVID-19 Pandemic: How Entrepreneurs and Manager Adapt and Reshape Business Strategies"	• 19 November | November 19	• 9th ICEBM (International Conference on Entrepreneurship and Business Management)
		• CEO Webinar: "The Way Forward"	• 1-2 Desember | November 1-2	• FORBES Asia
Yani Bardan	Anggota Member	• Indonesia Knowledge Forum IX 2020	• 6 Oktober | October 6	• BCA
		• Market update dan strategi investasi di masa pandemi	• 5 November | November 5	• BCA

Selama 2020, Komite Audit Perseroan telah mengadakan 5 (lima) kali rapat internal dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

During 2020, the Company's Audit Committee held 5 (five) internal meetings with the frequencies and attendance as follows:

No.	Tanggal Rapat Internal Date of Internal Meeting	Kehadiran Rapat | Meeting Attendance				
		HC	LA	YP	YB*	CPJ*
1	16 April 2020 | April 16, 2020	√	√	√	-	-
2	20 Mei 2020 | May 20, 2020	√	√	√	-	-
3	11 Juni 2020 | June 11, 2020	√	√	√	-	-
4	20 Juli 2020 | July 20, 2020	√	-	-	√	√
5	21 Oktober 2020 | October 21, 2020	√	-	-	√	√
Jumlah Rapat | Number of Meeting		5	3	3	2	2
Jumlah Kehadiran | Attendance		5	3	3	2	2
Tingkat Kehadiran | Attendance Level		100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan | Notes:
HC = Hadi Cahyadi, LA = Laurensia Adi, YP = Yugi Prayanto, YB = Yani Bardan, CPJ = Chambers Peter Jhon
*) Efektif menjabat hingga/mulai 6 Juli 2020 | Effective serves on July 6, 2020

Piagam Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit, efektif sejak 10 Desember 2016. Piagam Komite Audit ini telah diumumkan di dalam situs Perusahaan. Piagam Komite Audit dapat ditinjau secara berkala atau diperbaharui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatian ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Audit Committee Charter

The Company has had an Audit Committee Charter, effective since December 10, 2016. This Audit Committee Charter has been announced through the Company's website. The Audit Committee Charter can be reviewed periodically or updated if deemed necessary to be further refined while still observing the provisions and legislation in force and approved by the Company's Board of Commissioners.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit pada Tahun Buku

Pada 2020, Komite Audit telah menjalankan fungsinya untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementation of Audit Committee Activities in the Fiscal Year

In 2020, the Audit Committee has carried out its functions to assist and facilitate the Board of Commissioners in carrying out their duties and oversight functions on matters relating to financial information, internal control systems, effectiveness of audits by external and internal auditors and compliance with applicable laws and regulations.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK LC-021/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi dan tugas yang berhubungan dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi juga untuk membantu tugas Dewan Komisaris beserta anggotanya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses nominasi dan remunerasi agar berjalan secara objektif, efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai visi Perseroan.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee of the Company was formed based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK LC-021/VII/2020 dated July 16, 2020. The Nomination and Remuneration Committee is formed by and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out functions and tasks related to the nomination and remuneration of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. The formation of the Nomination and Remuneration Committee is also aimed at assisting the duties of the Board of Commissioners, and its members, in supervising the nomination and remuneration process, so that it can run objectively, effectively and efficiently, and can improve the quality, competence and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners in achieving the vision. Company.

Kebijakan dan Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Profil Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling kurang 3 (tiga) anggota dengan ketentuan 1 (satu) orang ketua yang merangkap anggota dan juga Komisaris Independen. Anggota lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.

Policy and Legal Basis

The formation of the Nomination and Remuneration Committee refers to:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 dated December 23, 2015 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Profile of the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, with the condition that 1 (one) chairman who is also a member and also an Independent Commissioner. Other members may come from members of the Board of Commissioners, parties from outside the Company or officers under the Board of Directors in charge of HR.

Ali Said
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi | Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No.: SK LC-021/VII/2020/COS tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 atau sampai diberhentikan dan/atau dibubarkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

Indonesian citizen, 54 years old, domiciled in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Serves as a Chairman of the Nomination and Remuneration Committee based on the decision of the Board of Commissioners No.: SK LC-021/VII/2020/COS dated July 16, 2020 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023 or until dismissed and/or dissolved based on Decision of the Board of Commissioners.

Anand Kumar
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi | Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga negara Singapura, berusia 53 tahun, berdomisili di Singapura.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No.: SK LC-021/VII/2020/COS tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 atau sampai diberhentikan dan/atau dibubarkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

Singapore citizen, 53 years old, domiciled in Singapore.

Legal Basis of Appointment
Serves as a Member of the Nomination and Remuneration Committee based on the decision of the Board of Commissioners No.: SK LC-021/VII/2020/COS dated July 16, 2020 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023 or until dismissed and/or dissolved based on Decision of the Board of Commissioners.

Ishak Kurniawan
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi | Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga negara Indonesia, berusia 64 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No.: SK LC-021/VII/2020/COS tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 atau sampai diberhentikan dan/atau dibubarkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

Rangkap Jabatan
Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Lippo Karawaci Tbk, PT Siloam International Hospitals Tbk dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.

Pengalaman Kerja
Beliau memulai karirnya sebagai Manajer Konstruksi di PT Gemini Agro Karya (1983-1985). Beliau kemudian menjabat sebagai Senior Financial Analyst di Household Finance Corporation, Pomona, CA, USA (1989-1990). Beliau selanjutnya merintis karir di Citibank, Jakarta, dan menjabat berbagai posisi strategis selama 1991-2008.

Riwayat Pendidikan
Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari San Diego State University, San Diego, California, USA.

Indonesian citizen, 64 years old, domiciled in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Serves as a Member of the Nomination and Remuneration Committee based on the decision of the Board of Commissioners No.: SK LC-021/VII/2020/COS dated July 16, 2020 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023 or until dismissed and/or dissolved based on Decision of the Board of Commissioners.

Concurrent Position
Currently he also serves as a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Lippo Karawaci Tbk, PT Siloam International Hospitals Tbk and PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.

Work Experience
He started his career as a Construction Manager at PT Gemini Agro Karya (1983-1985). He then served as a Senior Financial Analyst at Household Finance Corporation, Pomona, CA, USA (1989-1990). He then started his career at Citibank, Jakarta, and held various strategic positions during 1991-2008.

Educational Background
He holds a Master of Business Administration degree from San Diego State University, San Diego, California, USA.

Sanjay Bharwani
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi | Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan
Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No.: SK LC-021/VII/2020/COS tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 atau sampai diberhentikan dan/atau dibubarkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

Rangkap Jabatan
Saat ini beliau menjabat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Lippo Karawaci Tbk, Pendiri dan CEO Bester & Co.

Pengalaman Kerja
Sebelum mendirikan Bester & Co, sebuah perusahaan konsultan yang fokus dalam mentransformasi organisasi dan meingkatkan kinerja bisnis, beliau memegang berbagai posisi kepemimpinan di Bank Mandiri, Bank BTPN dan Bank Permata. Di Bank mandiri beliau banyak memimpin banyak inisiatif transformasi korporasi berskala besar, lintas fungsi dan meningkatkan kinerja dan budaya Bank bersama perusahaan anak di Group. Di Bank BTPN beliau memegang posisi kepemimpinan dimana beliau memimpin tim untuk memperbaiki beberapa proses kerja untuk mempercepat waktu pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja bisnis.

Riwayat Pendidikan
Beliau merupakan lulusan Sarjana Teknologi (Bachelor of Technology) dari Federation University Australia pada tahun 1994 dan menyelesaikan pendidikan eksekutif tentang "Leading High Impact Teams" di Universitas Northwestern–Kellogg School of Management, "Strategic IQ" di Harvard Business School dan "Executing Strategy for Results" di London Business School.

Indonesian citizen, 51 years old, domiciled in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Serves as a Member of the Nomination and Remuneration Committee based on the decision of the Board of Commissioners No.: SK LC-021/VII/2020/COS dated July 16, 2020 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023 or until dismissed and/or dissolved based on Decision of the Board of Commissioners.

Concurrent Position
Currently he is a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Lippo Karawaci Tbk, Founder and CEO of Bester & Co.

Work Experience
Prior to establishing Bester & Co, a consulting firm that focuses on transforming organizations and improving business performance, he held various managerial positions at Bank Mandiri, Bank BTPN and Bank Permata. At Bank Mandiri, he led many large-scale, cross-functional corporate transformation initiatives and improved the performance and culture of the Bank with subsidiaries in the Group. At Bank BTPN he held a leadership position where he led the team to improve several work processes to speed up decision making times and improve business performance.

Educational Background
He is a Bachelor of Technology from Federation University Australia in 1994 and completed his executive education in "Leading High Impact Teams" at Northwestern University-Kellogg School of Management, "Strategic IQ" at Harvard Business School and "Executing Strategy for Results" in London Business. School.

Keanggotaan dan Masa Jabatan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diangkatdan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari pada masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota tersebut dianggap tidak dapat lagi melakukan tugasnya.

Membership and Term of Office

Members of the Nomination and Remuneration Committee can be appointed and dismissed based on the decision of the Board of Commissioners. Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed for a certain term and can be reappointed.

In accordance with the Articles of Association, the term of office of the members of the Nomination and Remuneration Committee shall not be longer than the term of office of the Board of Commissioners. Committee members are appointed and dismissed based on the decision of the Board of Commissioners meeting. Replacement of Committee members who are not members of the Board of Commissioners shall be carried out no later than 60 (sixty) days after the member is deemed unable to perform his/her duties.

Independensi dan Persyaratan Keanggotaan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang ditunjuk telah memenuhi syarat independensi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Anggota lainnya dari Komite Nominasi dan Remunerasi (selain Ketua) sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.
2. Jumlah anggota lainnya adalah <50% berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.
3. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan tidak boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
4. Anggota Komite harus memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
5. Anggota Komite tidak dapat merangkap sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
6. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Terkait dengan fungsi nominasi, komite mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi remunerasi, komite mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

Independence and Membership Requirements

The appointed members of the Company's Nomination and Remuneration Committee have met the independence requirements with the following criteria:

1. Other members of the Nomination and Remuneration Committee (other than the Chairman), mostly do not come from parties who hold managerial positions under the Board of Directors in charge of HR.
2. The number of other members is <50% from parties holding managerial positions under the Board of Directors in charge of HR.
3. Committee members who come from outside the Company may not have any affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the main shareholders of the Company.
4. Committee members must have experience related to Nomination and/or Remuneration.
5. Committee members are prohibited from concurrently serving as members of other Committees owned by the Company.
6. Members of the Board of Directors of the Company are prohibited from becoming members of the Nomination and Remuneration Committee.

Duties and Responsibilities

Based on the Nomination and Remuneration Committee Charter, the Nomination and Remuneration Committee must act independently in carrying out its duties and report directly to the Board of Commissioners.

In relation to the nomination function, the committee has the following duties and responsibilities:

1. Compiling the composition and nomination process for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
2. Develop policies and criteria required in the nomination process for candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
3. Assisting in the evaluation of the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
4. Formulate a capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
5. Reviewing and proposing candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

With regard to the remuneration function, the committee has the following duties and responsibilities:

1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:

a. Struktur remunerasi;
b. Kebijakan remunerasi; dan
c. Saran atas Remunerasi.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

a. Remuneration structure;
b. Remuneration policy; and
c. Remuneration advice.

2. Assisting the Board of Commissioners in conducting performance appraisals in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

Pendidikan dan Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama 2020, tidak ada pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti oleh para anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Nomination and Remuneration Committee Education and Training

During 2020, there were no education and/or training attended by members of the Nomination and Remuneration Committee.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi berlandaskan pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, yang menentukan bahwa rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali tiap 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilakukan bila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas Komite Nominasi danRemunerasi merupakan ketua Komite. Selama 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat internal dengan rincian sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meetings

The Nomination and Remuneration Committee Meeting Policy is based on the Nomination and Remuneration Committee Charter, which stipulates that the Nomination and Remuneration Committee meetings are held periodically at least 1 (one) time every 4 (four) months. The Nomination and Remuneration Committee Meeting can only be held if attended by a majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee and one of the majority of the Nomination and Remuneration Committee is the chairman of the Committee. During 2020, the Company's Nomination and Remuneration Committee held 3 (three) internal meetings with the following details:

No.	Tanggal Rapat Internal Date of Internal Meeting	Kehadiran Rapat | Meeting Attendance				
		AS	TLS*	IK	AK*	SB*
1	26 Juni 2020 | June 26, 2020	√	√	√	-	-
2	21 Desember 2020 | December 21, 2020	√	-	√	√	√
3	28 Desember 2020 | December 28, 2020	√	-	√	√	√
Jumlah Rapat | Number of Meetings		3	1	3	2	2
Jumlah Kehadiran | Number of Attendance		3	1	3	2	2
Tingkat Kehadiran | Level of Attendance		100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan | Notes:
AS = Ali Said, TLS = Theo L. Sambuaga, IK = Ishak Kurniawan, SB = Sanjay Bharwani *) Efektif menjabat hingga/mulai 6 Juli 2020 | Effective serves until/starting July 6, 2020

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan seluruh program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Nomination and Remuneration Committee Activities

During 2020, the Nomination and Remuneration Committee has implemented all work programs in accordance with its duties and responsibilities.

Piagam Komite Nominasi and Remunerasi

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang efektif berlaku sejak 18 Desember 2015. Semua kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mematuhi peraturan sejak tanggal yang sudah ditetapkan. Piagam ini berfungsi sebagai pedoman kerja agar anggota komite dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan dan ketentuan OJK, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Company has a Nomination and Remuneration Committee Charter which is effective since December 18, 2015. All activities of the Nomination and Remuneration Committee must comply with the regulations from the date that has been determined. This charter serves as a work guideline so that committee members can carry out their duties and responsibilities efficiently, effectively, transparently, in accordance with applicable laws and regulations and regulations of the OJK, so that they can be accounted for and accepted by interested parties.

akan dikaji secara berkala dan dilakukan penyempurnaan apaabila dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam menominasikan anggota Direksi, Perseroan mendahulukan pihak internal terlebih dahulu. Prosedur nominasi dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kandidat yang akan ditetapkan menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mana juga mengaji pada POJK No. 33/POJK.04/2014 ("POJK33/2014"), dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. Kemudian, kandidat tersebut akan diusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dimintakan persetujuan.

This Charter will be reviewed periodically and made improvements if deemed necessary according to the needs and developments of the Company based on the applicable regulations.

Directors Succession Policy

In nominating members of the Board of Directors, the Company prioritizes internal parties. The nomination procedure is carried out in a transparent manner and in accordance with the conditions and needs of the Company as well as compliance with the prevailing laws and regulations.

Candidates who will be appointed as members of the Board of Directors must meet the formal requirements and other requirements set out in the Company's Article of Association which is also reviewed in POJK No. 33/POJK.04/2014 ("POJK33/2014"), and has passed the Fit and Proper Test conducted by a professional institution. Then, the candidate will be proposed to the Shareholders at the GMS for approval.

UNIT AUDIT INTERNAL

Dasar Hukum Penunjukan

Berdasarkan POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, diangkat berdasarkan pada surat keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan untuk menjadi auditor internal sebagaimana diatur di dalam Piagam Unit Audit Internal.

Struktur dan Komposisi Unit Audit Internal

Pada 2020, Unit Audit Internal Perseroan memiliki 3 anggota yang berdedikasi penuh dan kompeten dalam bidangnya. Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dalam melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).

Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal diberitahukan secara tertulis kepada OJK.

INTERNAL AUDIT UNIT

Legal Basis of Appointment

Based on POJK No. 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter. The Head of the Internal Audit Unit is responsible to the President Director, appointed based on the Board of Directors' decision after obtaining approval from the Board of Commissioners by considering the fulfilment of the requirements to become an internal auditor as stipulated in the Internal Audit Unit Charter.

Structure and Composition of the Internal Audit Unit

In 2020, the Company's Internal Audit Unit has 3 members who are fully dedicated and competent in their fields. The Internal Audit Unit reports directly to the President Director and in carrying out its duties provides reports to the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee).

Auditors who sit in the Internal Audit Unit are directly responsible to the Head of the Internal Audit Unit. Every appointment, replacement or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit is notified in writing to the OJK.

Profil Ketua Unit Audit Internal

Head of the Internal Audit Unit Profile

Yoseph Tannos
Kepala Unit Audit Internal | Head of Internal Audit Unit

Warga negara Indonesia, berusia 46 tahun, berdomisili di Jakarta.

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Jakarta pada tahun 1996.

Beliau juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus bagi Kepala Satuan Pengawas Internal di Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) pada tahun 2013 dan menyandang gelar Professional Internal Audit dan memperoleh sertifikasi dari Yayasan Pendidikan Internal Auditor sebagai Qualified Internal Auditor pada tahun 2008. Beliau memiliki karir professional dalam bidang keuangan, akunting dan audit di berbagai posisi di PT Putra Duta Anggada dan PT Super Progress, serta posisi terakhir sebagai Manager Internal Audit di PT Lippo Karawaci Tbk sebelum bergabung dengan PT Lippo Cikarang Tbk.

Indonesian citizen, 46 years old, domiciled in Jakarta.

He holds a Bachelor of Accounting degree from the Perbanas School of Economics, Jakarta in 1996..

He has also attended special education and training for the Head of the Internal Supervisory Unit at the Center for Accounting and Finance Development (PPAK) in 2013 and holds the title Professional Internal Audit and obtained certification from the Internal Auditor Education Foundation as a Qualified Internal Auditor in 2008. He has a professional career in finance, accounting and auditing in various positions at PT Putra Duta Anggada and PT Super Progress, as well as his last position as Internal Audit Manager at PT Lippo Karawaci Tbk before joining PT Lippo Cikarang Tbk.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam pelaksanaannya, Unit Audit Internal bertugas untuk:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
3. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektivitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
4. Menilai efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman dan limit-limit yang telah ditetapkan.
5. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji akurasi dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
6. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan peraturan akuntansi yang digunakan serta menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.
7. Menyelenggarakan audit internal secara efektif dengan melakukan, audit regular maupun audit khusus. Pelaksanaan audit internal harus didukung oleh auditor yang independen, kompeten dan profesional.
8. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).

Description of Duties and Responsibilities

In practice, the Internal Audit Unit is tasked with:

1. Assisting the President Director and the Board of Commissioners, particularly the Audit Committee appointed by the Board of Commissioners, in monitoring and evaluating the implementation of internal control and risk management in accordance with Company policy.
2. Develop and implement an annual internal audit plan.
3. Reviewing the independence, efficiency and effectiveness of all management functions in the Company.
4. Assessing the effectiveness of the internal control system, including compliance with the policies, procedures, guidelines and limits that have been set.
5. Assessing the reporting system and the accuracy and timeliness of reporting to the Management.
6. Assessing the appropriateness and fairness of accounting guidelines and regulations that were used and assess their compliance to predetermined accounting policies and guidelines.
7. Organizing internal audits effectively by conducting, regular audits and special audits. The implementation of the internal audit must be supported by an independent, competent and professional auditor.
8. To report the audit findings directly to the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee).

9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa di semua tingkat manajemen.
11. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
12. Bekerja sama dengan Komite Audit.
13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
14. Melakukan investigasi apabila terdapat indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan.

Selain itu, Unit Audit Internal juga bertanggung jawab dalam:

1. Menyampaikan rencana audit tahunan yang fleksibel ke Komite Audit untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuan Komite Audit.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui termasuk tugas khusus yang diminta oleh Presiden Direktur dan Komite Audit.
3. Mempertahankan personil audit yang profesional dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.
4. Menyampaikan laporan berkala dan ringkasan kegiatan audit kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.
5. Membantu kegiatan investigasi terhadap adanya dugaan penyimpangan yang signifikan di dalam Perseroan dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.

Piagam Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sejak 16 Desember 2009. Perseroan membentuk Divisi Audit Internal untuk membantu menjalankan fungsi pemeriksaan dan memberikan penilaian secara independen dan objektif terhadap efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal serta kepatuhan atas proses tata kelola perusahaan dari setiap unit kerja dan proses harian.

Piagam Audit Internal telah diumumkan di dalam situs Perseroan. Piagam Audit Internal dapat ditinjau secara berkala atau diperbaharui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pelaksanaan Kegiatan Unit Audit internal

Selama 2020, Unit Audit Internal telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan 9 laporan hasil pemeriksaan. Seluruh laporan yang merangkum semua temuan hasil audit telah disampaikan kepada tiap manajemen unit

9. Examining and assessing the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
10. Providing suggestions for improvements and objective information on the activities examined at all levels of management.
11. Monitor, analyze and report on the implementation of the suggested improvements.
12. Working closely with the Audit Committee.
13. Develop a program to evaluate the quality of the Internal Audit activities that are carried out.
14. Carry out investigations if there are indications of fraud, embezzlement and other indications that are detrimental to the Company.

In addition, the Internal Audit Unit is also responsible for:

1. Submit a flexible annual audit plan to the Audit Committee for review and approval by the Audit Committee.
2. Carry out the approved annual audit plan including special tasks requested by the President Director and the Audit Committee.
3. Maintaining professional audit personnel with sufficient knowledge, ability and experience to carry out their duties.
4. Submit periodic reports and summaries of audit activities to the President Director and the Audit Committee.
5. Assisting investigative activities against suspected significant irregularities within the Company and submitting the audit results to the President Director and the Audit Committee.

Internal Audit Unit Charter

The Company has had an Internal Audit Charter since December 16, 2009. The Company established an Internal Audit Division to help carry out the audit function and provide an independent and objective assessment of the effectiveness of risk management, internal control and compliance with the corporate governance processes of each work unit and daily processes.

The Internal Audit Charter has been announced on the Company's website. The Internal Audit Charter can be reviewed periodically or updated if deemed necessary to be further refined with due observance of the prevailing laws and regulations and approved by the Company's Board of Commissioners.

Implementation of Internal Audit Unit Activities

During 2020, the Internal Audit Unit conducted audits and published 9 audit reports. All reports summarizing all audit findings have been submitted to each business unit management and have been followed up in accordance

usaha dan telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi audit.

Fokus audit selama tahun 2020 meliputi:
1. *Financial Statement Review*
2. *Inventory, Asset Recording & Legal*
3. *Land Bank & Available Unit*
4. *Procurement & Payment*

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Dalam rangka meningkatkan penerapan GCG serta prinsip kehati-hatian dalam tata kelola Perseroan, manajemen berkomitmen untuk meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya yang menekankan kepada pentingnya penerapan SPI yang andal dan efektif pada setiap jenjang organisasi.

Penerapan SPI secara efektif membantu Perseroan dalam pengendalian keuangan dan operasional, menjamin tersedianya informasi dan laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya risiko kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Keuangan

Perseroan menerapkan sistem pengendalian keuangan dengan menyediakan informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum kepada manajemen, para pemegang saham, serta pemangku kepentingan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, semua asesmen laporan keuangan yang relevan yang terkait dengan semua akun dan pengungkapan yang penting perlu ditangani dengan baik, antara lain:

- Keberadaan atau Terjadinya (*Existence/Occurrence*)-Aset, kewajiban dan kepemilikan dimiliki pada tanggal tertentu, dan transaksi tercatat merupakan kejadian yang benar-benar terjadi selama periode tertentu.
- Kelengkapan (*Completeness*)-Semua transaksi dan kejadian dan keadaan lain yang terjadi selama periode tertentu, dan seharusnya diakui pada periode tersebut, sebenarnya telah dicatat dengan lengkap.
- Hak dan Kewajiban (*Rights & Obligation*)-Aset adalah hak, dan hutang adalah kewajiban, entitas pada tanggal tertentu.
- Penilaian atau Penugasan (*Valuation or Assignment*)-Komponen aset, tanggung jawab, pendapatan dan biaya dicantumkan pada jumlah yang sesuai sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

with the audit recommendations.

The audit focus in 2020 includes:
1. Financial Statement Review
2. Inventory, Asset Recording & Legal
3. Land Bank & Available Unit
4. Procurement & Payment

INTERNAL CONTROL SYSTEM (ICS)

With the intention of improving the implementation of GCG and the principle of prudence in corporate governance, the Management is committed to enhancing work ethics, upholding high integrity and creating a culture that emphasizes the importance of implementing reliable and effective Internal Control at every level of the organization.

The effective implementation of Internal Control helps the Company in financial and operational control, ensures the availability of accurate information and reports, improves compliance with applicable laws and regulations, and reduces the risk of loss, deviation and violations of the precautionary principle.

Implementation of Internal Control System

Financial Control

The Company implements a financial control system by providing financial information in accordance with generally accepted accounting standards to management, shareholders and stakeholders to form the basis for decision making.

To meet these objectives, all assessments on relevant financial statement relating to all important accounts and disclosures need to be handled properly, including:

- Existence or Occurrence-Assets, liabilities and ownership held on a certain date, and recorded transactions are events that actually occurred during a certain period.
- Completeness-All transactions and other events and circumstances that occurred during a certain period, and should have been recognized during that period, have actually been recorded.
- Rights & Obligation-Assets are the rights and liabilities are the obligations of an entity at a specific date.
- Valuation or Assignment-The assets, responsibilities, revenues and costs are stated in the appropriate amount in accordance with the Financial Accounting Standard Guidelines (PSAK).

- Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)-*Item* dalam laporan keuangan dijabarkan dengan benar, diurutkan dan diklasifikasikan.

Pengendalian Operasional

Perseoran menerapkan sistem pengendalian operasional dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang membantu pencapaian tujuan operasional dan secara wajar memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang berlaku dipatuhi.

Kesesuaian SPI dengan COSO

Perseroan telah menerapkan SPI yang mengacu pada kerangka pengendalian internal dari COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Operasional-efektivitas dan efisiensi operasi entitas perusahaan, termasuk sasaran kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga aset perusahaan.
2. Tujuan Pelaporan-laporan keuangan dan non keuangan baik internal dan eksternal memenuhi prinsip keandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau persyaratan lainnya seperti yang ditetapkan oleh regulator, standar yang diakui secara umum, atau kebijakan entitas perusahaan.
3. Tujuan Kepatuhan-kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Perseroan itu tunduk.

Prinsip pengendalian internal perusahaan mencakup komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Kegiatan Pengawasan

Selain kelima komponen tersebut di atas, Perusahaan mulai menerapkan konsep tiga lini pertahanan, dimana pada Lini Pertama, manajemen operasional bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dan risiko perusahaan. Lini kedua adalah fungsi dari manajemen risiko, pengendalian, kepatuhan, Kualitas Kesehatan Keselamatan dan Lingkungan (K3L), keamanan yang secara rutin mengevaluasi sistem pengendalian internal dan risiko perusahaan. Lini ketiga adalah fungsi audit internal yang melakukan audit terhadap Lini Pertama dan Lini Kedua.

Efektivitas Pelaksanaan SPI Tahun 2020

Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal perusahaan dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko dan juga melalui kegiatan audit internal. Perbaikan atas sistem pengendalian internal dilakukan secara berkelanjutan dan diawasi pelaksanaannya untuk memastikan tercapainya tujuan pengendalian internal tersebut.

- Presentation and Disclosure-Items in the financial statements are correctly described, sorted, and classified.

Operational Control

The Company deploys an operational control system by implementing policies and procedures that support the achievement of operational objectives and fairly ensure that the prevailing laws and regulations are adhered to.

Alignment of the ICS With COSO

The Company has implemented an ICS that refers to the COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) internal control framework, which has the following objectives:

1. Operational Objectives–the effectiveness and efficiency of the entity's operations, including operational and financial performance targets, and safeguarding company's assets.
2. Reporting Objectives–both internal and external financial and non-financial reports fulfill the principles of reliability, timeliness, transparency, and other requirements stipulated by the regulator, generally recognized standards, or company policies.
3. Compliance Objectives–compliance with the prevailing laws and regulations to which the entity is subject.

The Company's internal control principles cover the following components:

1. Environmental Control
2. Risk Assessment
3. Control Activities
4. Information and Communication
5. Supervision Activities

In addition to the five components mentioned above, the Company has applied the three lines of defense, wherein the first line, operational management is responsible for the Company's internal control system and risk. The second line is the function of risk management, control, compliance, Quality, Health, Safety and Environment (K3L), security which routinely evaluates the Company's internal control system and risk. The third line is the internal audit function which audits the First Line and Second Line.

The Effectiveness of the Implementation of the ICS in 2020

The Company has evaluated its internal control system in relation to risk management through internal audit activities. Improvements to the internal control system are carried out on an ongoing basis and its implementation is monitored to ensure the achievement of these internal control objectives.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko yang efektif merupakan salah satu hal terpenting bagi keberhasilan Perseroan agar dapat mencapai keseimbangan antara risiko yang diambil atas keputusan bisnis dan tingkat keuntungan yang dihasilkan. Tujuan dari manajemen risiko dapat dicapai dengan penerapan kerangka manajemen risiko yang sehat, terdiri dari:

1. Kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk berbagai area risiko yang dihadapi Perseroan
2. Struktur organisasi yang tepat dengan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas pada berbagai jenjang jabatan.
3. Proses manajemen risiko yang memadai, pemantauan risiko dan proses pengendalian risiko.
4. Infrastruktur yang memadai untuk berjalannya Perseroan, seperti sistem Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia.

Pada tahun 2020, Perseroan tetap terus mempertahankan strategi pengelolaan risiko yang telah terbukti efektif diterapkan pada tahun sebelumnya. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi Perseroan terutama dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya daya beli konsumen.

Perseroan senantiasa mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan keseluruhan roda bisnisnya, baik yang dapat dikendalikan secara internal maupun risiko yang di luar kendali Perseroan. Risiko yang bersifat internal akan dikendalikan dan diminimalkan keberadaannya oleh Perseroan dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Risiko yang bersifat eksternal sedapat mungkin diidentifikasi secara seksama potensinya dan dampaknya bagi Perseroan sehingga pada akhirnya dapat mencapai kinerja yang lebih solid sebagai hasil upaya usaha Perseroan.

Penjabaran Risiko yang Dihadapi Perseroan

Berikut ini adalah penjabaran risiko yang potensial dihadapi oleh Perseroan dan berbagai cara mitigasinya:

A. Risiko Umum

1. **Kondisi Perekonomian secara Makro & Global**

   Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global. Perekonomian suatu negara memiliki kecenderungan tren siklikal, di mana ada masa pertumbuhan tinggi dan penurunan ekonomi.

   Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membawa dampak negatif pada perekonomian global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Effective risk management is one of the most important things for the success of the Company in achieving a balance between the risk taken and the profit generated from a business decision. The objectives of risk management can be achieved by implementing a sound risk management framework, consisting of:

1. Comprehensive risk management policies for various risk areas faced by the Company
2. Appropriate organizational structure with clear definitions of roles and responsibilities at various levels of positions.
3. Adequate risk management processes, risk monitoring and risk control processes.
4. Adequate infrastructure for the management of the Company, such as Information Technology and Human Resources systems.

In 2020, the Company continued to maintain risk management strategy that was proven effective in the previous year. Even though there are many challenges faced by the Company, especially the COVID-19 pandemic which resulted in decreased consumer purchasing power.

The Company always anticipates various risks that may arise its entire business cycle, both those that can be controlled internally and those that are beyond the Company's control. Internal risks will be controlled and minimized by the Company by applying the precautionary principle. External risks are carefully identified, including their potential and impact on the Company to achieve a more solid performance as a result of the Company's efforts.

Description of the Risks Faced by the Company

The following is a description of the potential risks faced by the Company and various ways of mitigating them:

A. General Risks

1. **Economic Conditions in Macro & Global**

   Changes in economic conditions are common in the dynamics of the global economy. The economy of a country tends to have a cyclical trend with periods of high growth on one hand and economic decline on the others.

   The COVID-19 pandemic in 2020 has a negative impact on the global and national economy. Economic growth in many countries including Indonesia which experiencing a recession, with minus economic growth in two consecutive quarters.

B. Risiko Pasar

1. Fluktuasi Pasar Properti

Sejalan dengan kompleksitas industri properti yang terus bertambah dan juga ukuran aset Perseroan yang semakin bertambah, risiko yang dihadapi juga semakin kompleks. Salah satu risiko eksternal dan juga utama adalah risiko dari fluktuasi pasar properti yang selama beberapa tahun terakhir berdampak langsung pada hasil usaha Perseroan.

Fluktuasi kegiatan dan kondisi pasar properti dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha, prospek pertumbuhan dan kondisi keuangan Perseroan. Pada 2020, ekonomi Indonesia mengalami resesi karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan pasar properti. Setiap perlambatan pertumbuhan pasar properti di Indonesia dapat berdampak pada menurunnya kegiatan ekspansi Perseroan pada bidang kawasan residensial, industrial dan properti komersial.

2. Risiko Meningkatnya Kompetisi di Pasar Properti Indonesia

Properti yang dikembangkan Perseroan di masa yang akan datang akan menghadapi kompetisi dari pengembang lainnya dalam hal lokasi, fasilitas, infrastruktur pendukung, pelayanan dan harga. Meningkatnya kompetisi antara pengembang properti dapat meningkatkan harga akuisisi lahan serta mengakibatkan kelebihan pasokan properti yang dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

C. Risiko Finansial

1. Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan terpapar risiko fluktuasi Rupiah terhadap mata uang asing seperti USD. Laba atau rugi selisih kurs akan mempengaruhi laba bersih Perseroan. Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan ekspektasi ke depan dari pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah dalam memitigasi risiko yang mungkin timbul dari pergerakan nilai tukar. Perseroan juga aktif melakukan analisis sensitivitas baik pada pelemahan maupun penguatan mata uang Rupiah pada dampaknya terhadap laba Perseroan.

2. Tidak Tersedianya Pendanaan

Perseroan membutuhkan pendanaan eksternal untuk membiayai modal kerja atau belanja modal untuk ekspansi usaha. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan dan biaya dari dana akan tergantung pada kondisi ekonomi dan pasar modal, tingkat suku bunga, ketersediaan dana dari bank atau kreditur lainnya, kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyaluran kredit ke sektor properti dan faktor-faktor lainnya.

B. Market Risk

1. Property Market Fluctuations

In line with the increasing complexity of the property industry and the increasing size of the Company's assets, the risks faced are also increasingly complex. One of the external and also major risks is the risk from fluctuations in the property market which over the past few years has a direct impact on the Company's results of operations.

Fluctuations in property market activities and conditions could adversely affect the Company's business activities, growth prospects and financial condition. In 2020, Indonesia's economy experienced a recession due to the COVID-19 pandemic which resulted in a slowdown in growth in the property market. Any slowdown in the growth of the property market in Indonesia could have an impact on the decline in the Company's expansion activities in the residential, industrial and commercial property sectors.

2. Risks of Increased Competition in the Indonesian Property Market

The properties developed by the Company will face competition from other developers, in terms of location, facilities, supporting infrastructure, services and prices. Increased competition between property developers can increase land acquisition prices and result in excess supply of property which can affect the Company's profitability.

C. Financial Risk

1. Foreign Exchange Rates

The Company is exposed to the risk of fluctuation of the Rupiah against foreign currencies such as USD. Foreign exchange gain or loss will affect the Company's net income. The Company closely monitors fluctuations in foreign currency exchange rates and future expectations of the market in order to mitigate risks that may arise from movements in exchange rates. The Company is also active in conducting sensitivity analysis both on the weakening and strengthening of the Rupiah currency on its impact on the Company's profits.

2. Unavailability of Funding

The Company requires external funding to finance working capital or capital expenditures for business expansion. The Company's ability to obtain funding and its cost from funds will depend on economic and capital market conditions, interest rates, availability of funds from the banks or other creditors, Bank Indonesia and the Financial Services Authority policies in lending to the property sector and other factors.

3. **Risiko Kredit**
   Risiko kredit adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Perseroan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan bersikap lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

4. **Risiko Suku Bunga**
   Risiko suku bunga terutama karena adanya pinjaman dengan suku bunga mengambang. Perseroan mengelola risiko suku bunga melalui kombinasi pinjaman dengan suku bunga tetap dan mengambang yang tepat dan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

5. **Risiko Likuiditas**
   Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Perseroan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal Perseroan, secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

6. **Risiko Harga**
   Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Perseroan memiliki risiko harga terutama karena investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Perseroan mengelola risiko harga dengan secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan harga pasar atas investasinya, serta selalu memantau perkembangan pasar global.

D. Risiko Hukum

1. **Perubahan Peraturan di Dalam Negeri**
   Perseroan berkomitmen untuk menaati semua peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada peraturan Pemerintah, dan membutuhkan persetujuan dan perizinan dari Pemerintah. Perubahan dan penambahan peraturan Pemerintah dapat berdampak negatif pada harga dan kemampuan Perseroan dalam mengembangkan usahanya.

3. **Credit Risk**
   Credit risk is the risk that occurs because the Company incurs losses arising from customers, clients or partners failing to fulfill their contractual obligations. The Company manages credit risk by setting limits on the amount of risk that can be accepted for each customer and being more selective in choosing banks and financial institutions, namely only well-known and reputable banks and financial institutions are selected.

4. **Interest Rate Risk**
   Interest rate risk is mainly due to loans with floating interest rates. The Company manages interest rate risk through a combination of loans with appropriate fixed and floating interest rates and monitoring the impact of interest rate movements to minimize negative impacts on the Company.

5. **Liquidity Risk**
   Liquidity risk is the risk where the Company's cash flow position shows that short-term revenue is not sufficient to cover short-term expenses. The Company manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents to meet the Company's commitments for normal operations of the Company, regularly evaluating projected cash flows and actual cash flows, as well as scheduled maturity dates of financial assets and liabilities.

6. **Price Risk**
   Price risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market prices. The Company has a price risk mainly due to the investments classified as available-for-sale. The Company manages price risk by regularly evaluating the financial performance and market price of its investments, and always monitoring global market developments.

D. Legal Risk

1. **Changes of Domestic Regulations**
   The Company is committed to complying with all applicable laws and regulations, The Company's business activities are highly dependent on Government regulations, and require approval and licensing from the Government. Changes and additions to Government regulations could have a negative impact on the price and ability of the Company to develop its business.

2. **Risiko Tidak Diperolehnya Semua Izin untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perseroan**
   Masing-masing unit bisnis Perseroan memerlukan izin-izin untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini. Apabila Perseroan gagal memperoleh izin yang diperlukan maka terdapat risiko adanya sanksi dari Pemerintah yang berupa penutupan, denda atau hukuman kurungan.

2. **Risk of not obtaining all licenses to carry out the Company's business activities**
   Each of the Company's business units requires permits to carry out its current business activities. If the Company fails to obtain the necessary permits, there is a risk of sanctions from the Government in the form of closure, fines or imprisonment.

E. Risiko Operasional

1. **Risiko Tidak Tercapainya Sasaran Proyek (Biaya, Mutu, Waktu) dalam Pelaksanaan Konstruksi**
   Konstruksi memiliki risiko tertentu, seperti kurangnya pasokan bahan baku atau tenaga kerja yang berkualitas, masalah teknis, lingkungan atau geologis. Pemogokan, litigasi, cuaca, banjir atau kenaikan biaya yang tidak diantisipasi sebelumnya dapat berakibat pada keterlambatan penyelesaian proyek, meningkatnya biaya, dan isu terkait QHSE (*Quality, Health, Safety, Environment*).

2. **Risiko Terlambat atau Tidak Selesainya Suatu Proyek yang Sedang Berlangsung Maupun Proyek yang Masih dalam Tahap Perencanaan**
   Kesuksesan Perseroan dan kinerja keuangannya tergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi, mengembangkan, memasarkan dan menjual proyek-proyek dan kemampuan Perseroan memadukan sumber pendanaan dengan kebutuhan dana yang tepat waktu. Kegiatan pembangunan yang dilakukan Perseroan mengandung berbagai risiko konstruksi, termasuk risiko keterlambatan dalam memperoleh izin yang diperlukan, ketersediaan bahan baku, kenaikan biaya konstruksi, bencana alam, dan ketergantungan pada kontraktor pihak ketiga, serta risiko turunnya permintaan pasar selama proyek dalam pembangunan.

3. **Risiko Ketergantungan kepada Para Kontraktor**
   Perseroan menunjuk kontraktor pihak ketiga untuk mengerjakan proyek *urban development*, residensial dan ritel, yang antara lain terdiri dari pekerjaan konstruksi, *pilling* dan pondasi, pembangunan dan instalasi, dekorasi interior, instalasi pendingin ruangan, elevator, taman dan *landscaping*.

   Dalam hal ini, terdapat risiko bahwa kontraktor mengalami kesulitan keuangan atau hal lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga berakibat pada terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek atau terjadinya tambahan biaya yang harus ditanggung Perseroan.

E. Operational Risk

1. **Risk of Not Achieving Project Goals (Cost, Quality, Time) in Construction**
   Construction carries certain risks, such as a lack of supply of raw materials or qualified labor, technical, environmental or geological problems. Strikes, litigation, weather, floods or unexpected increases in costs can result in delays in project completion, increased costs, and issues related to QHSE (Quality, Health, Safety, Environment).

2. **The risk of being behind schedule or not completing an ongoing project or the one that is still in the planning stage**
   The Company's success and financial performance depend on the Company's ability to identify, develop, market and sell projects and the Company's ability to combine funding sources with timely funding requirements. The development activities carried out by the Company carry various risks, including the risk of delays in obtaining the necessary permits, availability of raw materials, increases in construction costs, natural disasters, and dependence on third party contractors, as well as the risk of decreasing market demand during the project under construction.

3. **Risk of Dependence on Contractors**
   The Company appoints third-party contractors to work on urban development, residential and retail projects, which include construction, pilling and foundation, construction and installation, interior decoration, air conditioning installations, elevators, gardens and landscaping.

   In this case, there is a risk that the contractor experiences financial difficulties or other matters, which can affect his ability to complete the work, resulting in delays in project completion or additional costs that must be borne by the Company.

4. **Risiko Teknologi Informasi**
   Kinerja sistem dan teknologi informasi Perseroan sangat penting bagi operasi bisnis Perseroan. Kegagalan sistem yang menyebabkan gangguan dalam layanan atau ketersediaan sistem Perseroan dapat mempengaruhi operasional atau pendapatan Perseroan. Terjadinya risiko ini dapat mengakibatkan interupsi, penundaan, kehilangan atau kerusakan data, yang semuanya dapat memiliki efek merugikan material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha dan merugikan reputasi bisnis Perseroan.

5. **Risiko Pencemaran Lingkungan**
   Perseroan tunduk kepada hukum dan peraturan yang mengatur lingkungan hidup, yang antara lain mewajibkan pemilik real estat untuk memeriksa dan membersihkan limbah berbahaya dalam lahan properti. Sesuai peraturan, pemilik properti harus menanggung biaya pembersihan limbah beracun, dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan itu kemungkinan akan signifikan.

   Dalam hal ini, Perseroan telah secara aktif mengelola risiko dengan penerapan prosedur standar operasi yang ketat serta perlindungan asuransi. Dalam hal tata kelola limbah dan air bersih, Perseroan secara aktif terus meningkatkan kualitas layanan agar dapat terus menyediakan air bersih yang ramah lingkungan kepada penghuninya.

6. **Risiko Usaha yang Tidak Dapat Dikendalikan**
   Terdapat beberapa risiko usaha yang tidak dapat dikendalikan seperti kebakaran, banjir, teroris dan bencana gempa. Perseroan mengelola risiko ini dengan melindungi aset-aset Perseroan melalui asuransi. Namun masih ada kemungkinan ada faktor risiko baru yang belum diidentifikasi pada saat ini, faktor risiko tersebut dapat dianalisa dan dilindungi oleh asuransi dikemudian hari.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk semua anak usaha dan Perseroan induk melalui beberapa mekanisme, seperti aplikasi pada operasional usaha kajian rutin dan implementasi indikator kinerja utama. Selain itu, Perseroan menerapkan *Three Lines Model* yaitu melalui standarisasi kebijakan dan bisnis proses, penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta pelaksanaan audit secara periodik.

4. **Information Technology Risk**
   The performance of the Company's information technology and systems is very important for the Company's business operations. System failures may cause disruption in the services or availability of the Company's systems and may affect the Company's operations or revenues. The occurrence of this risk could result in interruption, delay, loss or damage to data, all of which could have a material adverse effect on our financial position and results of operations and harm to the Company's business reputation.

5. **Environmental Pollution Risk**
   The Company is subject to environmental laws and regulations, which, among other things, requires real estate owners to inspect and clean up hazardous waste in property land. By law, property owners must bear the costs of cleaning up the toxic waste, and the costs associated with it are likely to be significant.

   In this regard, the Company has been actively managing risk by implementing strict standard operating procedures and insurance protection. In terms of waste and clean water management, the Company continues to actively improve the quality of its services so that it can continue to provide clean water that is environmentally friendly to its residents.

6. **Uncontrollable Business Risk**
   There are several business risks that cannot be controlled, such as fire, flood, terrorism and earthquake disasters. The Company manages this risk by protecting the Company's assets with insurance. However, it is possible that there are new risk factors that have not been identified at this time, these risk factors can be analyzed and protected by insurance in the future.

Overview of the Effectiveness of the Risk Management System

The Company implements risk management for all its subsidiaries and parent company through several mechanisms, such as application in routine review business operations and implementation of key performance indicators. In addition, the Company implements the Three Lines Model, namely through standardization of policies and business processes, implementation of an internal control system and risk management, and periodic audits.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan organ GCG yang berperan sebagai penghubung antara Perseroan dan pemangku kepentingan terutama pemegang saham, otoritas pasar modal, dan masyarakat, secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Interaksi dan komunikasi yang baik antar pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan Perseroan kepada pemangku kepentingan dan pihak lainnya.

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah individu atau orang yang bertanggung jawab dari unit kerja yang melakukan fungsi sekretaris perusahaan. Fungsi ini dibentuk berdasarkan POJK No. 35/POJK/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Sekretaris Perusahaan

Piagam Sekretaris Perusahaan telah dibentuk oleh Perseroan sejak 18 Februari 2016. Piagam Sekretaris Perusahaan ditetapkan oleh Direksi. Sekretaris Perusahaan harus mengevaluasi, menilai dan melakukan perbaikan pada Piagam secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan. Selanjutnya, Piagam Sekretaris Perusahaan yang telah disahkan telah diumumkan di dalam situs Perusahaan.

Profil Sekretaris Perusahaan

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is a GCG organ that acts as a liaison between the Company and the stakeholders, especially the shareholders, capital market authorities, and the community. In performing his/her duty, the Corporate Secretary acts independently and in accordance with applicable laws and regulations. The Company expects to develop the quality of its relationships with the stakeholders and other parties.

Legal Basis for Corporate Secretary Appointment

The Corporate Secretary is an individual in charge of a work unit pursuant to POJK No.35/POJK/2014 dated December 8, 2014, concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Corporate Secretary Charter

The Corporate Secretary Charter has been established by the Company on February 18, 2016. The Corporate Secretary Charter is determined by the Board of Directors. The Corporate Secretary shall evaluate, assess, and make periodic improvements to the Charter in accordance with the development and needs of the Company. Furthermore, the Corporate Secretary Charter can be found on the Company's website.

Corporate Secretary Profile

Lora Oktaviani
Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, berusia 35 tahun, berdomisili di Bekasi.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanagara dan Master Hukum dari Universitas Indonesia. Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0049/VI/2018/CORSEC tertanggal 5 Juni 2018.

Pengalaman Kerja
Beliau memulai karirnya sebagai Legal Officer di PT Wahana Ottomira Multiartha Tbk (2008-2009), Board of Director Office Staff PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (2009). Kemudian bergabung di PT Sistech Kharisma sebagai Assistant Product Manager (2009-2011), Assistant President Director PT Amstrong Industri (2011) dan bergabung kembali di PT Wahana Ottomira Multiartha Tbk sebagai Legal Department Head (2011-2014). Kemudian sebagai Legal and External Affairs PT East Jakarta Industrial Park (2014-2016) dan terakhir menjabat sebagai Legal Department Head di Perseroan (2016-2018).

Indonesian citizen, 35 years old, domiciled in Bekasi.

She obtained a Bachelor's degree in Law from the Tarumanagara University and a Master's degree in Law from the University of Indonesia. She was appointed as a Corporate Secretary based on the Board of Directors Decree No. 0049/VI/2018/CORSEC dated June 5, 2018.

Work Experience
She began her career as a Legal Officer at PT Wahana Ottomira Multiartha Tbk (2008-2009), and a Board of Directors' Office Staff at PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (2009). She then joined PT Sistech Kharisma as an Assistant Product Manager (2009-2011), Assistant President Director of PT Amstrong Industri (2011) and rejoined PT Wahana Ottomira Multiartha Tbk as Head of Legal Department (2011-2014). She then worked as the Head of Legal and External Affairs of PT East Jakarta Industrial Park (2014-2016) and finally served as the Head of the Legal Department at the Company (2016-2018).

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan secara umum namun tidak terbatas pada hal-hal berikut, yakni:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan:
4. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dan Pemegang Saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
5. Mewakili Perusahaan dalam korespondensi dengan otoritas pasar modal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Perseroan.

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary include:

1. Follow the developments of the capital market, especially the applicable legislation;
2. Provide input to the Board of Directors and the Board of Commissioners in relation to compliance with the laws and regulations in the Capital Market sector;
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing corporate governance:
4. Act as a liaison between the Company and the Shareholders, the OJK, and other stakeholders; and.
5. Represent the Company in correspondence with the capital market authority pursuant to the authority granted by the Company.

Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Berikut adalah daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama 2020:

Corporate Secretary Training Program

The following is a list of training and competency development attended by the Corporate Secretary during 2020:

Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelatihan Date of Training	Penyelenggara Organizer
Seminar "Resilience In Turbulence: Bertahan di Tengah Badai"	9 Juni 2020 June 9, 2020	Universitas Tarumanagara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Workshop Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) dengan "Excellent Attitude For Corporate Secretary"	8 September 2020 September 8, 2020	ICSA
Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal ("PPKHPM")	3-20 Agustus 2020 18 November-11 Desember 2020 August 3-20, 2020 November 18,- December 11, 2020	FHP Law School

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Selama 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan pada 6 Juli 2020 dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK No. 16/2020).
2. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit (internal dan dengan Direksi), serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Jadwal rapat untuk tahun mendatang telah diatur dan diinformasikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite terkait dan akan disesuaikan kembali apabila diperlukan.
3. Menunaikan kewajiban dan kepatuhan atas Peraturan Pasar Modal.

Implementation of Corporate Secretary Duties

During 2020, the Corporate Secretary has performed the following duties, among others:

1. Organized the Annual GMS on July 6, 2020, pursuant to the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation ('OJK') No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (POJK No. 15/2020) and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically (POJK No. 16/2020).
2. Facilitating the holding of meetings of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee (internal and with the Board of Directors), as well as the Nomination and Remuneration Committee. The meeting schedule for the coming year has been arranged and communicated to the Board of Directors, Board of Commissioners and related Committees and will be readjusted if necessary.
3. Fulfill obligations and comply with Capital Market Regulations.

4. Sekretaris Perusahaan bersama-sama dengan Investor Relations menyelenggarakan Paparan Publik pada 14 Desember 2020 melalui Zoom Webinar. Laporan Hasil Paparan Publik telah disampaikan kepada BEI pada 17 Desember 2020 dan dapat dilihat pada tautan *link* https://youtube.com/user/ptlippocikarangtbk
5. Berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan sosialisasi sepanjang 2020 sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan GCG dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris untuk meningkatkan implementasi GCG.

Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan

1. Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan sesuai Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2 ("Peraturan X.K.2"):
2. Laporan Tahunan 2019 telah disampaikan pada tanggal 12 Juni 2020.
3. Laporan Registrasi Saham bulanan disampaikan secara regular setiap bulan kepada IDX melalui IDX Net.
4. Laporan Hutang dalam Bentuk Valuta Asing disampaikan secara regular kepada OJK setiap bulan.
5. Laporan Keterbukaan Informasi dan/atau Informasi Fakta Material kepada OJK dan/atau BEI.

AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (AAJAMR) dan Akuntan Publik Saptoto Agustomo telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 18 April 2019 ('RUPST 2019') untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian PT Lippo Cikarang Tbk dan Entitas Anak tahun buku 2020.

Pada 2020, Perseroan menerima surat dari KAP AAJAMR No. 224119/SAT/1114 sehubungan dengan penggantian Akuntan Publik yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Oleh karena itu, berdasarkan wewenang yang diberikan RUPST 2020, Dewan Komisaris menyetujui rekomendasi penggantian Akuntan Publik dari Bapak Saptoto Agustomo menjadi Bapak Tjun Tjun. Perseroan telah melaporkan perubahan Akuntan Publik ke OJK sesuai surat No. 071/LC-COS/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

KAP yang ditunjuk tersebut tidak memberikan jasa lain selain audit atas buku Perseroan. Total biaya audit yang diberikan kepada KAP selama 2019 adalah sebesar Rp875.000.000.

4. The Corporate Secretary together with Investor Relations held a Public Expose on 14 December 2020 through Zoom Webinar. The Public Expose Result Report has been submitted to the IDX on December 17, 2020 and can be seen on the link https://youtube.com/user/ptlippocikarangtbk
5. Participated in various trainings and outreach activities throughout 2020 3 (three) times.
6. Making improvements to the implementation of GCG in assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners to improve GCG implementation.

Implementation of Reporting Obligations

1. Periodic Financial Statements submitted in accordance with Bapepam-LK Regulation No. X.K.2.
2. The 2019 Annual Report was submitted on June 12, 2020.
3. Monthly Share Registration Report is submitted regularly every month to IDX via IDX Net.
4. Debt Reports in Foreign Currency are submitted regularly to OJK every month.
5. Report on Disclosure of Information and/or Material Fact Information to OJK and/or IDX.

PUBLIC ACCOUNTANT

Independent Public Accountant Firm (KAP), Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (AAJAMR) and Public Accountant Saptoto Agustomo have been appointed by the Board of Commissioners through the power of attorney granted by the Annual General Meeting of Shareholders held on April 18, 2019 ('AGMS 2019') to conduct an audit of the consolidated Financial Statements of PT Lippo Cikarang Tbk and its Subsidiaries for 2020 Financial Year.

In 2020, the Company has received a letter from KAP AAJAMR No. 224119/SAT/1114 in connection with the replacement of the Public Accountant assigned to audit the Company's consolidated financial statements. Therefore, based on the authority given by the 2020 AGMS, the Board of Commissioners approved the recommendation to replace the Public Accountant from Mr. Saptoto Agustomo to Mr. Tjun Tjun. The Company has reported changes to the Public Accountant to OJK in accordance with letter No. 071/LCCOS/V/2020 dated May 26, 2020.

The appointed KAP does not provide services other than an audit of the Company. The total audit fee given to KAP during 2019 was Rp875,000,000.

KASUS DAN PERKARA PENTING

Pada 2020, Perseroan menghadapi beberapa kasus dan perkara sebagai berikut:

IMPORTANT CASES AND LITIGATIONS

In 2020, the Company has faced several cases and litigations as follows:

No	Penggugat Plaintif	Status Terakhir Perkara Latest Status of the Case	Putusan Terakhir Latest Decision	Objek Perkara Object of the Case
1.	Tarman Bin H. Kiman, Sarkinah Binti H. Kiman, Dedeh Marwati Binti H. Kiman, Emar Martinah Binti H. Kiman, HJ. Icih Binti H. Bahrudin, H. Engkos Binti H. Bahrudin, HJ. Nesih	Kasasi telah selesai diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia Cassation has processed in Supreme Court of Republic of Indonesia	Perusahaan dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Mahkamah Agung The Company won the case in Supreme Court	Tanah Seluas Land of 38,770 m²/ sqm
2.	Udi Bin Uji, H. Karna Alias H. Samin Bin Karim Tatang Suganda Bin Rohadi, Titin Kartika Binti Rohadi, Ade Handri Bin Rohadi, Linda Wati Binti Rohadi, Euis Sutari Binti Rohadi Purnamasari Binti Rohadi, Nining Hasanah Binti Rohadi, Karyati Sri Muningsih Binti Rohadi, Nurlela Sari Binti Rohadi, Undar Prayoga Alias Jusup N.	Peninjauan kembali telah selesai diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia The judicial review has processed in Supreme Court of the Republic of Indonesia	Peninjauan Kembali Perusahaan dalam perkara tersebut dikabulkan The Company's judicial review was granted	Tanah Seluas Land of 36,320 m²/ sqm
3.	Udi Bin Uji	Peninjauan kembali telah selesai diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia The judicial review has processed in Supreme Court of the Republic of Indonesia	Perusahaan dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Mahkamah Agung The Company won the case in Supreme Court	Tanah Seluas Land of 15,620 m²/ sqm

INFORMASI MENGENAI SANKSI ADMINISTRATIF DAN FINANSIAL

Pada 2020, tidak terdapat sanksi administratif dan finansial yang diberikan oleh OJK dan BEI kepada Perseroan.

INFORMATION ON ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SANCTIONS

In 2020 there were no administrative sanctions by the OJK and the IDX based on:

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan menyediakan akses informasi dan data perusahaan bagi pemangku kepentingan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti situs resmi Perseroan yang tersedia dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Laporan Tahunan yang diterbitkan setiap tahun, Laporan Keuangan Perseroan, pemberitaan melalui media massa, *mailing list,* serta produk-produk pemasaran Perseroan. Selain itu, pemangku kepentingan juga dapat mengirimkan surat tertulis kepada:

Sekretaris Perusahaan
PT Lippo Cikarang Tbk
Easton Commercial Centre
Jl. Gn. Panderman Kav. 05
Lippo Cikarang
Bekasi 17550, Indonesia
T. +6221 897 2484, 897 2488
F. +6221 897 2093, 897 2493
Call Center : 021-80820800
E-mail : www.lippo-cikarang.com
Jam Kerja : 08.30–17.30 WIB

ACCESS TO CORPORATE DATA AND INFORMATION

The Company provides access to Corporate data and information for the stakeholders through various communication channels, such as the Company's official website, www.lippo-cikarang.com, which is available in 2 (two) languages, namely Indonesian and English, Annual Report published annually, Company's Financial Statements, news through mass media, mailing list, as well as the Company's marketing products. In addition, the stakeholders can also send written letters to:

Corporate Secretary
PT Lippo Cikarang Tbk
Easton Commercial Centre
Jl. Gn. Panderman Kav. 05
Lippo Cikarang
Bekasi 17550, Indonesia
T. +6221 897 2484, 897 2488
F. +6221 897 2093, 897 2493
Call Center : 021-80820800
E-mail : www.lippo-cikarang.com
Working Hour : 08.30–17.30 WIB

KODE ETIK

Pokok Kode Etik

Kode Etik Perseroan berlaku secara universal bagi seluruh karyawan Perseroan di seluruh level organisasi. Pokok-pokok utama sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Perusahaan adalah untuk:

1. Melembagakan nilai-nilai Perseroan, berdasarkan pada praktik terbaik.
2. Secara terus menerus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
3. Bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Isi Kode Etik

Kode etik karyawan berisi kode etik yang mengatur tentang:

1. Hubungan dengan sesama karyawan
2. Hubungan dengan Perseroan
3. Hubungan dengan pelanggan
4. Hubungan dengan pemasok, rekanan, termasuk *outsourcing* dan konsultan
5. Hubungan dengan pesaing
6. Hubungan dengan regulator
7. Hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya; dan
8. Pelaporan atas pelanggaran atau potensi pelanggaran.

Sosialisasi dan Upaya Penegakan Kode Etik

Perseroan melakukan sosialisasi Kode Etik secara khusus pada saat karyawan mulai bergabung dengan Perseroan. Untuk mempermudah proses sosialisasi, Kode Etik telah tersedia pada situs *web* Perseroan. Dalam perjalanannya, Perseroan terus melakukan sosialisasi secara berkala melalui rapat dan pertemuan tatap muka dalam berbagai kesempatan.

Selain itu, seluruh karyawan diwajibkan untuk membaca dan menandatangani pernyataan pengungkapan benturan kepentingan. Pernyataan kepatuhan terhadap kode etik juga berlaku bagi Dewan Komisaris, komite-komite Dewan Komisaris, Direksi serta jajaran manajemen Perseroan.

Penyebarluasan Kode Etik

Penyebarluasan kode etik secara berkala diinformasikan melalui *E-mail* Perseroan dan tersedia di situs resmi Perseroan dan situs internal Perseroan.

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Pembinaan atau sanksi diberikan kepada karyawan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya yang mencakup pembinaan, teguran, surat peringatan tertulis, ataupun pemutusan hubungan kerja. Pada 2020, Perseroan tidak menerima pengaduan terkait pelanggaran kode etik.

CODE OF CONDUCT

Code of Conduct Fundamentals

The Company's Code of Conduct is applicable to all of the Company's employees at all levels of organization. The main fundamentals of the Code of Conduct are as follows:

1. Institutionalizing the Company's values based on best practices.
2. Continuously increasing the accountability and transparency.
3. Act in accordance with applicable laws and regulations.

Content of the Code of Conduct

The Employee Code of Conduct contains the code of conduct that regulates:

1. Relationship among fellow employees,
2. Relationship with the Company
3. Relationship with the customers
4. Relationships with suppliers, vendors, including outsourcing and consultants
5. Relationships with competitors
6. Relationships with the regulators
7. Relationships with other stakeholders ; and
8. Reporting on violations or potential violations.

Code of Conduct Socialization and Enforcement Efforts

The Code of Conduct socialization is continuously conducted since employees start joining the Company. To facilitate the socialization process, the Code of Conduct is available on the Company's website. Thus, the Company continues to conduct regular basis through meetings and face-to-face meetings on various occasions.

In addition, all employees are required to read and sign conflicts of interest disclosure statement. The statement of compliance to the code of conduct also applies to the Board of Commissioners, committees of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the management of the Company.

Code of Conduct Dissemination

The dissemination of the code of conduct is regularly informed through the Company's e-mail and available on the Company's official website and the Company's internal site.

Sanction on Code of Conduct Violation

Sanctions are given to employees based on the level of violations, which include mentorship, warning, written warning letters, or termination of employment. In 2020, the Company has no complaints related to violations of the code of conduct and has been completed/is still in the process of completion.

ANTI SUAP, *ANTI FRAUD* DAN KORUPSI, ANTI GRATIFIKASI, ANTI NEPOTISME, ANTI PENCUCIAN UANG, ANTI TERORIS & PENCEGAHAN PENDANAAN TERHADAP KEGIATAN YANG TERKAIT TERORISME, ANTI HOAKS, ANTI MONOPOLI/OLIGOPOLI, *TRUST*/KARTEL

Perseroan menegaskan komitmen untuk menjalankan usahanya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas, pada peraturan yang terkait dengan praktik GCG yang antara lain mengatur pedoman tingkah laku, yaitu anti suap, *anti fraud* dan korupsi, anti gratifikasi, anti nepotisme, anti pencucian uang, anti teroris dan pencegahan pendanaan terhadap kegiatan yang terkait terorisme, anti hoaks,serta antimonopoli/oligopoli/*trust*/kartel, serta menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) melalui penerapan standar tingkah laku (Kode Etik) yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan termasuk Direksi dan Komisaris tanpa terkecuali, yang terus menerus disosialisasikan dan setiap tahunnya disertifikasi ulang terkait pemahaman Kode Etik Perseroan oleh para Karyawan.

ANTI-BRIBERY, ANTI-FRAUD AND CORRUPTION, ANTI-GRATIFICATION, ANTI-NEPOTISM, ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORIST & PREVENTION OF FUNDING AGAINST TERRORISM-RELATED ACTIVITIES, ANTI-HOAX, ANTI-MONOPOLY/OLIGOPOLY, TRUST/CARTEL

The Company is committed to conducting its business by complying with applicable laws and regulations, including but not limited to regulations related to GCG practices, which among others regulate the code of conduct, namely anti-bribery, anti-fraud and corruption, anti-gratification, anti-nepotism, anti money laundering, anti-terrorism and prevention of funding for activities related to terrorism, anti-hoax, and anti-monopoly/oligopoly/trust/cartel, as well as carrying out good and clean governance practices through the implementation of Code of Ethics which must be implemented by all employees including Directors and Commissioners without exception, and is continuously socialized and annually re-certified regarding the understanding of the Company's Code of Ethics by employees.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System (WBS) merupakan salah satu bentuk pengawasan melekat yang dibangun oleh Perseroan dalam menjalankan pengendalian secara internal yang konsisten dan berkesinambungan. Perumusan sistem WBS Perseroan telah dilakukan sejak 2016 untuk mendukung implementasi praktik terbaik di bidang GCG di lingkungan Perseroan.

Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

Perseroan menciptakan infrastruktur saluran pelaporan pelanggaran yang berfungsiuntuk menyampaikan laporan, yaitu melalui:

1. Surat tertulis kepada tim WBS dengan cara dikirimkan langsung melalui pos.
2. Surat elektronik di whistleblower@lippo-cikarang.com.
3. Situs Perseroan di www.lippo-cikarang.com submenu Whistleblowing.
4. Kotak Whistleblower.

Jenis Pelanggaran

1. Korupsi, *fraud*, pencucian uang, *insider dealing.*
2. Perbuatan yang melanggar hukum
3. Pelanggaran ketentuan perpajakan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pelanggaran Pedoman Perilaku Perusahaan, nilai-nilai Perseroan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System (WBS) is one of the forms of inherent supervision built by the Company in performing consistent and continuous internal controls. The Company's policy on WBS was initially formulated in 2016, in order to support the best practices of GCG implementation within the Company.

Whistleblowing Mechanism

The Company develops a violation reporting channel infrastructure that serves to submit reports, namely through:

1. Written letter to the WBS team through mail and sent directly by mail.
2. E-mail address at whistleblower@lippo-cikarang.com
3. The Company's website at www.lippo-cikarang.com submenu Whistleblowing.
4. Whistleblower Box.

Types of Violations

1. Corruption, fraud, money laundering, insider dealing.
2. Unlawful acts
3. Violation of tax regulations or other regulations.
4. Violation of the Company's Code of Conduct, the Company's values, or violation of the norms in general.

5. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja atau membahayakan keamanan Perseroan.
6. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan/atau non-finansial terhadap Perseroan ataupun kerugian kepentingan Perseroan.
7. Pelanggaran segala kebijakan Perseroan, dan
8. Lainnya yang tidak mendukung terciptanya pelaksanaan GCG.

Kewenangan Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Direksi atau orang yang mempunyai hubungan khusus dengan anggota Direksi atau oleh tim *Whistleblowing*, maka pelaporan pelanggaran atau potensi pelanggaran disampaikan kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan dapat menggunakan investigator independen ataupun auditor independen. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris atau Tim *Whistleblowing*, maka laporan tersebut disampaikan kepada CEO Corporate, yang selanjutnya penanganan tindak lanjutnya dilakukan oleh Direksi serta bila diperlukan dapat menggunakan investigator independen ataupun auditor independen.

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh karyawan, maka laporan disampaikan ke Tim *Whistleblowing*. Selanjutnya, Komite *Whistleblowing* akan memutuskan apakah laporan tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Laporan yang layak ditindaklanjuti akan dilanjutkan dengan proses investigasi oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau auditor internal ataupun oleh HR Audit khusus untuk kasus-kasus terkait SDM.

Pihak Pengelola Pengaduan

Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai pengawas atas efektivitas pelaksanaan penerapan WBS di seluruh grup Perseroan. Pemantauan pelaksanaan WBS dapat diserahkan kepada Komite Dewan Komisaris. Laporan pelanggaran dikelola oleh tim *Whistleblowing*, yang terdiri dari:

1. Komite *Whistleblowing*
2. Penanggung Jawab *Whistleblowing*
3. Fasilitator
4. Unit Investigasi

Namun apabila hasil investigasi tersebut tidak diketemukan pelanggaran atau potensi pelanggaran, maka Perseroan harus memulihkan nama baik dari terlapor sebatas cakupan informasi pencemaran tersebut tersebar.

Jumlah Pengaduan

Pada 2020, Perseroan menerima 3 (tiga) laporan pelanggaran yang telah ditindaklanjuti dan ditangani.

5. Acts that endanger health and safety or jeopardize the security of the Company.
6. Acts that may lead to financial and/or non-financial losses to the Company or damaging the interests of the Company.
7. Violations of any Company policies, and
8. Others that do not support the creation of GCG implementation.

Authority to Handle Violation Reporting

In the event the violation is committed by a member of the Board of Directors or has a special relationship with members of the Board of Directors, or with the Whistleblowing Team, the violation or potential violation report shall be submitted to the Board of Commissioners, and if necessary can use independent investigators or independent auditors. In the event the violation is committed by members of the Board of Commissioners or the Whistleblowing Team, the report shall be submitted to the Corporate CEO, in which further follow-up handling will be carried out by the Board of Directors, and if necessary can use independent investigators or independent auditors.

In the event the violation is committed by an employee, the report shall be submitted to the Whistleblowing Team. Then, the Whistleblowing Team will decide whether or not the report should be followed-up. A report that should be followed-up will proceed to the investigation process by the Internal Control Unit (SPI) or internal auditor or by special HR audit for HR-related cases.

Report Handler

The Board of Commissioners is responsible as overseers of performance and effective implementations of the WBS in the company and its subsidiaries. Monitoring of the implementation may be submitted to the Committee of the Board Commissioner. Violations reports are managed by the Whistleblowing team, which consists of:

1. Whistleblowing Committee
2. Person in Charge of Whistleblowing
3. Facilitator
4. Investigation Unit

However, in the event the investigation results found no violation or potential violation, the Company must restore the good name of the reported party to the extent that the information on the defamation is spread.

Number of Reports of Violations

In 2020, the Company received 3 (three) reports of violations that have been followed up and handled.

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Perseroan mendukung penerapan tata kelola perusahaan terbuka dengan menerima dan menyerap rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh OJK sebagaimana tertuang dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang disahkan pada 17 November 2015.

GOVERNANCE GUIDELINES OF PUBLIC COMPANIES

The Company supports the implementation of good governance for public companies by accepting and adopting the recommendations from the FSA as stated in SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines for Public Company that were passed on November 17, 2015.

Aspek 1 | Aspects 1:
Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham
Relationship between Public Companies with the Shareholders in Ensuring the Rights of the Shareholders

Prinsip 1 | Principle 1:
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS
Improving the Implementation Value of the GMS

Rekomendasi | Recommendation:	Penjelasan | Description:
1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public Companies sets technical methods or procedures for voting, both open and closed, which promotes independence and the interest of the shareholders.	Sudah diterapkan. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS dalam laman Perusahaan 21 hari sebelum RUPS Tahunan dan dibagikan kepada pemegang saham saat memasuki ruang Rapat. Implemented. The Company has established the GMS Rules and Guidelines on the Company's page 21 days prior to the AGM and distributed to the shareholders upon entrance to the meeting room.
1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPST. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company are present in the AGM.	Sudah diterapkan. Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam RUPS Tahunan tanggal 6 Juli 2020. Implemented. The Board of Commissioners and the Board of Directors are present in the AGM on July 6, 2020.
1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Summary of minutes of the AGM is available in the Public Company's website for at least 1 (one) year.	Sudah diterapkan. Perusahaan mengunggah ringkasan risalah RUPS pada hari yang sama sesudah penyelenggaraan RUPS Tahunan tanggal 6 Juli 2020. Ringkasan risalah RUPS sejak 2015 hingga 2020 tersedia di situs *web* Perusahaan sampai dengan saat ini. Implemented. The Company has uploaded the summary of minutes of the GMS on the same day of the AGMS on July 6, 2020. The summaries of minutes of the GMS since 2015 up to 2020 are available on the Company's website up to the present time.

Prinsip 2 | Principle 2:
Meningkatkan Kualitas Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor
Improving Communication Quality with the Shareholders or Investors

Rekomendasi | Recommendation:	
2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public Companies establishes a policy that regulates communication with the shareholders or investors.	Sudah diterapkan. Perusahaan melakukan komunikasi dengan pemegang saham atau investor diantaranya melalui pelaksanaan RUPS, *Public Expose, Analyst Meeting*, serta menyediakan informasi publik termasuk melakukan keterbukaan informasi yang akurat, menyediakan alamat yang dapat dihubungi baik dalam situs *web* maupun Laporan Tahunan, akses Media Sosial (Facebook, Instagram), sehingga pemegang saham maupun investor dapat secara mudah melakukan komunikasi dengan Perusahaan. Implemented. The Company has established a policy that regulates communication with investors or shareholders, as regulated by the Company's Ethical Code of Conducts and uploaded on the Company's website. The Company also implements communication through the implementation of the GMS, Public Expose, Analyst Meeting, as well as providing information to the public by means of providing accurate and open information, contactable addresses on the website and Annual Report, social media access (Facebook, Instagram) to accommodate and facilitate shareholders and investors in contacting the Company.
2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs *web* perusahaan. Public Companies disclose communication policies between Public Companies and shareholders or investors on the company's website.	Sudah diterapkan. Perusahaan mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor, termasuk alamat Perusahaan yang dapat dihubungi telah diunggah dalam situs *web* Perusahaan. Implemented. The Company discloses communication policies between Company and shareholders/investors, including uploading Company's address that are accessible on Company's website. These policies are regulated within the Company's Code of Conduct Policies, which is also available on Company's website.

Aspek 2 | Aspects 2:
Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
Function and Role of the Board of Commissioners

Prinsip 3 | Principle 3:
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners

Rekomendasi | Recommendation:	
3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The decisions regarding the number of members of the Board of Commissioners are made with consideration of Public Company's conditions.	Sudah diterapkan. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan mempertimbangan kebutuhan, kondisi dan kemampuan Perusahaan. Implemented. The number of the Board of Commissioners' members are based on the regulations and take into account the Company's needs, conditions, and capacities.
3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. The decisions regarding the composition of members of the Board of Commissioners are made with due observance to the diversity of talent, knowledge, and experience needed.	Sudah diterapkan. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan sangat beragam dengan keahlian, pengetahuan, pengalaman dan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mendukung dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Implemented. The composition of the Company's Board of Commissioners is very diverse with various expertise, knowledge, experience, and citizenships in order to support and maintain competitive advantage.

Prinsip 4 | Principle 4:
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Improving the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Rekomendasi | Recommendation:	
4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners implements self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	Akan diterapkan. Dalam melaksanakan implementasi strategi dan memantau pencapaian kinerja Direksi (*self assessment*), Perusahaan menerapkan pendekatan *Balanced Scorecard* yang dikonversikan menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) dengan menggunakan empat Not yet. The Company has not established the policy on self assessment to assess the performance of the Board of Commissioners.
4.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The policies regarding self assessment to evaluate Board of Commissioners performance are disclosed in the Annual Reports of Public Companies.	Akan diterapkan. Proses penilaian kinerja Direksi dengan pendekatan Balanced Scorecard yang dikonversikan menjadi KPI tersebut telah diungkapkan dalam bagian Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi pada Laporan Tahunan ini Not yet Implemented. The Company has not established self assessment to assess the performance of the Board of Commissioners, therefore it is not disclosed in the Company's Annual Report.
4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners have policies regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if proven to be involved in financial crimes.	Sudah diterapkan. Kebijakan terkait hak anggota Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri diatur dalam Pasal 17.6 Anggaran Dasar Perusahaan, dan dalam Piagam Dewan Komisaris. Pengunduran diri tersebut wajib ditindaklanjuti dengan RUPS. Selain itu dalam terjadi pelanggaran anggota Dewan Komisaris, RUPS juga diberikan hak untuk memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu (dalam hal ini misalnya adanya pelanggaran atau kejahatan keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan). Implemented. The policies regarding the rights of Board of Commissioners' members to resign are regulated in Article 17.6 of the Company's Articles of Association and in the Board of Commissioners Charter. The resignations shall be followed up with the GMS. Moreover, in the event of misconduct by members of the Board of Commissioners, the GMS retains the right to terminate Board of Commissioners at any time (in the event of financial misconducts or crime perpetrated by the said member of Board of Commissioners).
4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or Committee in charge of the Nomination and Remuneration function prepares the succession policy regarding the Nomination process of members of the Board of Directors.	Sudah diterapkan. Kebijakan suksesi telah diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan juga dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi pada Laporan Tahunan ini. Implemented. The succession policy is regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter and disclosed in the Nomination and Remuneration Committee Work Report on this year's Annual Report.
Aspek 3 | Aspects 3: **Fungsi dan Peran Direksi** **Function and Role of the Board of Directors**	
Prinsip 5 | Principle 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	
Rekomendasi | Recommendation:	
5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The decisions regarding number of members within Board of Directors are made with consideration of Public Company's conditions as well as the effectiveness of the decision making processes	Sudah diterapkan. Penjelasan: Tanpa mengurangi efektivitas pengambilan keputusan dari masing-masing Direksi, penentuan jumlah anggota Direksi Perusahaan di antaranya mempertimbangkan: Kondisi keuangan dan kemampuan Perusahaan. Implemented. Description: Without diminishing the effectiveness of decision making of each member of the Board of Directors, the decision regarding numbers of members of the Board of Directors are made by taking into account: Financial condition and capacity of the Company.
5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The decisions regarding the composition of members of the Board of Directors are made with due observance to diversity of talent, knowledge, and experience needed.	Sudah diterapkan. Penjelasan: Direksi perusahaan memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal tersebut dapat dilhat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman Direksi tersebut dibutuhkan Perusahaan dalam rangka memperkaya budaya, dan dapat mengisi kesenjangan serta kekosongan yang mungkin terjadi. Implemented. Description: The Board of Directors of the Company has diverse background on expertise, knowledge, and experience. This is evident from the profile of each Director. The diversity of the Board of Directors is monumental in enriching the culture as well as in minimizing gap and filling potential gap.
5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or financial have the expertise and/or knowledge needed in the accounting field.	Sudah diterapkan. Direktur Keuangan Perseroan adalah seorang ahli akuntan yang berpengalaman di beberapa perusahaan serta memiliki latar belakang akuntansi. Implemented. The Company's Financial Director has the expertise in accounting and experiences in various companies, and he also has an accounting background.
Prinsip 6 | Principle 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Improving the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	
Rekomendasi | Recommendation:	
6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has the self assessment policies to evaluate the Board of Directors' performance.	Sudah diterapkan. Dalam melaksanakan implementasi strategi dan memantau pencapaian kinerja Direksi (*self assessment*), Perusahaan menerapkan pendekatan *Balanced Scorecard* yang dikonversikan menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) dengan menggunakan empat perspektif *Balanced Scorecard.* Implemented. In implementing the strategies and monitoring the performance of the Board of Directors (self assessment), the Company implements the Balanced Scorecard approach, which is subsequently converted to Key Performance Indicators (KPI) by using the four perspectives of Balanced Scorecard.
6.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The policies regarding self assessment to evaluate the performance of the Board of Directors are disclosed on Annual Reports of Public Companies.	Sudah diterapkan. Proses penilaian kinerja Direksi dengan pendekatan *Balanced Scorecard* yang dikonversikan menjadi KPI. Implemented. The of Board of Directors performance assessment process is conducted through the Balanced Scorecard approach, subsequently translated into KPIs.

6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has policies relating to the resignation of members of the Board of Directors if proven to be involved in financial crimes.	Sudah diterapkan. Perusahaan memiliki kebijakan bahwa Direksi berhak untuk mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Piagam Direksi. Perseroan akan bertindak aktif apabila terjadi kejahatan keuangan, tertuang dalam Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan antara lain bila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara, Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, dan jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan Kebijakan juga mengatur terkait dengan adanya indikasi kejahatan keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang harus ditindaklanjuti dengan RUPS. Implemented. The Company has the policy that states that members of the Board of Directors have the right to resign, as regulated in Company's Articles of Association and in the Board of Directors Charter. The Company will act actively in the event of a financial crime is committed. The Articles of Association states that members of the Board of Directors may be dismissed at any time for reasons of, among others, being involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State. Dismissal decisions are taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself in the GMS. The position of members of the Board of Directors will automatically end if they no longer fulfill the requirements as members of the Board of Directors based on this Articles of Association and laws and regulations. The policy also regulates actions in the indication of financial crimes perpetrated by the Board of Directors. The Board of Commissioners, through the decisions in the Board of Commissioners Meeting, retains the right to temporarily suspend members of the Board of Directors, which then need to be followed up with the GMS.
Aspek 4 | Aspects 4: **Partisipasi Pemangku Kepentingan** **Participation of Stakeholders**	
Prinsip 7 | Principle 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation	
Rekomendasi | Recommendation: 7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Public Companies have policies to prevent insider trading.	Sudah diterapkan. Perseroan memiliki kebijakan tertulis dalam Kebijakan Kode Etik Perusahaan yang diunggah juga dalam *web* Perusahaan. Implemented. The Company has a written policy in the Company's Code of Conduct that published in Company's website.
7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. Public Companies have anti corruption and anti fraud policies.	Sudah diterapkan. Perusahaan memiliki Kebijakan Anti Suap, Anti *Fraud* & Korupsi, Anti Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Pencucian Uang, Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan Terhadap Kegiatan Yang Terkait Terorisme, Anti Hoaks, serta Anti Monopoli/Oligopoli/*Trust*/Kartel. Implemented. The Company has Anti-Bribery, Anti-Fraud & Corruption, Anti-Gratuity, Anti-Nepotism, Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism and Funding Prevention Policies for Activities Related to Terrorism, Anti-Hoax, and Anti-Monopoly/Oligopoly/Trust/Cartel.
7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public Companies have the policy on the selection and capability improvement of suppliers or vendors.	Sudah diterapkan. Perusahaan memiliki kebijakan untuk memenuhi hak-hak dari kreditur melalui Divisi Keuangan yang mengatur dan mengelola pembayaran hak-hak kreditur. Kebijakan terkait hak kreditur telah tertuang dalam perjanjian dalam hal Perseroan melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditur. Dalam perjanjian tersebut telah dicantumkan hak dan kewajiban para pihak. Implemented. The Company has put in place a policy to fulfill the rights of creditors through the Finance Division, which regulates and manages the payment of creditor rights. Policies related to creditor rights are stated in the agreement in the event the Company entered into a borrowing agreement with the creditor. Set forth in the agreement is the rights and obligations of the parties.
7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Companies have policies regarding the fulfillment of creditors' rights.	Sudah diterapkan. Perusahaan memiliki kebijakan untuk memenuhi hak-hak dari kreditur melalui Divisi Keuangan yang mengatur dan mengelola pembayaran hak-hak kreditur. Kebijakan terkait hak kreditur telah tertuang dalam perjanjian dalam hal Perseroan melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditur. Dalam perjanjian tersebut telah dicantumkan hak dan kewajiban para pihak. Implemented. The Company has a policy to fulfill the rights of creditors through the Finance Division which regulates and manages the payment of creditor rights. Policies related to creditor rights have been stated in the agreement in the event the Company entered into a Borrowing agreement with Creditors. In the agreement, the rights and obligations of the parties have been stated.
7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*). Public Companies have the whistleblowing policy.	Sudah diterapkan. Perusahaan memiliki kebijakan *Whistleblowing* yang juga diungkapkan dalam bagian pengungkapan *Whistleblowing* dalam Laporan Tahunan ini. Implemented. The Company has the Whistleblowing policy that is also disclosed in the Whistleblowing section of this Annual Report.
7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Public Company has policies regarding long-term incentives for the Board of Directors and all employees.	Belum diterapkan. Perseroan belum memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Not yet implemented. The Company has not established the policy on long-term incentives for the Board of Directors and employees.

Aspek 5 | Aspects 5: **Keterbukaan Informasi** **Disclosure of Information**	
Prinsip 8 | Principle 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Improving Disclosure of Information Practices	
Rekomendasi | Recommendation:	
8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs perusahaan sebagai media keterbukaan informasi. Public Company utilizes range of information technology platforms other than website as channels of information disclosure.	Sudah diterapkan. Selain situs web, Perseroan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media sosial lainnya seperti melalui portal internal, E-mail, facebook instagram. E-mail: corsec@lippo-cikarang.com Instagram: officiallippocikarang Facebook: Lippo Cikarang Official Implemented. In addition to the website, the Company utilizes other information technology and social media applications, such as internal portal, E-mail, facebook, instagram. E-mail: corsec@lippo-cikarang.com Instagram: officiallippocikarang Facebook: Lippo Cikarang Official
8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficiaries in the Public Company's share ownership of at least 5%, in addition to the disclosure of the ultimate beneficiaries in share ownership through major and controlled shareholders.	Sudah diterapkan. Perusahaan mengungkapkan mengenai rekomendasi ini dalam Laporan Tahunan Perusahaan di bagian Komposisi Pemegang Saham. Implemented. The Company implements this recommendation in the Company's Annual Report in the chapter Shareholders Composition.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

KOMITMEN KAMI

Dengan mematuhi pada peraturan pemerintah yaitu Pasal 1 ayat 3 dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan membuktikan komitmennya melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) secara berkesinambungan. Program CSR Perseroan berfokus pada 4 (empat) bidang utama, yaitu kelestarian alam dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan ketenagakerjaan serta perlindungan terhadap pelanggan.

Pada 2020, Perseroan mengeluarkan dana sebesar Rp1,4 miliar untuk seluruh program CSR.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

Kebijakan dan Jenis Program

- **Pengembangan Perkantoran Hijau**
  Perseroan melaksanakan inisiatif pengembangan perkantoran hijau dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan energi listrik, konsumsi air dan kertas.
- **Pengembangan Lingkungan Hijau**
  Perseroan mengatur rasio lahan hijau sebesar 60:40 untuk area usaha seperti di media jalan dan 70:30 untuk lahan perumahan.
- **Bangunan Hijau**
  Bangunan properti Perseroan senantiasa mengedepankan konsep bangunan hijau yang mengacu kepada pertimbangan desain konstruksi pada rumah tinggal.
- **Penanaman 1.000 Bibit Pohon**
  Pada tanggal 7 Januari 2020, Perseroan melakukan penanaman 1.000 bibit pohon di area Delta Silicon 8 sebagai ruang terbuka hijau.

Sistem Pengolahan Limbah

Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kawasan Lippo Cikarang telah menggunakan sitem fisika, biologi dan kimia untuk mengolah air limbah yang dihasilkan oleh industri yang berada di kawasan Industri Lippo Cikarang.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Para pemangku kepentingan dapat menyampaikan hal-hal terkait isu lingkungan kepada Perseroan melalui saluran telepon yang aktif selama 24 jam di nomor 021-89908911 dan *e-mail* ke alamat: cs@lippo-cikarang.com.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kebijakan dan Program Ketenagakerjaan

Sebagai sebuah korporasi, Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait aspek ketenagakerjaan, yang mencakup pemenuhan hak-hak kepada karyawan dan kewajiban sebagai perusahaan. Kepatuhan ini dipertegas

OUR COMMITMENT

By complying with government regulations, include Article 1 paragraph 3 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company has proven its commitment through the implementation of its Corporate Social Responsibility (CSR) programs continuously. The Company's CSR program focuses on 4 (four) main areas, which are preservation of nature and the environment, community empowerment, fulfillment of Occupational Health and Safety (OHS) and employment aspects and protection of customers.

In 2020, the Company spent Rp1.4 billion for all CSR programs.

RESPONSIBILITY TOWARDS THE ENVIRONMENT

Policy and Type of Program

- **Green Office Development**
  The Company carries out green office development initiatives by prioritizing efficiency and effectiveness in the use of electrical energy, water consumption and paper.
- **Green Environmental Development**
  The Company regulates green land ratio of 60:40 for business areas such as roads and 70:30 for residential land.
- **Green Building**
  The property buildings of the Company always prioritize the green building concept that refers to the construction design considerations for residential houses.
- **Planting 1,000 Trees**
  On January 7, 2020, the Company planted 1,000 tree seeds in the Delta Silicon 8 area as a green open space.

Waste Management System

The Lippo Cikarang Area Wastewater Management Installation System (IPAL) uses physical, biological and chemical systems to treat wastewater produced by industries located in the Lippo Cikarang Industrial zone.

Environmental Issues Complaints Mechanism

Stakeholders can convey matters related to environmental issues to the Company through a telephone line that is active for 24 hours at 021-89908911 and e-mail to cs@lippo-cikarang.com.

RESPONSIBILITY TOWARDS EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Employment Policy and Program

As a corporation, the Company complies with laws and regulations pertaining to employment aspects, which include the fulfillment of employee rights and its obligations as a corporation. The Company treats all employees fairly

dengan komitmen Perseroan untuk memperlakukan seluruh karyawan dengan adil dan setara tanpa perbedaan.

Pada 2020, tingkat perputaran kerja karyawan Perseroan adalah sebesar 13,6%. Guna menyeimbangi tingkat perputaran kerja, Perseroan melakukan program rotasi dan mutasi, serta rekrutmen sesuai kebutuhan organisasi.

Kebijakan dan Jenis Program K3

Untuk mengoptimalkan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (BPJS Ketenagakerjaan), BPJS Kesehatan, Dana Pensiun, dan Asuransi Kesehatan Swasta.

Guna meningkatkan kualitas penerapan aspek K3, pada 2020, Perseroan telah mengadakan berbagai kegiatan pelatihan sebagai berikut:

1. Pelatihan Pengolahan Air Bersih dan Air Industri pada 12-13 Agustus 2020.
2. *Training Operator Genset* (Trivium Terrace Apartment) pada 26-30 Oktober 2020.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Kebijakan dan Jenis Program Penggunaan Tenaga Kerja Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat

Per akhir 2020, Perseroan telah berhasil mengembangkan kawasan perkotaan berisi real estat terpadu dengan luas area sekitar 3.250 ha. Melalui 1.399 perusahaan manufaktur yang beroperasi setiap hari kerja, kawasan industri Lippo Cikarang telah menyerap sejumlah 582.307 tenaga pekerja. Perseroan berkomitmen untuk tidak mempekerjakan tenaga kerja paksa dan anak di bawah umur.

Kebijakan dan Jenis Program

Selama 2020, Perseroan melakukan beragam kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain:

- Pemberian bantuan infrastruktur berupa besi beton untuk pembangunan masjid.
- Pemberian bantuan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2020.
- Pemberian sembako untuk bakti sosial Polres Metro Bekasi.
- Bantuan Pengadaan Fasilitas Sarana & Prasarana di Yayasan Nurul Amal Cibatu.

Kebijakan dan Jenis Program Anti Korupsi

Sebagai bentuk penerapan praktik GCG secara konsisten, Perseroan menolak terjadinya aksi korupsi, dalam bentuk apa pun di dalam lingkungan kerja Perseroan.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

Kebijakan dan Jenis Program

Perseroan memastikan bahwa produk dan jasa yang diberikan kepada pelanggan memiliki kualitas yang optimal,

and equally regardless of ethnicity, race, religion, and social class backgrounds.

In 2020, the Company's employee turnover rate amounts to 13.6%. To offset the turnover rate, the Company implements a rotation and mutation program, as well as recruitment that is in accordance with organizational needs.

OHS Policy and Program Type

To optimize the implementation of occupational health and safety, the Company includes all employees in the Work Accident Insurance (BPJS Ketenagakerjaan), BPJS Kesehatan, Pension Fund, and Private Health Insurance.

To enhance the quality of OHS application, the Company has conducted the various training activities in 2020 as follows:

1. Training of Clean Water Treatment (Water Treatment Plant) and Industrial Water on August 12-13, 2020.
2. Training of Generator Operator (Trivium Terrace Apartment) on October 26-30, 2020.

RESPONSIBILITY TOWARDS SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Use of Local Employment and Community Empowerment Policies and Program Type

As the end of 2020, the Company succeeded in developing urban areas containing integrated real estate with an area of 3,250 ha. Through 1,399 manufacturing companies operating every working day, the Lippo Cikarang Industrial Zone absorbs a total of 582,307 workers. The Company is committed to not employing forced and minors workers.

Policies and Types of Program

During 2020, the Company carried out various social activities, including:

- Providing assistance in the form of concrete iron for the construction of a mosque
- Providing sacrificial animal assistance in the framework of Eid Al Adha 2020
- Providing basic necessities during the social services event at the Metro Police Bekasi.
- Assistance for Procurement of Facilities & Infrastructure at Yayasan Nurul Amal Cibatu.

Anti Corruption Policy and Program Type

As part of consistent implementation of GCG, the Company rejects any form of corruption within the Company.

RESPONSIBILITY TOWARDS THE CONSUMER

Policies and Types of Program

The Company ensures that the products and services provided to customers have the optimal quality, by

dengan mengutamakan aspek keamanan, kenyamanan, dan kebersihan yang berkualitas. Perseroan memegang teguh nilai-nilai terkait pelayanan pelanggan, yakni *Obsessed with Our Customers, Passion for Innovation,* dan *Operational Excellence*. Perseroan juga menerapkan "*Golden Rule of Customer Service*".

Informasi Produk/Jasa

Informasi tentang produk Perseroan ditampilkan dengan jelas dan disebarluaskan melalui brosur, *flyer, billboard,* umbul-umbul, spanduk, majalah internal Goodnews, jejaring sosial, *e-mail blast* dan *website*.

Kegiatan Pelanggan

Pada 2020, Perseroan melakukan berbagai kegiatan untuk para penghuni sebagai berikut:

- Pemberian bantuan sembako banjir di Cikarang Pusat pada 6 Januari 2020.
- Penyemprotan disinfektan secara rutin di kawasan residensial dan ruko sejak Maret 2020.
- Pemberian bantuan masker kepada warga Cluster Taman Cibodas (RW 17) pada 5 Mei 2020.

Kepada pelanggan industrial, Perseroan juga mengadakan berbagai kegiatan di bawah ini:

- Penyelenggaraan *tenant gathering* pada 6 Februari dan 19 September 2020.
- Pelaksanaan peluncuran acara Masker Sehati pada 2 September 2020.
- Pelaksanaan sosialiasi adaptasi kebiasaan baru kepada *tenant* industri dan komersial pada 26 Juni 2020.
- Penyelenggaraan webinar pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada para *tenant* industri dan komersial pada 2 September 2020.

Seluruh kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Sarana, Jumlah dan Penganggulangan atas Pengaduan Konsumen

Dalam rangka melakukan penanggulangan atas pengaduan konsumen, Perseroan menyediakan beberapa pelayanan pengaduan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem *Customer Relationship Management* (CRM).
2. *Call Center* 24 jam untuk konsumen di nomor 021-80820800.
3. Telepon darurat untuk pengaduan penghuni di nomor 021-89908911.
4. E-mail di cs@lippo-cikarang.com.

Pada 2020, Perseroan menerima sebanyak 3.508 keluhan. Sebanyak 3.369 keluhan yang disampaikan kepada Perseroan telah ditanggulangi dengan baik melalui mekanisme pertemuan dengan warga dan *tenant gathering*, dan sebanyak 139 keluhan masih dalam proses penanggulangan.

prioritizing quality aspects of safety, comfort and cleanliness. The Company upholds values related to customer service, namely Obsessed with Our Customers, Passion for Innovation, and Operational Excellence. The Company also applies the "Golden Rule of Customer Service".

Product/Service Information

Information about the Company's products are clearly displayed and disseminated through brochures, flyers, billboards, banners, signs, Good News internal magazine, social networks, e-mail blasts and website.

Customers Activities

In 2020, the Company carried out various activities for the residents as follows:

- Provided groceries assistance for floods victims in Central Cikarang on January 6, 2020.
- Sprayed disinfectants regularly in residential areas and shop houses since March 2020.
- Provided masks assistance to residents of the Taman Cibodas Cluster (RW 17) on May 5, 2020.

For industrial customers, the Company also carries out the following activities:

- The holding of tenant gathering on February 6 and September 19, 2020.
- The launch of the Sehati Mask event on September 2, 2020.
- Socialization of new custom adaptations to industrial and commercial tenants on June 26, 2020.
- Conducted seminar web on Proper Function Certificate (SLF) management for industrial and commercial tenants on September 2, 2020.

All activities were carried out by implementing the health protocol for COVID-19 handling.

Consumer Complaint Facilities, Amount and Mitigation

In order to handle consumer complaints, the Company provides several complaint services, as follows:

1. Customer Relationship Management (CRM) System.
2. 24-hour Call Center for consumers by dialing 021-80820800.
3. Emergency Call for resident complaints at 021-89908911.
4. E-mail to cs@lippo-cikarang.com.

In 2020, the Company received 3,508 complaints. An estimated 3,369 complaints that were submitted to the Company, were received and responded by the Company, and duly addressed in accordance with applicable procedures and submitted back to the customer. As many as 139 complaints are still being addressed.

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Lippo Cikarang Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Lippo Cikarang Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Lippo Cikarang Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lippo Cikarang, Juni 2021

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Sie Subiyanto
Presiden Direktur
President Director

Rudy Halim
Direktur
Director

Tevilyan Yudhistira Rusli
Direktur
Director

Ju Kian Salim
Direktur
Director

Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners on the Responsibility for the 2020 Annual Report of PT Lippo Cikarang Tbk

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2020 Annual Report of PT Lippo Cikarang Tbk has been presented in its entirety, and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Annual Report of PT Lippo Cikarang Tbk.

This statement is hereby made in all integrity.

Lippo Cikarang, June 2021

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Theo L. Sambuaga
Presiden Komisaris
President Commissioner

Sugiono Djauhari
Komisaris
Commissioner

Anand Kumar
Komisaris
Commissioner

Didik Junaidi Rachbini
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Hadi Cahyadi
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ali Said
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Laporan Keuangan
Financial Statements

PT LIPPO CIKARANG Tbk
DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PT LIPPO CIKARANG Tbk
AND SUBSIDIARIES

Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019

LIPPO CIKARANG

PT LIPPO CIKARANG Tbk
DAN ENTITAS ANAK

PT LIPPO CIKARANG Tbk
AND SUBSIDIARIES

Daftar Isi

Halaman/ *Pages*

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2020 and 2019***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

LIPPO CIKARANG

Surat Pernyataan Direksi
Directors' Statement Letter

Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian
On the Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
Serta untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
For the Year Ended of December 31, 2020 and 2019
And for the Years Ended December 31, 2020 And 2019

PT Lippo Cikarang Tbk dan Entitas Anak
PT Lippo Cikarang Tbk and Subsidiaries
No: 001/LC/KEU/V/2021

Kami yang bertandatangan di bawah ini / *We, the undersigned*:

1	Nama / *Name*	:	Sie Subiyanto
	Alamat Kantor / *Office Address*	:	Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05 Lippo Cikarang, Bekasi – 17550, Jawa Barat - Indonesia
	Alamat Domisili sesuai KTP / *Domicile as stated in ID Card*	:	Villa Melati Mas Blok G-1/17 Jelupang Serpong Utara Jakarta Selatan
	Nomor Telepon / *Phone Number*	:	(021) 8972484
	Jabatan / *Position*	:	Presiden Direktur / *President Director*
2	Nama / *Name*	:	Tevilyan Yudhistira Rusli
	Alamat Kantor / *Office Address*	:	Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05 Lippo Cikarang, Bekasi – 17550, Jawa Barat - Indonesia
	Alamat Domisili sesuai KTP / *Domicile as stated in ID Card*	:	Jalan Bisma 14 Blok C 9 No.9 Tanjung Priok Jakarta Utara
	Nomor Telepon / *Phone Number*	:	(021) 8972484
	Jabatan / *Position*	:	Direktur / *Director*

menyatakan bahwa:

1 Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Lippo Cikarang Tbk dan entitas anak;

2 Laporan keuangan konsolidasian PT Lippo Cikarang Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3 a) Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Lippo Cikarang Tbk dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b) Laporan keuangan konsolidasian PT Lippo Cikarang Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4 Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Lippo Cikarang Tbk dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

state that:

1 We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Lippo Cikarang Tbk and subsidiaries;

2 The consolidated financial statements of PT Lippo Cikarang Tbk and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3 a) All information in the consolidated financial statements of PT Lippo Cikarang Tbk and subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;
b) The consolidated financial statements of PT Lippo Cikarang Tbk and subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;

4 We are responsible for internal control system of PT Lippo Cikarang Tbk and subsidiaries.

We certify the accuracy of this statement

Lippo Cikarang, 5 Mei 2021 / *May 5, 2021*
PT Lippo Cikarang Tbk

METERAI TEMPEL
10000
F49C1AJX037229942

Sie Subiyanto | Tevilyan Yudhistira Rusli

PT LIPPO CIKARANG Tbk
Kantor Pusat & Pemasaran :
Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. (021) 897-2484, 897-2488 (Hunting) Fax. (021) 897-2093, 897-2493

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00558/2.1030/AU.1/03/1115-2/1/V/2021

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Lippo Cikarang Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Lippo Cikarang Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Lippo Cikarang Tbk ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors'

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

RSM
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Lippo Cikarang Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated statement financial position of PT Lippo Cikarang Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penekanan atas suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 2.c atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa efektif 1 Januari 2020, PT Lippo Cikarang Tbk dan entitas anaknya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72: Pendapatan dari Kontrak Pelanggan dengan dampak kumulatif pada tanggal penerapan awal sesuai dengan standar pengakuan pada tanggal awal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif. Penerapan PSAK 72 berdampak pada penyesuaian saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2020 sebesar Rp589.558 juta. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Emphasis of a matter

We draw attention to Note 2.c to the accompanying consolidated financial statements which explains that effective January 1, 2020, PT Lippo Cikarang Tbk and subsidiaries, implemented the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 72: Revenue from Customer Contracts with the cumulative effect of initially applying the standard recognized at beginning January 1, 2020 and did not restate the comparative information. The adoption of PSAK 72, there is impacted to adjusted beginning balance of retained earnings as of January 1, 2020 amounting to Rp589,558 millions. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Tjun Tjun
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1115/
Public Accountant License Number: AP.1115

Jakarta, 5 Mei 2021/*May 5, 2021*

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2020 Rp	2019 Rp	
ASET				***ASSETS***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	3, 9, 39	635,427	522,698	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	4, 9, 39	21,189	266,930	*Trade Accounts Receivable*
Investasi dalam Saham	11	168,664	230,139	*Investment in Shares*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	5, 39	3,173	46,814	*Other Current Financial Assets*
Persediaan	6	5,724,998	5,078,166	*Inventories*
Pajak Dibayar di Muka	18.c	164,422	111,609	*Prepaid Taxes*
Beban Dibayar di Muka	7	38,017	41,715	*Prepaid Expenses*
Jumlah Aset Lancar		6,755,890	6,298,071	*Total Current Assets*
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	9, 39	7,435	8,908	*Due from Related Parties Non-Trade*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	8, 9, 39	404,691	338,625	*Other Non-Current Financial Assets*
Investasi pada Entitas Asosiasi	9, 10.a	16,490	1,690,051	*Investments in Associates*
Investasi pada Dana Investasi Infrastruktur	9, 10.b	1,991,078	3,239,387	*Investment in Infrastructure Investment Funds*
Properti Investasi	12	167,141	174,597	*Investment Properties*
Aset Tetap	13	77,482	94,457	*Property and Equipment*
Aset Pajak Tangguhan - Neto	18.b	33,019	30,351	*Deferred Tax Asset - Net*
Tanah untuk Pengembangan	15	244,932	244,932	*Land for Development*
Aset Non-Keuangan Tidak Lancar Lainnya	14	21,412	99,849	*Other Non-Current Non-Financial Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		2,963,680	5,921,157	*Total Non-Current Assets*
JUMLAH ASET		**9,719,570**	**12,219,228**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2020 Rp	2019 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Utang Bank Jangka Pendek	20.a, 39	500,000	200,000	*Short-Term Bank Loan*
Utang Usaha - Pihak Ketiga	16, 39	84,467	114,230	*Trade Accounts Payable - Third Parties*
Beban Akrual	17, 39	144,255	160,668	*Accrued Expenses*
Utang Pajak	18.d	36,933	45,285	*Taxes Payable*
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	39	2,397	12,127	*Short-Term Employees' Benefits Liabilities*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek				*Other Current Financial Liabilities*
Lainnya - Pihak Ketiga	19, 39	177,063	175,873	*Third Parties*
Liabilitas Kontrak	21	1,120,782	200,603	*Contract Liabilities*
Pendapatan Ditangguhkan	22	20,843	41,999	*Deferred Income*
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang				*Current Portion of Long-Term Liability*
Utang Bank	20.b	71,358	--	*Bank Loan*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2,158,098	950,785	*Total Current Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Utang Bank Jangka Panjang	20.b	406,040	--	*Long-Term Bank Loan*
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	9, 39	1,966	1,517	*Due to Related Parties Non-Trade*
Liabilitas Kontrak	21	532,208	347,883	*Contract Liabilities*
Liabilitas Imbalan Pascakerja	9, 23	42,096	36,521	*Post - Employment Benefits Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		982,310	385,921	*Total Non-Current Liabilities*
Jumlah Liabilitas		3,140,408	1,336,706	*Total Liabilities*
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:				***Equity Attributable to the Owners of the Parent:***
Modal Saham - Nilai Nominal Rp500 per Saham				*Capital Stock - Par Value Rp500 per Share*
Modal Dasar - 2.700.000.000 saham				*Authorized - 2,700,000,000 Shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 2.679.600.000 Saham	24	1,339,800	1,339,800	*Issued and Fully Paid - 2,679,600,000 Shares*
Tambahan Modal Disetor-Neto	25	1,981,185	1,981,185	*Additional Paid in Capital-Net*
Komponen Ekuitas Lain	26	2,017,922	2,017,922	*Other Equity Component*
Saldo Laba		974,906	5,171,888	*Retained Earnings*
Penghasilan Komprehensif Lain	28	27,762	59,557	*Other Comprehensive Income*
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		6,341,575	10,570,352	*Total of Equity Attributable to the Owners of the Parent*
Kepentingan Nonpengendali	29	237,587	312,170	***Non-Controlling Interest***
Jumlah Ekuitas		6,579,162	10,882,522	*Total Equity*
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**9,719,570**	**12,219,228**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2020 Rp	2019 Rp	
PENDAPATAN	9, 30	1,844,373	1,694,809	***REVENUES***
BEBAN PAJAK FINAL	18.a	(41,816)	(36,375)	***FINAL INCOME TAX***
PENDAPATAN NETO		1,802,557	1,658,434	***NET REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	31	(1,138,339)	(1,013,749)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		664,218	644,685	***GROSS PROFIT***
Beban Usaha	32	(300,605)	(210,869)	*Operating Expenses*
Penghasilan Lainnya	34	58,297	28,200	*Other Income*
Beban Lainnya	34	(2,228,552)	(120,184)	*Other Expenses*
LABA (RUGI) USAHA		**(1,806,642)**	**341,832**	***OPERATING INCOME (LOSS)***
Penghasilan (Beban) Keuangan - Neto	33	(129,153)	125,416	*Financial Income (Expenses) - Net*
Bagian Rugi Investasi pada Entitas Asosiasi -Neto	11	(1,668,611)	(44,955)	*Equity in Loss on Investment in Associates -Net*
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		**(3,604,406)**	**422,293**	***PROFIT (LOSS) BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	18.a	(41,980)	(38,261)	***INCOME TAX EXPENSES***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**(3,646,386)**	**384,032**	***PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi				*Item that will not be Reclassified to Profit and Loss*
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain		(61,475)	13,812	*Financial Assets Measured Through Other Comprehensive Income*
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Kerja		(6,250)	(6,652)	*Employee Benefits Program Measurement on*
Pajak Penghasilan Terkait		309	475	*Related Income Tax*
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		(67,416)	7,635	***Other Comprehensive Income After Tax***
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(3,713,802)**	**391,667**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***PROFIT (LOSS) FOR CURRENT YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		(3,654,135)	310,911	*Owners of the Parent*
Kepentingan Nonpengendali		7,749	73,121	*Non-Controlling Interest*
		(3,646,386)	**384,032**	
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		(3,691,871)	312,458	*Owners of the Parent*
Kepentingan Nonpengendali		(21,931)	79,209	*Non-Controlling Interest*
		(3,713,802)	**391,667**	
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)	35	**(1,364)**	**221**	***BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE (Full Rupiah)***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing,
Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency,
Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/*Equity Attributable to Owners of the Parent*										Kepentingan Nonpengendali/ *Non-Controlling Interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*
		Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*	Tambahan Modal Disetor-Neto/ *Additional Paid-in Capital*			Saldo Laba/ *Retained Earnings*			Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other Comprehensive Income*	Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Equity Component*	Jumlah/ *Total*		
			Agio Saham-Neto/ *Additional Paid-in Capital Excess of Par-Net*	Selisih antara Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak/ *Differences between Tax Amnesty Assets and Liabilities*	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi dengan Entitas Sepengendali/ *Difference in Value of Restructuring between Entity Under Common Control*	Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	Keuntungan Kerugian Aktuarial/ *Actuarial Gain (Loss)*	Investasi dalam Saham/ *Investment in Stock*				
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PER 1 Januari 2019/ *BALANCE AS OF January 1, 2019*		**348,000**	**39,458**	**2,000**	**(29,300)**	**2,650**	**4,864,261**	**243**	**51,833**	**2,017,922**	**7,297,067**	**232,961**	**7,530,028**
Penawaran Umum Terbatas/ *Limited Public Offering*	25	991,800	1,969,027	–	–	–	–	–	–	–	2,960,827	–	2,960,827
Dana Cadangan Umum/ *General Reserve Fund*	27	–	–	–	–	200	(200)	–	–	–	–	–	–
Laba Tahun Berjalan/ *Profit for the Year*		–	–	–	–	–	310,911	–	–	–	310,911	73,121	384,032
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan/ *Other Comprehensive for the Year*		–	–	–	–	–	–	(6,177)	7,724	–	1,547	6,088	7,635
SALDO PER 31 DESEMBER 2019/ *BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019*		**1,339,800**	**2,008,485**	**2,000**	**(29,300)**	**2,850**	**5,174,972**	**(5,934)**	**59,557**	**2,017,922**	**10,570,352**	**312,170**	**10,882,522**
Dampak Penerapan Awal Standar Akuntansi Baru/ *Impact on Initial Implementation of New Accounting Standard*		–	–	–	–	–	(536,906)	–	–	–	(536,906)	(52,652)	(589,558)
SALDO PER 1 Januari 2020/ *BALANCE AS OF January 1, 2020*		**1,339,800**	**2,008,485**	**2,000**	**(29,300)**	**2,850**	**4,638,066**	**(5,934)**	**59,557**	**2,017,922**	**10,033,446**	**259,518**	**10,292,964**
Dana Cadangan Umum/ *General Reserve Fund*	27	–	–	–	–	200	(200)	–	–	–	–	–	–
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Profit (Loss) for the Year*		–	–	–	–	–	(3,654,135)	–	–	–	(3,654,135)	7,749	(3,646,386)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan/ *Other Comprehensive for the Year*		–	–	–	–	–	–	(5,941)	(31,795)	–	(37,736)	(29,680)	(67,416)
SALDO PER 31 DESEMBER 2020/ *BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020*		**1,339,800**	**2,008,485**	**2,000**	**(29,300)**	**3,050**	**983,731**	**(11,875)**	**27,762**	**2,017,922**	**6,341,575**	**237,587**	**6,579,162**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2020 Rp	2019 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari Pelanggan		1,117,658	1,463,147	*Collections from Customers*
Pencairan (Penempatan) Dana yang Dibatasi Penggunaannya		(136,406)	7,910	*Withdrawal (Placement) of Restricted Fund*
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(1,430,225)	(1,674,929)	*Payments to Suppliers and Other Third Parties*
Pembayaran kepada Karyawan		(144,090)	(111,499)	*Payments to Employees*
Pembayaran Pajak		(74,427)	(58,144)	*Taxes Payments*
Penerimaan Bunga		46,511	144,170	*Interest Received*
Pembayaran Bunga		(71,650)	(18,754)	*Interest Payments*
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi		**(692,629)**	**(248,099)**	***Net Cash Flows Used in Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan Dividen	11	4,950	4,050	*Dividends Received*
Perolehan Properti Investasi	12	(1,178)	(6,999)	*Acquisition of Investment Properties*
Perolehan Aset Tetap	13	(9,276)	(11,577)	*Acquisition of Property and Equipment*
Pembayaran kepada Pihak Berelasi		--	(2,960,827)	*Payment to Related Parties*
Penerimaan dari Pihak Berelasi		1,473	2,919,767	*Received from Related Parties*
Pelepasan (Penempatan) Penyertaan pada Dana Investasi Infrastruktur	10.b	31,600	(3,253,623)	*Disposal (Placement) of Investment in Infrastructure Funds*
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		**27,569**	**(3,309,209)**	***Net Cash Flows Provided By (Used in) Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Utang Bank Jangka Pendek	20.a	300,000	200,000	*Proceed of Short-Term Bank Loan*
Utang Bank Jangka Panjang				*Long -Term Bank Loan*
Penerimaan	20.b	495,800	--	*Proceed*
Pembayaran	20.b	(18,402)	--	*Payment*
Penerimaan dari Pihak Berelasi		449	296,139	*Received from Related Parties*
Penerimaan Penawaran Umum Terbatas I Saham Perusahaan		--	2,965,482	*Proceeds of the Company Shares from Limited Public Offering I*
Biaya Emisi Saham		--	(4,655)	*Shares Issuance Cost*
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		**777,847**	**3,456,966**	***Net Cash Flows Provided By Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		112,787	(100,342)	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3	522,698	623,125	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR***
DAMPAK SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS		(58)	(85)	***EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**635,427**	**522,698**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***
Tambahan Informasi tentang arus kas disajikan dalam Catatan 40				*Additional information regarding cash flows presented in Note 40*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Lippo Cikarang Tbk (Perusahaan) didirikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tanggal 20 Juli 1987 dengan Akta No. 43 dari Hendra Karyadi, S.H., yang diubah dengan Akta No. 63 dari notaris yang sama pada tanggal 22 April 1988. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4701.HT.01.01.TH.88 tanggal 30 Mei 1988 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 94 tanggal 23 November 1990, Tambahan No. 4719. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 3 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N Notaris di Bekasi, mengenai pernyataan keputusan rapat. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya No. AHU-0123416.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah pengembangan kota (*urban development*) yang meliputi pengembangan kawasan perumahan dan industri, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, penyediaan jasa-jasa pendukung, serta melakukan investasi, baik langsung dan tidak langsung melalui entitas anak maupun patungan dengan pihak-pihak lain. Pada saat ini kegiatan Perusahaan terutama adalah pembangunan kawasan industri, perumahan dan penyediaan jasa-jasa penunjang lainnya.

Perusahaan berdomisili dan berkantor di Easton Commercial Center, Jalan Gn. Panderman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi - 17550, Jawa Barat, Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989.

PT Kemuning Satiatama, entitas induk Perusahaan. Entitas Induk terakhir Perusahaan adalah PT Lippo Karawaci Tbk. Perusahaan adalah anggota kelompok usaha Lippo.

1.b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Penawaran umum perdana Perusahaan kepada masyarakat sebanyak 108.588.000 saham biasa atas nama, memperoleh

1. General

1.a. The Company's Establishment

PT Lippo Cikarang Tbk (the Company) was established in Indonesia within the framework of the Domestic Capital Investment Law on July 20, 1987 based on Notarial Deed No. 43 of Hendra Karyadi, S.H., as amended by Notarial Deed No. 63 of the same notary dated April 22, 1988. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice in the decree No. C2-4701.HT.01. 01.TH.88 dated May 30, 1988 and published in the State Gazette No. 94 Supplement No. 4719 on November 23, 1990. The Company's Articles of Association has been amended several times, the most recently by Deed No. 3 which was made in the presence of Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N a Notary in Bekasi, dated July 6, 2020, concerning the statement of decision of the Company's meeting. The amendment of the deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-0123416.AH.01.11.Tahun 2020 dated July 29, 2020.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, The Company's scope of activities is urban development which includes development of real estate and industrial estate area, development of infrastructure and public facilities, providing supporting services, and making investments, both direct and indirect, either through its subsidiaries or in joint venture with other parties. Currently, the Company's main activities include development of industrial estate area, real estate and providing supporting services.

The Company's office and domicile is located at Easton Commercial Center, Jalan Gn. Panderman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi - 17550, West Java, Indonesia. The Company started commercial operations in 1989.

PT Kemuning Satiatama, the parent entity of the Company. The ultimate parent entity of the Company is PT Lippo Karawaci Tbk. The Company is a member of Lippo Group.

1.b. The Company's Initial Public Offering

The Company's initial public offering consisting of 108,588,000 common stocks, was declared effective by the chairman of Capital Market and

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal) dengan Surat Keputusan No. S-1492/PM/1997 tanggal 27 Juni 1997.

Financial Supervisory Board (Bapepam-LK) (formerly Capital Market Supervisory Board) in the Decree No. S-1492/PM/1997 dated June 27, 1997.

Pada 27 Juni 2019, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 1.983.600.000 saham biasa baru atas nama, yang telah disetujui oleh pemegang saham melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 April 2019. Penawaran tersebut telah mendapat surat pemberitahuan efektifnya penyataan pendaftaran melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-71/D.04/2019 tanggal 13 Juni 2019.

On June 27, 2019, the Company offered 1,983,600,000 common shares to the shareholders through Limited Public Offering I in connection with HMETD approved by the shareholders through the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) on April 18, 2019. This offering has received an effective notice of registration statement through the letter from Financial Service Authority No. S-71/D.04/2019 dated June 13, 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah saham beredar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 2.679.600.000 lembar saham.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding shares listed on the Indonesia Stock Exchange are 2,679,600,000 shares.

1.c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (Grup)

Berikut adalah rincian entitas anak yang signifikan yang terkonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian:

1.c. Structure of the Company and its Subsidiaries (Group)

The details of significant subsidiaries consolidated in the consolidated financial statements are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha Utama/ *Main Business*	Persentase Kepemilikan/ *Ownership Percentage*		Tahun Awal Beroperasi/ *Year of Starting Operation*	Jumlah Aset/*Total Assets*	
			Langsung/ *Direct*	Tidak Langsung/ *Indirect*		2020 Rp	2019 Rp
PT Great Jakarta Inti Development dan/ *and* Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Bekasi	Pengelolaan Kota dan Real Estat/ *Estate Management and Real Estate*	99.99%	0.01%	1992	593,408	605,465
PT Tirta Sari Nirmala dan/ *and* Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Bekasi	Pengelolaan Air Bersih dan Limbah/ *Clean and Waste*	99.99%	0.01%	2011	252,392	189,727
PT Tunas Pundi Bumi	Bekasi	Pengelolaan Kota/ *Estate Management Water Management*	25.00%	75.00%	2010	194,174	142,628
PT Sinar Surya Timur	Bekasi	Perdangangan, Pembangunan dan Jasa/ *Trading, Development and Services*	99.99%	0.01%	2007	77,825	77,528
PT Waska Sentana	Bekasi	Real Estat/ *Real Estate*	75.00%	25.00%	2014	628,938	622,972
PT Swadaya Teknopolis dan/ *and* Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Bekasi	Real Estat/ *Real Estate*	99.99%	0.01%	2015	321,836	449,705
Premium Venture International Ltd dan/ *and* Entitas Anak/ *Subsidiary*	*British Virgin Island*	Investasi/ *Investment*	--	100.00%	2015	321,761	449,630
Intellitop Finance Ltd	*British Virgin Island*	Investasi/ *Investment*	--	51.72%	2015	320,790	448,659
PT Cahaya Ina Permai dan/ *and* Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Bekasi	Real Estat/ *Real Estate*	75.00%	25.00%	--	580,155	565,658
PT Astana Artha Mas	Bekasi	Real Estat/ *Real Estate*	--	100.00%	--	67,432	67,319
PT Megakreasi Cikarang Damai	Bekasi	Real Estat/ *Real Estate*	--	100.00%	2015	258,623	244,251
PT Megakreasi Cikarang Asri dan/ *and Entitas Anak/ Subsidiary*	Bekasi	Real Estat/ *Real Estate*	--	75.00%	--	83,524	83,347
PT Megakreasi Propertindo Utama	Bekasi	Real Estat/ *Real Estate*	--	75.00%	--	83,434	83,257
PT Megakreasi Cikarang Permai dan/ *and* Entitas Anak/ *Subsidiary*	Bekasi	Real Estat/ *Real Estate*	99.92%	0.08%	2015	810,961	2,179,510
PT Lippo Diamond Development	Bekasi	Real Estat/ Real Estate	--	51.00%	2015	806,506	535,056

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

1.d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 02 tanggal 6 Juli 2020 dan No. 28 tanggal 29 November 2019, yang masing-masing dibuat di hadapan Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N Notaris di Bekasi dan Kristanti Suryani, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

1.d. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

The composition of Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 and 2019 based on Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 02 dated July 6, 2020 and No. 28 dated November 29, 2019 which was made in the presence of Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N a Notary in Bekasi and Kristanti Suryani, S.H., M.kn, a Notary in Jakarta, respectively, are as follows:

		2020	2019		
Dewan Komisaris:					***Board of Commissioners:***
Presiden Komisaris	:	Drs. Theo L. Sambuaga	Drs. Theo L. Sambuaga	:	*President Commissioner*
Komisaris Independen	:	Hadi Cahyadi	Hadi Cahyadi	:	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	:	Ali Said	Ali Said	:	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	:	Didik Junaidi Rachbini	Didik Junaidi Rachbini	:	*Independent Commissioner*
Komisaris	:	Sugiono Djauhari	Sugiono Djauhari	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Anand Kumar	--	:	*Commissioner*
Direksi:					***Directors:***
Presiden Direktur	:	Sie Subiyanto	Sie Subiyanto	:	*President Director*
Direktur	:	Rudy Halim	Ju Kian Salim	:	*Director*
Direktur	:	Ju Kian Salim	Alexander Yasa	:	*Director*
Direktur	:	Tevilyan Yudhistira Rusli	Lora Oktaviani	:	*Director*
Direktur Independen	:	--	Sony	:	*Independent Director*

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Audit Committee composition as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

		2020	2019		
Komite Audit:					***Audit Commitee:***
Ketua	:	Hadi Cahyadi	Hadi Cahyadi	:	*Chairman*
Anggota	:	Yani Bardan	Laurensia Adi	:	*Member*
Anggota	:	Peter John Chambers	Yugi Prayanto	:	*Member*

Kepala Audit Internal adalah Yoseph Tannos dan Sekretaris Perusahaan adalah Lora Oktaviani masing-masing pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Head of Internal Audit is Yoseph Tannos and Corporate Secretary is Lora Oktaviani as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Perusahaan dan entitas anak masing-masing memiliki sejumlah 456 dan 427 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of December 31, 2020 and 2019, the Company and subsidiaries have a total of 456 and 427 permanent employees, respectively (unaudited).

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2. Significant Accounting Policies

2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan

2.a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas didalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi atas standar Baru

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): “Penyajian Laporan Keuangan: tentang Judul Laporan Keuangan”;
- PSAK 13: “Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba”;
- PSAK 15 (Amandemen 2017): “Investasi

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Sevices Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated financial statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. New Standard and interpretation of Standards

New Standard and amendment to standards which effective for the periods beginning on or after Januari 1, 2020 with early adoption is permitted, are as fillow:

- *PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): “Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";*
- *PSAK 13: "Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting";*
- *PSAK 15 (Amendment 2017): “Investment*

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Pada Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";

- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amandemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 73 (Amandemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19;
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- ISAK 35: "Penyesuaian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- **PSAK 71: Instrumen Keuangan**
  PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

In Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures;"

- *PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors";*
- *The amandements of PSAK 60 "Financial Instrument: Disclosure" about interest rate benchmark reform;*
- *PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation";*
- *PSAK 71: "Financial Instrument";*
- *PSAK 72: "Revenue from Contract with Customer";*
- *PSAK 73: "Lease";*
- *PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Covid-19 related Rent Concessions;*
- *PSAK 102 (Revisi 2019): "Accounting for Murabahah";*
- *PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract;*
- *ISAK 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements";*
- *ISAK 101: "Recognition of Unearned Revenue of Murabahah Without Significant Risk Related to Inventory Ownership";*
- *ISAK 102: "Allowance for Murabahah Receivables";*
- *ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases;*
- *Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform.*

Except for the changes described below, the implementation of these standards did not result in a substantial change in the Group accounting policies and had no material impact on the financial statements of the current year or previous year.

- ***PSAK 71: Financial Instrument***
  PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows,

pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

Berdasarkan hasil kajian Grup dengan menggunakan kedua kriteria tersebut, tidak terdapat dampak perubahan signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangan Grup. Seluruh aset keuangan Grup yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang diberikan menurut PSAK 55 berubah menjadi kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai PSAK 71. Karena sebelumnya aset keuangan tersebut masing-masing telah diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka pengukuran aset keuangan tersebut tidak perlu disesuaikan.

Based on the Group review using both criteria, there is no significant impact on the classification and measurement of the Group Financial Assets. All of the Group's Financial Assets that were classified as loans and receivables in PSAK 55 are now classified as amortized costs in PSAK 71. Since these financial assets are already recorded as amortized costs, hence no need adjustments is required for those financial asset measurements.

Aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual menurut PSAK 55 berubah menjadi kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Karena sebelumnya aset keuangan tersebut telah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka pengukuran aset keuangan tersebut tidak perlu disesuaikan.

Financial assets that were classified as available for sale in PSAK 55 are now classified as financial asset at fair value through other comprehemsive income. Since the financial assets are already recorded at fair value through other comprehensive income, hence no need adjustments is required for those financial asset measurements.

Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga tidak berdampak signifikan pada nilai tercatat aset keuangan Grup pada awal penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

Changes in the approach to calculating impairment of financial assets also has no significant impact on the carrying value of the Group financial assets at the initial implementation of PSAK 71 on January 1, 2020.

- **PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan**
  PSAK 72 menggantikan PSAK 23: "Pendapatan" dan PSAK 44 : "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate". PSAK 72 menggantikan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

- ***PSAK 72: Revenue from Contract with Customer***
  PSAK 72 replaces PSAK 23: "Revenue" and PSAK 44: "Accounting for Real Estate Development Activities". PSAK 72 introduces 5 (five)-step model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

Grup menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal

The Group applies PSAK 72 retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020

1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, berikut adalah penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020:

and did not restate the comparative information.

Based on the review that the Group has conducted on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages in PSAK 72, below are require adjustments in the opening balance January 1, 2020:

	1 Januari 2020 / January 1, 2020				
	Berdasarkan PSAK 44/ *Based on PSAK 44*	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Penyesuaian Saldo Laba/ *Adjustment to Retained Earnings***	**Berdasarkan PSAK 72/ *Based on PSAK 72***	
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	
ASET					***ASSETS***
Piutang Usaha	215,672	--	(210,708)	4,964	*Trade Receivable*
Persediaan	2,241,171	--	1,339,767	3,580,938	*Inventories*
Pajak Dibayar di Muka	20,276	--	47,940	68,216	*Prepaid Taxes*
TOTAL ASET	**2,477,119**	**--**	**1,176,999**	**3,654,118**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Uang Muka Pelanggan	548,486	(548,486)	--	--	*Advance from Customers*
Liabilitas Kontrak	--	548,486	1,766,557	2,315,043	*Contract Liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**548,486**	**--**	**1,766,557**	**2,315,043**	***TOTAL LIABILITIES***
Dampak Penerapan Awal PSAK 72			**(589,558)**		***Impact of the Initial Implementation PSAK 72***

Grup mereklasifikasi saldo uang muka pelanggan menjadi liabilitas kontrak per 1 Januari 2020 sebesar Rp548.486.

The Group reclassified advance from customer as contract liabilities as of January 1, 2020 amounted to Rp548,486.

- **PSAK 73: Sewa**
  PSAK 73 menggantikan PSAK 30: “Sewa” yang mensyaratkan Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

  Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak sewa di dalam PSAK 73: Sewa, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

- ***PSAK 73: Lease***
  PSAK 73 replace PSAK 30: "Leases", which requires the Group as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases with low-value assets.

  Based on the Group review on lease contracts in PSAK 73: Lease, there is no significant impact on financial statement and there is no required to adjust the beginning balance as per January 1, 2020.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include financial statement of the Company and subsidiaries as stated in Note 1.c.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e., the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity’s relevant activities (power over the investee).

mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e., substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

The Group's consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

A parent prepares the consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation to reflect the financial position as a single business entity.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e., transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

If the Group loses control, the Group:

(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
(b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
(c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;
(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
(e) Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and
(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.e. Transaction and Balances in Foreign Currency

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (“the functional currency”). The functional currency of the Company and the subsidiaries is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting year, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e., middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2020 and 2019 as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
1 USD	14,105	13,901
1 SGD	10,644	10,321

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current accounts) and time deposits with maturity period of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.g. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:
(a) jika investasi menjadi entitas anak.
(b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
(c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait

2.g. Investment in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognised in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property and equipment and from foreign exchange translation differences.The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:
(a) if the investment becomes a subsidiary.
(b)If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.

(c) When the Group discontinue the use of the equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that

dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

2.h. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

(1) Operasi bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

(a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
(b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
(c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
(d) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
(e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

(2) Ventura Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai *venturer* bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.h. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e., the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant actvities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classified joint arrangement as:

(1) Joint Operation

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognize in relation to its interest in a joint operation:

(a) Its assets, including its share of any assets held jointly;
(b) Its liablities, including its share of any liabilities incurred jointly;
(c) Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;
(d) Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
(e) Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

(2) Joint Venture

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognize its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

2.i. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

(a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(b)Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

2.i. Transaction and Balances with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

i. has control or joint control over the reporting entity;
ii. has significant influence over the reporting entity; or
iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(b) An entity is related to the reporting entity if any of following conditions applies:

i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All transactions and significant balances with related parties are disclosed in relevant Notes.

2.j. Persediaan dan Tanah untuk Pengembangan

Persediaan real estat terutama terdiri dari biaya perolehan tanah dalam pematangan, rumah hunian, rumah gerai, apartemen, termasuk bangunan (rumah) dalam penyelesaian, dicatat sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (NRV). Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Biaya perolehan atas tanah dalam pematangan termasuk biaya pengembangan dan pematangan tanah. Biaya perolehan atas rumah hunian dan rumah gerai terdiri dari biaya konstruksi aktual.

Tanah yang dimiliki oleh Grup untuk pengembangan di masa mendatang dikelompokkan sebagai "Tanah untuk Pengembangan". Pada saat dimulainya pengembangan dan pembangunan infrastruktur, nilai tanah untuk pengembangan tersebut akan diklasifikasikan ke akun persediaan real estat, properti investasi atau aset tetap, mana yang lebih sesuai.

Selisih lebih nilai tercatat persediaan atas estimasi jumlah terpulihkannya diakui sebagai rugi penurunan nilai sebagai "Penyisihan atas Penurunan Nilai Persediaan" dalam laba rugi.

Persediaan lainnya dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama. Penyisihan atas penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan hasil penelahaan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada tahun terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan

2.j. Inventories and Land for Development

Real estate inventories, which mainly consist of Real estate inventories, which mainly consist of acquisition cost of land under development, residential houses, shophouses, apartments including buildings (houses) under construction, are carried at the lower of cost and net realizable value (NRV). Cost is determined by using the average method. Cost of land under development includes cost of land improvement and development. The cost of residential houses and shophouses consist of actual construction cost.

Land for future development of the Group is classified as "Land for Development". Upon the commencement of development and construction of infrastructure, the carrying costs of land for development will be reclasified to the respective real estate inventory, investment property or property and equipment accounts, whichever is appropriate.

The excess of carrying value of inventories over their estimated recoverable value is recognized as impairment loss under "Provision for Decline in Value of Inventories" in profit or loss.

Other inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined by using the first-in-first-out method. Allowance for decline in inventory value is provided based on a review of inventory status at the end of year.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and selling costs.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the year the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net

kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada tahun terjadinya pemulihan tersebut.

realizable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the year in which the reversal occurs.

2.k. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban.

2.k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefitted of respective expenses.

2.l. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Hak atas tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan properti investasi dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset selama 20 tahun.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

2.l. Investment Property

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognised as an asset if, and only if it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group choose to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses if any.

Landrights are not depreciated and are carried at costs.

Depreciation of investment property starts when its available for use and its computed by using straight line method based on the estimated useful lives of assets for 20 years.

The cost of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred while significant renovations and additions are capitalised.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

a. dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
b. dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
c. berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
d. Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.m. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

a. Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner-occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;
b. Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;
c. End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and
d. Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.

An Investment property is derecognised on disposal on disposal or when the investment property is permanenty withdrawn from use and no future economic benefits, are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the assets, and are recognized in profit or loss in the period of retirement or disposal.

2.m. Property and Equipment

Property and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, property and equipment, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses, if any.

Hak atas tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognised at its cost and are not depreciated.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of property and equipment starts when its available for use and its computed by using straight line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

	Tahun/ *Year*	
Bangunan	20	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	4	*Machineries and Equipments*
Kendaraan	4	*Vehicles*
Perabot dan Perlengkapan Kantor	4 - 5	*Furniture and Office Equipment*

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi tahun berjalan pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapusbukukan.

The cost of repairs and maintenance is charged to operation as incurred while significant renovations and additions are capitalized. The carrying value of the part replaced was written-off.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self constructed property and equipment is presented as part of property and equipment as "Construction in Progress" and is stated at cost. All cost incurred related to the construction of such assets is caplitalized as part of cost of construction in progress. Cost of construction in progress shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective property and equipment items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of property and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset) is credited or charged to operations in the asset is derecognised.

Pada akhir tahun pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai

At the end of each financial year, the Group reviews useful life residual values, and methods

residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

of depreciation, and the remaining useful life based on technical condition.

2.n. Sewa

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai *Lessee:*
Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental *lessee.* Biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee* ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai *Lessor:*
Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa pembiayaan. Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian

2.n. Leases

Accounting treatment before January 1, 2020

Determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance operating leases if it transfers substantially all the risks and benefits incidental to ownership.

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and benefits incidental to ownership.

The Group as lessees:
At the commencement of the lease term under finance lease, the Group recognized financial leases as assets and liabilities in their statement of financial position at amounts equal to the fair value of the leased assets or, if lower, the present value of minimum lease payments. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the rate implicit in the lease, if this is practical to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Initial direct cost of the lessee is added to the amount recognized as an asset. The depreciation any leased asset is consistent with depreciable assets that are owned.

Under an operating lease, the Group recognises lease payments as an expense on a straight line basis over the lease term.

The Group as Lessors:
Group recognises assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant yearic rate of return on Group's net investment in the finance lease as lessor.

periodik yang konstan atas investasi bersih Grup sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.

Grup mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa operasi. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Jual dan Sewa-Balik
Aset yang dijual berdasarkan transaksi jual dan sewa - balik diperlakukan sebagai berikut:

- Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan atas nilai tercatat akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.
- Jika transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa operasi dan transaksi tersebut dilakukan pada nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, Jika harga jual dibawah nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, kecuali kerugian tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka kerugian tersebut ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual diatas nilai wajar, maka selisih lebih atas nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama perkiraan periode penggunaan aset.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020
Pada tanggal insepsi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan asset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah salama periode penggunaan,

Group presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, be recognized as income in the year incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight line basis over the lease term.

Sale and Leaseback
Assets sold under a sale and leaseback transaction are accounted for as follows:

- *If the sale and leaseback trasaction results in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount of the asset is deferred and amortized over the lease term.*
- *If the sale and leaseback transaction result in an operating lease and the transaction is established at fair value, any profit or loss is recognized immediately. If the sale price is recognized immediately except that, if the loss is compensated by future lease payments at below market price, it is deferred and amortized in proportion to the lease payments over the period for which the asset is expected to be used. If the sale price is above fair value, the excess over fair value is deferred and amortized over the period for which the asset is expected to be used.*

Accounting treatment since January 1, 2020
At inception of a contract, the Group shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the the Group shall assess whether, throughout the period of use, the

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Grup memiliki dua hal berikut:
a) hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian; dan
b) hak untuk mengarahkan penggunaan asset identifikasian, yaitu hanya jika:
   (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
   (ii) keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
   - Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan asset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
   - Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Grup sebagai Lessee
Pada tanggal permulaan, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Group has both of the following:
(a) the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset; and
(b) the right to direct the use of the identified asset, only if either:
   (i) the Group has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use; or
   (ii) the relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined and:
   - *the Group has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions;or*
   - *the Group designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.*

Group as Lessee:
At the commencement date, the Group shall recognise a right-of-use asset and a lease liability.

After the commencement date, the Group shall measure the right-of-use asset applying a cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right-of-use asset depreciated using straight line method.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liablitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liablitas sewa dengan:

a. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
b. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika utang sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Modifikasi sewa
Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

At the commencement date, the Group shall measure the lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at that date. The lease payments shall be discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Group shall use the Group's incremental borrowing rate.

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

a. increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;
b. reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and
c. remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments

It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Lease modification
Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, Group:

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa yang direvisi menggunakan tingkat diskonto yang direvisi berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan asset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah
Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

2.o. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan
Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

- *Remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
- *Determine the lease term of the modified lease;*
- *Remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *Decrease the carrying amount of the right of- use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*

- *Make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

Short-term leases and leases of low-value assets
The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for leases of low-value assets and short-term leases. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2.o. Impairment of Non – Financial Assets
At the end of each reporting year, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognised immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior year for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

2.p. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah

2.p. Business Combination

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the years in which the costs are incurred and the services are received.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquire is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognised in profit or loss. When in prior years, a changes in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognised in

diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

other comprehensive income, that amount shall be recognized on the same basis as would be required if the Group had disposed directly of the previously held equity interest.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir tahun pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama tahun pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting year in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete in its financial statements. During the measurement year the acquirer adjust, recognized additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

Pada tanggal akusisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto terindentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari akusisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akusisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakusisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugiaan dari pelepasan.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is

Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

2.q. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.

Karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

Bila entitas yang menerima bisnis kemudian melepas entitas bisnis yang sebelumnya diperoleh, akun tambahan modal disetor yang dicatat sebelumnya, tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

2.q. Business Combination between Entities Under Common Control

Business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction can not result in a gain or loss for the Group as a whole or the individual entity within the Group.

Due to business combination transactions of entities under common control does not lead to change in economic substance of ownership on the exchanged asset, liability, shares or other exchange ownership instrument, then the transferred asset or liability (in its legal form) is recorded at its carrying amount as well as a business combination under the pooling of interest method.

An entity that receives the business, in a business combination of entities under common control, recognizes the difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of each transaction of a business combination of entities under common control in equity under additional paid in capital.

If the entity that received the business, subsequently dispose the business entity acquired previously, the additional paid-in capital recorded before, can not be recognized as a realized gain or loss nor reclassified to retain earning.

2.r. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

2.r. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Shor-term employee benefits are recognised when an employee has rendered service during accounting year, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

Imbalan Pascakerja
Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon
Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

(a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
(b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.s. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020
Grup mengakui pendapatan dari penjualan real estat berdasarkan PSAK 44 "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat" sebagai berikut:

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Post-employment Benefits
Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Group recognises the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation is determined by discounting the benefit.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognised in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognised in other comprehensive income.

Termination Benefits
The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:
(a) When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
(b) When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.s. Revenue and Expense Recognition
Accounting treatment before January 1, 2020
The Group recognizes revenue from the sale of real estate based on PSAK 44 "Accounting for Real Estate Development Activities" as follows:

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

(i) Pendapatan dari penjualan kavling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh pada saat pengikatan jual beli apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:
   a. Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli;
   b. Harga jual akan tertagih;
   c. Tagihan penjual tidak bersifat subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli di masa yang akan datang;
   d. Proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk membangun kavling tanah yang dijual seperti kewajiban untuk mematangkan kavling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan perundang-undangan; dan
   e. Hanya kavling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kavling tanah tersebut.

(ii) Pendapatan dari penjualan bangunan rumah, ruko dan bangunan sejenis lainnya beserta kavling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi:
   a. Proses penjualan telah selesai;
   b. Harga jual akan tertagih;
   c. Tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan
   d. Penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

(iii) Pendapatan penjualan pusat belanja, apartemen dan perkantoran diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian bila memenuhi semua kriteria berikut:
   a. Proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu fondasi bangunan telah

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

(i) Revenues from sales of lots that do not require the seller to construct building are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met:
   a. Total payments by the buyer are at least 20% of the agreed selling price and the amount is not refundable;
   b. The selling price is collectible;
   c. The receivable is not subordinated to other loans in the future;
   d. The land development process is complete so that the seller has no further obligations related to the lots sold, such as obligation to construct amenities or obligation to build other facilities applicable to the lots sold as provided in the agreement between the seller and the buyer or regulated by law; and
   e. Only the lots are sold, without any requirement of the seller's involvement in the construction of building on the lots.

(ii) Revenues from sales of houses, shop houses, and other similar property and related land are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met:
   a. A sale is consummated;
   b. The selling price is collectible;
   c. The seller's receivable is not subject to future subordination against other loans which will be obtained by the buyer; and
   d. The seller has transferred the risks and benefits ownership to the buyer through a transaction that in substance is a sale and does not have substantial continuing involvement with the property.

(iii) Revenues from sales shopping center, apartments and office are recognized using the percentage-of-completion method if all of the following conditions are met:
   a. The construction process has already commenced, i.e., the building foundation

selesai dengan semua persyaratan untuk memulai pembangunan telah terpenuhi;

b. Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan Jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; dan

c. Jumlah pendapatan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan handal.

has been completed and all of the requirements to commence construction have been fulfilled;

b. Total payments by the buyer are at least 20% of the agreed selling price and the amount is not refundable; and

c. The amount of revenue and the cost of the property can be reliably estimated.

Metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian aktivitas pengembangan adalah berdasarkan persentase aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah aktivitas yang harus dilaksanakan.

The method used to determine the level of development activity completion is based on a percentage of actual activities accomplished to total development activities that need to be accomplished.

Apabila suatu transaksi real estat tidak memenuhi seluruh kriteria pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh, pengakuan penjualan ditangguhkan dan transaksi tersebut diakui dengan metode uang muka sampai seluruh kriteria penggunaan metode akrual penuh terpenuhi.

If a real estate sale fails to meet all the criteria of full accrual method, revenue recognition is deferred and the transaction is recognized using the deposit method until all of the conditions of full accrual method are fulfilled.

Beban pokok penjualan lahan siap bangun ditentukan berdasarkan taksiran biaya perolehan tanah ditambah taksiran beban lain untuk pengembangan dan pembangunan prasarana penunjang. Beban pokok penjualan rumah hunian dan rumah gerai ditentukan berdasarkan seluruh biaya aktual pengerjaan yang terjadi dan taksiran biaya untuk menyelesaikan pengerjaan. Taksiran biaya untuk menyelesaikan pengerjaan disajikan dalam "Beban Akrual" yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Perbedaan antara jumlah taksiran biaya dengan biaya aktual pengerjaan atau pengembangan dibebankan pada "Beban Pokok Pendapatan" periode berjalan.

Cost of land lots sold is determined based on the estimated acquisition cost of the land plus other estimated expenditures for its improvements and developments. The cost of residential houses and shophouses sold is determined based on actual cost incurred and estimated cost to complete the work. The estimated cost to complete is included in the "Accrued Expenses" account which is presented in the Consolidated Statements of financial position. The difference between the estimated cost and the actual cost of construction or development is charged to "Cost of Revenues" in the current period.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

Expenses are recognized as incurred on an accruals basis.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dengan melakukan analisis transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:

i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan dengan kriteria sebagai berikut;
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
   - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu

Accounting treatment since January 1, 2020

Group recognizes revenues in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", by performing transaction analysis through the five steps of income recognition model as follows:

i. Identify contract(s) with a customer with certain criteria as follows:
   - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
   - *Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the*

pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
- Kontrak memiliki substansi komersial
- Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan

ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;

v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Grup mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan atas penjualan apartemen,

goods or services to be transferred

- *The contract has commercial substance*
- *It isprobable that the Group will receive benefits for*

ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;

iii. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;

iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin;

v. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:
- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

The Group recognized revenue from contracts with customer of sales apartments, residential

rumah hunian dan toko serta lahan siap bangun pada saat pengendalian atas barang dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Grup dalam pertukaran barang tersebut.

house and shophouses and land lots when control of the good is transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods.

Grup mencatat uang muka yang diperoleh pelanggan yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan dan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, jika ada, sebagai liabilitas kontrak.

The Group recorded advance form customer that have not meet the revenue recognition criteria and significant financing component, if any, as contract liabilities.

2.t. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

2.t. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the year. Current tax and deferred tax is recognised in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognised in other comprehensive income or equity, respectively.

Jumlah pajak kini untuk tahun berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk tahun berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current year and prior period shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior period exceeds the amount due for those years, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current year and prior period shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari tahun sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous years is recognised as an asset. Deferred tax asset is recognised for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which theunused tax losses and unused tax credits can be utilised.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a. pengakuan awal *goodwill*; atau
b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang
   i. bukan kombinasi bisnis; dan
   ii. pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:
a. bukan kombinasi bisnis; dan
b. pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir tahun pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:
1) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
2) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:

a. the initial recognition of goodwill; or
b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is
   i. not a business combination; and
   ii. at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is:
a. not a business combination; and
b. at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting year, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:
1) the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and

2) the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

i. entitas kena pajak yang sama; atau
ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap tahun masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini disajikan jika, dan hanya jika, entitas:
1) memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menghapus dalam jumlah yang diakui; dan
2) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.v. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Komponen liabilitas pada instrumen keuangan majemuk diakui pada awalnya sebesar nilai wajar liabilitas yang serupa yang tidak memiliki opsi konversi ekuitas. Komponen ekuitas diakui pada awalnya sebesar selisih antara nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan dan nilai wajar komponen liabilitas. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dialokasikan pada komponen liabilitas dan ekuitas sesuai dengan proporsi nilai tercatat awalnya.

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

i. the same taxable entity; or
ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future year in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The offset of current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the entity:
1) has legally enforceable right to set off the recognised amounts; and
2) intends either to settle on a net basis, or to realise the assets and settle liabilities simultaneously.

2.v. Financial Instruments

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial assets or a financial libilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability is not measured at fair value through profit or loss, fair value is added or reduced with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issuance of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issuance of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

The liability component of compound financial instrument is recognized initially at the fair value of a similar liability that does not have an equity conversion option. The equity component is recognized initially as the difference between the fair value of the compound financial instrument as a whole and the fair value of the liability component. Any directly attributable transaction costs are allocated to the liability and equity components in proportion to their initial carrying amounts.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba atau Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Accounting treatment before January, 1 2020

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

(i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

(ii) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

(a) those loan and receivables that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
(b) those loan and receivables that upon initial recognition designated as available for sale; or
(c) those loan and receivables for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

(iii) Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ("HTM")

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Held-to-Maturity Investments ("HTM")

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(iv) Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recogniized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Accounting treatment since January 1, 2020

At initial recognition, financial assets are classified in the three categories as follows: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
b. Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

(i) Financial Assets Measured at Amortized Costs

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

a. The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and
b. Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

(ii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

a. the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset; and
b. Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment losses, and gain or loss on foreign exchange, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (held for trading) untuk diukur pada FVTOCI.

Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

(iii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI.

This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Accounting treatment before January 1, 2020

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial

liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020
Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:
(a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabiitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabiliatas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
(b) Liabitas keuangan yang timbul Ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
(c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit

liabilities into one of the following categories:

(i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

(ii) Other Financial Liabilities
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Accounting treatment since January 1, 2020
The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

(a) financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
(b) financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
(c) financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, and issuer of such a contract and

komitment selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
(i) Jumlah penyisihan kerugian dan
(ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.

(d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
(a) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkosistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai *"accounting mismatch")* yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
(b) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset

an issuer ofsuch a commitment shall subsequently measure it at the higher of:

(i) the amount of the loss allowance
(ii) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.

(d) Contingent consideration recognised byan acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measures at fair value with changes recognised in profit or loss

At initial recognition the Group may irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

(a) it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as an accounting mismatch') that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

(b) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Grup's key management personnel.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

Financial assets
The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize

keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognizes the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup melakukan transaksi dengan mana ia mentransfer aset yang diakui dalam laporan posisi keuangannya, tetapi tetap memiliki semua atau secara substansial semua risiko dan manfaat dari aset yang ditransfer. Dalam kasus ini, aset yang ditransfer tidak dihentikan pengakuannya.

The Group enters into transactions whereby it transfers assets recognised in its statement of financial position, but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets. In these cases, the transferred assets are not derecognised.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is reclassified to profit or loss.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety the Group allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Liabilitas keuangan
Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Financial liabilities
The Group removes a financial liability from its statement of financial position if, and only if, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Impairment of Financial Assets
Accounting treatment before January 1, 2020
At the end of each reporting year, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impared and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occured after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:
(a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
(c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
(d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:
(a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;
(b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;
(c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or
(d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments

hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is

penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020
Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti obyektif sebagai akibat adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan terdampak.

Accounting treatment since January 1, 2020
Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

The Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized cost.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Perusahaan mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Perusahaan secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

i. jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
ii. nilai waktu uang; dan
iii. informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan

However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 months expected credit loss (stage 1) is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Company in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial intruments are conducted by a means which reflect:

i. an unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;
ii. time value of money; and
iii. reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low

peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant year. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter year to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat.

Reclassification

Accounting treatment before January 1, 2020

The Group shall not reclassify a derivative out of the measured at fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the measured at fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as measured at fair value through profit or loss. The Group may reclassifiy that financial asset out of the measured at fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term.

Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

The Group shall not reclassify any financial instrument into the measured at fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

If, as a result of a change in the Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020
Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan jika dan hanya jika, terjadi perubahan model bisnis.

Accounting treatment since January 1, 2020
The Group can reclassify all its financial assets if and only if, a change in the business model.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FTVPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through other comprehensive income, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference

selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when Groups reclassifies its financial asset out of the FTVOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into fair value through profit or loss, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam tingkat yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Tingkat 1);
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tingkat 2); atau
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Tingkat 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara tingkat hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.w. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2); or
(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.w. Operating Segment

The Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.x. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Manajemen secara periodik menelaah asumsi dan estimasi ini untuk memastikan bahwa asumsi dan estimasi telah dibuat berdasarkan semua informasi relevan yang tersedia pada tanggal tersebut dimana laporan keuangan konsolidasian disusun. Karena terdapat ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, nilai aset dan liabilitas yang akan dilaporkan di masa mendatang akan berbeda dari estimasi tersebut.

Pada tanggal pelaporan, manajemen telah membuat asumsi dan estimasi penting yang memiliki dampak paling signifikan pada jumlah tercatat yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, yaitu sebagai berikut:

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

2.x. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgment

The preparation of the Group' consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group and subsidiaries based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of Group and subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

The management periodically reviews them to ensure that the assumptions and estimates have been made based on all relevant information available on the date in which the consolidated financial statements have been prepared. Because there is inherent uncertainty in making estimates, the value of assets and liabilities to be reported in the future might differ from those estimates.

At the reporting date, the management has made significant assumptions and estimates which have the most significant impact to the carrying amount recognized in the consolidated financial statements, as follows:

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Secara umum manajemen menganalisis kecukupan penyisihan piutang berdasarkan beberapa hal, yaitu antara lain menganalisis historis piutang tak tertagih, konsentrasi piutang masing-masing pelanggan, kelayakan kredit yang diberikan dan perubahan jangka waktu pelunasan. Analisis tersebut dilakukan secara individual terhadap jumlah piutang yang signifikan, sedangkan kelompok piutang yang tidak signifikan dilakukan atas dasar kolektif. Pada tanggal pelaporan, jumlah tercatat piutang telah mencerminkan nilai wajarnya dan nilai tercatat tersebut dapat berubah secara material pada periode pelaporan berikutnya, namun perubahan itu bukan berasal dari asumsi maupun estimasi yang dibuat pada tanggal pelaporan ini.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai piutang usaha. Nilai tercatat piutang telah diungkapkan dalam Catatan 4 dan 6.

Estimasi Pajak Tangguhan
Pengakuan aset pajak tangguhan dilakukan hanya jika besar kemungkinan aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima pada tahun mendatang, di mana perbedaan temporer dan akumulasi rugi fiskal masih dapat digunakan. Manajemen juga mempertimbangkan estimasi laba kena pajak di masa datang dan perencanaan strategis perpajakan dalam mengevaluasi aset pajak tangguhannya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maupun perubahannya. Sebagai akibatnya, terkait dengan sifat bawaannya, ada kemungkinan bahwa perhitungan pajak tangguhan

Impairment of Financial Assets
Accounting treatment before January 1, 2020
In general, the management analyzes the adequacy of the allowance for impairment of receivable based on several data, which include analyzing historical bad debts, the concentration of each customer's accounts receivable, credit worthiness and changes in a given year of repayment. The analysis is carried out individually on a significant amount of accounts receivable, while the insignificant group of accounts receivable is carried on the collective basis. At the reporting date, the carrying amount of accounts receivable has been reflected at fair value and the carrying value may change materially in the subsequent reporting period, but the change, however, will not be attributable to the assumptions and estimates made as of this reporting date.

Accounting treatment since January 1, 2020
The Group at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach to measure expected credit loss using roll rate and discounted cash flow to measuring trade receivables. The carrying amounts of receivables are disclosed in Notes 4 and 6.

Deferred Tax Estimation
Deferred tax assets recognition is performed only if it is probable that the asset will be recovered in the form of economic benefits to be received in future years, in which the temporary differences and tax losses can still be used. Management also considers the future estimated taxable income and strategic tax planning in order to evaluate its deferred tax assets in accordance with applicable tax laws and its updates. As a result, related to its inherent nature, it is likely that the calculation of deferred taxes is related to a complex pattern where assessment requires a judgment and is not expected to provide an accurate calculation (Note 18.b).

berhubungan dengan pola yang kompleks di mana penilaian memerlukan pertimbangan dan tidak diharapkan menghasilkan perhitungan yang akurat (Catatan 18.b).

Berdasarkan PERPU No 1 tahun 2020, terdapat perubahan tarif pajak penghasilan badan untuk tahun 2020 dan 2021 menjadi 22%, dan untuk tahun 2022 dan tahun fiskal selanjutnya menjadi sebesar 20%.

Based on PERPU No. 1 tahun 2020, there is a change in the corporate income tax rate for fiscal years 2020 and 2021 to 22% and for fiscal the year 2022 and subsequent fiscal years to 20%.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Properti Investasi
Manajemen melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi mesin dan peralatan medis di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap dan properti investasi, jika terjadi, diperlakukan secara prosepektif sesuai PSAK 25 (Amandemen 2019) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" (Catatan 12 dan 13).

Estimation of Useful Lifes of Property and Equipment and Investment Property
Management makes a yearic review of the useful lifes of property and equipment and investment property based on several factors such as physical and technical conditions and development of medical equipment technology in the future. The results of future operations will be materially influenced by the change in estimate as caused by changes in the factors mentioned above. Changes in estimated useful life of property and equipment and investment property, if any, are prospectively treated in accordance with PSAK 25 (Amendment 2017), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" (Notes 12 and 13).

Imbalan Pascakerja
Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) tersebut mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja (Catatan 23).

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban ini. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban yang terkait. Asumsi kunci lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini, selama periode di mana liabilitas imbalan pascakerja terselesaikan. Perubahan asumsi imbalan kerja ini akan berdampak pada pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial pada akhir periode pelaporan.

Post-employment Benefits
The present value of post-employment benefits liability depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the cost (income) include the discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits (Note 23).

The Group determines the appropriate discount rate at end of reporting period by the interest rate used to determine the present value of future cash outflows expected to settle this obligation. In determining the appropriate level of interest rates, the Group considers the interest rate of government bonds denominated in Rupiah that has a similar year to the corresponding year of obligation. Other key assumption is partly determined by current market conditions, during the year in which the post-employment benefits liability is resolved. Changes in the employee benefits assumption will impact on recognition of actuarial gains or losses at the end of the period.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Fair Value of Financial Instruments
If the fair value of financial assets and liabilities recorded in the consolidated statement of financial position is not available in active market, it is determined using valuation techniques including the use of mathematical model. Input for this model derived from observable market data throughout the available data. When observable market data is not available, management judgment is required to determine the fair value. The considerations include liquidity and input models such as volatility for long-term derivative transactions and discount rates, prepayments, and default rate assumptions.

3. Kas dan Setara Kas / *3. Cash and Cash Equivalents*

	2020 Rp	2019 Rp
Kas/ *Cash on Hand*	80	73
Bank/ *Cash in Banks*		
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	44,617	12,938
PT Bank ICBC Indonesia	4,791	3,796
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,024	2,348
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,058	2,269
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,289	1,764
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1,759	1,664
PT Bank Central Asia Tbk	1,274	1,387
PT Bank Mayapada Tbk	77,049	--
PT Bank Mega Tbk	317	937
Lain-lain/ *Others* (masing-masing di bawah Rp100/ *each below Rp100*)	51	1,373
Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*		
Dolar Amerika Serikat/ *US Dollar*		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2,475	2,082
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13	889
PT Bank Mega Tbk	13	14
Pihak Berelasi/ *Related Party* (lihat Catatan 10/ *see Note 10*)		
PT Bank Nationalnobu Tbk		
Rupiah	358,032	166,625
Dolar Amerika Serikat/ *US Dollar*	2,708	2,662
Dolar Singapura/*SG Dollar*	9	9
Subjumlah Bank/ *Subtotal Cash in Banks*	503,479	200,757

	2020 Rp	2019 Rp
Deposito Berjangka/ *Time Deposits*		
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Rupiah		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	66,000	216,000
PT Bank Mega Tbk	50,000	30,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,868	40,868
PT Bank Mayapada Tbk	5,000	--
PT Bank KEB Hana Indonesia	--	35,000
Subjumlah Deposito Berjangka/ *Subtotal Time Deposits*	131,868	321,868
Jumlah/ *Total*	**635,427**	**522,698**

Tingkat suku bunga kontraktual dan jangka waktu yang berlaku untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Contractual interest rates and maturity period of the time deposits are as follows:

	2020	2019
Tingkat Bunga/ *Interest Rate*	3.00-6.00%	5.75-7.75%
Jangka Waktu/ *Maturity Period*	1 bulan/*month*	1 bulan/*month*

4. Piutang Usaha

4. Trade Accounts Receivable

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Party (*lihat Catatan 9*/ see Note 9)*		
Rumah Hunian dan Rumah Toko/ *Residential Houses and Shophouses*	5,502	5,502
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(5,502)	(5,502)
Subjumlah Pihak Berelasi - Neto/ *Subtotal Related Party - Net*	--	--
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Apartemen/ *Apartment*	--	215,672
Pengelolaan Kota/ *Town Management*	81,138	72,981
Pengelolaan Air/ *Water Treatment*	64,316	44,069
Lahan Siap Bangun/ *Land Lots*	13,580	13,452
Rumah Hunian dan Rumah Toko/ *Residential Houses and Shophouses*	1,593	1,962
Lain-lain/ *Others*	29,011	46,627
Subjumlah Pihak Ketiga/ *Subtotal Third Parties*	189,638	394,763
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(168,449)	(127,833)
Subjumlah Pihak Ketiga - Neto/ *Subtotal Third Parties - Net*	21,189	266,930
Jumlah Neto/ *Net*	**21,189**	**266,930**

Analisis piutang usaha berdasarkan jatuh temponya disajikan pada Catatan 39.

Analysis of trade accounts receivable by maturity is presented in Note 39.

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movements in allowances for expected credit loss of trade accounts receivable are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo Awal/ *Beginning Balance*	133,335	87,184
Pemulihan/ Recovery	(11,469)	--
Penambahan/ *Addition*	52,085	46,151
Saldo Akhir/ *Ending Balance*	**173,951**	**133,335**

Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dilakukan berdasarkan penelaahan saldo piutang masing-masing debitur pada akhir tahun.

Additional of allowance for impairment losses of trade accounts receivable is based on the review of the status of debtors at the end of the year.

Manajemen Grup berpendapat kerugian kredit ekspektasian tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian tidak tertagihnya piutang usaha.

Group's management believes that the allowance for expected credit loss is adequate to cover the possibility of uncollectible trade accounts receivable.

Piutang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

Trade accounts receivable denominated in Rupiah.

5. Aset Keuangan Lancar Lainnya

5. Other Current Financial Assets

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Tagihan atas Kerja Sama Operasi/ *Billing of Joint Operation*	--	46,665
Lain-lain/ *Others*	17,616	14,592
Subjumlah/ *Subtotal*	17,616	61,257
Dikurangi/ Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	(14,443)	(14,443)
Jumlah - Neto/ *Net*	**3,173**	**46,814**

Manajemen melakukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan lancar lainnya berdasarkan analisa atas ketertagihannya.

Management made allowances for impairment losses of other current financial assets based on its collectability analysis.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian tidak tertagihnya aset keuangan lancar lainnya.

The Group's management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover the possibility of uncollectible other current financial assets.

6. Persediaan / *6. Inventories*

	2020 Rp	2019 Rp
Infrastruktur, Rumah Hunian, Rumah Toko dan Apartemen/ *Infrastructure, Residential Houses, Shophouses and Apartments*	2,508,614	2,640,980
Tanah dalam Pematangan/ *Land Under Development*	3,211,168	2,432,014
Lain-lain/ *Others*	5,256	5,212
Subjumlah/ *Subtotal*	5,725,038	5,078,206
Dikurangi/ Less:		
Penyisihan Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	(40)	(40)
Jumlah - Neto/ *Net*	**5,724,998**	**5,078,166**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 persediaan tanah terdiri dari beberapa bidang tanah dengan luas kurang lebih 504 dan 442 hektar, seluruhnya terletak di kawasan Lippo Cikarang.

As of December 31, 2020 and 2019 land inventories consist of several land areas with the area aproximately 504 and 442 hectares, all located in Lippo Cikarang.

Tanah PT Waska Sentana, entitas anak, seluas 97.000 m² dijadikan jaminan atas pinjaman PT Lippo Karawaci Tbk, entitas induk utama, yang diperoleh dari PT Bank ICBC Indonesia.

Land of PT Waska Sentana, a subsidiary, for an area of 97,000 sqm used as a collateral for loan of PT Lippo Karawaci Tbk, ultimate parent entity, obtained from PT Bank ICBC Indonesia.

Tanah PT Waska Sentana, entitas anak, seluas 38.901 m² dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman Perusahaan yang diperoleh dari PT Bank ICBC Indonesia (lihat Catatan 20).

Land of PT Waska Sentana, a subsidiary, for an area of 38,901 sqm used as a collateral for loan of the Company obtained from PT Bank ICBC Indonesia (see Note 20).

Tanah PT Lippo Cikarang seluas 41.667 m² dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman Perusahaan yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (lihat Catatan 20).

Land of PT Lippo Cikarang for an area of 41,667 sqm used as a collateral for loan of the Company obtained from PT Bank Negara Indonesia Tbk (see Note 20).

Jumlah persediaan yang dibebankan ke beban pokok pendapatan adalah sebesar Rp876.446 dan Rp719.164 masing-masing untuk tahun-tahun yang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The amount of inventory charged to cost of revenue amounted to Rp876,446 and Rp719,164 for the years ended December 31, 2020 and 2019.

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat penghapusan persediaan sebesar Rp890.940 (lihat Catatan 34).

In 2020, the Company recorded write off inventories amounted to Rp890,940 (see Note 34).

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh manajemen pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi risiko penurunan nilai persediaan.

Based on review by management at the end of year, management believes that the allowance for impairment is adequate to cover the possible impairment of inventories.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

7. Beban Dibayar di Muka / *7. Prepaid Expenses*

	2020 Rp	2019 Rp
Infrastruktur Kota/ *Town Infrastructure*	32,245	27,381
Iklan dan Pemasaran/ *Advertising and Marketing*	139	3,533
Lain-lain/ *Others*	5,633	10,801
Jumlah/ *Total*	**38,017**	**41,715**

8. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya / *8. Other Non-Current Financial Assets*

	2020 Rp	2019 Rp
Dana yang Dibatasi Penggunaannya/*Restricted Funds*	236,349	99,943
Jaminan/ *Deposits*	7,819	3,608
Piutang Kepada Pemegang Saham Nonpengendali pada Entitas Anak/ *Receivables to Non-controling Interest of a Subsidiary*	8,250	8,250
Deposito Berjangka Dijaminkan/ *Pledged Time Deposits*	--	7,795
Investasi Lainnya/*Other Investments*	152,273	219,029
Jumlah/ *Total*	**404,691**	**338,625**

Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan penempatan deposito berjangka sehubungan dengan persyaratan di dalam perjanjian kerjasama kredit kepemilikan rumah dan apartemen (KPR dan KPA) yang dilakukan oleh Grup dengan beberapa bank. Rincian dana yang dibatasi penggunaannya pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Restricted Funds

Restricted fund represents time deposits placements as required in mortgages agreement for houses and apartments (KPR and KPA) entered by the Group with several banks. Details of restricted fund as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Deposito Berjangka/ *Time Deposits*		
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25,838	28,149
PT Bank Permata Tbk	24,961	17,711
PT Bank CIMB Niaga Tbk	14,129	6,965
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8,778	8,978
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6,180	6,141
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3,048	3,362
PT Bank Central Asia Tbk	2,138	2,613
PT Bank Danamon Tbk	1,425	1,804
PT Bank OCBC NISP Tbk	1,148	1,594
PT Bank Mega Tbk	801	803
Pihak Berelasi/ *Related Party*		
Rupiah		
PT Bank Nationalnobu Tbk	147,903	21,823
Jumlah/ *Total*	**236,349**	**99,943**

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Tingkat suku bunga kontraktual dan jangka waktu yang berlaku untuk rekening deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Contractual interest rates and maturity period of the time deposits are as follows:

	2020	2019
Tingkat Bunga/*Interest Rate*	3.00%-5.00%	4.25%-6.5%
Jangka Waktu/*Maturity Period*	1 bulan/ *month*	1 bulan/ month

Investasi Lainnya / ***Other Investments***

	Domilisi/ *Domicilie*	2020 Rp	2019 Rp
Saham KIJA dalam Penyelesaian, termasuk Akumulasi Keuntungan yang belum Direalisasi (lihat Catatan 5)/ *Shares of KIJA in Settlement, included Accumulated Unrealized Gain (see Note 11)*	Bekasi	225,095	225,095
Dikurangi : Cadangan Penurunan Nilai/ *Less:Allowance for Impairment*		(73,749)	(6,993)
Jumlah Neto/ *Net*		151,346	218,102
PT East Jakarta Industrial Park	Jakarta	767	767
PT Spinindo Mitradaya	Jakarta	160	160
Jumlah/ *Total*		**152,273**	**219,029**

Investasi PT East Jakarta Industrial Park dan PT Spinindo Mitradaya merupakan investasi saham dengan kepemilikan saham di bawah 20% dan tidak memiliki kuotasi harga pasar saham.

Investment of PT East Jakarta Industrial Park and PT Spinindo Mitradaya represents investment in shares below 20% of ownership and do not have quoted stock market prices.

Saham KIJA dalam penyelesaian merupakan investasi yang intensinya untuk penyelesaian utang kepada pemegang saham nonpengendali pada entitas anak.

Shares of KIJA in settlement represent investment intended for settlement of payables to non-controling interest of a subsidiary.

Manajemen Grup berpendapat cadangan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai wajar investasi.

Group's management believes that the allowance for impairment is adequate to cover the possibility decrase of fair value of investment.

9. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi / *9. Transactions and Balances with Related Parties*

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of the account balances with related parties are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset/ *Percentage to Total Assets/* 2020 %	2019 %
PT Bank Nationalnobu Tbk				
Rekening Giro/ *Current Accounts*	360,749	169,296	3.71	1.39
Dana yang Dibatasi Penggunaannya/ *Restricted Funds*	147,903	21,823	1.52	0.18
Jumlah/ *Total*	**508,653**	**191,119**	**5.23**	**1.57**

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset/ Jumlah Liabilitas/ Jumlah Penjualan/ Jumlah Beban Terkait/ *Percentage to Total Assets/ Total Liabilities/ Total Revenue/ Total Related Expense* 2020 %	2019 %
Piutang Usaha/ *Trade Account Receivable*				
PT Bumi Lemahabang Permai	5,502	5,502	0.06	0.05
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(5,502)	(5,502)	(0.06)	(0.05)
Jumlah Neto/ *Net*	--	--	--	--
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha/ *Due from Related Parties Non-Trade*				
PT Bumi Lemahabang Permai	9,991	9,991	0.10	0.08
PT Mahkota Sentosa Utama	5,774	5,774	0.06	0.05
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)/ *Others (each below Rp1,000)*	2,750	4,148	0.03	0.03
Jumlah/ *Total*	18,515	19,913	0.19	0.16
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(11,080)	(11,005)	(0.11)	(0.09)
Jumlah Neto/ *Net*	**7,435**	**8,908**	**0.08**	**0.07**
Investasi pada Entitas Asosiasi/ *Investment in Associates* (catatan 10.a / *note 10.a*)				
PT Hyundai Inti Development	11,292	11,498	0.12	0.09
PT Nusa Medika Perkasa	5,198	5,193	0.05	0.04
PT Mahkota Sentosa Utama	0	1,673,360	0.00	13.69
Jumlah/ *Total*	**16,490**	**1,690,051**	**0.17**	**13.82**
Investasi pada Dana Investasi Infrastruktur/ *Investment in Infrastructure Investment Funds* (Catatan 10.b / *note 10.b*)				
Dana Investasi Infrastruktur Township Development USD/ *Infrastructure Investment Fund Township Development USD*	1,859,657	3,060,485	19.13	25
Dana Investasi Infrastruktur Township Development IDR/ *Infrastructure Investment Fund Township Development IDR*	131,421	178,902	1.35	1.46
Jumlah/ *Total*	**1,991,078**	**3,239,387**	**20.49**	**27**
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha/ *Due to Related Parties Non-Trade*				
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000/ *Others (each below Rp1,000)*	**1,966**	**1,517**	**0.02**	**0.01**
Liabilitas Imbalan Pascakerja/ *Post-employment Benefits Liabilities*				
Direksi, Dewan Komisaris dan Manajemen Kunci/ *Directors, Commissioners and Key Management*	**1,475**	**1,648**	**0.05**	**0.12**
Penjualan Lahan Komersial/ *Sales of Commercial Lands*				
PT Mahkota Sentosa Utama	--	**65,610**	--	**3.87**
Pembelian Lahan Komersial/ *Purchase of Commercial Lands*				
PT Mahkota Sentosa Utama	**702,482**	--	**38.09**	--
Beban Imbalan Kerja Jangka Pendek/ *Short-Term Post-Employment Benefits Expenses*				
Direksi, Dewan Komisaris dan Manajemen Kunci Lainnya/ *Directors, Commissioners and Other Key Management*	**4,475**	**12,217**	**1.49**	**5.79**

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Nature of transactions with related parties are as follows:

Pihak Berelasi/ *Related Parties*	**Sifat Hubungan/ *Relationship with the Company***	**Transaksi/ *Transactions***
PT Bumi Lemahabang Permai	Entitas Sepengendali/ *Entity Under Common Control*	Piutang usaha dan piutang non usaha yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jatuh tempo/ *Trade accounts receivable and non bearing non-trade receivable without maturity date*
PT Mahkota Sentosa Utama	Entitas Asosiasi/ *Associate*	Investasi penyertaan saham, piutang non usaha yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jatuh tempo dan penjualan lahan siap bangun/ *Investment in shares, non bearing non-trade receivable without maturity date, customer deposit and sales of land lot*
PT Nusa Medika Perkasa	Entitas Asosiasi/ *Associate*	Investasi penyertaan saham/ *Investment in shares*
PT Hyundai Inti Development	Entitas Asosiasi/ *Associate*	Investasi penyertaan saham/ *Investment in shares*
PT Bank Nationalnobu Tbk	Entitas Sepengendali/ *Entity Under Common Control*	Penempatan pada rekening giro dan dana yang dibatasi penggunaannya/ *Placement in current account and restricted funds*
Dana Investasi Infrastruktur Bowsprit Township Development USD/ *Infrastructure Invesment Fund Bowsprit of Township Development USD*	Afiliasi/ *Affiliate*	Investasi pada dana investasi infrastruktur/ *Investment in infrastructure investment funds*
Dana Investasi Infrastruktur Bowsprit Township Development/ *Infrastructure Invesment Fund Bowsprit of Township Development*	Afiliasi/ *Affiliate*	Investasi pada dana investasi infrastruktur/ *Investment in infrastructure investment funds*
Direksi, Dewan Komisaris dan Manajemen Kunci Lainnya/ *Directors, Commisioners and Other Key Management*	Manajemen Kunci/*Key Management*	Imbalan kerja dan pinjaman yang tidak dikenakan bunga/ *Employee benefits and Non-interest bearing loan without maturity date*

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

10. Investasi / *10. Investments*

a. Investasi pada Entitas Asosiasi / *a. Investment in Associates*

	2020					
	Domisili/ *Domicile*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Biaya Perolehan/ *Acquisition Cost*	Akumulasi Bagian Laba (Rugi) Neto/ *Accumulated Share in Profit (Loss) - Net*	Akumulasi Penerimaan Dividen *Accumulated Dividend Received*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*
		%	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Mahkota Sentosa Utama	Bekasi	49.72	2,239,956	(2,239,956)	--	0
PT Hyundai Inti Development	Bekasi	45.00	6,155	121,372	(116,235)	11,292
PT Nusa Medika Perkasa	Jakarta	21.91	2,500	2,698	--	5,198
Jumlah/ *Total*			**2,248,611**	**(2,115,886)**	**(116,235)**	**16,490**

	2019					
	Domisili/ *Domicile*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Biaya Perolehan/ *Acquisition Cost*	Akumulasi Bagian Laba (Rugi) Neto/ *Accumulated Share in Profit (Loss) - Net*	Akumulasi Penerimaan Dividen *Accumulated Dividend Received*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*
		%	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Mahkota Sentosa Utama	Bekasi	49.72	2,239,956	(566,596)	--	1,673,360
PT Hyundai Inti Development	Bekasi	45.00	6,155	116,628	(111,285)	11,498
PT Nusa Medika Perkasa	Jakarta	21.91	2,500	2,693	--	5,193
Jumlah/ *Total*			**2,248,611**	**(447,275)**	**(111,285)**	**1,690,051**

Berikut disajikan ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The following is a summary of financial information of the associates as of December 31, 2020 and 2019:

	2020 Rp	2019 Rp
Jumlah Agregat Aset Lancar/ *Total Agregate of Current Assets*	5,126,685	11,207,344
Jumlah Agregat Aset Tidak Lancar/ *Total Agregate of Non Current Assets*	1,704,061	907,215
Jumlah Agregat Liabilitas Jangka Pendek/ *Total Agregate of Current Liabilities*	918,213	1,693,562
Jumlah Agregat Liabilitas Jangka Panjang/ *Total Agregate of Non Current Liabilities*	8,187,220	9,040,510
Jumlah Agregat Pendapatan Tahun Berjalan/ *Total Agregate of Net Revenue for the Year*	990,755	57,754
Jumlah Agregat Rugi untuk Tahun Berjalan/ *Total Agregate of Loss for the Year*	(3,645,568)	(149,808)
Jumlah Agregat Rugi Komprehensif Lain untuk Tahun Berjalan/ *Total Agregate of Other Comprehensive Loss for the Year*	(281)	--
Jumlah Agregat Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan/ *Total Agregate of Comprehensive Loss for the Year*	(3,529,532)	(149,808)

Pada 31 Desember 2020, tidak tersedia informasi nilai wajar berdasarkan kuotasi harga publikasian atas investasi pada entitas asosiasi di atas.

As of December 31, 2020, there was no fair value information available based on quoted market prices of the above investments in associates.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

b. Investasi pada Dana Investasi Infrastruktur

b. Investment in Infrastructure Investment Funds

	2020 Rp	2019 Rp
Dana Investasi Infrastruktur Township Development USD/ *Investment in Infrastucture Fund Township Development USD*	1,859,657	3,060,485
Dana Investasi Infrastruktur Township Development IDR/ *Investment in Infrastucture Fund Township Development IDR*	131,421	178,902
Jumlah/ *Total*	**1,991,078**	**3,239,387**

Perusahaan menempatkan investasi pada Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) Bowsprit Township Development USD sebanyak 218.741.116 unit pada 31 Desember 2020 dan 2019.

The Company placed investment in Investment Infrastructure Fund (DINFRA) Bowsprit Township Development USD of 218,741,116 units as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Perusahaan menempatkan investasi pada DINFRA Bowsprit Township Development sebanyak 177.170.631 unit pada 31 Desember 2019. Pada 2020, Perusahaan menjual kepemilikan unit DIINFRA Bowsprit Township Development sebanyak 31.135.446 unit sebesar Rp31.600 dan mencatat rugi atas penjualan investasi sebesar Rp494 pada beban lain – lain di laba rugi. Pada 31 Desember 2020, jumlah unit DIINFRA Bowsprit Township Development yang dimiliki Perusahaan sebanyak 146.035.185 unit.

The Company placed investment in DINFRA Bowsprit Township Development of 177,170,631 units as of December 31, 2019. In 2020, the Company's sold ownership of the unit DINFRA Bowsprit Township Development units were 31,135,446 units amounting to Rp31,600 and recorded loss on sale of investement amounting to Rp494 as other expenses on profit or loss. As of December 31, 2020, the Company's DIINFRA Bowsprit Township Development units were 146,035,185 units.

Pada 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan pengukuran atas nilai wajar DINFRA Bowsprit Township Development USD dan DINFRA Bowsprit Township Development dengan nilai wajar masing-masing sebesar Rp1.859.657 dan Rp131.421. Selisih atas investasi sebelum dan setelah diukur nilai wajarnya sebesar Rp1.216.215 dicatat pada laba rugi (lihat Catatan 34).

As of December 31, 2020, the Company measured the fair value of DINFRA Bowsprit Township Development USD and DINFRA Bowsprit Township Development with fair value amounted to Rp1,859,657 and Rp131,421, respectively. The difference of investment before and after remeasured at its fair value amounted to Rp1,216,215 recorded at profit or loss (see Note 34).

Nilai wajar investasi DINFRA diukur berdasarkan laporan penilaian independen oleh PT Ernst & Young Indonesia dalam laporannya tanggal 9 Maret 2021. Pendekatan yang digunakan oleh penilai adalah pendekatan pendapatan dengan aplikasi metode arus kas terdiskonto.

The investment fair value of DINFRA measured based on the independent valuation report of PT Ernst & Young Indonesia in it's report dated March 9, 2021. The approach used by the valuer is an income approach with the application of the discounted cash flows method.

11. Investasi dalam Saham

11. Investment in Stock

	2020 Rp	2019 Rp
Biaya Perolehan/ *At Cost*		
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)	342,772	342,772
Akumulasi Keuntungan yang Belum Direalisasi/ *Accumulated Unrealised Gain*	50,987	112,462
Jumlah/ *Total*	393,759	455,234

	2020 Rp	2019 Rp
Reklasifikasi ke Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya (lihat Catatan 8)/ *Reclassified to Other Non-Current Financial Assets (see Note 8)* (2020 dan/ *and* 2019: 735,606,003 Saham/ *Shares*)	(225,095)	(225,095)
Jumlah Neto/ *Net* (2020 dan/ *and* 2019: 788,149,632 saham/ *shares*)	**168,664**	**230,139**

Investasi pada saham KIJA merupakan Investasi saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diiukur melalui penghasilan komprehensif lain yang pada 1 Januari 2020 direklasifikasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual sebagai dampak dari penerapan PSAK 71: Instrumen keuangan. Harga publikasian saham KIJA pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp214 dan Rp292 (dalam Rupiah penuh).

Investment in KIJA shares is an Investment in Shares which are listed on the Indonesia Stock Exchange measure through other comprehensive income. On January 1, 2020, this investment represents reclassification of available-for-sale financial assets as a result of implementation of PSAK 71: Financial Instruments. The published prices for KIJA's shares as of December 31, 2020 and 2019 are Rp214 and Rp292 (in full Rupiah), respectively.

12. Properti Investasi / *12. Investment Properties*

	2020				
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya Perolehan					***Acquisition Cost***
Hak atas Tanah	27,929	–	–	27,929	*Landrights*
Bangunan dan Prasarana	198,101	1,178	–	199,279	*Building and Facilities*
	226,030	1,178	–	227,208	
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Bangunan dan Prasarana	51,433	8,634	–	60,067	*Building and Facilities*
Nilai Tercatat	**174,597**			**167,141**	***Carrying Value***

	2019				
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya Perolehan					***Acquisition Cost***
Hak atas Tanah	27,929	–	–	27,929	*Landrights*
Bangunan dan Prasarana	191,102	6,999	–	198,101	*Building and Facilities*
	219,031	6,999	–	226,030	
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Bangunan dan Prasarana	43,655	7,778	–	51,433	*Building and Facilities*
Nilai Tercatat	**175,376**			**174,597**	***Carrying Value***

Pendapatan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Rental revenue earned and direct operating expenses from investment property in the consolidated profit or loss are as follows:

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Pendapatan Sewa	55,551	24,087	*Rental Income*
Beban Operasi Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang Menghasilkan Penghasilan Sewa	8,634	7,778	*Direct Operating Cost Arises from the Rental Generated Investment Properties*

Beban penyusutan properti investasi untuk tahun–tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp8.634 dan Rp7.778 dicatat sebagai bagian dari beban pokok pendapatan pada laba rugi.

Depreciation of investment properties for the year ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp8,634 and Rp7,778, respectively, was recorded as part of cost of revenues in the profit or loss.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp86.515.

The fair value of investment properties as of, December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp86,515, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup tidak melakukan pengukuran nilai wajar atas properti investasi. Nilai wajar yang disajikan dalam pengungkapan ini menggunakan nilai yang tertera atas obyek pajak yang terdapat pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

As of December 31, 2020 and 2019, the Group did not make fair value measurements of the investment properties. The fair value presented in this disclosure uses the value that stated on the tax object in the Land and Building Tax (PBB).

Pada tanggal 31 Desember 2020 and 2019 bangunan telah diasuransikan kepada PT Lippo General Insurance Tbk, pihak berelasi, terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan seluruhnya masing-masing sebesar Rp151.059. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As of December 31, 2020 and 2019, building has been insured to PT Lippo General Insurance Tbk, a related party, against fire and other risks with a sum insured of Rp151,059, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on assets insured.

Berdasarkan evaluasi mengenai nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi.

Based on the evaluation of the value of investment properties as of December 31, 2020, Group's management believes that there are no changes in circumstances indicate an impairment of investment properties.

13. Aset Tetap / *13. Property and Equipment*

	2020					
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Hak atas Tanah	12,368	--	--	--	12,368	*Landrights*
Bangunan	57,000	1,378	--	--	58,378	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	63,949	7,109	--	--	71,058	*Machineries and Equipments*
Perabot dan Perlengkapan Kantor	95,450	5,307	--	--	100,757	*Furniture and Office Equipment*
Kendaraan	9,126	--	--	--	9,126	*Vehicles*
	237,893	13,794	--	--	251,687	

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2020					
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	22,123	3,199	--	--	25,322	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	27,838	20,604	--	--	48,442	*Machineries and Equipments*
Perabot dan Perlengkapan Kantor	85,918	6,321	--	--	92,239	*Furniture and Office Equipment*
Kendaraan	7,557	645	--	--	8,202	*Vehicles*
	143,436	30,769	--	--	174,205	
Nilai Tercatat	**94,457**				**77,482**	***Carrying Value***

	2019					
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Hak atas Tanah	12,368	--	--	--	12,368	*Landrights*
Bangunan	56,216	784	--	--	57,000	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	42,064	8,744	--	13,141	63,949	*Machineries and Equipments*
Perabot dan Perlengkapan Kantor	86,286	9,164	--	--	95,450	*Furniture and Office Equipment*
Kendaraan	8,972	154	--	--	9,126	*Vehicles*
	205,906	18,846	--	13,141	237,893	
Aset Dalam Penyelesaian						***Construction In Progress***
Mesin dan Peralatan	13,043	99	--	(13,141)	--	*Machineries and Equipments*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	19,144	2,979	--	--	22,123	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	24,372	3,466	--	--	27,838	*Machineries and Equipments*
Perabot dan Perlengkapan Kantor	74,632	11,286	--	--	85,918	*Furniture and Office Equipment*
Kendaraan	6,685	872	--	--	7,557	*Vehicles*
	124,833	18,603	--	--	143,436	
Nilai Tercatat	**94,116**				**94,457**	***Carrying Value***

Penambahan aset tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, termasuk transaksi non-kas dari realisasi uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp4.518 dan Rp7.367 (lihat Catatan 40).

The addition of the Group's property and equipment, as of December 31, 2020 and 2019, including non-cash transactions from realization of property and equipment advances amounted to Rp4,518 dan Rp7,367 (see Note 40).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset tetap Perusahaan telah diasuransikan kepada PT Lippo General Insurance Tbk, pihak berelasi, terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan seluruhnya masing-masing sebesar Rp177.456 dan Rp184.247.

As of December 31, 2020 and 2019, property and equipment is insured to PT Lippo General Insurance Tbk, a related party, against fire, burglary, and other risks with a sum insured of Rp177,456 and Rp184,247 respectively.

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan pada laporan laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

Depreciation charges that were allocated in the consolidated statement of profit or loss are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Beban Penjualan (lihat Catatan 32)	15,225	4,665	*Selling Expense (see Note 32)*
Beban Umum dan Administrasi (lihat Catatan 32)	15,544	13,938	*General and Administrative Expenses (see Note 32)*
Jumlah	**30,769**	**18,603**	***Total***

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Bekasi, Jawa Barat dengan Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2024 sampai dengan 2030. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Group own some parcels of land located in Bekasi, West Java with 30 (thirty) years leasehold that will due between 2024 to 2030. Management believes that there will be no difficulty in renewing the land title since the land were legally acquired and supported by sufficient evidences of ownership.

Tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada aset tetap.

There is no borrowing cost capitalized into property and equipment.

Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan adanya penurunan nilai atas nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020.

The Group's management believes that there is no indication of a change in circumstances that would result in an impairment of the carrying value of property and equipment as of December 31, 2020.

14. Aset Non-Keuangan Tidak Lancar Lainnya / *14. Other Non – Current Non-Financial Assets*

	2020 Rp	2019 Rp
Uang Muka Konstruksi/ *Advance for Construction*	16,976	56,199
Uang Muka Pembelian Aset Tetap/ *Advance for Purchase of Property and Equipment*	889	5,407
Uang Muka Pembelian Tanah/ *Advance for Acquisition of Land*	--	28,195
Lain-lain/ *Others*	3,547	10,048
Jumlah/ *Total*	**21,412**	**99,849**

Pada tahun 2020, uang muka tanah sebesar Rp28.195 telah dilakukan perikatan jual beli.

On 2020, advance for land amounted to Rp28,195 have been entered to sales and purchase agreements.

Uang muka konstruksi merupakan uang muka yang dibayarkan kepada kontraktor untuk pembangunan proyek apartemen Orange County.

Advance for construction represents advance paid to contractors for projects construction of Orange County apartment.
.

15. Tanah untuk Pengembangan / *15. Land for Development*

	2020 dan/ *and 2019*	
	Luas/ *Width* m²/*sqm*	Nilai/ *Value* Rp
Perusahaan/ *the Company*	528,243	225,997
Entitas Anak/ *Subsidiary:*		
PT Erabaru Realindo	596,821	18,935
Jumlah/ *Total*	**1,125,064**	**244,932**

Status kepemilikan tanah untuk pengembangan pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Ownership status of land for development are as of December 31, 2020 and 2019 follows:

	2020 dan/ *and 2019*
Sertifikat Hak Guna Bangunan (m²)/ *Buildingright Certificate (sqm)*	723,338
Pelepasan Hak (m²)/ *Discharge of Right (sqm)*	401,726
Jumlah (m²)/ *Total (Sqm)*	**1,125,064**

Tanah untuk pengembangan milik Grup, berlokasi di Desa Cibatu, Sukaresmi, Cicau, Sinarjati, Sukamukti, Jayamukti dan Pasirsari, yang seluruhnya berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Land for development of the Group are located at Cibatu, Sukaresmi, Cicau, Sinarjati, Sukamukti, Jayamukti and Pasirsari villages, which are all in Bekasi Regency, West Java.

16. Utang Usaha – Pihak Ketiga / *16. Trade Accounts Payable – Third Parties*

	2020 Rp	**2019 Rp**
Pemasok/ *Suppliers*	48,659	77,257
Kontraktor/ *Contractors*	35,808	36,973
Jumlah/ *Total*	**84,467**	**114,230**

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas perolehan utang ini.

There is no collateral given by the Group on these payables.

Seluruh utang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

All trade accounts payable denominated in Rupiah.

17. Beban Akrual / *17. Accrued Expenses*

	2020 Rp	**2019 Rp**
Taksiran Biaya untuk Pembangunan *Estimated Cost for Construction*	38,551	83,407
Kontraktor dan Pemasok *Contractors and Suppliers*	52,501	47,531
Perbaikan dan Pemeliharaan *Repair and Maintenance*	52,412	24,664
Lain-lain/ *Others*	790	5,066
Jumlah/ *Total*	**144,255**	**160,668**

Taksiran biaya untuk pembangunan merupakan taksiran biaya untuk menyelesaikan pengembangan tanah dan pembangunan rumah hunian dan apartemen yang sudah terjual.

Estimated cost for construction represents estimated cost to complete the development of land and the construction of residential houses and apartments which have been sold.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

Beban akrual lain-lain terutama merupakan beban akrual atas pemeliharaan dan perbaikan.

Accrued expense others mainly represents accrual expenses for repair and maintenance.

18. Perpajakan / *18. Taxation*

a. Beban Pajak / *a. Tax Expenses*

Beban Pajak Final / *Final Tax Expenses*

Jumlah beban pajak final untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp41.816 dan Rp36.375, dengan rincian sebagai berikut:

Final tax expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp41,816 and Rp36,375, respectively, with details as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Perusahaan			*The Company*
Pendapatan Sewa - 10%	3,410	1,333	*Rental Income - 10%*
Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan - 2,5% dan 5%	25,972	14,450	*Transfer of Land and Building Right 2.5% and 5%*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Pendapatan Sewa - 10%	2,145	1,076	*Rental Income - 10%*
Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan - 2,5% dan 5%	10,289	19,516	*Transfer of Land and Building Right 2.5% and 5%*
Jumlah	**41,816**	**36,375**	***Total***

Beban Pajak Kini dan Tangguhan / *Current Tax and Deferred Tax*

	2020		
	Perusahaan/ *the Company* Rp	Entitas Anak/ *Subsidiaries* Rp	Konsolidasi/ *Consolidated* Rp
Beban Pajak Kini/ *Current Tax Expenses*	1,953	42,386	44,339
Manfaat Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax Benefits*			
Tahun berjalan/ *For the Year*	--	(9,483)	(9,483)
Penyesuaian Tarif Pajak/ *Tax Rate Adjustment*	--	7,124	7,124
Jumlah Beban Pajak Penghasilan/ *Total Income Tax Expenses*	**1,953**	**40,027**	**41,980**

	2019		
	Perusahaan/ *the Company* Rp	Entitas Anak/ *Subsidiaries* Rp	Konsolidasi/ *Consolidated* Rp
Beban Pajak Kini/ *Current Tax Expenses*	24,652	30,429	55,081
Koreksi Pajak Periode Lalu/ *Previous Period Tax Correction*	--	(5,512)	(5,512)
Manfaat Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax Benefits*	--	(11,308)	(11,308)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan/ *Total Income Tax Expenses*	**24,652**	**13,609**	**38,261**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax as presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the Company's estimated fiscal income is as follows:

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	(3,604,406)	422,293	*Profit (Loss) before Tax as Presented in the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Dikurangi: Laba Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	1,605,923	(180,192)	*Less: Income of Subsidiaries and Associates*
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Perusahaan	(1,998,483)	242,101	*Income (Loss) Before Company's Income Tax*
Perbedaan Tetap			***Permanent Differences***
Pendapatan yang telah Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	(1,408,493)	(622,783)	*Revenue Subjected to Final Tax*
Beban Terkait Pendapatan yang telah Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	3,452,192	500,403	*Expenses Related to Final Tax*
Penghasilan Bunga yang Telah Dikenakan Pajak Final	(39,113)	(25,910)	*Interest Income Subjected to Final Tax*
Beban Pajak	--	2,525	*Tax Expenses*
Sumbangan dan Jamuan	2,772	2,272	*Donation and Representation*
Sub Jumlah	2,007,358	(143,492)	*Subtotal*
Taksiran Laba Kena Pajak Tahun Berjalan - Perusahaan	**8,875**	**98,609**	***Estimated Taxable Income for the Year - the Company***
Taksiran Pajak Kini Tahun Berjalan - Perusahaan	**1,953**	**24,652**	***Estimated Current Tax for the Year- the Company***
Dikurangi :			*Deduct:*
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka:			*Prepaid Income Tax:*
Pasal 23	(281)	(16,511)	*Article 23*
Pasal 25	(1,021)	(1,102)	*Article 25*
Taksiran Utang Pajak Kini - Perusahaan Tahun Berjalan	**651**	**7,039**	***Estimated Current Tax Payable - the Company for the Year***

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan pajak penghasilan badan.

Taxable income resulted from the reconciliation for the year ended December 31, 2020 used as basis for filling the SPT annual tax return.

Perhitungan taksiran pajak kini dan utang pajak entitas anak adalah sebagai berikut:

Calculation of estimated current tax and tax payable of subsidiaries is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Taksiran Laba Kena Pajak Entitas Anak	192,664	121,715	*Estimated Current Tax - Subsidiaries*
Beban Pajak Kini	42,386	30,429	*Current Tax*
Utang Pajak Periode Lalu	--	8,459	*Tax Payable Previous Period*
Kredit Pajak	(17,122)	(15,373)	*Tax Credit*
Utang Pajak Penghasilan Pasal 29 Entitas Anak	**25,264**	**23,515**	***Income Tax Payable Article 29 Subsidiaries***

Rekonsiliasi antara beban pajak Perusahaan dengan hasil perkalian laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Company's tax expense and the multiplication of the consolidated profit before income tax with the prevailing tax rate is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	(3,604,406)	422,293	*Profit (Loss) before Tax as Presented in the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Dikurangi: Laba Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	1,605,923	(180,192)	*Less: Income of Subsidiaries and Associates*
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Perusahaan	(1,998,483)	242,101	*Income (Loss) Before Company's Income Tax*

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Pajak Penghasilan Dihitung dengan Tarif Berlaku	439,666	(60,525)	*Income Tax Compute Using the Prevailing Rate*
Pendapatan yang telah Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	309,868	155,696	*Revenue Subjected to Final Tax*
Beban Terkait Pendapatan yang telah Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	(759,482)	(125,101)	*Expenses Related to Revenue Subjected to Final Tax*
Penghasilan Bunga yang Telah Dikenakan Pajak Final	8,605	6,477	*Interest Income Subjected to Final Tax*
Beban Pajak	--	(631)	*Tax Expenses*
Sumbangan dan Jamuan	(610)	(568)	*Donation and Representation*
Jumlah Beban Pajak Perusahaan	**(1,953)**	**(24,652)**	*Total Corporate Taxes of the Company*
Beban Pajak Entitas Anak			*Tax Expense of the Subsidiaries*
Pajak Kini	(42,386)	(30,429)	*Current Tax*
Koreksi Pajak Periode Lalu	--	5,512	*Previous Period Tax Correction*
Pajak Tangguhan	2,359	11,308	*Deferred Tax*
Jumlah Beban Pajak Entitas Anak	(40,027)	(13,609)	*Total Tax Expense of the Subsidiaries*
Jumlah Beban Pajak Konsolidasian	**(41,980)**	**(38,261)**	***Total Consolidated Tax Expenses***

b. Aset Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

b. Deferred Tax Asset

Details of the Group's deferred tax assets are as follows:

	1 Januari/ *January 1,* 2020 Rp	Penyesuaian tarif pajak/ *Tax rate Adjustment* Rp	Dikreditkan pada Laba Rugi Laba Rugi Konsolidasian/ *Credited to the Consolidated Profit or Loss* Rp	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income* Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp
Entitas Anak/ *Subsidiaries*					
Liabilitas Imbalan Pascakerja/ *Post-employment Benefits Liabilities*	5,244	(1,599)	438	309	4,392
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	25,107	(5,525)	9,045	--	28,627
Jumlah Aset Pajak Tangguhan Konsolidasian/ *Total Consolidated Deferred Tax Assets*	**30,351**	**(7,124)**	**9,483**	**309**	**33,019**

	1 Januari/ *January 1,* 2019 Rp	Dikreditkan pada Laba Rugi Laba Rugi Konsolidasian/ *Credited to the Consolidated Profit or Loss* Rp	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income* Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Entitas Anak/ *Subsidiaries*				
Liabilitas Imbalan Pascakerja/ *Post-employment Benefits Liabilities*	4,227	542	475	5,244
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	14,341	10,766	--	25,107
Jumlah Aset Pajak Tangguhan Konsolidasian/ *Total Consolidated Deferred Tax Assets*	**18,568**	**11,308**	**475**	**30,351**

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui laba kena pajak di masa mendatang.

Management believes that the deferred tax assets can be recovered through future taxable profits in the future.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

c. Pajak Dibayar di Muka / *c. Prepaid Taxes*

	2020		
	Perusahaan/ *the Company* Rp	Entitas Anak/ *Subsidiaries* Rp	Konsolidasi/ *Consolidated* Rp
Pajak Penghasilan/ *Income Tax*			
Pasal/ *Article* 4 (2)	49,493	9,581	59,074
Pasal/ *Article* 23	--	137	137
Pasal/ *Article* 28.a	--	50	50
Pajak Pertambahan Nilai/ *Value Added Tax*	85,124	20,037	105,161
Jumlah/ *Total*	**134,617**	**29,805**	**164,422**

	2019		
	Perusahaan/ *the Company* Rp	Entitas Anak/ *Subsidiaries* Rp	Konsolidasi/ *Consolidated* Rp
Pajak Penghasilan/ *Income Tax*			
Pasal/ *Article* 4 (2)	27,044	1,351	28,395
Pasal/ *Article* 23	--	99	99
Pasal/ *Article* 28.a	--	139	139
Pajak Pertambahan Nilai/ *Value Added Tax*	59,956	23,020	82,976
Jumlah/ *Total*	**87,000**	**24,609**	**111,609**

d. Utang Pajak / *d. Taxes Payable*

	2020		
	Perusahaan/ *the Company* Rp	Entitas Anak/ *Subsidiaries* Rp	Konsolidasi/ *Consolidated* Rp
Pajak Penghasilan/ *Income Tax*			
Pasal/ *Article* 4 (2)	1,689	355	2,044
Pasal/ *Article* 15	--	135	135
Pasal/ *Article* 21	2,301	461	2,762
Pasal/ *Article* 23	81	50	131
Pasal/ *Article* 25	--	474	474
Pasal/ *Article* 29	651	25,264	25,915
Pajak Pertambahan Nilai/ *Value Added Tax*	--	5,472	5,472
Jumlah/ *Total*	**4,722**	**32,211**	**36,933**

	2019		
	Perusahaan/ *the Company* Rp	Entitas Anak/ *Subsidiaries* Rp	Konsolidasi/ *Consolidated* Rp
Pajak Penghasilan/ *Income Tax*			
Pasal/ *Article* 4 (2)	1,021	4,973	5,994
Pasal/ *Article* 15	70	--	70
Pasal/ *Article* 21	793	401	1,194
Pasal/ *Article* 22	151	--	151
Pasal/ *Article* 23	3	69	72

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2019		
	Perusahaan/ *the Company* Rp	**Entitas Anak/ *Subsidiaries* Rp**	**Konsolidasi/ *Consolidated* Rp**
Pajak Penghasilan/ *Income Tax*			
Pasal/ *Article* 25	96	1,184	1,280
Pasal/ *Article* 26	--	1	1
Pasal/ *Article* 29	7,039	23,654	30,693
Pajak Pertambahan Nilai/ *Value Added Tax*	--	5,822	5,822
Pajak Hiburan/ *Entertainment Tax*	--	8	8
Jumlah/ *Total*	**9,173**	**36,112**	**45,285**

e. Administrasi

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu.

Berdasarkan PERPU No 1 tahun 2020, terdapat perubahan tarif pajak penghasilan badan menjadi sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta sebesar 20% untuk tahun pajak berikutnya.

e. Administration

Fiscal laws in Indonesia require that each company calculate, determine and pay the amount of tax payable individually.

Based on PERPU No. 1 tahun 2020, there change in the corporate income tax rate to 22% for fiscal years 2020 and 2021 and by 20% for the next fiscal year.

19. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya – Pihak Ketiga

19. Other Current Financial Liabilities – Third Parties

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Utang Kepada Pemegang Saham Nonpengendali pada Entitas Anak/ *Payables to Non-controling Interest of a Subsidiary*	153,605	153,605
Utang Lain-lain/ *Other Payables*	23,458	22,268
Jumlah/ *Total*	**177,063**	**175,873**

20. Utang Bank

20. Bank Loans

a. Utang Bank Jangka Pendek

a. Short – Term Bank Loan

PT Bank ICBC Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diperbaharui beberapa kali dan terakhir pada tanggal 23 Oktober 2020 melalui perpanjangan perjanjian kredit Nomor: 144/ICBC-MK/PTD1 /X/2011/P10, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap on Demand – A1 (PTD-A1) dari PT Bank ICBC Indonesia sebesar maksimum Rp215.000 dengan suku bunga sebesar 11% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2021. Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah

PT Bank ICBC Indonesia

Based on Deed of Loan Agreement No. 86 dated October 25, 2010 which was made in the presence of Mellyani Noor Shandra, S.H., a Notary in Jakarta, and has been amended several times and the latest amended on October 23, 2020 through the extension of credit agreement No: 144/ICBC-MK/ PTD1/X/2011/P10, the Company obtained Fixed Loan on Demand – A1 (PTD-A1) facility from PT Bank ICBC Indonesia with maximum credit limit of Rp215,000, bears with interest rate of 11% per annum and will mature on October 25, 2021. This loan is secured by a parcel of land with an area of

seluas 38.901 m² dengan HGB No. 178/Sukaresmi terdaftar atas nama PT Waska Sentana, entitas anak (lihat Catatan 6).

38,901 sqm, with the Building Rights (HGB) No. 178/Sukaresmi registered under the name of PT Waska Sentana, a subsidiary (see Note 6).

Saldo utang bank Perusahaan atas fasilitas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing – masing sebesar Rp 200.000.

The Company's bank loan balances for this loan facility in December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp200,000, respectively.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 78 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap on Demand – 2 (PTD A-2) dari PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp300.000 dengan suku bunga mengambang 11% per tahun dan jangka waktu 1 tahun dan telah diperpanjang melalui surat perpanjangan perjanjian kredit pada tanggal 25 Februari 2021 menjadi 27 Februari 2022. Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah seluas 92.500 m² dengan HGB No. 2014 terdaftar atas nama PT Waska Sentana, entitas anak (lihat Catatan 6).

Based on Deed of Loan Agreement No. 78 dated February 27, 2020 which was made in the presence of Mala Mukti, S.H., LL.M., a Notary in Jakarta, the Company obtain Fixed Loan on Demand – 2 (PTD A-2) facility from PT Bank ICBC Indonesia amounting to Rp300,000 with interest floating rate 11% per annum and a term of 1 year and has been extended by means of a credit agreement extension letter on February 25, 2021 to February 27, 2022. This loan is secured by a parcel of land with an area 92,500 sqm, with the Building Rights (HGB) No. 2014 registered under the name of PT Waska Sentana, a subsidiary (see Note 6).

Pada tahun 2020, Perusahaan mencairkan fasilitas Pinjaman Tetap on Demand dari PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp300.000.

In 2020, the Company drawdowned Fixed Loan Facility on Demand from PT Bank ICBC Indonesia amounted to Rp300,000.

Saldo utang bank Perusahaan atas fasilitas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 300.000.

The Company's bank loan balances for this loan facility in December 31, 2020 amounting to Rp300,000.

b. Utang Bank Jangka Panjang / ***b. Long – Term Bank Loan***

	2020 Rp	2019 Rp	
PT Bank Negara Indonesia Tbk.	477,398	--	*PT Bank Negara Indonesia Tbk.*
Dikurangi: Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			*Less: Current Maturities*
PT Bank Negara Indonesia Tbk.	(71,358)	--	*PT Bank Negara Indonesia Tbk.*
Jumlah Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	**(71,358)**	**--**	*Total Current Maturities*
Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	**406,040**	**--**	***Long-Term Bank Loans - Net of Current Maturities***

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto ,S.H., M.kn Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman berupa Kredit Modal Kerja untuk modal kerja Perusahaan dan entitas anak diluar pengadaan tanah dan proyek Meikarta sebesar Rp500.000 dengan suku bunga tetap 11% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2025. Atas perjanjian tersebut kemudian diadendum melalui surat No. LMC1/3.9/1469A tanggal 15 September 2020 dimana maksimum kredit menjadi Rp495.800. Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah seluas 41.667 m² dengan HGB No.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on Deed of Loan Agreement No. 18 dated June 12, 2020 which was made in the presence of Efran Yuniarto, S.H., M.kn a Notary in Jakarta, the Company obtained Loan Facility purpose for working capital credit for the Company and its subsidiaries except of land acquisition and working capital Meikarta project amounting Rp500,000 bears an fixed interest rate of 11% per annum and will mature on June 11, 2025. The agreement was then amendment by letter No. LMC1 / 3.9 / 1469A dated September 15, 2020 where the maximum credit is Rp495,800. This loan is secured by a parcel of land with an area of 41,667 sqm, with the Building Rights

3159/Cibatu terdaftar atas nama PT Lippo Cikarang (lihat Catatan 6).

(HGB) No. 3159/Cibatu registered under the name of PT Lippo Cikarang (see Note 6).

Perusahaan wajib memenuhi pembatasan rasio keuangan sebagai berikut:
- *Current ratio* minimal 1,0 (satu) kali;
- *Debt equity ratio* maksimal 2,7 (dua koma tujuh) kali;
- *Debt service coverage* minimal 100%

Companies are required to comply with the following financial ratio covenants:
- *Current ratio minimal 1,0 (one) time;*
- *Debt equity ratio maximum 2,7 (two point seven) time;*
- *Debt service coverage minimal 100%*

Pada tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan telah memenuhi pembatasan yang disyaratkan.

As of December 31, 2020 the Company has complied with the covenants as required.

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan pembayaran pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk sebesar Rp18.402.

In 2020, the Company made payment of loan to PT Bank Negara Indonesia Tbk amounted to Rp18,402.

Saldo utang bank Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp477.398.

The Company's bank loan balances as of December 31, 2020 amounting to Rp477,398.

21. Liabilitas Kontrak / *21. Contract Liabilities*

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Apartemen/ *Apartments*	980,587	21,435
Rumah Hunian dan Rumah Toko/ *Residential Houses and Shophouses*	396,829	227,881
Lahan Siap Bangun/ *Land Lots*	174,542	206,593
Lain-lain/ *Others*	101,032	92,577
Jumlah/ *Total*	1,652,990	548,486
Bagian Jangka Pendek/ *Current Portion*	1,120,782	200,603
Bagian Jangka Panjang/ *Non-current Portion*	**532,208**	**347,883**

Rincian persentase liabilitas kontrak terhadap masing-masing nilai kontrak penjualan adalah sebagai berikut:

Details of the percentage of contract liabilities to sales price are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
100%	805,480	267,270
50% - 99%	565,551	187,658
20% - 49%	85,689	28,433
Di bawah/ *Below* 20%	196,269	65,125
Jumlah/ *Total*	**1,652,990**	**548,486**

Komponen pendanaan signifikan atas liabilitas kontrak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp87.004.

The significant financing component for the liabilities as of 31 December 2020 amounting to Rp87,004.

Saldo pendanaan signifikan atas liabilitas kontrak yang telah dicatat sebagai pendapatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp17.011 (Catatan 30).

Balance of significant financing contract liabilities that have been recorded as revenue in 2020 amounting to Rp17,011 (Note 30).

22. Pendapatan Ditangguhkan / *22. Deferred Income*

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Sewa/ *Rental*	20,438	37,657
Lain-lain/ *Others*	405	4,342
Jumlah/ *Total*	**20,843**	**41,999**

23. Liabilitas Imbalan Pascakerja / *23. Post-Employment Benefits Liabilities*

Imbalan Pascakerja – Program Imbalan Pasti tanpa Pendanaan

Grup menunjuk aktuaris independen untuk menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Manajemen telah melakukan pencadangan liabilitas imbalan pascakerja Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi atas imbalan pascakerja tersebut telah memadai untuk menutup kewajiban yang dimaksud.

Post-Employment Benefits – Unfunded Defined Benefit Plan

The Group appointed independent actuaries to determine post-employment liability in accordance with the existing manpower regulations. The management has provided reserve on post-employment benefits liability as of December 31, 2020 and 2019. The management believes that the estimate of post-employment benefits is sufficient to cover such liabilities.

Liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti, Akhir Tahun	42,096	36,521	*Present Value of Defined Benefit Obigation, End of Year*
Nilai Wajar Aset Program	--	--	*Fair Value Asset Plan*
Jumlah	**42,096**	**36,521**	***Total***

Rincian beban imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expense recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Biaya Jasa Kini	6,860	2,714	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	1,985	2,042	*Interest Cost*
Jumlah	**8,845**	**4,756**	***Total***

Beban imbalan pascakerja dicatat sebagai bagian dari biaya gaji dan kesejahteraan karyawan.

Post-employment benefits expense is recorded as part of salaries and employee's benefits expense.

Rekonsiliasi perubahan pada liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Reconciliation of changes in liabilities recognized in the consolidated statements of financial position is as follow:

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	36,521	32,504	*Beginning Balance*
Pembayaran Imbalan Kerja	(9,520)	(7,391)	*Payment of Employees' Benefits*
Penghasilan Komprehensif Lain	6,250	6,652	*Other Comprehensive Income*
Biaya Jasa Kini dan Bunga	8,845	4,756	*Current Service Cost and Interest Cost*
Saldo Akhir	**42,096**	**36,521**	***Ending Balance***

Rekonsiliasi perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Reconciliation of changes in present value of defined benefits obligation is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Nilai Kini Kewajiban, Awal Tahun	36,521	32,504	*Present Value of Obigation at Beginning of Year*
Biaya Jasa Kini	6,860	2,714	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	1,985	2,042	*Interest Cost*
Pembayaran Imbalan Kerja	(9,520)	(7,391)	*Payment of Employees' Benefits*
Nilai Kini Kewajiban Yang Diharapkan Akhir Tahun	35,846	29,869	*Expected Present Value of Defined Benefits at End of Year*
Nilai Kini Kewajiban Aktual Akhir Tahun	(42,096)	(36,521)	*Actual Present Value of Obligation at End of Year*
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Tahun Berjalan	**(6,250)**	**(6,652)**	***Actuarial Gain (Loss) for the Year***

Mutasi dari penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai berikut:

Movement of the consolidated of other comprehensive income is as follow:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	(8,308)	(1,656)	*Beginning Balance*
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	(6,250)	(6,652)	*Other Comprehensive Income (Loss) Current Year*
Saldo Akhir	**(14,558)**	**(8,308)**	***Ending Balance***

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefits plan gives the Group exposure of interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga
Nilai kini imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, oleh karenanya, penuruan suku bunga obligasi pemerintah meningkatkan liabilitas program.

Interest Rate Risk
The present value of the defined benefits plan liability is calculated using the interest of government bond, therefore, the decreasing in the government bond interest rate will increase defined benefits plan liability.

Risiko Gaji
Nilai kini imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi kenaikan gaji dimasa depan, oleh karenanya, peningkatan persentase kenaikan gaji di masa depan akan meningkatkan liabilitas program.

Salary Risk
The present value of the defined benefits plan is calculated using the assumption of future salaries increase, therefore, the increasing of salary percentage will increase defined benefits plan liability.

Analisis Sensitivitas

Peningkatan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2020, akan berakibat pada penurunan beban imbalan kerja karyawan sebesar Rp576 dan penurunan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp3.789.

Penurunan 1% dalam tingkat diskonto yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2020, akan berakibat pada peningkatan beban imbalan kerja karyawan sebesar Rp667 dan peningkatan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp4.300.

Peningkatan 1% dalam beban gaji yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2020, akan berakibat pada peningkatan beban imbalan kerja karyawan sebesar Rp647 dan peningkatan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp4.174.

Penurunan 1% dalam beban gaji yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2020, akan berakibat pada penurunan beban imbalan kerja karyawan sebesar Rp571 dan penurunan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp3.754.

Nilai kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait dan biaya jasa lalu di atas dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis

Increasing 1% of assumed discount rate on December 31, 2020 will impact to the decrease of employee benefits expenses amounted to Rp576 and decrease the defined benefits plan obligation by Rp3,789.

Decreasing 1% of assumed discount rate on December 31, 2020, will impact to the increase of employee benefits expenses amounted to Rp667 and increase the defined benefits plan obligation by Rp4,300.

Increasing 1% of assumed salary expenses on December 31, 2020, will impact to the increase of employee benefits expenses amounted to Rp647 and increase the of defined benefits plan obligation amounted to Rp4,174.

Decreasing 1% of assumed salary expenses on December 31, 2020, will impact to the decrease of employee benefits expenses amounted to Rp571 and decrease the defined benefits plan obligation amounted to Rp3,754.

Present value of defined benefits obligation, related current service cost and past service cost were calculated by independent actuaries using the following assumptions as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Tingkat Diskonto	7.35%	8.17%	*Discount Rates*
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	8.00%	8.00%	*Salary Increase Projection Rate*
Tingkat Mortalita	TMI-2011	TMI-2011	*Mortality Rate*
Tingkat Cacat Tetap	10% x TMI 2011	10% x TMI 2011	*Permanent Disability Rate*
Tingkat Pengunduran Diri	5.00% - 0.00%	5.00% - 0.00%	*Resignation Rate*
Usia Normal Pensiun (dalam Tahun)	56	56	*Normal Retirement Age (in Years)*

24. Modal Saham

24. Capital Stock

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Company's stockholder composition as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

2020

Pemegang Saham/ *Stockholders*	**Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Total Shares Issued and Fully Paid***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* %**	**Jumlah/ *Total* Rp**
PT Kemuning Satiatama	2,165,811,178	80.83	1,082,906
Publik/ *Public* (masing-masing kurang dari/ *below* 5% each)	513,788,822	19.17	256,894
Jumlah/ *Total*	**2,679,600,000**	**100.00**	**1,339,800**

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

2019			
Pemegang Saham/ *Stockholders*	**Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Total Shares Issued and Fully Paid***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Jumlah/ *Total***
		%	Rp
PT Kemuning Satiatama	2,085,811,178	77.84	1,042,906
Publik/ *Public* (masing-masing kurang dari/ *below* 5% each)	593,788,822	22.16	296,894
Jumlah/ *Total*	**2,679,600,000**	**100.00**	**1,339,800**

Pada 27 Juni 2019, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 1.983.600.000 saham biasa baru atas nama dengan nilai nominal Rp500 (dalam Rupiah penuh) per saham yang telah disetujui oleh pemegang saham melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 April 2019. Penawaran tersebut telah mendapat surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-71/D.04/2019 tanggal 13 Juni 2019 (lihat Catatan 1.b).

On June 27, 2019, the Company offered 1,983,600,000 common shares with a par value of Rp500 (in full Rupiah) to the stockholders through Limited Public Offering I in connection with HMETD approved by the shareholders through the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) on April 18, 2019. This offering has received an effective notice of registration statement through the letter from Otoritas Jasa Keuangan No. S-71/D.04/2019 dated June 13, 2019 (see Note 1.b).

Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Reconciliation of outstanding shares as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Total Shares Issued and Fully Paid*	**2020**	**2019**
Jumlah Saham Beredar - Awal/ *Number of Shares Outstanding - Beginning*	2,679,600,000	696,000,000
ditambah: Penawaran Umum Saham Terbatas I/ *additional: Limited Shares Public Offering I*	--	1,983,600,000
Jumlah Saham Beredar - Akhir/ *Number of Shares Outstanding - Ending*	**2,679,600,000**	**2,679,600,000**

25. Tambahan Modal Disetor – Neto

25. Additional Paid in Capital – Net

	Rp	
Agio Saham - Neto	2,008,485	*Additional Paid-in Capital Excess of Par - Net*
Selisih antara Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak	2,000	*Differences between Tax Amnesty Assets and Liabilities*
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi dengan Entitas Sepengendali	(29,300)	*Difference in Value of Restructing Between Entity Under Common Control*
Jumlah	**1,981,185**	***Total***

Agio Saham – Neto / ***Paid in Capital Excess of Par – Net***

	2020 Rp	
Penawaran Umum Perdana		*Initial Public Offering*
Agio Saham	46,151	*Paid in Capital Excess of Par*
Biaya Emisi	(6,693)	*Stock Issuance Cost*
Subjumlah	**39,458**	***Subtotal***
Penawaran Umum Terbatas I (lihat Catatan 24)		*Limited Public Offering I (see Note 24)*
Agio Saham	1,973,682	*Paid in Capital Excess of Par*
Biaya Emisi	(4,655)	*Stock Issuance Cost*
Subjumlah	**1,969,027**	***Subtotal***
Jumlah Agio Saham - Neto	**2,008,485**	***Total Paid in Capital Excess of Par - Net***

Selisih antara Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) tanggal 10 Oktober 2016, Perusahaan mendeklarasikan aset persediaan sebesar Rp2.000 dan dicatat pada akun aset pengampunan pajak dan tambahan modal disetor.

Differences between Tax Amnesty Assets and Liabilities

Based on Approval Letter of Tax Amnesty (SKPP) dated on October 10, 2016, declared asset of inventory amounted to Rp2,000 and recorded in tax amnesty asset account and additional paid-in capital.

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi dengan Entitas Sepengendali

Akun ini merupakan selisih nilai akuisisi PT Sinar Surya Timur dari entitas sepengendali dengan nilai aset neto pada saat tanggal akuisisi.

Difference in Value of Restructing Between Entity Under Common Control

This account represent difference in acquisition value of PT Sinar Surya Timur from the entity under common control and net asset at the acquisition date.

Perhitungan selisih nilai transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

Computation of difference in value of restructing between entity under common control as follow:

	Rp
Nilai Aset Neto/ *Net Asset Value*	680
Harga Perolehan/ *Acquisition Cost*)*	(29,980)
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi dengan Entitas Sepengendali/	
Difference in Value of Restructing Between Entity Under Common Control	**(29,300)**

*)merupakan nilai transaksi sebesar Rp106.645 dikurangkan liabilitas yang diperoleh sebesar Rp76.665.

**)represent net of transfer value of Rp106,645 and liabilities acquired amounted to Rp76,665.*

26. Komponen Ekuitas Lainnya / *26. Other Equity Component*

Saldo komponen ekuitas lain sebesar Rp2.017.922 pada 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan selisih nilai investasi pada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), yang berasal dari perubahan ekuitas MSU pada saat hilangnya pengendalian atas MSU pada tahun 2018.

The balance of other equity components amounting to Rp2,017,922 as of December 31, 2020 and 2019 represents the difference in investment value in PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), which originated from changes in MSU's equity at the time of loss of control over MSU in 2018.

Sampai dengan saat sebelum hilangnya pengendalian atas MSU, Grup mencatat selisih nilai investasi pada MSU sebesar Rp4.042.922 sebagai komponen ekuitas lainnya. Atas pelepasan bagian kepemilikan investasi pada MSU, Grup kehilangan pengendalian atas MSU dan bagian saldo komponen ekuitas lain atas kepemilikan saham pada MSU yang telah dilepas sebesar Rp2.025.000 dibukukan pada laba rugi, sehingga bagian saldo komponen ekuitas lain atas kepemilikan 49,72% saham Grup di MSU menjadi sebesar Rp2.017.922 dan ini sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan tanggal 24 Mei 2019 dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I Perusahaan.

Until before the loss of control over MSU, the Group recorded the difference in value of its investment in MSU amounting to Rp4,042,922 as other equity component. Upon the disposal of the share of investment ownership in MSU, the Group lost control of MSU and the portion of the balance of the other equity component of the share ownership in MSU which was disposed amounting to Rp2,025,000 was recorded in profit or loss, so that the remaining portion of the balance of the other equity component on the Group's share ownership of 49.72% at MSU to be Rp2,017,922, and this is in accordance with the Financial Services Authority Letter dated May 24, 2019 with regard the Company's Limited Public Offering I.

27. Dana Cadangan

27. Reserved Fund

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Tahunan No. 2 tanggal 6 Juli 2020 dibuat di hadapan Lucy Octavia Siregar, S. H., Sp.N, Notaris di Bekasi, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2019 untuk memperkuat struktur modal, sehingga untuk tahun buku tersebut, Perusahaan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham dan penyisihan tambahan dana cadangan sebesar Rp200 dari saldo laba.

Based on Deed of General Meeting of Stockholders and Deed of Annual General Meeting of Stockholders No. 2 dated July 6, 2020 which was made in the presence of Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N, a Notary in Bekasi, the stockholders approved to use net income of 2019 to strengthen capital structure, and consequently for those year, the Company did not distribute dividend to the stockholders and increased the reserved fund amounting to Rp200 from retained earnings.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Tahunan No.37 tanggal 18 April 2019 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2018 untuk memperkuat struktur modal, sehingga untuk tahun buku tersebut, Perusahaan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham dan penyisihan tambahan dana cadangan sebesar Rp200 dari saldo laba.

Based on Deed of Annual General Meeting of Stockholders No. 37 dated April 18, 2019 which was made in the presence of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., a Notary in Jakarta, the stockholders approved to use net income of 2018 to strengthen capital structure, and consequently for those year, the Company did not distribute dividend to the stockholders and increased the reserved fund amounting to Rp200 from retained earnings.

28. Penghasilan Komprehensif Lainnya

28. Other Comprehensive Income

Akun ini merupakan laba yang belum direalisasi atas investasi pada saham KIJA setelah dikurangkan bagian kepentingan nonpengendali (lihat Catatan 8 dan 11).

This account represents of unrealized gain on investments in KIJA net of the noncontrolling portion (see Notes 8 and 11).

29. Kepentingan Nonpengendali

29. Non-Controlling Interests

Berikut adalah rincian kepentingan nonpengendali atas ekuitas masing-masing entitas anak pada tanggal 31 December 2020 dan 2019:

Details of non-controlling interests in the equity of consolidated subsidiaries as of December 31, 2020, and 2019 are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
PT Lippo Diamond Development	190,142	235,035
Intellitop Finance Ltd	39,419	69,099
PT Megakreasi Cikarang Asri	8,026	8,036
Jumlah/ *Total*	**237,587**	**312,170**

30. Pendapatan / *30. Revenues*

	2020 Rp	2019 Rp
Penjualan Rumah Hunian dan Apartemen/ *Sales of Residential Houses and Apartments*	1,265,430	825,136
Pendapatan Pengelolaan Kota/ *Town Management*	324,983	338,634
Penjualan Tanah Industri/ *Sales of Industrial Lots*	129,820	366,899
Penjualan Lahan Komersial dan Rumah Toko/ *Sales of Commercial Lands and Shophouses*	65,898	134,507
Pendapatan Sewa dan Lainnya/ *Rental Income and Others*	58,242	29,633
Jumlah/ *Total*	**1,844,373**	**1,694,809**

Pendapatan Grup dari liabilitas kontrak pendanaan signifikan yang telah diakui pada tahun 2020 adalah sebesar Rp17.011.

Group revenue from significant financing liabilities contract that have been recognized in 2020 amounting to Rp17,011.

Tidak ada penjualan dengan nilai jual neto melebihi 10% dari jumlah penjualan neto untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

There is no sales with net sales amount exceeding 10% of total net sales pertain for the years ended December 31, 2020 and 2019.

31. Beban Pokok Pendapatan / *31. Cost of Revenues*

	2020 Rp	2019 Rp
Penjualan Rumah Hunian dan Apartemen/ *Sales of Residential Houses and Apartments*	843,757	502,425
Pendapatan Pengelolaan Kota/ *Town Management*	200,280	206,510
Penjualan Tanah Industri/ *Sales of Industrial Lots*	58,129	211,846
Penjualan Lahan Komersial dan Rumah Toko/ *Sales of Commercial Lands and Shophouses*	11,237	84,442
Pendapatan Sewa dan Lainnya / *Rental Income and Others*	24,936	8,526
Jumlah/ *Total*	**1,138,339**	**1,013,749**

Tidak ada pembelian dengan nilai jual neto melebihi 10% dari jumlah penjualan neto untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

There is no purchase with net sales amount exceeding 10% of total net sales pertain for the years ended December 31, 2020 and 2019.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

32. Beban Usaha / *32. Operating Expenses*

	2020 Rp	2019 Rp	
Penjualan			***Selling***
Pemasaran dan Iklan	48,140	37,060	*Marketing and Advertising*
Gaji, Bonus, Tunjangan dan Kesejahteraan Karyawan	30,624	20,895	*Employees Salaries, Bonus, Allowances and Welfare*
Penyusutan (lihat Catatan 13)	15,225	4,665	*Depreciation (see Note 13)*
Perlengkapan Kantor	2,775	5,187	*Office Supplies*
Perbaikan dan Pemeliharaan	2,750	2,741	*Repair and Maintenance*
Lain-lain	5,001	7,087	*Others*
Subjumah	**104,515**	**77,635**	***Subtotal***
Umum dan Administrasi			***General and Administrative***
Gaji, Bonus, Tunjangan dan Kesejahteraan Karyawan	115,512	73,165	*Employees Salaries, Bonus, Allowances and Welfare*
Transportasi	29,018	18,103	*Transportation*
Penyusutan (lihat Catatan 13)	15,544	13,938	*Depreciation (see Note 13)*
Biaya Profesional	12,604	4,329	*Profesional Fees*
Telepon, Air dan Listrik	5,056	3,863	*Telephone, Electricty and Water*
Representasi dan Hiburan	2,838	1,909	*Representation and Entertainment*
Perbaikan dan Pemeliharaan	2,801	3,968	*Repair and Maintenance*
Perijinan	2,673	1,214	*Permits*
Sewa	1,978	1,407	*Rental*
Perlengkapan Kantor	1,862	2,253	*Repair and Maintenance*
Lain-lain	6,204	9,085	*Others*
Subjumah	**196,090**	**133,234**	***Subtotal***
Jumlah	**300,605**	**210,869**	***Total***

33. Penghasilan (Beban) Keuangan – Neto / *33. Financial Income (Charges) – Net*

	2020 Rp	2019 Rp
Pendapatan Bunga/ *Interest Income*	46,511	144,170
Beban Bunga/ *Interest Expenses*	(68,747)	(18,460)
Beban Keuangan/ *Financial Charges*	(2,903)	(294)
Bunga dari Pendanaan Signifikan/ *Interest from Significant Financing*	(104,014)	--
Jumlah Neto/ *Net*	**(129,153)**	**125,416**

Penghasilan bunga merupakan penghasilan bunga dari rekening bank dan deposito berjangka, dana yang dibatasi penggunaannya dan investasi pada DINFRA Bowsprit Township Development (lihat Catatan 3 dan 8).

Interest income represents interest income from bank accounts, time deposits, restricted funds and Investment in DINFRA Bowsprit Township Development IDR (see Notes 3 and 8).

Beban keuangan merupakan biaya administrasi bank dan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen, sedangkan beban bunga merupakan beban bunga atas pinjaman (lihat Catatan 8 dan 20).

Financial charges represent bank charges and interest subsidy on mortgages for Housing and Apartments, while interest expenses represent interest expenses on loans (see Notes 8 and 20).

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

34. Penghasilan (Beban) Lainnya / *34. Other Income (Expenses)*

	2020 Rp	2019 Rp	
Penghasilan Lainnya			***Other Income***
Denda - Neto	42,154	27,930	*Penalty - Net*
Lain-lain	16,143	270	*Others*
Jumlah Penghasilan Lainnya	**58,297**	**28,200**	***Total Other Income***
Beban Lainnya			***Other Expenses***
Rugi Penurunan Nilai Wajar Investasi	(1,216,215)	(14,235)	*Loss on Decrease in Fair Value of Investment*
Penghapusan Persediaan	(890,940)	--	*Write off Inventories*
Rugi atas Penurunan Nilai Investasi Lainnya (Catatan 9)	(66,756)	(6,993)	*Impairment Loss of Other Investment (Note 9)*
Rugi Penurunan Nilai Piutang	(52,085)	(46,151)	*Impairment Loss of Receivables*
Rugi Selisih Kurs	--	(40,792)	*Loss on Foreign Exchange*
Lain-lain	(2,556)	(12,013)	*Others*
Jumlah Beban Lainnya	**(2,228,552)**	**(120,184)**	***Total Other Expenses***

35. Laba (Rugi) per Saham Dasar / *35. Basic Earnings (Loss) Per Share*

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

The calculation of basic earnings per share is as follows:

	2020	2019	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk (Rupiah)	(3,654,135)	310,911	*Income (Loss) for the Year Atributable to Owner of the Parent (Rupiah)*
Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Biasa (Lembar)	2,679,600,000	1,408,968,595	*Weighted Average Number of Common Shares (Share)*
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	(1,364)	221	*Basic Earnings (Loss) Per Share (Full Rupiah)*

36. Ikatan dan Perjanjian Penting / *36. Significant Commitments and Agreements*

a. Kerjasama Operasional dan Manajemen
Grup mengadakan perjanjian dengan beberapa kontraktor untuk pengembangan proyek. Jumlah perjanjian kontrak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.362.908 serta yang belum direalisasi adalah sebesar Rp621.335.

a. Operational and Management Agreements
Group entered into several agreements with contractors for the development of their projects. As of December 31, 2020, the outstanding commitments amounted to Rp3,362,908 with commitments not yet realized of Rp621,335.

b. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Properti
Pada tanggal 4 Mei 2015, PT Waska Sentana (WS), entitas anak, melakukan kerjasama pembiayaan properti dengan PT Asiatic Sejahtera Finance, pihak berelasi, dengan plafon maksimum sebesar Rp100.000 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan maksimum adalah 90% dari nilai properti yang dibeli oleh pelanggan; dan
2. *Buyback guarantee* oleh WS apabila pembeli gagal melakukan pembayaran selama 3 bulan berturut-turut.

Kerjasama pembiayaan ini berlaku sejak ditandatangani dan akan berlaku sampai dengan diakhiri oleh PT Asiatic Sejahtera Finance.

b. Property Financing Agreements
On May 4, 2015, PT Waska Sentana (WS), a subsidiary, entered into property financing agreement with PT Asiatic Sejahtera Finance, a related party, with the maximum credit limit of Rp100,000 with the following provision:

1. *Maximum financing is 90% of value of property purchased by customer; and*
2. *Buyback guarantee by WS, if the buyers fail to make the payment for continuous of 3 months.*

This Financing agreement will be valid since it is signed until terminated by PT Asiatic Sejahtera Finance.

c. Perjanjian Operasi Bersama

PT Megakreasi Cikarang Damai, entitas anak, membuat perjanjian Kerjasama Operasi atas pengelolaan Delta Silicon 8 dengan PT Cikarang Hijau Indah sebagai pemilik tanah seluas 227 hektar. Berdasarkan akta No. 26 tanggal 24 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., Notaris di Tangerang, kerjasama operasi dilakukan untuk merencanakan, mengembangkan, membangun, memasarkan, menjual, menyewakan dan mengelola lahan kerjasama sebagai kawasan industri berikut infrastruktur dan fasilitasnya. Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun dan akan otomatis diperpanjang jika penjualan mencapai 50% dari keseluruhan tanah tersedia.

Pada tahun 2019, perjanjian tersebut diadendum sesuai dengan akta No.45 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., Notaris di Tangerang. Para pihak mengakui dan sepakat bahwa lahan kerjasama seluas 227 hektar setelah dilakukan pengukuran ulang menjadi sebesar lebih kurang 224 hektar. Jangka waktu perjanjian diperpanjang 1 tahun sejak tanggal addendum perjanjian, kecuali diperpanjang melalui kesepakatan tertulis para pihak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, perjanjian ini sedang dalam proses pengakhiran kontrak kerjasama.

Penjualan tanah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 2019 tanah yang terjual telah mencapai 111 hektar.

c. Joint operation Agreement

PT Megakreasi Cikarang Damai, a subsidiary, entered the joint operation agreement for managing Delta Silicon 8 with PT Cikarang Hijau Indah as the owner's of the 227 hectare of land. Based on the Deed No. 26 dated July 24, 2014 which was made in the presence of Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., Notary in Tangerang, the joint operation includes planning, development, construction, marketing, selling, rental and managing of land area of the joint operation as the industrial area including its infrastructures and facilities. Term of the agreement is two (2) years and will be automatically extended if sales have been reached 50% of the total available land.

In 2019, there was an addendum to the agreement in accordance with deed No.45 dated January 29, 2019 which was made in the presence of Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., Notary in Tangerang. The parties acknowledge and agree that the cooperation land area of 227 hectares after remeasurements be of approximately 224 hectares. The term of the agreement is extended by 1 year from the date of the addendum to the agreement, unless extended by written agreement of the parties. Until the date of consolidated financial statements, this agreement is in the process of terminating of joint operation.

Sales of land for the year ended December 31, 2019, had reached 111 hectares.

37. Segmen Operasi

37. Operating Segment

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang mempunyai aktivitas bisnis dimana hasil operasinya dievaluasi oleh manajemen secara berkala, dan informasi keuangannya dapat disajikan secara terpisah.

Segmen Perusahaan dan entitas anak dikelompokkan berdasarkan kegiatan usaha yang meliputi pengembangan real estat dan jasa pendukung (pengelolaan kota, transportasi dan rekreasi).

Berikut segmen operasi Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

An operating segment is a component of the entity that engages in business activity whose operating results are regularly reviewed by management, and its financial information can be presented separately.

The Company and subsidiaries segment grouping are based on business activities which consist of real estate development and supporting services (estate management, public transport and recreation).

The following are Group's operating segment for the years ended December 31, 2020 and 2019:

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2020			
	Real Estat/ *Real Estate*	**Jasa Pendukung/ *Support Services***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Konsolidasian/ *Consolidated***
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Pendapatan/ *Revenues*	1,461,102	383,271	--	1,844,373
Beban Pajak Final/ *Final Income Taxes*	(29,383)	(12,433)	--	(41,816)
Pendapatan Neto/ *Net Revenues*	1,431,719	370,838	--	1,802,557
Laba Bruto/ *Gross Profit*	518,596	145,622	--	664,218
Beban Usaha/ *Operating Expenses*	(275,296)	(25,309)	--	(300,605)
Penghasilan (Beban) Keuangan Neto/ *Financial Income (Charges)-Net*	(130,739)	1,586	--	(129,153)
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Neto/ *Other Income (Expense) - Net*	(2,105,876)	(64,378)	--	(2,170,255)
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi/ *Equity in (Gain) Loss on Investment in Associates*	(1,668,611)	--	--	(1,668,611)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak/ *Profit (Loss) Before Tax*	**(3,661,926)**	**57,521**	**--**	**(3,604,406)**
Manfaat (Beban) Pajak/ *Tax Benefit (Expense)*	(2,278)	(39,702)	--	(41,980)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Profit (Loss) for the Year*	**(3,664,204)**	**17,819**	**--**	**(3,646,386)**
Aset Segmen/ *Segment Assets*	11,444,026	831,329	(2,572,275)	9,703,080
Investasi Pada Entitas Asosiasi/ *Investment in Associates*	16,490	--	--	16,490
Jumlah Asset/ *Total Assets*	**11,460,516**	**831,329**	**(2,572,275)**	**9,719,570**
Liabilitas Segmen/ *Segment Liabilities*	**3,874,146**	**509,676**	**(1,243,414)**	**3,140,408**
Belanja Modal/ *Capital Expenditures*	1,178	13,794	--	14,972
Penyusutan/ *Depreciation*	31,603	7,801	--	39,404
Beban Non Kas Selain Penyusutan/ *Non-Cash Expenses Other than Depreciation*	3,955,776	35,917	--	3,991,693

	2019			
	Real Estat/ *Real Estate*	**Jasa Pendukung/ *Support Services***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Konsolidasian/ *Consolidated***
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Pendapatan/ *Revenues*	1,326,542	384,355	(16,088)	1,694,809
Beban Pajak Final/ *Final Income Taxes*	(15,783)	(20,592)	--	(36,375)
Pendapatan Neto/ *Net Revenues*	1,310,759	363,763	(16,088)	1,658,434
Laba Bruto/ *Gross Profit*	512,046	148,727	(16,088)	644,685
Beban Usaha/ *Operating Expenses*	(202,671)	(24,286)	16,088	(210,869)
Pendapatan (Beban) Keuangan Neto/ *Financial Income (Charges)-Net*	124,703	713	--	125,416
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto/ *Other Income (Expense) - Net*	(46,282)	(45,702)	--	(91,984)
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi/ *Equity in (Gain) Loss on Investment in Associates*	(44,955)	--	--	(44,955)
Laba Sebelum Pajak/ *Profit Before Tax*	**342,841**	**79,452**	**--**	**422,293**
Manfaat (Beban) Pajak/ *Tax Benefit (Expense)*	(24,652)	(13,609)	--	(38,261)
Laba Tahun Berjalan/ *Profit for the Year*	**318,189**	**65,843**	**--**	**384,032**

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2019			
	Real Estat/ *Real Estate*	Jasa Pendukung/ *Support Services*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidated*
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Segmen/ *Segment Assets*	12,018,689	785,886	(2,275,397)	10,529,178
Investasi Pada Entitas Asosiasi/ *Investment in Associates*	1,690,051	--	--	1,690,051
Jumlah Asset/ *Total Assets*	**13,708,740**	**785,886**	**(2,275,397)**	**12,219,229**
Liabilitas Segmen/ *Segment Liabilities*	**1,790,603**	**519,646**	**(973,543)**	**1,336,706**
Belanja Modal/ *Capital Expenditures*	15,609	2,967	--	18,576
Penyusutan/ *Depreciation*	21,574	4,807	--	26,381
Beban Non Kas Selain Penyusutan/ *Non-Cash Expenses Other than Depreciation*	1,679,140	119,195	--	1,798,335

38. Kasus Hukum

38. Litigation Cases

a. Perusahaan sebagai Tergugat

a. The Company as a Defendant

Penggugat/ *Plaintiff*	Status Terakhir Perkara/ *Latest Status of the Case*	Putusan Terakhir *Latest Decision*	Objek Perkara/ *Object of the Case*
Tarman Bin H. Kiman, Sarkinah Binti H. Kiman, Dedeh Marwati Binti H. Kiman, Emar Martinah Binti H. Kiman, HJ. Icih Binti H. Bahrudin, H. Engkos Binti H. Bahrudin, HJ. Nesih	Kasasi telah selesai diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ Cassation has processed in *Supreme Court of Republic of Indonesia*	Perusahaan dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Mahkamah Agung/ *The Company won the case in Supreme Court*	Tanah Seluas/ *Land of* 38,770 m²/ *sqm*
Udi Bin Uji, H. Karna Alias H. Samin Bin Karim Tatang Suganda Bin Rohadi, Titin Kartika Binti Rohadi, Ade Handri Bin Rohadi, Linda Wati Binti Rohadi, Euis Sutari Binti Rohadi Purnamasari Binti Rohadi, Nining Hasanah Binti Rohadi, Karyati Sri Muningsih Binti Rohadi, Nurlela Sari Binti Rohadi, Undar Prayoga Alias Jusup N.	Peninajauan kembali telah selesai diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ *The judicial review has processed in Supreme Court of the Republic of Indonesia*	Peninjauan kembali Perusahaan dalam perkara tersebut dikabulkan/ *The Company's judicial review was granted*	Tanah Seluas/ *Land of* 36,320 m²/ *sqm*
Udi Bin Uji	Peninjauan kembali telah selesai diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia/ *The judicial review has processed in Supreme Court of the Republic of Indonesia*	Perusahaan dalam perkara tersebut dinyatakan menang di tingkat Mahkamah Agung/ *The Company won the case in Supreme Court*	Tanah Seluas/ *Land of* 15.620 m²/ *sqm*

b. Sejak tanggal 15 Oktober 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang atas dugaan suap terkait pengajuan perijinan proyek Meikarta yang dimiliki oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas asosiasi. Sampai dengan tanggal persetujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, berdasarkan informasi publik yang kami ketahui, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung serta telah menjatuhkan pidana terhadap orang perorangan. Tidak ada penetapan tersangka terhadap Direksi maupun Komisaris Perseroan Perusahaan maupun MSU. Berdasarkan hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas, baik Perusahaan maupun MSU tidak terkait dan tidak terikat atas putusan tersebut.

b. Since October 15, 2018, the Corruption Eradication Commission has examined several person for alleged bribery related to the submission of permits for the Meikarta's project that owned by PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), an associate. Until the date of approval for the issuance of the consolidated financial statements, in accordance with the public information, the case has been verdicted by the Special Corruption Court at Bandung District Court and has convicted an individual. There was no determination of suspects against the Directors or Commissioners of the Company or MSU. Based on the result of the verdict which has permanent legal force as mentioned above, neither the Company nor MSU are related and are not bound by the verdict.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

39. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan

39. Financial Instruments and Financial Risk Management

Risiko keuangan utama yang dihadapi Grup adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko likuiditas, dan risiko harga. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia.

The main financial risks faced by the Group are credit risk, foreign exchange rate risk, liquidity risk and price risk. Attention of managing these risks has significantly increased in light of the considerable change and volatility in Indonesian markets.

Direksi telah menelaah kebijakan manajemen risiko keuangan secara berkala.

The Directors have reviewed the financial risk management policy regularly.

(i) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan tersedia untuk dijual, aset keuangan lancar lainnya, piutang pihak berelasi non-usaha dan aset keuangan tidak lancar lainnya. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

(i) Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from their customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. The Group's financial instruments that potentially contain credit risk are cash and cash equivalents, trade accounts receivable, financial assets available for sale, other current financial asset, due from related parties' non-trade and other non-current financial assets. The maximum total credit risks exposure is equal to the amount of the respective accounts.

Jumlah eksposur risiko kredit maksimum aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Total maximum credit risk exposure of financial assets on December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020		2019		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value* Rp	Eksposur Maksimum/ *Maximum Exposure* Rp	Nilai Tercatat/ *Carrying Value* Rp	Eksposur Maksimum/ *Maximum Exposure* Rp	
Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan diamortisasi					***Financial Assets Measured at Amortized Cost***
Kas dan Setara Kas	635,427	635,427	522,698	522,698	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	21,189	21,189	266,930	266,930	*Trade Accounts Receivable*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	3,173	3,173	46,814	46,814	*Other Current Financial Assets*
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	7,435	7,435	8,908	8,908	*Due from Related Parties Non-Trade*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	252,418	252,418	119,596	119,596	*Other Non Current Financial Assets*
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif					***Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income***
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	152,273	152,273	219,029	219,029	*Other Non Current Financial Assets*
Investasi dalam Saham	168,664	168,664	230,139	230,139	*Investment in Shares*
Jumlah Aset Keuangan	**1,240,579**	**1,240,579**	**1,414,114**	**1,414,114**	***Total Financial Assets***

Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

The Group manage and control this credit risk by setting limits on the amount of risk they are willing to accept for respective customers and being more selective in choosing banks and financial institutions that they deal with, which includes choosing only the reputable and creditworthy banks and financial institutions.

Tabel berikut menganalisis aset yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta aset keuangan yang mengalami penurunan nilai:

The following table analyzes assets over due but not impaired and not yet due but not impaired and financial assets to be impaired:

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2020					
	Mengalami Penurunan Nilai/ *Impaired*	Lewat Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Overdue but not Impaired*			Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Not Yet Due and Not Impaired*	Jumlah/ *Total*
		1 - 90 Hari/ *Days*	91 - 180 Hari/ *Days*	> 181 Hari/ *Days*		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas dan Setara Kas/ *Cash and Cash Equivalents*	--	--	--	--	635,427	635,427
Piutang Usaha/ *Trade Accounts Receivables*	173,951	4,957	3,651	5,240	7,341	195,140
Aset Keuangan Lancar Lainnya/ *Other Current Financial Assets*	14,443	--	--	--	3,173	17,616
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Financial Assets*	--	--	--	--	252,418	252,418
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha/ *Due from Related Parties Non-Trade*	11,080	--	--	--	7,435	18,515
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non-Current Financial Assets*	--	--	--	--	152,273	152,273
Investasi dalam Saham/ *Investment in Shares*	--	--	--	--	168,664	168,664
Jumlah/ *Total*	**199,474**	**4,957**	**3,651**	**5,240**	**1,226,731**	**1,440,053**

	2019					
	Mengalami Penurunan Nilai/ *Impaired*	Lewat Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Overdue but not Impaired*			Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Not Yet Due and Not Impaired*	Jumlah/ *Total*
		1 - 90 Hari/ *Days*	91 - 180 Hari/ *Days*	> 181 Hari/ *Days*		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas dan Setara Kas/ *Cash and Cash Equivalents*	--	--	--	--	522,698	522,698
Piutang Usaha/ *Trade Accounts Receivables*	133,335	40,534	6,488	18,812	201,096	400,265
Aset Keuangan Lancar Lainnya/ *Other Current Financial Assets*	14,443	--	--	--	46,814	61,257
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Financial Assets*	--	--	--	--	119,596	119,596
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha/ *Due from Related Parties Non-Trade*	11,080	--	--	--	8,833	19,913
Investasi dalam Saham/ *Investment in Shares*	--	--	--	--	230,139	230,139
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non-Current Financial Assets*	--	--	--	--	219,029	219,029
Jumlah/ *Total*	**158,858**	**40,534**	**6,488**	**18,812**	**1,348,205**	**1,572,897**

Grup telah membentuk penyisihan penurunan nilai piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, dan piutang pihak berelasi non-usaha yang telah jatuh tempo (lihat Catatan 4, 6 dan 10).

Aset keuangan yang belum jatuh tempo yang terindikasi risiko kredit terutama dari kas dan setara

The Group has provided allowance for impairment of trade accounts receivable, other current financial asset, and due from related parties non-trade which has been due (see Notes 4, 6 and 10).

Not yet due financial assets which have indication of credit risks are mainly from cash and cash

kas, piutang usaha dan dana yang dibatasi penggunaannya

equivalents, trade accounts receivable and restricted fund.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana di bank, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-bank yang berpredikat baik.

Management believes that there is no significant credit risk on placements in banks, due to fund placements only to reputable and creditworthy banks.

Manajemen berpendapat bahwa piutang usaha yang belum jatuh tempo tidak memiliki risiko kredit yang signifikan, karena piutang usaha atas penjualan unit properti, dijamin dengan properti yang sama, dimana jumlah eksposure risikonya lebih rendah dari nilai jaminannya, sedangkan piutang usaha nonproperti berasal dari pelanggan-pelanggan yang memiliki rekam jejak yang baik.

Management believes that not yet due accounts receivable have no significant credit risk, because receivables from selling units of property are secured by the related properties, where as the risks exposure are lower than the security, while accounts receivable non-property arisen from customers who has good track record.

Manajemen berpendapat bahwa investasi jangka panjang lainnya tidak memiliki risiko kredit yang signifikan, karena penempatan dilakukan kepada Perusahaan memiliki reputasi baik dan merupakan perusahaan terbuka.

Management believes that other long term investement have no significant credit risk, because of placement made in reputable company and also listed company.

(ii) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Grup menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Grup untuk operasi normal Grup dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jatuh tempo:

(ii) Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk when the cash flow position of the Group indicates that the short-tem revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

The Group manages this liquidity risk by maintaining an adequate level of cash and cash equivalents to cover Group's commitment in normal operation and regularly evaluates the projected and actual cash flow, as well as maturity date schedule of their financial assets and liabilities.

The following table analyzes the breakdown of financial liabilities based on maturity:

	2020				
	Akan Jatuh Tempo/ *Will Due On*			Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ *Maturity not Determine*	Jumlah/ *Total*
	Kurang dari 1 Tahun/ *Less Than 1 Year*	1 - 5 Tahun/ *Year*	Lebih Dari 5 Tahun/ *More Than 5 Years*		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Financial Liabilities at Amortized Cost:*					
Utang Usaha/ *Accounts Payable*	84,467	--	--	--	84,467
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek/ *Short-Term Employees' Benefits Liabilities*	2,397	--	--	--	2,397
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya - Pihak Ketiga *Other Current Financial Liabilities - Third Parties*	--	--	--	177,063	177,063
Beban Akrual/ *Accrued Expenses*	144,255	--	--	--	144,255
Utang Bank/ *Bank Loans*	571,358	406,040	--	--	977,398
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha/ *Due to Related Parties Non-Trade*	--	--	--	1,966	1,966
Jumlah/ *Total*	**802,477**	**406,040**	**--**	**179,029**	**1,387,546**

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

	2019				
	Akan Jatuh Tempo/ *Will Due On*			Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ *Maturity not Determine*	Jumlah/ *Total*
	Kurang dari 1 Tahun/ *Less Than 1 Year*	1 - 5 Tahun/ *Year*	Lebih Dari 5 Tahun/ *More Than 5 Years*		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi *Financial Liabilities at Amortized Cost:*					
Utang Usaha/ *Accounts Payable*	114,230	--	--	--	114,230
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek/ *Short-Term Employees' Benefits Liabilities*	12,127	--	--	--	12,127
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya - Pihak Ketiga/ *Other Current Financial Liabilities - Third Parties*	--	--	--	175,873	175,873
Beban Akrual/ *Accrued Expenses*	160,668	--	--	--	160,668
Utang Bank/ *Bank Loan*	200,000	--	--	--	200,000
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha/ *Due to Related Parties Non-Trade*	--	--	--	1,517	1,517
Jumlah/ *Total*	**487,025**	**--**	**--**	**177,390**	**664,415**

(iii) Risiko Pasar
Risiko pasar yang dihadapi Grup terutama adalah risiko nilai tukar mata uang dan risiko harga.

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko nilai tukar mata uang terutama terdiri dari kas dan setara kas dan piutang usaha.

Tabel berikut menyajikan jumlah aset keuangan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan jenis mata uang asing:

(iii) Market Risk
Market risks facing by the Group are mainly currency exchange rate risk and price risk.

a. Foreign Exchange Rate Risk
Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in the foreign exchange rates.

The Group's financial instruments that potentially contain foreign exchange rate risk are cash and cash equivalents and trade account receivables.

The following tables show total financial assets in foreign currency as of December 31, 2020 and 2019:

	2020			2019		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*		Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*		Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*
	USD	SGD		USD	SGD	
Aset/ Assets						
Kas dan Setara Kas/ *Cash and Cash Equivalents*	374,812	884	5,218	406,192	857	5,656

Analisa Sensitivitas
Dengan hipotesis pelemahan nilai tukar terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar 10%, akan meningkatkan laba sebelum pajak sebesar Rp529 (2019: Rp565).

Analisis di atas didasarkan pada asumsi bahwa pelemahan dan penguatan terhadap mata uang asing dengan pola yang sama, tetapi tidak benar-benar terjadi pada kenyataannya.

Sensitivity Analysis
A hypothetical 10% decrease in the exchange rate of the Rupiah against the US Dollar currency would increase profit before tax by Rp529 (2019: Rp565).

The analysis above is based on assumption that Rupiah weakened or strengthened against of the currency in the same direction and magnitude, but it may not be necessarily true in reality.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

b. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Grup memiliki risiko harga terutama karena memiliki investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.

Grup mengelola risiko harga dengan secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan harga pasar atas investasinya.

b. Price Risk

Price risk is a risk of fluctuation in the value of financial instruments as a result of changes in market price. The Group are exposed to price risk because they own an investment classified as financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

The Group manages this risk by regularly evaluating the financial performance and market price of their investment.

c. Risiko Suku Bunga

Grup terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Grup memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada bank yang menggunakan tingkat bunga pasar. Untuk mengelola risiko tingkat bunga, Grup membuat kombinasi utang dan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga tetap dan mengambang.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan sifat bunga:

c. Interest Risk Rate

The Group exposure to interest rate risk is primarily related to financial liabilities. The Group has long-term loans to banks that use market interest rate. To manage interest rate risk, the Group makes a combination of debt and long-term loans with fixed and floating interest rates.

The following table analyzes the breakdown of financial liabilities by type of interest:

	2020				
	Akan Jatuh Tempo/ *Will Due On*			Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ *Maturity not Determine*	Jumlah/ *Total*
	Kurang dari 1 Tahun/ *Less Than 1 Year*	1 - 5 Tahun/ *Year*	Lebih Dari 5 Tahun/ *More Than 5 Years*		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Tanpa Bunga/ *Non-Interest Bearing*	231,119	--	--	179,029	410,148
Bunga Tetap/ *Fixed Rate*	500,000	71,358	406,040	--	977,398
Jumlah/ *Total*	**731,119**	**71,358**	**406,040**	**179,029**	**1,387,546**

	2019				
	Akan Jatuh Tempo/ *Will Due On*			Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ *Maturity not Determine*	Jumlah/ *Total*
	Kurang dari 1 Tahun/ *Less Than 1 Year*	1 - 5 Tahun/ *Year*	Lebih Dari 5 Tahun/ *More Than 5 Years*		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Tanpa Bunga/ *Non-Interest Bearing*	287,025	--	--	177,390	464,415
Bunga Tetap/ *Fixed Rate*	200,000	--	--	--	200,000
Jumlah/ *Total*	**487,025**	**--**	**--**	**177,390**	**664,415**

Analisa Sensitivitas

Dengan hipotesis peningkatan 1% bunga pinjaman, akan menurunkan laba sebelum pajak sebesar Rp4.000.

Analisis di atas didasarkan pada asumsi bahwa pelemahan dan penguatan terhadap semua tingkat bunga dengan pola yang sama terhadap

Sensitivity analysis

A hypothetical 1% increase in the interest rate of the debt will decrease profit before income tax by Rp4,000.

The analysis above is based on assumption that interest rate increased or decreased against all of the bank loans in the same direction and

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

seluruh utang bank, tetapi tidak benar-benar terjadi pada kenyataannya.

magnitude, but it may not be necessarily true in reality.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar masing-masing kategori aset dan liabilitas keuangan:

Fair Value Estimation

The schedule below presents the carrying amount of the respective categories of financial assets and liabilities:

	2020		2019		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value* Rp	Nilai Wajar/ *Fair Value* Rp	Nilai Tercatat/ *Carrying Value* Rp	Nilai Wajar/ *Fair Value* Rp	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Diukur dengan biaya perolehan diamortisasi					*Measured at amortized cost*
Kas dan Setara Kas	635,427	635,427	522,698	522,698	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	21,189	21,189	266,930	266,930	*Trade Accounts Receivable*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	3,173	3,173	46,814	46,814	*Other Current Financial Assets*
Piutang Pihak Berelasi	7,435	7,435	8,908	8,908	*Due from Related Parties*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	252,418	252,418	119,596	119,596	*Other Non Current Financial Assets*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya					*Measured at fair value through other comprehensive income*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	152,273	152,273	219,029	219,029	*Other Non Current Financial Assets*
Investasi dalam Saham	168,664	168,664	230,139	230,139	*Investment in Stock*
Jumlah Aset Keuangan	**1,240,579**	**1,240,579**	**1,414,114**	**1,414,114**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Diukur dengan biaya perolehan diamortisasi					*Measured at amortized cost*
Utang Bank Jangka Pendek	571,358	571,358	200,000	200,000	*Short-Term Bank Loan*
Utang Bank Jangka Panjang	406,040	406,040	--	--	*Long-Term Bank Loan*
Utang Usaha	84,467	84,467	114,230	114,230	*Trade Accounts Payable*
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	2,397	2,397	12,127	12,127	*Short-Term Employees' Benefits Liabilities*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya - Pihak Ketiga	177,063	177,063	175,873	175,873	*Other Current Financial Liabilities - Third Parties*
Utang Pihak Berelasi Non-usaha	1,966	1,966	1,517	1,517	*Due to Related Parties Non-trade*
Beban Akrual	144,255	144,255	160,668	160,668	*Accrued Expenses*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**1,387,546**	**1,387,546**	**664,415**	**664,415**	***Total Financial Liabilities***

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen memperkirakan bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dan yang jatuh temponya tidak ditentukan telah mencerminkan nilai wajarnya.

As of December 31, 2020 and 2019, management estimates that the carrying value of short-term financial assets and liabilities and those which maturity not determined have reflect their fair value.

Investasi dalam saham dan aset keuangan tidak lancar lainnya saham KIJA dalam penyelesaian merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya secara berulang dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari kuotasian di pasar aktif (Tingkat 1). Nilai pada saat direklasifikasi merupakan nilai perolehan sebagai aset keuangan tidak lancar lainnya- Saham KIJA dalam penyelesaian.

Investment in stock and other non-current financial assets of KIJA shares in settlement represents financial assets continously measured at the fair value through other comprehensive income using quotation price in an active market (Level 1). Reclasified value is carrying value as other non-current financial assets-shares of KIJA in settlement.

Aset keuangan tidak lancar lainnya terdiri dari investasi pada PT East Jakarta Industrial Park dan PT Spinindo Mitradaya merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya (Tingkat 3).

Other non-current financial assets consist of investments in PT East Jakarta Industrial Park and PT Spinindo Mitradaya measured at the fair value through other comprehensive income (Level 3).

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Saham/ Unit dan Dinyatakan Lain)

PT LIPPO CIKARANG Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended As of December 31, 2020 and 2019
(In Million Rupiah, Unless Foreign Currency, Shares/ Unit and Otherwise Stated)

40. Informasi Tambahan Arus Kas

40. Supplemental Cash Flows Information

a. Transaksi Non-Kas
Berikut aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:

- Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, penambahan aset tetap termasuk realisasi uang muka pembelian aset tetap masing-masing sebesar Rp4.518 dan Rp7.367.

a. Non-Cash Transactions
The following are investing and financing activities which do not affect cash flows:

- *For the years ended December 31, 2020 and 2019, additional property and equipment including additional from realization of advance for purchase of property and equipment amounting to Rp4,518 and Rp7,367, respectively.*

b. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan
Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

b. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities
The below table sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2020 and 2019, as follows:

	2020			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Arus Kas/ *Cash Flows* Pembayaran/ *Payment* Rp	Arus Kas/ *Cash Flows* Penerimaan *Proceed* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
Utang Pihak Berelasi Non Usaha/ *Due To Related Parties-Non Trade*	1,517	449	--	1,966
Utang Bank Jangka Pendek / *Short - Term Bank Loan*	200,000	--	300,000	500,000
Utang Bank Jangka Panjang / *Long - Term Bank Loan*	--	(18,402)	495,800	477,398

	2019			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Arus Kas/ *Cash Flows* Pembayaran/ *Payment* Rp	Arus Kas/ *Cash Flows* Penerimaan *Proceed* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
Utang Pihak Berelasi Non Usaha/ *Due To Related Parties-Non Trade*	107,825	(106,308)	--	1,517
Utang Bank/ *Bank Loan*	--	--	200,000	200,000

41. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

41. Event After Reporting Period

Pada tanggal 9 Maret 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) tahun pajak 2017 sebesar Rp26.293.

On March 9, 2021, the Company received a tax assessment letter for the underpayment of value added tax for goods and services (SKPKB PPN) for the 2017 fiscal year amounting to Rp26,293.

42. Manajemen Permodalan

42. Capital Management

Tujuan manajemen permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup (*going concern)*, memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

The objective of capital management is to safeguard the Group's ability as a going concern, maximize the returns to stockholders and benefits for other stockholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Grup secara rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Grup, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

The Group regularly reviews and manages the capital structure to ensure that the return to stockholders is optimal, by considering the capital needs in the future and the Group's capital efficiency, profitability in the present and the future, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected opportunities of strategic investment.

43. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

43. New Accounting Standard and Interpretation Standard has Issued Not Yet Effective

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode berjalan.

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the current period.

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: “Akuntansi Wakaf”
- PSAK 22 (Amandemen 2019): “Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis”.
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa’d; dan
- Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55, Amandemen PSAK 60, Amandemen PSAK 62 dan Amandemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2.

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 112: “Accounting for Endowments”*
- *PSAK 22 (Amendment 2019): “Business Combinations regarding Definition of Business”.*
- *PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;*
- *PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa’d; and*
- *Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAk 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.*

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan
- Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted are as follows:

- *Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding reference to Conceptual Frameworks;and*
- *Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs.*

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi

New standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted are as follows:

- *PSAK 74: Insurance Contract*

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotoriasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amandemen standar tersebut.

Until the date of the consolidated financial statements being authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards and amendments these standards.

44. Tanggung Jawab Manajemen dan Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian yang telah diotorisasi untuk diterbitkan kembali oleh Direksi pada tanggal 5 Mei 2021.

44. Management Responsibility and Authorization of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for reissuance of the cosnsolidated financial statements which were authorized to be reissued by Directors on May 5, 2021.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

2020

Laporan Tahunan
Annual Report

BUILDING THE FOUNDATION FOR FUTURE GROWTH

PT LIPPO CIKARANG Tbk
Easton Commercial Centre
Jl. Gn. Panderman Kav. 05
Lippo Cikarang
Bekasi 17550, Indonesia
T. +6221 897 2484, 897 2488
F. +6221 897 2093, 897 2493